EDISI NO.25/TH.XII/1997

BALAIRUNG

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

GERAKAN MAHASISWA ERA 1990-AN

DIASPORA KEKUATAN YANG SIAP MELEDAK?

NOMOR TUJUH, TAHUN KEEMPAT, EDISI NOPEMBER 197

gelora mahasiswa

PENERBITAN DEWAN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

KAMPUS GAMA DIKEPUNG

Sekedar menjalankan perintah atasan.

- Patroli PHH Masuk Kampus UGM Tanpa Ijin

ANDI ARIEF :

"KAMI SIAP DIPIMPIN BUDIMAN DARI DALAM PENJARA...."

ISSN 0215 – 076X

Rp. 3.000,00

DAPUR

Organisasi penerbitan mahasiswa macam *Balairung* memang tidak bisa terhindarkan dari pergantian pengelola yang sangat tinggi frekuensinya. Pengelola yang semua berstatus mahasiswa, dalam menapaki waktu tidak bisa bertahan dengan status tersebut secara terus menerus. Mereka akan digantikan oleh yang lebih baru, yang lebih muda. Kondisi demikian tentu mengakibatkan terus bertambahnya jumlah alumni pengurus. Dan pengurus *Balairung* sejak generasi pertama hampir 12 tahun silam sampai yang baru kemarin dilepas di Auditorium Graha Sabha Pramana, masih terus mencoba saling menjalin komunikasi. Maka mantan pengurus BALAIRUNG pun mempunyai acara non formal rutin tahunan yaitu temu alumni. 2 Maret 1997 lalu Lais Abid dan Khoirul Rosyadi, staf redaksi kami menyempatkan hadir dalam temu kangen itu di rumah salah satu mantan pengurus di Bambu Apus, Jakarta Timur. Di forum itu memang hanya '*kangen-kangenan*' lalu berbagi cerita masa lalu, yang penuh dengan romantisme, suka-duka mahasiswa. Pengalaman mereka menjadi bahan berharga bagi kami yang masih aktif. Tetapi yang lebih penting adalah usaha kami untuk menjadikan pengalaman itu sebagai semacam pewarisan ide dan menjaga idealisme serta cita-cita Majalah Mahasiswa *Balairung* UGM, . . . itu saja. Selanjutnya kami selalu menunggu kabar alumni pengurus yang lain.

Ir. Rahman Hidayat

Temu alumni pengurus di Jakarta
Menjaga idealisme dan cita-cita?

Pembaca, di lain pihak, bagi tim artistik kami barangkali hari-hari terakhir ini adalah masa sibuk yang harus dilalui. Jika selama ini tim artistik lebih banyak bekerja menjelang *dead-line*, kini kami mencoba untuk bekerja lebih awal-seawal tim-tim yang lain. Mulai dari penyediaan ilustrasi, sampai penataan kembali wajah beberapa rubrik. Tetapi toh pekerjaan justru paling menguras tenaga ketika menjelang *dead line*. Jam 02.00 sampai 05.00 WIB dini hari adalah waktu 'romantis' buat menyambut *dead line* itu.

Pembaca, satu lagi cerita dari dapur kami, sebagai pelaksanaan program kerja non penerbitan, awal Maret 1997 kemarin Majalah *Balairung* bekerjasama dengan Institut Studi Arus Informasi(ISAI) Jakarta sempat mengadakan diskusi buku **Ilusi Sebuah Kekuasaan**. Diskusi buku terbitan ISAI ini dilaksanakan di ruang sidang Laboratorium Kimia-Fisika Pusat(LAKFIP) UGM. Inilah barangkali kegiatan pungkasan yang sudah dilaksanakan oleh pengurus periode ini.

Tetapi untuk mengevaluasi program dan aktivitas itu semua, maka pada bulan November 1996 pengurus *Balairung* mengadakan SWOT di Pantai Glagah, Kulon Progo Yogyakarta. Hasilnya, disinyalir program *Balairung* selama ini masih banyak yang perlu ditinjau kembali.

Penjaga dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❑ **Diterbitkan oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM). Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/UM/01/37 International Standard Serial Number (ISSN): 0215-076X ❑ **Pelindung**: Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com. (Rektor UGM) ❑ **Penasihat:** Ir. Bambang Kartika (Purek III UGM), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, S.H., Ir. Abdul Hamid Dipopramono ❑ **Pemimpin Umum**: Timbul Sunoto ❑ **Sekretaris Umum**: Aris Purnomo ❑ **Pemimpin Redaksi**: Hary Prabowo ❑ **Sekretaris Redaksi**: Nining Sunartiningsih ❑ **Ka. Litbang**: Asip Agus Hasani ❑ **Staf Litbang**: Eriyanto, Lais Abid. ❑ **Pemimpin Perusahaan**: Agus Riyanto ❑ **Sekretaris Perusahaan**: Kun Anggoro EY ❑ **Kabag Distribusi dan Promosi**: Risdiyanto ❑ **Kabag. Iklan**: Among Kurnia Ebo ❑ **Kabag. Keuangan**: Mohammad Sri Sadono ❑ **Staf Perusahaan**: F. Ika Yuniarti, Daryanti, Ristiana Kadarsih, Sri Wahyuni, Priyo Sudarmo, Ahmad Ali Fridi, Tri Rahayu Susanti, Muh. Marjuki (non aktif) ❑ **Redaktur Pelaksana:** Khoirul Rosyadi ❑ **Penanggung Jawab Rubrik**: Wuwun Widiawati, Mashudi, Sutrisno, Kusbiantoro E, Dirmawan Hatta, Pedy Artsanti, Rudy Isbowo ❑ **Reporter**: M. Mustajab, Agung Widiatmoko, Asep Mulyana, Nenden Novianti F, Hermawan, Hendrik FS, Widarso, M. Arifin, Setiati, Herwanto (non aktif), Ajianto Dwi Nugroho, Edo Rahardian, M.A. Fitrianto, Alb. Agung Kunto Anggoro, Nur Hidayati, Irfan Muktiono, Apriliana Prastari, Melani Wahyu Wulandari, Irma Hidayana, Kusen Ali Pahadi, Kukuh Siswoyo, Imam Risdianto, Moh. Mustafied, Sarwo Wibowo, Sholahuddin Ghozali, Heri Trianto, Nurul Wibawa CB, B Nursanti RR, Radyah Maharastri, ❑ **Redaktur Artistik**: Agung Arif Budiman ❑ **Staf Artistik**: M.Gandhi, A. Lely Fakhrina, Eka Kurniawan, Riza Afifi, Zuhrotun Muniroh, Andy Seno Aji, Widi Pristiono, Fanie Indrian M. ❑ **Redaktur Foto**: Tri Wasono Sunu ❑ **Fotografer**: Achmad Krisna (non aktif), Fernando Bestral, ❑ **Pemimpin Produksi**: Agung Arif Budiman ❑ **Alamat Redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171 ❑ **Rekening**: Tabungan MITRA BAPINDO Cabang UGM No. Rek. 22.1.5027.66.1. dan 22.1.504776.8 ❑ **Percetakan**: Liberty Offset, Jl Jayengprawiran 21 Yogyakarta Telp. (0274) 512908. **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan menyebutkan program pengolah kata 6-36 kilobyte. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya

BALAIRUNG

Laporan Utama 11

M. NURDIANTO

Gerakan Mahasiswa Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa ninabobokkan, sebelum agenda politik Orde Baru beranjak dari "kuburan kelam" monolitik-status quo. Selepas dari kubangan busa kata-kata di era sebelumnya, gerakan mahasiswa kini turun sebagai kekuatan riil, kekuatan opisisi. Pada dekade 1990-an ini, benarkah ia menjelma kekuatan penuh diaspor yang siap meledak?

Laporan Daerah 77

ARIS PURNOMO

Suku Tengger di tengah silang-sengkarut tukar-menukar nilai, ternyata mampu mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan leluhurnya. Meski bukan lagi suku pedalaman, Tengger terus berproses menampilkan jati dirinya.

ISI

Insan Wawasan 93

Tetap konsisten di jalur keras dan *out of system*, dialah Soe Hok Djin alias Arief Budiman. Kemenangan sementara kapitalisme dunia tak membuat ia pindah iman. Bahwa perubahan politik tak mempengaruhi keyakinannya. Saya tetap sosialisme, akunya. Simak pula pendapatnya tentang gerakan mahasiswa, keluarga nomor satu dan lingkaran setan kebuntuan politik di ibu pertiwi ini.

ARIEFBUDIMAN

REPRO: TIRAS

Budaya 100

REPRO HAI

Bila musik rock Indonesia tak mau munafik, ia tetaplah imbas teriak lengking musik cadas yang dihembuskan Barat. Namun sayangnya, proses transformasi ini hanya sebatas material. Adakah visi musik rock Indonesia? Bagaimana ia bergulat menggali unsur-unsur etnis, untuk menjadi *local genius* yang *new-wave*?

DESAIN KULIT MUKA : AGUNG ARIF BUDIMAN

AGUNG ARIF BUDIMAN

Menggulingkan 'bangunan tua', apa sih, susahnya?

Ketika kekuasaan yang 'miring' ≠ kekuasaan yang kokoh.

Berapa harganya?

Dengan hormat,

Saya ingin berlangganan koran (majalah-*red*) *Balairung*. Mohon bisa dikirim majalah tersebut dan informasi, berapa biayanya. Setelah ada informasi akan segera saya kirim biaya tersebut.

Terima kasih.

Ir. Tugiran
Tromol Pos 01 Pagatan 72173
Kalimantan Selatan

surat dan majalah telah kami kirim-red

❖

Bagaimana pengirimannya?

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya sebagai alumni UGM sangat bangga dengan adanya penerbitan Majalah Mahasiswa *Balairung* dan sudah dua kali mendapat majalah tersebut.

Kami mohon penjelasan, bagaimana yang dimaksud donatur itu? Mohon dijelaskan dan bagaimana pengirimannya?

Sekian dan maaf jika ada kekurangan. Saya tunggu balasannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hj. Sri Utami
Jl Karya Bhakti II Pontianak
Kalimantan Barat

Jawaban telah kami kirim melalui surat dan kiriman sudah diterima. Terima kasih banyak-red

❖

Paling 'wah'...

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama kali saya kenal *Balairung* dari teman-teman pengelola Majalah *Baruga* Kosmik FISIP UNHAS dan saya langsung tertarik membacanya, bahkan seluruh rubrik, tanpa saya lewatkan. Ternyata temanya begitu beragam, lay out-nya yang terbilang lumayan dan penyajian informasi yang aktual, obyektif dan akurat. Dan saya kira merupakan majalah mahasiswa paling 'wah' dan pantas menyandang kategori majalah alternatif.

Oh ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan *Balairung*? Apakah bisa dikirimkan 1(satu) edisi perkenalan bagi teman-teman jajaran redaksi *Mitra* untuk kemungkinan berlangganan pada edisi berikutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

a.n. dewan redaksi
Majalah *Mitra*
HIMA-AN Fisip Unhas
Pusat perkantoran FIS VIII
Universitas Hasanuddin
Tamalanrea Ujung Pandang
90245
Muslimin B. Putra,
koordinator

5 nomor contoh majalah telah kami kirim-red

❖

PLTN dan Janji-janjinya

Januari 1994: Menristek BJ Habibie menyatakan bahwa pembangunan PLTN sepenuhnya tergantung kepada rakyat. Di mana rencana pembangunan PLTN dapat dibatalkan apabila rakyat menolaknya.

Agustus 1994: Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) Djali Ahimsa (kini mantan) menyatakan bahwa BATAN berencana mengadakan dengar pendapat umum untuk mengetahui sejauh mana publik bersikap terhadap rencana pembangunan PLTN.

Maret 1996: Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ginanjar Kartasasmita dalam rapat kerja di DPR mengatakan bahwa isu pembangunan PLTN agar didiskusikan secara terbuka sebelum ditetapkan.

Pernyataan-pernyataan diatas secara eksplisit maupun implisit mengandung janji untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai titik ancang upaya penentuan suatu kebijakan pembangunan yang berdampak luas. Tentunya janji itu mengikat secara moril dan politis.

Seiring janji-janji yang belum juga dilakukan secara optimal maka bersama ini kami menghimbau para pembaca (masyarakat) sepanjang tahun 1997 untuk menjadikan rubrik 'surat pembaca' media massa (juga termasuk media ini) sebagai forum debat publik dan pernyataan sikap yang mudah-mudahan dapat pula merepresentasikan kehendak rakyat. Kami sangat berterima kasih seandainya para partisipan bersedia mengirimkan klipping surat pembaca anda kepada kami.

Andreas Iswinarto,
Pewarta Solidaritas
Bunga Matahari
Jl. Rawasari Barat III / E 57 Jakarta
10510

❖

Serius ndak sih Kita mau Merdeka?

Ketika pers tidak mampu lagi menyuarakan kebenaran. Dan tidak lagi mampu melakukan perubahan, nurani terpasung...tertindas oleh manusia dzalim.

Juga ketika pers terlepas

dari kehidupan, apalah artinya kelahiran seorang wartawan?

Satu kerangka satu konsep...bahwa kejahatan pasti roboh...di manapun, kitalah (pers alternatif) peramu dan peledak..serius!

Wawan
pejalan kaki yang mulai pincang, tinggal di Tabloid Mahasiswa *Jumpa* Universitas Pasundan Bandung

Tentang Tiga Satu Malam di Gelanggang Mahasiswa UGM itu . . .

Tepat malam pergantian tahun 1996 ke 1997 di gelanggang mahasiswa UGM diadakan acara langka penyambutan tahun baru yang diberi label *Tiga Satu Malam di Gelanggang.* Menurut saya acara itu lebih sebagai acara reuni dan nostalgik para aktivis gelanggang mahasiswa UGM. Karena hadir di sana para penggerak aktivitas kemahasiswaan di UGM masa lalu. Dan selebihnya, tampaknya acara tersebut merupakan puncak dari upaya melibas kelesuan aktivitas kemahasiswaan UGM yang akhir-akhir ini sangat terasa. Salah satu usaha itu adalah dengan diselenggarakannya kembali GAMA FAIR '96.

Saya berharap, semoga dengan momentum itu dunia kemahasiswaan di UGM marak lagi, dan semoga komitmen itu disadari oleh para aktivis yang saat ini masih malang melintang di gelanggang mahasiswa Bulaksumur itu.

Buat *sesepuh*; alumni gelanggang, terima kasih atas usahanya untuk mencoba peduli, dengan 'kembali ke kampusnya' untuk mencambuk adik-adiknya bangkit!

nama dan identitas ada di redaksi

Mohon bantuan referensi

Dengan hormat,

Guna pengembangan wawasan intelektual dan ilmu pengetahuan kami, kelengkapan pustaka menjadi hal yang signifikan. Namun kondisi organisasi yang masih sangat kurang dalam hal tersebut, menjadi satu kendala. Untuk itu kami berharap, kiranya redaksi Majalah *Balairung* dapat mengirimkan bantuan; berupa *reference* apa-pun atau semacamnya, yang relevan dengan misi dan tujuan organisasi kami.

Selain itu kami juga berharap, untuk mendapatkan informasi mengenai situasi serta kondisi lembaga Anda.

Atau ada pembaca Majalah *Balairung* yang ingin membantu?

Demikian permohonan kami, atas kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam sejatera.

Forum Komunikasi Mahasiswa Palu
Jl. Ki Maja Lrg. Bakso No. 40
Palu 94111
Rasyidi bakry
Sek. Jend.

Terima kasih suratnya. Kondisi dokumentasi redaksi Balairung pun barangkali tidak jauh berbeda dengan FKMP. Mungkin kami tidak bisa mengirim seperti apa yang Anda maksud. Bagi pembaca yang ingin membantu silahkan mengirimkannya ke alamat di atas-red

❖

Ke mana saya harus mengirim?

Saya ingin berlangganan Majalah *Balairung* mulai edisi Juli 1996 sampai belum bisa kami tentukan. Karena tempat tinggal kami di Gresik, mohon *Balairung* bisa mengirim ke alamat saya, atau ke mana saya harus mengirimkannya, baru kemudian kami mengirim weselnya. Besar harapan kami *Balairung* bisa memenuhi permintaan saya guna menambah ilmu dan wawasan kami.

Tukiyo Minami
Jl Dr. Soetomo IIB No. 21
Gresik Jawa Timur 61119

Anda kirim Rp. 3500,00 per eksemplar bebas ongkos kirim. Atau Rp 10.000,00 untuk tiga nomer.

Siapa berminat Buku?

Kami mendistribusikan buku berjudul FASISME (terbitan Kalam Elkama, Yogyakarta, 1996). Berisi refleksi kemanusiaan yang ditulis 103 penyair dengan gaya ungkapan puitis.

Bagi yang berminat harap mengirim wesel pos sebesar Rp. 3. 500, 00 (Pulau Jawa termasuk ongkos kirim) atau Rp. 4.500,00 (luar Jawa termasuk ongkos kirim). Wesel pos dialamatkan kepada alamat di bawah.

Kelompok Studi Perilaku "Kelompok Kamis Malam"
d.a. Aminudin Rifai: Sagan Gk V/955 Yogyakarta 55223

❖

Contoh Balairung

Yth. Redaksi *Balairung,*

Sebagai agen majalah, koran dan toko buku, kami ingin mengetahui lebih jelas dan kalau mungkin, memasarkan majalah *Balairung* sesuai iklan majalah *Tiras* edisi no. 40/Thn. II/31 Oktober 1996 di halaman 29.

Apabila Anda berkenan, kami mohon beberapa eksemplar contoh Majalah *Balairung* edisi lama atau baru, berikut syarat untuk menjadi agen.

Kami berharap, perkenalan ini menjadi awal kerjasama yang baik dan perlu kami jelaskan bahwa untuk komunikasi yang efektif dengan kami adalah melalui pos kilat khusus, faximile, atau interlokal.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam.

Bambang Triono
CV Semangat
Gedung UME NEKMUTI
Jl. Jend. Sudirman no. 152 KUPANG 58119 Telp/Fax. (0380) 31034

Contoh majalah telah dikirim-red

BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA (BPPM UGM) ❑ **Ketua Umum:** Akuat Supriyanto ❑ **Sekretaris Umum:** Khoirul Rosyadi ❑ **Bendahara Umum:** Mohammad Anugerah Firdaus ❑ **Ketua Departemen Pemberdayaan Penerbitan Fakultas:** Durin Nafisatin ❑ **Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar:** Moh. Fattah Yasin ❑ **Ketua Departemen Penerbitan Majalah:** Timbul Sunoto

Lebih dekat dengan Coca-Cola

Sejarah Coca-Cola. Coca-Cola tercatat sebagai merek dagang paling terkenal dalam sejarah perdagangan sejak penemuan 8 Mei 1886. Seorang ahli farmasi Dr. John S Pemberton, menemukan ramuan khusus berupa bahan baku dasar di kota Atlanta, Georgia, AS. Ramuan tersebut selanjutnya dicampur dengan gula murni dan air bersih steril, yang kemudian terkenal dengan nama ***Coca-Cola***. Nama *Coca-Cola* itu sendiri dicetuskan oleh Frank M. Robinson, rekan usaha merangkap akuntan Dr. John S. Pemberton. Setahun kemudian melalui kantor rekannya dr. Joseph Jacob's Pharmacy, *Coca-Cola* dijual untuk pertama kalinya. Sebelum wafat tahun 1888, Dr. Pemberton mewariskan penemuannya kepada Asa Candler, yang mendirikan perusahaan dengan nama The *Coca-Cola* Company tahun 1892, di Atlanta, Georgia.

Ide cemerlang untuk menyediakan minuman *Coca-Cola* dalam botol datang dari Joseph Biedenharn, pemilik toko di Missisippi. Ide ini disambut oleh dua pengusaha terkenal Tennesse yang pada tahun 1899 mendirikan pabrik minuman *Coca-Cola* pertama di dunia. Pabrik yang dimodali penuh oleh pengusaha Tennese ini, membeli Concetrate (ramuan bahan baku dasar) dari the *Coca-Cola* Company. Dan kemudian mengolahnya hingga menjadi minuman *Coca-Cola* yang dimasukkan ke dalam botol.

Inilah awal suatu sistem dagang yang unik dalam sejarah perdagangan, disebut *Franchised System* (waralaba), yaitu sistem kerjasama saling menguntungkan antara dua perusahaan (The *Coca-Cola* Company dan pabrik minuman) yang sama sekali terpisah modal kepemilikan dan manajemennya. Dan sistem dagang yang sama berlaku juga untuk usaha *Coca-Cola* di seluruh dunia, meliputi hampir 195 negara, dengan peminum lebih dari 880 juta botol sehari.

Coca-Cola di Jawa Tengah - DIY -Madiun. *Coca-Cola* Amatil Indonesia (CCAI) Semarang *Operation* adalah salah satu dari 11 pabrik pembotolan di Indonesia. Semula bernama PT. PAN JAVA BOTTLING Co. Yang didirikan pada 1 Nopember 1974, dan mulai berproduksi pertama kali pada 5 Desember 1976. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang makin pesat, maka mulai bulan April 1992 **PT. Pan Java Bottling Co**, melakukan kerjasama *(joint venture)* dengan **PT. *Coca-ola* Amatil (Australia)**, sehingga sejak saat itu PT. Pan Java Bottling Co, berubah namanya menjadi PT. *Coca-Cola* Pan Java (PT. CCPJ). Dan mulai 1995 resmi menjadi *Coca-Cola* Amatil Indonesia (CCAI) Semarang sebagai salah satu kota yang memiliki cabang *Coca-Cola* Amatil Indonesia ikut memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan serta kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dengan program meliputi pengolahan air limbah, pelayanan poliklinik beserta *ambulance* untuk masyarakat sekitar, unit mobil pemadam kebakaran, pembangunan tempat ibadah, memberikan bantuan rutin kepada 8 panti Asuhan (Semarang, Salatiga, Bawen, Solo dan Yogyakarta), serta bantuan *supply* air bersih pada saat kemarau, pemberian beasiswa kepada masyarakat sekitar. Selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk praktek kerja/riset/skipsi mengenai industri minuman serta kegiatan sosial lainnya. Kunjungan di pabrik ***COCA-COLA* AMATIL INDONESIA - SEMARANG**, dapat memperluas wawasan, di samping untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Sumber Daya Manusia. Dipimpin manejemen yang handal, dengan putra terbaiknya; Bapak Mugijanto dan Almarhum Bapak Partogious Hutabarat; sebagai tokoh pendiri PT. *Coca-Cola* Pan Java Bottling Company, yang telah turut memajukan nama besar *Coca-Cola* sejak tahun 1974. Selama kurun waktu ini CCAI Unit Semarang telah mempekerjakan 1093 tenaga kerja, yang memiliki KKB (Kesepakatan Kerja Bersama), dengan SP RTMM (Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman) dan Koperasi Kendali Harta sebagai penunjang hubungan Industrial Pancasila yang harmonis, tingkat kesejahteraan yang memadai menuju tingkat Produktivitas berkualitas Optimal.

Produksi. Minuman ringan tanpa alkohol, *Coca-Cola*, Sprite, Fanta, Air kemasan Bonaqa dan teh Hi-C dibuat dari bahan baku yang terpilih, dikemas secara ***higienis*** dalam kemasan botol dan kaleng. Maka jelas produksi nasional ini makin menunjukkan kelasnya tersendiri, sebagai produk dengan standard kualitas bertaraf Internasional. Terutama dengan didukung fasilitas laboratium modern dengan tenaga profesional terlatih.

Terjaminnya pengendalian mutu ditandai dengan diperolehnya pengakuan internasional, berupa penghargaan tertinggi di antara 11 pabrik di Indonesia dan tertinggi di seluruh Asia Pasifik. Apalagi setelah diberikannya sertifikat halal, baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun oleh Depkes RI.

Mugijanto dan alm. Partogious Hutabarat

Di *Coca-Cola* Amatil (CCA) Bapak Mugijanto sebagai salah satu pendiri yang kini menjabat *Chief Executive Operation* dalam sambutannya saat peluncurkan edisi perdana buletin CCA Indonesia, ***Hanya Yang Terbaik***, menjelaskan, bahwa adanya buletin tersebut merupakan respons terhadap penggabungan manajemen CCA seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, yang membuka kesempatan bagi seluruh jajaran *Coca-Cola system* untuk saling bertukar ide, pengalaman dan kreatifitas dalam meraih sukses. Sehingga nantinya tiap karyawan *Coca-Cola* bertekad melayani siapa saja, kapan saja, dimana saja, demi kepuasan pelanggan. **ALWAYS *Coca-Cola*.**

(Priyo.S & Koen AEY)

Kolam Ikan, sebagai indikator pada bak penampung limbah

TAPI...
ITU MAHASISWA
APA KAMBING HITAM, SIH?
CEREWET!
KAN UDAH DIBILANGIN
YANG RUSUH DIGEBUK SAJA!
©EKA'97
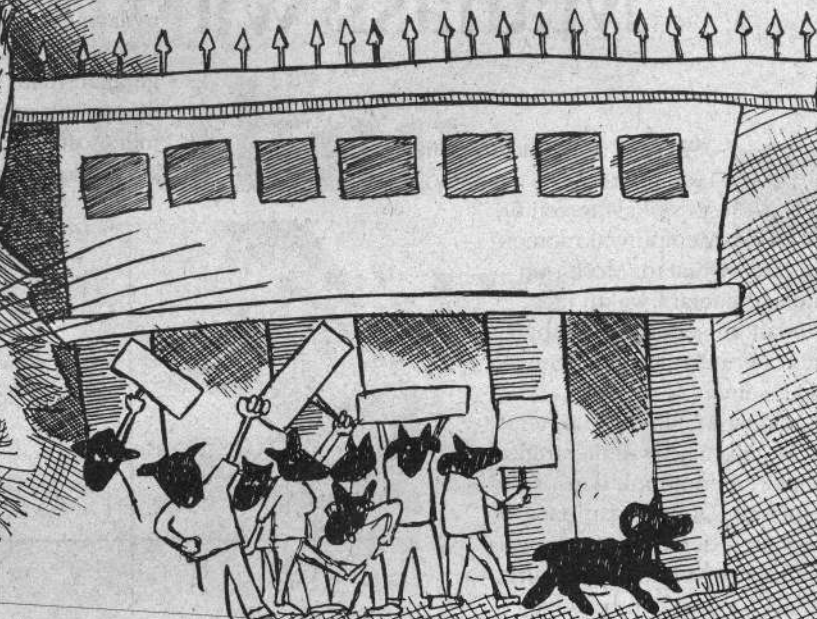
Mendiagnosa Gerakan Politik Mahasiswa

PANGGUNG gerakan politik mahasiswa di era 1990-an, ternyata memiliki warna dan spesifikasi tersendiri. Mempunyai momentum dan kekuatan. Meskipun untuk sementara waktu jeda, taruhlah itu sebagai persiapan untuk bermetamorfosa kembali. Sebab semenjak insiden demokrasi 27 Juli 96' lalu, terasa ada kegelisahan politik yang semakin menumpuk dan memberat. Di kalangan para pengharap demokrasi Indonesia, mereka yang telah sekian lama menata fondasi dan batu bata demokrasi negeri ini, boleh jadi terantuk batu. Sebab semua orang tahu. Bahwa menjelang pemilu 97' semua kekuatan oposisi (*trouble maker*) yang bakal mengusik perhelatan besar tersebut akan digebuk. Karena dibutuhkan jalan lempang dan mulus menuju hari H tersebut. Untuk itu diperlukan penumbalan politik. *Political games* kemudian membikin sejenis jebakan. Kuburan. Tempat semua kekuatan pengganggu ditanam.

AGUNG ARIF BUDIMAN

Dan benar juga. Setelah diadakan pemancingan di suatu kolam yang keruh, umpan dipasang, dan ikan-ikan bermunculan, ternyata juga dipasang ranjau dan pukat harimau. Pada saat ranjau meledak, maka haruslah, harus ada si kambing hitam. Dan pukat harimau bekerja menggaruk semua ikan-ikan. Besar maupun kecil. Dilanjutkan penguatan legitimasi di sana-sini, dan langkah pasti pembersihan besar-besaran (*oposition cleaning*). Karuan saja semua kekuatan pro-demokrasi pontang-panting. Penangkapan, interograsi kasar, serta pemenjaraan, sebelum dipasalsubversikan di pengadilan nantinya, menjadi satu pemandangan betapa kekuasaan sedang krisis kepercayaan diri lantas main batu.

Satu pelajaran berharga memang boleh kita petik dari pendidikan politik 27 juli 1996, terutama bagi gerakan politik mahasiswa. Sebab tak hanya SMID sebagai elemen PRD yang dibabat habis. Namun semua. Semua gerakan politik mahasiswa ikut terkena reses tunggal. Setidaknya, kalau tidak dikatakan tiarap, nyatanya banyak yang terpaksa membakar habis file-file rahasia, lari menepi di labirin-labirin gelap dan terjadi "kematian diskursif politik" secara mayoritas walau sementara, di markas-markas politis mahasiswa.

Kemudian ketika reses politik mereda, ada satu pertanyaan yang ramai-ramai diperbincangkan oleh kaum aktivis pergerakan mahasiswa. Quo Vadis (mau ke mana) gerakan politik mahasiswa selanjutnya? Bagaimana melawan regimentasi politik Orde Baru?

Sebuah pertanyaan besar sekali. Mau ke mana lagi gerakan mahasiswa selanjutnya. Menyusun kekuatan lagi, menyuntik tubuh dengan darah segar generasi baru, merancang strategi, dan kemudian terkubur lagi? Akankah gerakan politik mahasiswa pasca 66 memang mengalami klise-klise yang terkadang membikin lelah umatnya yang mencoba bertahan di jalur keras -- pejuang demokrasi?

Di sepanjang tahun 1990-1996 ini cukup banyak peristiwa penting bagi gerakan politik mahasiswa. Liku-liku peristiwa, meskipun di atas panggung yang sama (rezim Orde Baru), boleh dikatakan setengah dasawarsa ini menjadi, tak hanya *test case* bagi renovasi-renovasi gerakan politik mahasiswa dari babak sebelumnya, namun telah memasuki pergulatan politik langsung dan riil sebagai pelaksanaan kata-kata (busa-busa dari meja diskusi). Pluralisasi gerakan dengan varian-variannya, beraneka-warni bertaburan di sepanjang kota, dari Lampung, Ujung Pandang, Jakarta, Bandung, Yogya, Semarang, Solo, Jombang, Surabaya, Bali dan seterusnya. Mereka mengusung dari tema miras sampai kampanye presiden baru. Menjadi soko guru demokrasi Indonesia.

Dan di tengah fase konsolidasi semua kelompok gerakan mahasiswa inilah, suatu refleksi, otokritik, telaah, diskusi, menjadi berharga. Inilah satu alasan terpenting kenapa pers mahasiswa (*Balairung*) harus men"tackle" persoalan gerakan politik mahasiswa sendiri. Melakukan pencatatan dan analisa lintasperspektif untuk membedah persoalan politik mahasiswa. Ini suatu peran dan tanggung jawab yang musti digarap oleh pers mahasiswa. Sebab kenyataan yang tak terpungkiri adalah, baik dalam pemandangan historis maupun sosiologis, bahwa pers mahasiswa merupakan satu elemen yang inheren dalam *corp* gerakan politik mahasiswa. ❑

Prabowo
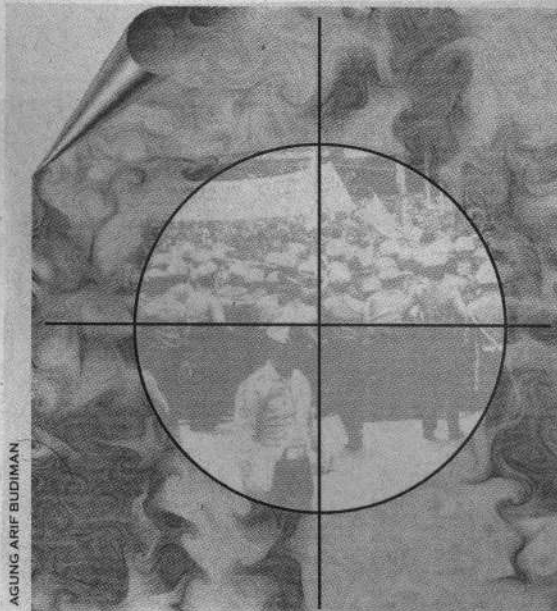
Kritik dan Puja untuk Gerakan Mahasiswa

Dalam gerakan politik selalu membutuhkan martil-martil sebagai alat penggada. Politisasi sektor-sektor strategis menjadi tuntutan instrumental dalam suatu percaturan politik. Gerakan mahasiswa era 90-an sebagai satu elemen kekuatan politik tak lepas dari hal ini. Aliansi dengan rakyat -- buruh-tani, adakah ini politik tameng atau murni gerakan pemberdayaan masyarakat margin? Apa hubungannya dengan teori-teori "kiri"? Kenapa demonstrasi menjadi pilihan utama? Benarkah Orde Baru berhasil melakukan depolitisasi kampus dan mahasiswa?

Untuk mewujudkan perubahan besar-besaran tampaknya memerlukan kegairahan dan perjuangan yang menggelora. Kita masih ingat peristiwa Tiananmen, padang kurusetranya kekuatan pro-demokrasi Cina-- yang melibatkan gerakan mahasiswa -- dilibas oleh tank-tank tentara Deng Xiaoping. Di Korea Selatan gerakan mahasiswa tak kalah heroik, bersatu bersama kelompok oposisi menghimpun jutaan rakyat buruh untuk melawan undang-undang baru yang mendeskriditkan kaum buruh. Di Myanmar, gerakan mahasiswa berjuang membangun demokrasi negaranya bersama Aung San Suu Kyi. Demikian juga gerakan mahasiswa Indonesia, tak kalah sengit menghadapi kekerasan politik Orde Baru yang tak mengijinkan lahirnya kekuatan-kekuatan oposisi.

Fenomena gerakan mahasiswa di negara semi-demokrasi agaknya telah menjadi satu *positioning-historis,* seperti pion-pion yang selalu ada di antara bidak-bidak percaturan politik. Ia terlibat dalam permainan jarak dekat dengan perubahan politik suatu agama, gerakan revolusi, atau gerakan sporadis lainya. Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa Indonesia tentunya menjadi bagian yang tak dapat dilepaskan dari konstelasi perubahan politik Indonesia.

EKA K.

Bonar Tigor Naipospos

Sebagai satu kekuatan yang lahir dari kubangan "monolitik Orde Baru", gerakan mahasiswa -- khususnya era '90-an -- kemudian menampilkan isu-isu populis; kemiskinan kaum petani, upah rendah kaum buruh, multi-partai, presiden baru, anti-militerisme, permasalahan kaum proletariat dan kontra-wacana dengan negara yang stagnan.

Karakter perjuangan demikian pada sisi tertentu memiliki kekuatan guna melancarkan aksi-aksinya. Karena dengan membaurnya mahasiswa dengan para kaum tertindas, akan memunculkan posisi tawar yang lebih menguntungkan dan diperhitungkan.

M. Sobary, budayawan dan juga peniliti LIPI, mempunyai komentar mengenai strategi yang dilakukan gerakan mahasiswa era '90-an ini. Bagi Sobary taktik tersebut merupakan cara jitu, bahkan suatu panggilan mahasiswa untuk bergabung dengan mereka. "Mereka yang mengatakan (gerakan aliansi rakyat-Red) itu tidak sah, berarti *majnun.* Karena mahasiswa sesungguhnya harapan masyarakat," ungkapnya pada *Balairung.*

Hal senada juga dikatakan Bonar Tigor Naipospos. Menurutnya, mahasiswa merupakan komunitas yang memiliki nilai lebih. Karenanya mereka harus menjadi katalisator, fasilitator dan masuk ke kelompok-kelompok (buruh dan tani--Red) yang

DOC. PERSMA

Aksi turun jalan masih masih menjadi modus utama gerakan mahasiswa di rentang sejarahnya
Adakah alternatif modus gerakan lainnya?

negara.

Dalam suatu masyarakat jika dorongan untuk mengembangkan keadaan yang lebih baik tersumbat, maka seseorang bisa menempuh lewat jalur pergerakan; gerakan penegakan keadilan (hukum dan HAM) sebagai isu-isu strategis perubahan.

Manifestasi gerakan pun lebih riil dalam suatu kolaborasi langsung dengan rakyat, mengadvokasi ada, kemudian 'menyebarkan benih' hingga pada akhirnya mereka membikin kelompok dan organisasi sendiri.

"Di sini mahasiswa tidak lagi menjadi bintang. Tapi bergabung

dengan mereka untuk membentuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil kan majemuk, banyak kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan salah satu adalah buruh serta tani," papar aktivis yang pernah merasakan penjara Orde Baru ini.

Namun bagi Fadli Zon, ia melihat politisasi dalam konteks ini dari sudut lain. Gerakan mahasiswa yang beraliansi dengan masyarakat bawah tidak mengalami perubahan yang berarti. "Menurut saya buruh dan tani hanya dijadikan alat. Jadi dengan teoritik-teoritik yang 'kiri' mereka dipakai untuk menjadi garda depan dalam sebuah demonstrasi," katanya.

Menurut aktivis yang kini jadi eksekutif direktur pada CPDS (*Center For Development Studies*) itu, buruh dan tani harus digarap, tapi dalam konteks yang strategis dan taktis dalam menggarap. Artinya pembelaan terhadap buruh memang harus dilakukan, tapi caranya bukan menjadikan mereka turun ke jalan dan berteriak-teriak. "Mereka seharusnya melakukan gerakan dengan membawa buruh dan tani kepada institusi-institusi yang berwenang, berargumentasi secara proposional," ujarnya.

Gerakan Mahasiswa Era '90-an dan Kebijakan Politik Makro Orde Baru

Seberapa jauhkah peran gerakan mahasiswa era '90-an dalam konstelasi rejim politik Orde Baru? Benarkah kehadiran mereka sungguh diperhitungkan? Dalam arti, apakah teriakan-teriakan mahasiswa sekarang betul sebuah kekuatan serius yang laik didengar? Atau jangan-jangan gerakan mahasiswa hanyalah angin lalu yang melintas dalam kekuasaan besar Orde Baru?

K.H. Abdurrahman Wahid, ketua PBNU dan tokoh FORDEM, dalam pidatonya peringatan 36 PMII pernah menggelitik keberadaan gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa adalah makhluk yang berada di daerah perbatasan, *change mansion*, manusia perbatasan, yaitu mereka yang masih memiliki gejolak emosi atau romantisme dalam diri remaja atau anak-anak. Karena itu segala tindakannya selalu langsung.

Namun buru-buru Gus Dur -- demikian nama panggilan K.H. Abdurrahman Wahid -- mengatakan, ini jangan dilihat sebagai pelecehan, bukan! Artinya emosi atau romantisme dalam diri remaja dan anak-anak itu sangat kuat. Melihat peranan dirinya itu masih dalam arti mengutamakan akunya, *self*-nya. Tetapi pada saat yang sama sudah mulai dibekali pisau analisa oleh tahap pendidikan mereka. Jadi sudah di universitas, pada perguruan tinggi, maka ada kemampuan analisa yang mendalam, menghasilkan analisa yang rasional.

Posisi sekaligus kelebihan mahasiswa itu pada akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan, apakah dengan demikian gerakan mahasiswa era '90-an mempunyai pengaruh terhadap setiap kebijakan politik makro bangsa Indonesia?

Eep Syaefullah, dosen Fisip UI, menjelaskan, dalam politik tak ada rumus bahwa satu aktor politik dapat mencapai satu hasil sendirian. Politik merupakan rumus pertarungan antarkelompok yang menghasilkan konfigurasi kekuasaan. Kemudian dari konfigurasi itu lahir distribusi. Kebijakan distribusi buat masyarakat, distribusi kekayaan, kesejahteraan, dan sebagainya. Distribusi itu sendiri tidak ditentukan oleh satu aktor. "Kalau pola berpikirnya begitu sebetulnya gerakan mahasiswa itu sudah ada hasilnya. Kita lihat misalnya, advokasi mahasiswa ke kalangan buruh. Jika dibandingkan data unjuk rasa buruh pada tahun 1989 sampai 1995 kita akan menemukan grafik yang naiknya luar biasa," tuturnya.

Jadi dengan pola berpikir yang demikian, lanjut Eep, maka gerakan mahasiswa era '90-an sudah menghasilkan konfigurasi kekuatan tertentu. Di situ ada peran konflik elite. Misalnya; polarisasi elite, ada peran tumbuhnya kesadaran perlawanan politik di kalangan masyarakat dalam pengertian yang lebuh luas.

Hal serupa juga dijelaskan Bonar Tigor Naipospos, menurutnya agak susah kalau kita melihat implikasi langsung gerakan mahasiswa era '90-an terhadap kebijakan politik makro. Tapi dalam bentuk implikasi tidak langsung dan akumulasi, maka gerakan mahasiswa ada pengaruh besar yang dihasilkan. Misalnya dalam kasus kebijakan tanah. Protes-protes mahasiswa sejak dari kasus Kedung Ombo, Rancamaya, Bendungan Hilir, merupakan akumulasi penindasan. Sehingga dari peristiwa tersebut pemerintah akhirnya membentuk KOMNAS HAM.

BAL. DOC

Radikalisasi gerakan mahasiswa Indonesia tak kalah dengan gerakan mahasiswa di Korea Selatan

Bentrokan dengan tentara di Gambir

"Jadi kalau satu aksi mahasiswa, pengaruhnya langsung pada suatu kebijakan makro itu tidak ada. Tetapi kalau akumulatif dan *indirect*, kita bisa melihat banyak," kata Coky, nama panggilan Bonar Tigor.

Sementara itu, bagi Dr. Burhan D. Magenda, melihat segala bentuk protes yang dilakukan gerakan mahasiswa era '90-an sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam politik Indonesia. "Saya kira pengaruh gerakan mahasiswa hanya punya implikasi pada saluran bagi aspirasi

hati nurani rakyat semata, sementara untuk perubahan politik, sama sekali tidak," tandas mantan aktivis angkatan 66 ini.

Namun demikian, diakui atau tidak, hadirnya gerakan mahasiswa era '90-an merupakan daya kekuatan kritis yang tidak bisa dihiraukan. Meskipun terkadang dalam wacana kebijakan politik makro kurang mempunyai nilai tawar yang besar.

"Dan itu bukan berarti gerakan mahasiswa melakukan sesuatu yang kosong. Apa yang dilakukan mahasiswa bukan berarti tidak ada. Setiap perenungan politis, moral, tidak ditangkap dalam kehidupan politik Indonesia secara makro, itu tidak karena pemikiran yang tidak bagus, tapi itu banyak dikarenakan keangkuhan penguasa. Karena ada keangkuhan dalam sistem," timpal M. Sobary menegaskan.

Demonstrasi menentang kekerasan militer di Boulevard UGM
Solidaritas untuk korban Ujung Pandang

Gerakan Mahasiswa era '90-an Pasca 27 Juli

Masih terbayang jelas betapa 27 Juli 1996 telah terjadi "politik bar-barian' yang begitu mendebarkan. Sebuah peristiwa yang menjadi lembaran paling buram dalam sejarah perpolitikan Indonesia (Orde Baru). Pembakaran, pembunuhan masyarakat sipil dan penangkapan yang disertai pengkambinghitaman yang sangat berlebihan.

Tak pelak pencarian di balik dalang kerusuhan pun dilakukan. Klaim serta tuduhan akhirnya bertebaran. Dan seperti yang diketahui, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan segenap *underbouw*-nya telah menjadi tertuduh dalam peristiwa 'Juli Kelabu' tersebut.

Pengejaran terus berlanjut, bahkan sudah tidak hanya pada aktivis PRD belaka, melainkan seluruh aktivis gerakan mahasiswa menjadi sasaran penangkapan. Suasana pun menjadi tegang, seluruh aktivitas gerakan mahasiswa mulai saat itu serasa 'tiarap' sesaat. Diskusi, aksi-aksi protes ke jalan hampir bisa dikatakan menjadi aktifitas yang menakutkan.

Mengomentari huru-hara politik tersebut, toh tetap ada yang menyalahkan gerakan mahasiswa dan bukan pihak pemangku politik (rezim). Adalah Fadli Zon, memandang peristiwa 27 Juli merupakan kesalahan yang dibuat oleh gerakan mahasiswa era '90-an. "Menurut saya, pengaruh yang kita rasakan dari peristiwa kemarin tidak menjadikan mahasiswa semakin kuat. Bahkan mahasiswa yang ada di daerah-daerah semakin takut untuk melakukan suatu gerakan. Mereka akhirnya bukannya malah berani, mereka semakin hati-hati. Di sini menurut saya PRD sangat tidak taktis dan tidak strategis," ujarnya.

Jadi apa yang dilakukan PRD kemarin, lanjut mantan mahasiswa teladan dari UI ini, bukan menguntungkan kehidupan demokrasi, malah membuat kita semakin *set-back*. Karena dengan kejadian kemarin ada justifikasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk semakin memperketat ruang keterbukaan politik.

Namun Bonar Tigor, aktivis yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Sosiologi UGM ini, menanggapi suasana demikian sebagai hal yang biasa. Baginya, fenomena tersebut merupakan siklus semata. Di manapun gerakan politik akan mengalami tahap-tahap seperti itu. Pada suatu waktu ia memuncak, aktif. Pada waktu lain dia akan *cooling down*. "Memang harus diakui semenjak peristiwa 27 Juli, banyak gerakan mahasiswa yang hati-hati dan tiarap. Tapi perlu diingat, bahwa ini nggak akan berjalan terus, karena suatu saat pasti kembali muncul. Tiarap itu hanya temporer," ungkapnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Dahlan Ranuwihardjo, tokoh senior dari HMI. Menurutnya memang betul, gerakan mahasiswa era '90-an untuk sementara lagi surut. Tapi sama sekali itu bukan muara akhir. "Itu bukan dikarenakan situasi yang menuntut begitu, adanya suatu sikap kritis, bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga setiap warga bangsa yang mulai tersadarkan," katanya.

Sementara itu Arbi Sanit, pengamat politik UI, punya prediksi menarik atas gerakan mahasiswa pasca 27 Juli. Menurutnya, peristiwa Juli tahun kemarin bukanlah titik mati dari gerakan mahasiswa era '90-an. Dan itu terbukti dengan kembali maraknya kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti seminar ataupun lainya. Jadi tekanan kemarin akan menjadi tolak balik yang akan lebih dahsyat.

"Dan saya yakin paling cepat gerakan mahasiswa itu akan kembali muncul pada tahun 1997-1998. Sebab dalam Pemilu dan sidang umum MPR itu ada suatu 'undangan' untuk aspirasi masyarakat. Tentu mahasiswa menyadari itu sebagai kesempatan dan peluang," papar pengamat politik UI ini dengan penuh yakin.

Sebuah Otokritik Buat Gerakan Mahasiswa Era '90-an

Laiknya sebuah organisasi gerakan massa, gerakan mahasiswa era '90-an juga tidak lepas dari kelemahan di tengah berbagai kelebihannya. Dalam tulisannya *Gerakan Massa yang Baik dan Yang Buruk,* Eric Hoffer (1951), menyatakan bahwa yang menjadi kelemahan mendasar dari setiap gerakan massa adalah terlalu fanatik berlebihan tanpa berpikir panjang

dan strategis. Ia selalu merasa benar sendiri, suka bertengkar, memaksakan kehendak, suka mencari kesalahan dan kasar. Padahal menurutnya, sebuah gerakan masa yang fanatik buta ini sangatlah mandul. Paling tidak ada empat kelemahan yang dapat dicatat darinya.

Dahlan Ranuwihardjo

Pertama, semangat yang ditimbulkannya menghisap habis semua tenaga sehingga tidak ada lagi tersisa untuk mencipta. Pengaruh semangat gerakan massa terhadap kreativitas sama dengan pengaruh penghamburan tenaga terhadap kreativitas.

Kedua, gerakan massa yang aktif fanatik buta membatasi kreativitas pada tugas memajukan perjuangan gerakan. Sastra, seni, dan ilmu harus berpropaganda dan harus 'praktis'. Penulis, seniman, dan ilmuwan pengikut teguh gerakan berkarya bukan untuk mengungkapkan isi hatinya, atau untuk mencari selamat, atau untuk menyingkap kebenaran dan keindahan. Dalam pandangannya, ia bertugas memberi peringatan, memberi nasehat, mendorong, memuja dan menyangkal.

Ketiga, bila suatu gerakan massa membuka kegiatan lapangan yang luas (perang, penjajahan, pengembangan industri), banyak kreativitas yang terserap.

Keempat, sikap fanatik sendiri dapat mencekik samua bentuk kegiatan mencipta. Seorang fanatik aktif buta memandang rendah masa kini, dan sikap ini menyebabkanya tidak menyadari bahwa hidup itu rumit dan khas. Hal-hal yang menggerakkan hati orang yang kreatif dianggapnya remeh atau buruk.

Apa yang dikemukakan Eric Hoffer di muka, sadar atau tidak sadar sering dilakukan gerakan mahasiswa era '90-an. Seperti yang dikatakan oleh M. Sobary, menurutnya, gerakan mahasiswa era '90-an sering mendewakan aksi turun jalan. Mereka terlalu percaya dengan cara-cara frontal yang sifatnya kontemporer. "Mahasiswa banyak yang hanya percaya pada demonstrasi sebagai mekanisme gerakan. Gerakan itu tidak hanya demo, ada corak-corak lain, misalnya lewat seminar, diskusi atau yang lainnya. Memang semuanya itu membosankan," ujarnya.

Namun kebosanan yang terjadi ini, lanjut budayawan yang lahir di Bantul ini, lebih dikarenakan terlalu lamanya pemerintah yang berkuasa. Baginya seandainya kekuasaan ini bergulir dinamis, maka akan muncul kreativitas yang tidak hanya pada aksi turun jalan semata.

Sementara Eep Saefullah Fatah, aktivis yang sekarang bekerja di Litbang Republika dan dosen Fisip UI, melihat bahwa gerakan mahasiswa era '90-an itu seringkali ahistoris. Dalam pengertian ketika mereka ingin membangun gerakan, mereka tidak membaca preseden sejarah. Misalnya, mereka sering tidak memperhitungkan bahwa radikalisme boleh jadi satu pilihan. Tetapi untuk mencapai pada sikap radikalisme -- yakni; perlawanan pada struktur politik -- ada kebutuhan untuk membentuk dan membina terlebih dahulu kekuatan kognitif di kalangan mahasiswa. Sehingga gerakan mahasiswa era '90-an, lanjut Eep, sering tidak ada kesamaan dalam memahami persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Akhirnya mereka tidak tahu apa yang harus dilawan, apa persoalan masyarakat, dan apa yang harus diagendakan ketika harus melawan. Hingga pada akhirnya sering muncul "radikalisme bendera". Radikalisme yang lahir bukan sebagai strategi perlawanan yang matang, melainkan sebagai lambang. "Gerakan mahasiswa era '90-an sering kali meloncat masuk ke agenda pemberdayaan struktural. Saya tidak tahu mengapa begitu. Apakah ini salah satu keberhasilan Orde Baru dalam mengikis daya kognitif mereka sehingga gerakan mahasiswa era '90-an mengalami ketidakberdayaan kognitif," tuturnya dengan nada tanya.

Fadli Zon

Hal serupa ditegaskan oleh Dahlan Ranuwihardjo. Menurut tokoh HMI yang kini menjabat dekan di salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta, gerakan mahasiswa era '90-an masih kurang dalam wawasan makro tentang bangsa sehingga sering argumentasi-argumentasi yang dimunculkan tidak argumentatif, alias rapuh. Maka tidak jarang gerakan-gerakan yang dilakukan patah tanpa kelanjutan.

Menghadapi kenyataan ini, maka solusi mendesak yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa era '90-an adalah mengadakan pembinaan basis baik ke dalam sebagai gerakan intelektual maupun menyusun kekuatan di luar. Sehingga akan lahir sebuah kekuatan yang benar-benar utuh dan tidak terjebak pada fanatisme brutal yang hanya mengakibatkan keluarnya tenaga sia-sia tanpa hasil maksimal.

Pilihan Aliansi Gerakan Mahasiswa Era '90 di Masa Mendatang

Gerakan mahasiswa dalam tradisi politik Indonesia, betapapun kecil masih diperlukan keberadaannya. Artinya fenomena gerakan mahasiswa dalam negara berkembang tidak jarang muncul sebagai kekuatan ketiga untuk menentukan setiap kebijakan penguasa. Dan sejarah membuktikan di tahun 1966 gerakan mahasiswa yang saat itu beraliansi dengan ABRI -- khususnya AD -- mampu
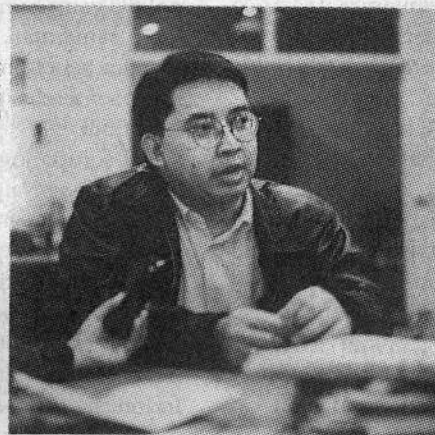
menggulingkan rezim Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno.

Arbi Sanit, pengamat politik dan mantan aktivis mahasiswa ini menjelaskan, gerakan mahasiswa kapan juga perlu. Hal ini disebabkan karena kita masih kekurangan suatu kekuatan-kekuatan kritis. Sementara parpol, ormas, kalangan pemerintah sendiri, kaum birokrat, dan kaum profesional itu terbatas kekuatan kritisnya. Sedangkan mahasiswa dan kaum intelektual merupakan 'pulau kritis' dalam masyarakat. Oleh karenanya, gerakan mahasiswa di negara Indonesia sampai kapan pun masih diperlukan sejauh golongan-golongan yang seharusnya berfungsi tidak melakukan tugasnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah gerakan mahasiswa sekarang dan mendatang harus beraliansi dengan kekuatan lain di luar dirinya seperti yang terjadi di tahun 1965?

Menjawab pertanyaan ini, Arbi Sanit melihat, bahwa aliansi mahasiswa dengan kekuatan lain merupakan keharusan. Artinya dalam sejarah dunia, tidak ada mahasiswa yang bergerak sendiri. Mahasiswa dengan militer, mahasiswa dengan intelektual, mahasiswa dengan kaum buruh, serta mahasiswa dengan kaum bisnis.

"Jangan harap mahasiswa bergerak sendiri, lalu beres semuanya. Bagaimanapun mahasiswa butuh patner strategis. *Strategic partnership* mesti dikembangkan," ungkapnya. Permasalahanya adalah dengan kelompok mana mahasiswa harus beraliansi; militerkah, kaum intelektual, atau malah dengan parpol.

Burhan D. Magenda punya catatan menarik tentang kemungkinan bergabungnya mahasiswa dengan Parpol. Menurutnya gerakan mahasiswa masa depan sudah saatnya mulai berpikir berani dengan jalan beraliansi dengan ormas (organisasi masyarakat) atau bahkan parpol. "Karena dengan bergabungnya mahasiswa dengan parpol, maka tuntutan-tuntutannya lebih banyak disetujui. Sehingga dalam sistem politik lebih bisa bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Eep Saefullah menjelaskan, bahwa aliansi mahasiswa dengan salah satu parpol itu tidaklah mungkin. Karena menurutnya, sebuah aliansi dalam rumus politik mensyaratkan ada dua atau lebih kekuatan yang memiliki posisi tawar relatif, punya neraca pertukaran relatif. Jadi masing-masing punya sesuatu yang bisa diberikan satu sama lain. Ada posisi tawar antara keduanya. Sementara kalau dilihat antara mahasiswa dan parpol tidak memiliki daya tawar tersebut.

Permasalahan lainnya, lanjut Eep adalah seringkali agenda-agenda institusi formal seperti parpol sebenarnya tidak paralel dengan aspirasi mahasiswa. Bila aliansi itu diasumsikan harus dilaksanakan dengan parpol, saya kira parpol kita, tiga-tiganya sudah menjadi lembaga politik yang punya karakter kurang lebih sama atau menyontek negara. Mereka sebetulnya tidak aspiratif karena mereka punya keterbatasan struktural.

REPRO ADIL

Eep Saefullah Fatah

Hal serupa juga dikatakan oleh Bonar Tigor Naipospos, menurutnya dalam beraliansi yang diharapkan adalah munculnya kekuatan yang lebih. Maka manakala gerakan mahasiswa mendatang bekerja sama dengan parpol itu sama saja kesalahan besar. "Partai-partai politik yang ada di Indonesia tidak berfungsi dengan benar. Golkar saja kan hanya alat pengumpul suara, *electoral machine* saja. Golkar nggak bisa apa-apa. Dia hanya difungsikan ketika pemilu, setelah itu nggak ada lagi," ungkapnya.

Lebih lanjut Bonar Tigor menjelaskan, bahwa gerakan mahasiswa di masa mendatang adalah sebuah gerakan yang bertujuan membentuk masyarakat sipil. Maka mereka harus bergabung dengan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat seperti kaum agamawan dan intelektual. Kemudian menjadi *pressure* bagi negara. Dengan demikian akan muncul gerakan mahasiswa yang aktif di dalam kampus sekaligus aktif di luar kampus. Jadi interaksi dia dengan kelompok-kelompok di luar kampus tetap jalan, tetapi dia punya basis di dalam kampus. Seperti yang terjadi di Korea, ketika terjadi gerakan di dalam kampus, akan muncul gerakan-gerakan dukungan dari kelompok sosial.

Sementara itu Arbi Sanit menegaskan, gerakan mahasiswa di masa mendatang yang paling strategis adalah membangun elite baru dengan melakukan kerja sama dengan golongan intelektual dan kaum profesional. Sementara itu pada level bawah, gerakan mahasiswa harus membangun kekuatan pendobrak untuk melawan penguasa. Dan kekuatan yang strategis adalah membentuk kerja sama dengan kaum pekerja.

"Dengan membentuk kerjasama 'atas-bawah' ini akan muncul kekuatan yang bisa diandalkan. Dan apabila negara tidak tanggap dengan perubahan ini, maka bahaya bagi para penguasa. Karena mereka akan berhadapan dengan gerakan massa," ungkap Arbi Sanit.

Pada akhirnya, di saat gerakan mahasiswa berkonsolidasi merancang-bangun kembali strategi-strategi perjuangannya, sebagai kelompok kritis, toh gerakan mahasiswa bukanlah kekuatan yang eksklusif dan anti-kritik. Di tengah pilihan-pilihan strategis saat ini, dari desain ideologis, aliansi politis, maupun serangan-serangan politik praktis yang dilancarkan -- tak ada salahnya bila gerakan mahasiswa banyak-banyak membuka mata, membaca wacana dari kutuk dan puja yang diperuntukkannya. ❑

Khoirul Rosyadi dan Prabowo
Laporan : Mashudi, Widarso, Wuwun, Eka Kurniawan.

Hartono Ack, Direktur PEDULI AQUA

PEDULI AQUA:

PROGRAM DAUR ULANG MENYELAMATKAN LINGKUNGAN

RATUSAN bahkan ribuan perusahaan ada di negeri ini. Tetapi, dari jumlah yang banyak itu, hanya puluhan yang peduli dengan limbah industrinya. Dari yang sedikit itu, PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI (PT AGM), pemroduksi air dalam kemasan, adalah salah satu yang telah memeloporinya. Bentuk konkretnya diwujudkan lewat program PEDULI AQUA.

Lahirnya PEDULI AQUA bermula dari tantangan Prof Dr Emil Salim kala masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH). Dalam acara yang diselenggarakan IBWA (*International Bottled Water Association*) di Jakarta, 9 Januari 1993, yang kebetulan. AQUA sebagai tuan rumah, Menteri Emil Salim yang menjadi *keynote speaker*nya, berkata dengan nada menantang bahwa ada satu persoalan yang masih harus dipikirkan oleh AQUA, yakni menangani botol-botol plastik yang mengotori lingkungan dan mengganggu keindahan kota.

Oleh Tirto Utomo, pendiri dan pemegang PT AGM, tantangan Menteri KLH yang yang diucapkan dihadapan 130 orang peserta dari 17 negara itu dinilai tidak main-main. Karenanya, ia segera mengumpulkan semua stafnya untuk secara khusus membahasnya.

Hasilnya adalah dilahirkannya program PEDULI (Pengembangan Daur Ulang Limbah Indonesia) AQUA Karena sifat kerjanya yang spesifik. program ini dikelola di luar mekanisme kerja PT AGM. Resmilah pada tanggal 1 Februari 1993, PEDULI AQUA terbentuk dan siap beroperasi dengan kerja-kerjanya.

Untuk menangani program ini ditunjuk Hartono Ack sebagai orang nomer satu yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan program AQUA terbaru itu.

KUMPULKAN BOTOL BEKAS

Apa program pertama yang dijalankan oleh Hartono? Ia punya ide sederhana, tetapi siapa sangka hasilnya menjadi sangat luar biasa. Hartono dan stafnya berpikir tentang bagaimana caranya agar botol-botol bekas AQUA di seluruh Jakarta bisa dikumpulkan dan diproses kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Dalam praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak kesulitan yang harus dihadapi. "Bahkan, untuk bisa meyakinkan para pemulung bahwa botol-botol AQUA bekas kini bisa dijual, susahnya sungguh bukan main,"kata Hartono. Sebab, memang selama ini di kalangan mereka hanya dipahami bahwa hanya kardus dan kertas saja yang bisa dipulung, sedangkan botol-botol plastik tidak.

Botol-botol yang diambil dari pemulung itu ada dua jenis. Yakni, botol plastik berukuran 1500 ml dihargai Rp 20,00 dan botol plastik berukuran 500 ml dibeli seharga Rp 10,00 per botol. Atau, dalam bentuk kiloan, botol-botol itu dibeli seharga Rp 550,00 per kg. "Hanya dua botol ini memang yang kita beli karena keduanya terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*), bahan yang tidak mempengaruhi kualitas dan rasa air," jelas Hartono Ack kepada BALAIRUNG di kantornya Jl. Pemuda Kav. 1449 A. Rawamangun Jakarta, Telepon (021) 4759608, 4723101.

Sampai saat ini ada sekitar 500-an pemulung atau *palapak* yang bekerja untuk program PEDULI AQUA ini. Setiap harinya tak kurang dari 1 ton botol-botol plastik bekas AQUA yang bisa ditampung pabrik, untuk kemudian di daur ulang. Jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan pemakaian botol plastik AQUA oleh konsumen yang mencapai 600 ton per bulannya atau 7200 ton per tahunnya. "Padahal, mesin pabrik kami sanggup mengolah lebih dari 8 ton sehari," tandas Hartono Ack.

Yang juga menarik, proses dan hasil daur ulang botol AQUA sendiri. Sebab, ternyata diluar sangkaan banyak orang, botol-botol AQUA bekas ini bisa dijadikan bahan utama pembuatan tekstil. Setelah menjadi *flake*, bisa diolah menjadi bahan *spring bed*, pegas, senar, dan kain.

AKSI-AKSI PENGEMBANGAN

Berhasil dengan program pengumpulan botol-botol bekas, PEDULI AQUA terus mengembangkan aksi-aksi pedulinya. Tidak saja sebatas memasuki lingkup industri, tetapi juga ke lingkup sosial dan akademis.

Maka aksi-aksi turun langsung lapangan pun banyak dilakukan. Misalnya, melakukan aksi sosial ke masyarakat pinggiran, khususnya ke komunitas para *palapak*. Untuk pengembangan ke lingkungan akademik, PEDULI AQUA banyak memberikan sponsor kepada kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Semua itu dilakukan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kegiatan kepedulian lingkungan PEDULI AQUA, sekaligus juga untuk mempertahankan *image* positif perusahaan di mata masyarakat.

"Oktober 1995 lalu, kami menjadi salah satu pendukung seminar dan pameran yang berlabel AKRAB LINGKUNGAN yang digelar mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM," ujar Hartono. Sebelumnya, aksi-aksi serupa juga dilakukan. Antara lain, bersama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia-Jakarta (FK3I) saat mengadakan aksi bersih pantai di Pulau Seribu Jakarta Utara. Atau, bersama Kelompok Pecinta Alam Jakarta melakukan aksi bersih gunung di Pangrango tahun 1994.

SUMBANG DANA MITRA LINGKUNGAN

Selain aksi sosial, PEDULI AQUA juga bekerja sama dengan Dana Mitra Lingkungan, sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kepada yayasan ini PEDULI AQUA menjadi donatur tetap, yang secara suntikan dana secara periodik.

Sejuta pohon di pabrik AQUA,upaya konkret menjaga kelestarian alam dan lingkungan

Sampai saat ini, PEDULI AQUA sudah dua kali memberikan sumbangan ke Dana Mitra Lingkungan. Pertama, tahun 1994, dana yang disumbangkan PEDULI AQUA epada Dana Mitra Lingkungan sebesar Rp 200 juta. Kedua, tahun 1996, PEDULI AQUA menyumbang lagi sebesar Rp 600 juta, yang penyerahannya langsung disaksikan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Apa yang telah dilakukan PEDULI AQUA ini selayaknya diacungi jempol. Namun, harapannya tentu saja tidak sebatas itu, tetapi bagaimana ini bisa mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk juga peduli dengan limbahnya dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Bumi ini adalah tanggung jawab bersama penghuninya. Oleh karenanya, kelestariannya harus dipikirkan bersama. Kalangan industri yang selama ini banyak dituding sebagai pencemar lingkungan seyogyanya bisa membuktikan diri dengan upaya-upaya yang konkret bahwa kepeduliannya terhadap lingkungan juga tinggi. Dengan begitu, nasib bumi ini akan lebih terjamin.

AQUA GOLDEN MISSISSIPI telah memulainya. Siapa akan menyusul?

(Pariwara/Among K. Ebo)

■ Gerakan Mahasiswa Era 90-an:

Diaspora Kekuatan yang Siap Meledak

Generasi gerakan mahasiswa era 66-an, boleh dikatakan solid dalam satu barisan. Menumbangkan rezim Orde Lama. Namun setiap panggung sejarah tentu punya *setting* tersendiri. Sebagaimana gerakan mahasiswa di era kini. Bersatu dengan kekuatan rakyat, menuntut demokratisasi; gerakan mahasiswa ada di setiap kota, tak mesti satu ideologi, tak mau bersatu dalam satu payung. Bagai jamur di musim hujan, mereka siap melawan untuk perubahan.

Perdebatan tentang mahasiswa -- terlebih gerakan mahasiswa -- merupakan suatu *entry point* yang tidak akan pernah basi. Hal ini bukan hanya karena gerakan mahasiswa (GM) adalah kelompok para elite oposisi yang agak lebih transparan, melainkan juga karena faktor penempatan mahasiswa di dalam mitologi Orde Baru.

Masih terbayang jelas di tahun 1966 bagaimana GM diperuntukkan pada suatu dukungan masyarakat yang jelas: untuk menggulingkan presiden Soekarno (Orde Lama), dan juga memberikan legitimasi yang mendadak bagi rezim baru.

Contoh historis itulah yang kemudian menjadikan mahasiswa Indonesia diuntungkan oleh sejarah. Seperti yang dijelaskan Bonar Tigor Naipospos, sesungguhnya mahasiswa di dunia ketiga -- khususnya Indonesia -- mendapat keuntungan dari peran historis yang sudah melekat tanpa disadari. Peran historis tersebut sekarang harus diambil oleh mahasiswa era 90-an untuk menjadi katalisator terbangunnya masyarakat sipil. *Dus*, mahasiswa harus masuk membangun organisasi-organisasi rakyat serta organisasi sosial untuk terus mengadakan kontrol bagi kesewenang-wenangan penguasa.

Namun dalam sebuah rezim yang berbeda, setiap mahasiswa tentunya memiliki permasalahan dan peluang yang tidak sama, begitu juga yang terjadi pada gerakan mahasiswa era 90-an. Ini yang kemudian menjadikan cara yang ditempuh gerakan massa sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya.

EKA K.

Mahasiswa UGM dialog dengan Rektor menentang intervensi militer di depan Balairung UGM

Sekilas tentang Gerakan Mahasiswa Indonesia

E. Aspinall, peneliti masalah Asia Tenggara di Monash University, dalam majalah *Indonesia* No 59 pernah mencatat, bahwa gerakan mahasiswa 66 yang mengadakan *partnership* dengan militer untuk menggulingkan Soekarno merupakan inspirasi munculnya gerakan mahasiswa berikutnya. Di awal tahun 1970 misalnya, gerakan protes mahasiswa ditujukan pada kesalahan rezim yang menutup-nutupi permasalahan. Selanjutnya, gerakan tersebut ditekankan pada regulasi dan reformasi terhadap isu-isu seperti korupsi, kebijaksanaan pembangunan, dan penambahan undang-undang institusi, khususnya KOPKAMTIB (Komando Pengawasan Keamanan dan Ketertiban).

Kemudian pada waktu yang sama, kekecewaan terhadap Soeharto dan korupsi dalam pemerintah membikin gerakan mahasiswa semakin merajalela. Puncak dari gerakan itu adalah munculnya insiden Malari Januari 1974 yang secara khusus adanya penyalahtempatan sejumlah KOMKAMTIB dengan komando Soemitro yang konon sedang 'dipersiapkan' mengambil kekuasaan Soeharto. Kesalahtafsiran Soemitro inilah yang kemudian menjadikan banyak pemimpin mahasiswa ditangkap dan aktivis politik kampus selalu dalam pengawasan.

Pemunculan kembali gerakan protes mahasiswa dalam tahun 1977-1978 ditandai dengan pengerasan sikap terhadap rezim, yang diwakili dengan mengadakan penolakan terhadap Soeharto untuk kembali menjadi presiden . Dalam masyarakat, sikap anti militer terus merebak, dan menuntut agar ABRI kembali pada fungsinya. "ABRI kembali pada rakyat," adalah sebutan yang terkenal saat itu.

Kemudian pada waktu yang sama, *mainstream* terhadap anti militer kembali merebak. Ini muncul secara jelas dalam pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan yang ditindak keras pada awal 1978. Pidato pembelaan dari Indro Tjahjono, mahasiswa ITB yang berjudul "Indonesia di Bawah Sepatu Laras" merupakan suatu dakwaan mahasiswa yang sangat eksplisit terhadap peranan militer di dalam konstelasi politik pada waktu itu.

Mahasiswa mengguggat UU LaLin no 14/1992

Perjuangan untuk masyarakat

Tindakan represif yang serupa terhadap gerakan mahasiswa terjadi pada 1977-1978. Bahkan pengekangan yang dilakukan mereka semakin lebih komprehensif dan efektif daripada yang terdahulu. Perwakilan-perwakilan mahasiswa (Dewan Mahasiswa) dibekukan. Suatu badan pemandu ditempatkan pada kegiatan-kegiatan politik di kampus. Birokrasi kampus diberi wewenang yang besar untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Secara umum, kebijakan-kebijakan ini dikenal dengan nama NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

Dampak dari NKK/BKK ini selanjutnya melemahkan aktivitas mahasiswa dari jalur kehidupan politik di Indonesia. Selama tahun 1980-an merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi kritikan-kritikan mahasiswa pada pemerintah untuk mengorganisasi kebebasan kampus. Selanjutnya sebagian dari gerakan mahasiswa bergabung dengan komunitas kecil yang bekerja pada LSM-LSM yang memulai dengan menanyakan beberapa paradigma dalam pengembangan pemikiran. Sementara dari aktivis gerakan mahasiswa ada juga yang mendirikan kelompok-kelompok studi yang pada awal tahun 1980-an memadati kampus-kampus besar. Kelompok-kelompok studi ini sangat bervariasi, ada yang di bidang politik, ada yang semi bergerak di bawah tanah, ada yang membatasi hubungan-hubungan mereka dengan kelompok yang sama, dan sebagaian pada pemikiran-pemikiran yang bersifat kritik, serta LSM-LSM.

Pemunculan kembali gelombang baru yang berlarut-larut pada protes organisasi mahasiswa ditandai dengan pecahnya protes yang menentang NKK/BKK dan menuntut adanya "otonomi kampus" yang ada di Yogyakarata, Bandung, dan Jakarta pada bulan-bulan terakhir 1988.

Pada awal 1989 sampai sekarang, demonstrasi umum yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa telah terjadi di tempat-tempat umum hampir setiap hari. Demonstrasi ini terjadi di beberapa universitas besar di Jawa. Isu-isu yang diangkat menyangkut dimensi-dimensi hak asasi manusia. Beberapa kampanye yang dilakukan cukup intens dengan masalah-masalah pemukiman (tanah), seperti Kedung Ombo di Jawa Tengah yang berakibat adanya pengadilan terhadap para aktivis mahasiswa di Yogyakarta tahun 1989-1990. Pemeriksaan serupa juga terjadi kembali di Bandung, Jakarta, Yogyakarta terhadap aktivis yang protes terhadap pembredelan *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* di pertengahan tahun 1994.

Dari sejarah perjalanan gerakan mahasiswa tersebut, E. Aspinall kemudian memunculkan tesis, bahwa

gerakan mahasiswa era 90-an memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya, cara-cara yang membedakanya secara garis besar ada tiga. *Pertama,* pembagian daerah yang mempunyai ciri khusus. Kalau generasi tahun 1966, 1973-1974, dan 1977-1978 kebanyakan hanya terpusat di Jakarta dan Bandung, maka gerakan mahasiswa era 90-an, aksi-aksi protesnya secara organisasi muncul di banyak universitas terkemuka di Jawa; Jakarta, Bandung, Bogor, Salatiga, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Jombang, Jember, Bali, dsb. Bahkan kelompok-kelompok studi yang mempunyai hubungan dengan Jawa juga muncul, seperti Bali, Lombok, Medan, dan Menado. Bila ditilik lebih jauh, maka Jawa Tengah -- khususnya Yogyakarta -- merupakan fokus dari gerakan mahasiswa era 1989-1990-an dengan FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta) yang telah memberi suatu model.

Kedua, tidak seperti tahun 1960-an dan 1970-an di mana gerakan mahasiswa hanya berpusat pada universitas elit negeri (khususnya UI dan ITB) dan tidak melibatkan universitas-universitas kecil, maka pada gerakan mahasiswa era 90-an telah mengalami diaspora basis kekuatan mahasiswa-mahasiswa dari kampus swasta yang kecil dan kurang terkenal. Di Jakarta khususnya, sampai saat ini muncul beberapa kelompok gerakan mahasiswa dari kampus swasta seperti; Universitas Nasional, Universitas Mustopo, serta Universitas 17 Agustus.

Ketiga, perbedaan terletak pada bentuk organisasi. Kalau pada tahun 1970-an gerakan protes mahasiswa dengan leluasanya diorganisir badan-badan yang dikenal melalui pemilihan yang sah (dalam hal ini Dewan Mahasiswa), maka di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an protes mahasiswa dibentuk melalui komite-komite yang bersatu untuk suatu kampanye dan kemudian bubar. Misalnya, kelompok solidaritas korban pembangunan waduk Kedung Ombo, yang dibentuk pada tahun 1989 dengan anggota mahasiswa-mahasiswa dari sejumlah kota. Kemudian disusul dengan munculnya organisasi-organisai yang luas untuk mengadakan koordinasi secara formal untuk kegiatan-kegiatan kampus yang bermula dari kelompok-kelompok bawah. Prototipenya adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta yang terbentuk pada tahun 1989. Pada tahun yang sama (1989-1990) organisasi yang serupa lahir di kota-kota lain seperti BKMJ (Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta), BAKOR (Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung), dan FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya).

Dari koordinasi-koordinasi tersebut, lalu muncul berbagai percobaan untuk mengorganisir lebih terbuka pada basis antarkota, dengan model seperti FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia) yang berdiri di tahun 1994, SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) yang dipublikasikan pada bulan Agustus tahun 1994.

Gerakan Mahasiswa membangun demokrasi
Memprotes pembredelan tiga media

Selanjutnya, E. Aspinal dalam majalah *Forum Keadilan* No 16 Th II, 25 November 1993, mengatakan bahwa dalam periode 1987-1990 telah terjadi 155 kali demonstrasi mahasiswa, terutama menyangkut soal tanah, nasib buruh, serta pelanggaran hak asasi.Semua itu dilakukan dengan mengadakan aliansi atas kaum marjinal (buruh, petani, kaum miskin kota, dll).

Dari jumlah frekuensi jumlah gerakan demonstrasi mahasiswa serta bentuk kerja sama tersebut menunjukkan bahwa, ciri lain gerakan mahasiswa era 90-an adalah bentuk kerja sama yang dilakukan. Artinya, hal lain yang membedakan gerakan mahasiswa era 90-an dengan generasi sebelumnya terletak dengan meleburnya mahasiswa dengan para buruh, petani, serta kaum miskin kota yang ada.

Hal ini dibenarkan oleh Yana, salah seorang aktivis FKPMJ (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta) bahwa, "Aliansi itu kami lakukan karena sebuah refleksi dan re-evaluasi terhadap gerakan mahasiswa yang dulu. Kami menganggap gerakan mahasiswa 80-an masih bersifat elitis. Artinya, mereka tidak bersentuhan dengan kelompok-kelompok rakyat. Tetapi era 90-an lain sekali, gerakan mahasiswa sekarang tidak tanggung-tanggung mengakomodasi buruh, tani, dll," Jelasnya kepada *Balairung.*

Hal senada juga dilakukan para aktivis APPI (Aliansi Pemuda Pelajar Indonesia). Gerakakan yang merupakan gabungan 13 organisasi di Jakarta ini dalam aksi-kasinya selalu hadir dengan tema-tema populis. "Dalam bergerak kita mengambil tema-tema kecil, bahkan tidak jarang kita berjuang dan terlibat dalam kasus yang kasuistik. Dalam matematika politik, kita sering muncul langsung untuk mengadakan pengadvokasian secara langsung," papar Nico.

Isu-isu dari bawah yang kemudian dikedepankan oleh banyak gerakan mahasiswa era 90-an tersebut, seakan menjadi tema global. Artinya, hampir bisa dipastikan bahwa gerakan mahasiswa periode sekarang selalu muncul dengan menghimpun penderitaan masyarakat tertindas. Sebut saja SPID (Solidaritas Pemuda Indonesia untuk Demokrasi), gerakan mahasiswa yang muncul di Jakarta ini, bulan Mei dan Juni tahun lalu bergabung bersama rakyat Sawangan Bogor untuk memperjuangkan

tanahnya dari penggusuran penguasa dan konglomerat. Begitu juga dengan Front Pemuda Penegak Hak-hak Rakyat (FPPHR-Bogor) yang bergabung bersama rakyat Bogor untuk mempertahankan tanahnya dari mangsa PT Suryamas Duta Makmur.

Gerakan mahasiswa era 90-an itupun pada akhirnya juga berpengaruh pada cara yang ditempuh oleh PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dalam menjalankan kerja-kerjanya. "Isu yang diangkat PMII hampir semua mengadopsi isu-isu yang berkembang di kalangan gerakan mahasiswa pada umumnya, misalnya ketika teman-teman dari gerakan mahasiswa membicarakan kasus tanah, kami juga membuat advokasi mengenai tanah itu, meskipun kami juga beraliansi dengan teman-teman yang lain," ujar Umam, salah satu anggota presidium PMII Jakarta.

Sementara gerakan mahasiswa di Bandung, sebagai basis penting gerakan mahasiswa saat ini tak kalah gencar. "Bahwa saat ini tengah terjadi pluralisasi gerakan di Bandung sendiri, meskipun sering terjadi koalisi di tingkat kota Bandung dalam even-even tertentu" ujar Mulyadi, aktivis FPMB dan penggiat pers mahasiswa di Universitas Pasundan.

Pun isu-isu politis yang diangkat tak kalah plural. Dari kasus lokal sampai nasional; masalah tanah (Nipah, Rancamaya, Benhil), HAM, Otonomi kampus, advokasi rakyat dan mahasiswa sampai penolakan pemilihan Soeharto sebagai presiden kembali.

Sementara itu hal lain yang menjadikan pembeda gerakan mahasiswa era 90-an dengan generasi sebelumnya, menurut Arbi Sanit terletak pada kedetailan konsep serta pikirannya yang lebih praksis. Menurut dosen Fisip UI ini, kalau gerakan mahasiswa angkatan 66 tidak punya tuntutan yang nyata kecuali hanya anti- Soekarno dan anti-Orde Lama. Mereka tidak punya tuntutan yang jelas, mau diapakan negara ini, mereka tidak punya. Kecuali hanya Tritura, dan itu tidak lebih dari soal perut semata. "Sementara gerakan mahasiswa era 90-an, lihat saja caranya Budiman berpikir. Pikiranya detail. Ideologi seperti apa yang diinginkan, kekuasaan negara seperti apa yang diinginkan. Semuanya jelas. Kelompok-kelompok di luar Budiman saya pikir juga punya konsep tentang negara ini apa, elit nanti apa, ekonomi seperti apa, bagaimana partai, mereka punya konsep yang detail. Jadi mereka pikirannya lebih praksis," ujarnya.

Manajemen Gerakan Mahasiswa Era 90-an

Dalam sebuah organisasi, manejemen merupakan kekuatan penting dalam menentukan berhasil tidaknya program-program yang direncanakan. Dan hal ini disadari betul oleh setiap kelembagaan, termasuk juga gerakan mahasiswa di tahun 1990-an. Keyakinan akan vitalnya manajemen itu hampir semua gerakan mahasiswa era 90-an yang dijumpai BALAIRUNG mengakuinya; seperti PIJAR, SMID, FKPMJ, APPI, SPID.

PENJARA, PENGASINGAN, BAHKAN KEMATIAN ADALAH KONSEKUENSI DARI PERJUANGAN YANG TELAH KAMI LAKUKAN

"Bagaimanapun juga kita harus pandai-pandai menyusun strategi agar segala tujuan yang telah direncanakan menjadi kenyataan, namun mengenai manajemen organisasi terlebih di FKPMJ -- tidak terlalu ketat dalam menerapkanya. Yang jelas kami punya forum tertinggi yang dihadiri oleh seluruh kelompok pers mahasiswa Jakarta. Keputusan-keputusan organisasi ditetapkan dalam forum tersebut. Setelah itu kami membagi tugas lewat SATGAS (Satuan Tugas) di mana setiap SATGAS punya ketua masing-masing," papar Yana, salah seorang aktivis FKPMJ.

Jadi, lanjut mahasiswa IKIP Jakarta itu, setiap SATGAS yang berjumlah kurang lebih delapan orang berkewajiban menjalankan tugasnya masing-masing. Bahkan sesungguhnya, pada merekalah kunci roda organisasi ini dijalankan.

Manajemen yang 'tradisional' ini juga terjadi pada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Seperti yang diakui oleh Umam, "Kalau mau lihat manajemen PMII, ini saya kira masih tradisional juga, artinya tidak begitu ketat sebagaimana organisasi partai. Kalau partai itu kan harus tahu berapa anggota di setiap cabangnya, punya sertifikat dalam bentuk kartu tanda pengenal. PMII sampai sekarang belum begitu ketat, ini terbukti dari beberapa anggota PMII yang masuk SMID, itu kan menunjukkan bahwa secara managemen belum begitu rapi," katanya.

Hal yang lebih menarik dari perkembangan gerakan mahasiswa era 90-an khususnya manajemen gerakan mahasiswa di Jakarta -- adalah adanya pola yang sudah berani mengadakan aliansi dengan sesama gerakan mahasiswa yang lain. Hal ini terlihat dalam APPI (Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia) yang merupakan gabungan dari berbagai 13 organisasi gerakan mahasiswa yang ada di Jakarta.

"Hal itu bukan karena kami meniru PRD, melainkan itu kami lakukan untuk membangun basis perjuangan, dan dengan adanya aliansi tersebut, berarti memudahkan untuk mengorganisir ribuan massa, baik dalam pabrik ataupun para petani," jelas Nino bersama aktivis APPI lainya.

Apapun bentuk sebuah model perencanaan organisasi setiap pergerakan mahasiswa yang ada, gerakan mahasiswa era 90-an telah menunjukkan, bahwa mereka telah melakukan *planning,* yang kemudian mengevaluasi hasil kerja mereka yang telah dilakukan. Itu membuktikan, bahwa gerakan mahasiswa era 90-an memiliki kesadaran, sesungguhnya perjuangan yang dijalankan butuh strategi serta kiat untuk menggolkan cita-cita besar rakyat Indonesia (keadilan, kebenaran, demokrasi). Terlebih lagi yang dihadapi mereka adalah penguasa dengan persenjataan komplit yang setiap saat bisa memenjarakannya.

Namun begitu, perjalanan gerakan mahasiswa era 90-an bukan berarti tanpa hambatan. Layaknya sebuah organisasi lainya, gerakan mahasiswa tahun 90-an juga tidak lepas dari tantangan, rintangan baik yang datang dari dalam ataupun dari luar organisasi mereka.

Hambatan Gerakan Mahasiswa Era 90-an.

Mencatat permasalahan gerakan mahasiswa era- 90an, maka paling tidak ada dua tipe bentuk permasalahan yang ada. Yakni, hambatan yang bersumber dari internal organisasi dan tantangan yang berasal dari luar keorganisasian.

Seperti yang dialami oleh PMII, yang dijelaskan oleh Umam. "Saya kira, organisasi yang besar itu selalu ada elemen *diskurstif* di dalamnya, maksudnya masih banyak juga teman-teman yang masih bergantung diri pada kekuatan-kekuatan negara. Itu adalah problem yang serius. Problem kedua adalah kekuatan eksternal, karena negara punya kepentingan untuk menyetir ormas-ormas besar, sehigga berpengaruh juga pada PMII."

Lain halnya dengan FKPMJ, bagi organisasi yang berdiri 14 Juli 1993 ini, hambatan paling jelas dirasakan lebih banyak pada permasalahan ke dalam, yakni tidak adanya keseragaman arti radikalisasi antaranggota.

"Kalau kampus-kampus semisal IKIP Jakarta, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Universitas Dr. Moestopo-Beragama, Universitas Tujuhbelas Agustus (UNTAG) Jakarta tidak terlalu masalah, karena mereka punya konsep radikalisasi yang hampir sama, sehingga program-programnya bisa diterima. Sementara kampus-kampus seperti Universitas Tri Sakti, beberapa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE), dan lain-lain politiknya untuk radikalisasi itu masih rendah. Makanya dalam penentuan program, sering kali kami bentrokan, sehingga pada akhirnya kampus-kampus yang kesan politiknya demikian memilih keluar dari FKPMJ karena melihat program-program politik yang dibuat tidak bisa diterima," jelas Yana, salah seorang ketua SATGAS FKPMJ.

Permasalahan internal organisasi seperti itu hampir juga dialami APPI. Kelompok yang merupakan aliansi dari 13 gerakan mahasiswa yang ada di Jakarta ini, dalam menjalankan program-programnya sering terhambat pada permasalahan teknis, misalnya tentang jarak kampus antar anggotanya, dana, ataupun SDM yang mereka miliki.

."Di samping permasalahan teknik tersebut, permasalahan lain adalah karena kita merupakan aliansi, jadi latar belakang organisasi yang berbeda itu kadang sedikit menyulitkan gerak kami. Namun, karena dari kebanyakan aliansi kami memiliki semangat populis demokratik, demokrasi kerakyatan, dan watak kerakyatan yang kita pakai, maka akhirnya kami bisa bersatu dan menjalankan kerja-kerja sesuai dengan program kita," papar Nico dan kawan-kawannya.

Dari beberapa masalah yang ada pada gerakan mahasiswa era 90-an tersebut, menunjukkan bahwa hambatan selama ini yang mereka rasakan sering muncul dari dalam sendiri, baik mengenai dana, regenerasi, ataupun yang lainya. Itu mengartikan bahwa tantangan dari luar seperti represi dari penguasa rezim (militer) tidak begitu mereka 'anggap' meskipun dalam lapangan sering mereka rasakan. Karena baginya, mati lebih utama dari pada hidup dalam bayang-bayang keserakahan dan penindas.

"Penjara, pengasingan, bahkan kematian adalah konskuensi dari perjuangan yang telah kami lakukan," kata Adian, aktivis APPI yang sempat masuk sel ketika aksi 10 November tahun lalu.

Semangat inilah yang selalu menjadi modal utama dari gerakan mahasiswa era 90-an dalam menjalankan aksi-aksi demonstrasinya, sehingga sama sekali mereka tidak pernah jera meski senapan, poporan militer selalu ia rasakan.

Keyakinan anak muda Indonesia tersebut, bukanlah utopis dan khayalan belaka. Meski itu muncul dari segelintir orang, tapi mereka memiliki kekuatan, semangat perjuangan yang setiap saat mampu menggelitik ketidakadilan rezim penguasa negara. Pada akhirnya repolitasasi mahasiswa yang penuh diaspora saat ini akan meledak serta membuka kemampatan demokratisasi politik Orde Baru, menyongsong perubahan yang lebih baik di bumi pertiwi ini. ❑

Khoirul Rosyadi

Laporan: Rosyadi,Wuwun Widiawati, Mashudi, Widarso, Eka Kurniawan, Prabowo
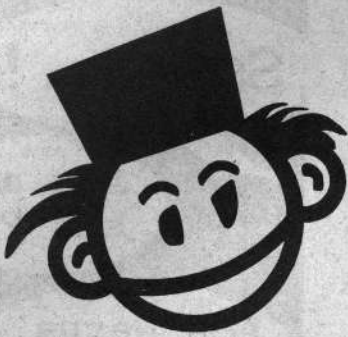
SMPT, 1991

Golput, 1992

SDSB, 1993
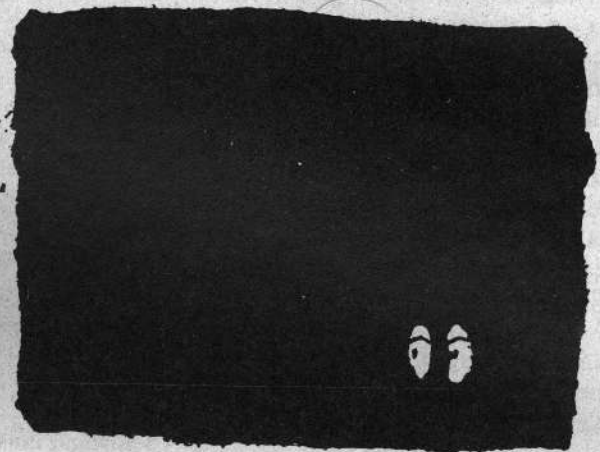
Breidel, 1994
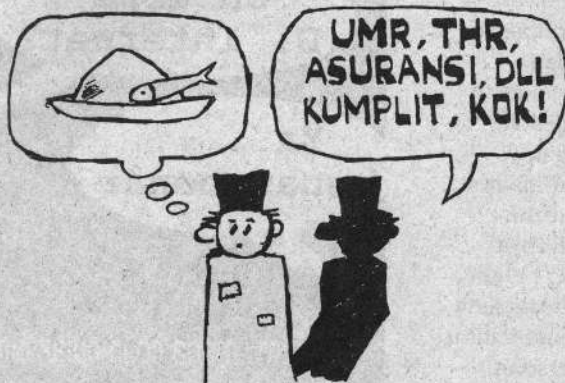
Buruh, 1995

27 Juli, 1996

■ Arbi Sanit:

"Secepatnya Gerakan Mahasiswa Bangkit"

Menurut pengamatan Anda, apa yang membedakan secara karakteristik gerakan mahasiswa era 90-an dengan gerakanan mahasiswa generasi sebelumnya?

Sebenarnya batasnya nggak 1990, malah 1978. Jadi dari awal Orde Baru sampai kurang lebih tahun 1971 sampai tahun 1973, lalu 1973-1978. Atau dari awal sampai akhir tahun 1960-an, 1970 lalu kemudian sampai 1978. Lalu tahun 1978 sampai 1990 sekarang. Saya kira ada empat yang kita bisa lihat.

Nah, di awal 1970 saya kira gerakan mahasiswa masih melanjutkan KAMI, KAPPI itu ya angkatan 66. Di mana mereka masih berpandangan, berasumsi bahwa kebebasan Orde Baru ini mengoreksi Orde Lama. Berarti Orde Lama tidak ada kebebasan. Mahasiswa tidak boleh berperan, seperti mau membubarkan KAMI. Saya kira begitu anggapannya sampai '69-'70.

Tapi waktu pemilu 1971, mulai dihajar lagi waktu mahasiswa protes-protes di pemilu. Nah, penghajaran 1971 sebenarnya sampai 1978 puncaknya. Di situ dia mulai tertekan. Tertekan tapi masih bisa 1974 tampil, 1978 tampil lagi. Setelah tahun 1978 itu mahasiswa dicabut dari hak politiknya. Jadi mahasiswa sebagai rakyat punya hak politik, tapi mahasiswa sebagai mahasiswa tidak ada hak politik. Saya kira sejak 1978, mahasiswa itu tidak langsung di politik tapi di LSM-LSM dan *study group* yang tidak mau di LSM. LSM kan penekananya pada pengabdian masyarakat. *Study group* kebebasan intelektualnya yang terkekang itu dikembangkan di sana. Jadi ada dua bentuk gerakan atau organisasi kelompok mahasiswa itu yang saya kira terus sampai tahun 1990-an.

Arbi Sanit

Kemudian tahun-tahun 1990-an itu meningkat golongan menengah, mulai sejak awal tahun 1980-an, konglomerat dan profesional meningkat. Bersamaan dengan melemahnya peran ekonomi negara, ekonomi masyarakat meningkat terutama kaum pengusaha, nah lahirlah konglomeratisme, kaum profesional naik juga. Kaum intelektual ikut juga, walaupun sebelumnya sejak awal meskipun jumlahnya kecil.

Berkaitan dengan itu mahasiswa bangkit lagi, aktivitasnya meningkat di kelompok mahasiswa itu sendiri. Jadi tahun 90-an disambut dengan macam-macam gerakan prodemokrasi, LSM-LSM kelas menengah itu, lalu protes-protes sosial melibatkan mahasiswa itu sendiri. Nah LSM 90-an sudah beralih kiblatnya, bukan saja bidang karikatif atau pembelaan tapi sudah pindah ke politik. Jadi mahasiswa yang aktif di LSM itu juga pindah ke politik. Nah itu membangkitkan kembali kesadaran mahasiswa yang dulu diskusi-diskusi itu. Ya, lalu ikut bersama mereka, itu sampai '96 lah, puncaknya 27 Juli '96 itu.

Meminjam istilah pemerintah saat ini, apakah gerakan mahasiswa dapat distigmasi kekiri-kirian?

Kalau dipandang dari pemerintah ya, bisa kiri, karena pemerintahnya kanan, kapitalistik, konservatif. Buktinya konglomeratisme berkuasa sekarang kan? Malah bukan konglomerat swasta saja, konglomerat negara dan konglomerat anak pejabat sekarang tampil. Jadi semua sistem ekonominya yang liberal seperti itu. Jadi dalam konsep ideologi, sistem pemerintahannya kanan. Apalagi konservatismenya meningkat, makin membaku, kecurigaan terhadap perubahan meningkat, karena keyakinan ideologi stabilitas politik sebagai basis pembangunan ekonomi.

Jadi kalau mahasiswa golongan kiri, karena kritik-kritik mahasiswa bersama kaum intelektual karena ingin meratakan ekonomi, melindungi yang lemah, buruh petani, membela mereka mulai dari pembebasan tanah, jaminan kerja, upah, harga yang tertekan, sistem produksi yang represif pada masyarakat, seperti mirip-mirip VOC begitu. Jadi mahasiswa cenderung melihat itu sebagai problema bersama dengan kaum intelektual. Oleh karena itu menjadi 'kiri' dia menurut ideologi sejak tahun '50-

Jadi bisa dapat dikatakan sifat gerakan mahasiswa '90-an bersifat kerakyatan?

Iya, kerakyatan itu pasti 'kiri' jadinya. Kalau elite 'kanan' biasa itu.

Di samping persoalan-persoalan ekonomi, kesenjangan. Apakah Anda melihat gerakan mahasiswa itu sudah mengarah menentang rezim kekuasaan, seperti yang terjadi tahun '66?

Gerakan politik mahasiswa memang ada arah ke sana. Jadi sudah meninggalkan pandangan kulturalisme, dan beralih ke strukturalisme. Jadi berarti bahwa ketimpangan sosial, keterpojokan masyarakat, lemahnya masyarakat, itu disebabkan oleh penguasaan sumber-sumber daya politik dan ekonomi ini berada pada golongan penguasa dan kaum elite.

Jadi secara struktural masyarakat, petani, buruh, pengangguran dan mahasiswa sendiri merasa berada pada kondisi struktural yang terpojok. Ini kan disebabkan oleh negara yang begitu kuat, golongan penguasa, militer, birokrasi yang begitu dominan dalam kenegaraan. Itu kesimpulan yang lebih kuat pada tahun '90-an.

Pada tahun '70-an gerakan politiknya masih mengarah pada kulturalisme. Mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti LSM tahun '70-an lah. Dengan sendirinya kalau masyarakat sudah dididik, sudah sejahtera maka demokrasi akan tumbuh. Untuk sementara teori itu tidak berjalan di Indonesia. Sementara pembangunan meningkat, represi juga meningkat, karena itu bergeser cara-cara perjuangan mahasiswa dan cita-citanya ideologi. Bukan saja mendidik masyarakat supaya lebih aktif ambil bagian dalam pembangunan dan politik, tetapi malah tatanan politik dan pemerintahan serta elite itu hendak dikoreksi. Nah ke sana kan perginya.

Dalam gerakan mahasiswa tahun '65-'66 itu kan menghasilkan Orde Baru. Nah apakah gerakan mahasiswa sekarang ini juga akan menghasilkan orde yang baru lagi?

Yang lebih baru? Orde terbaru? Ada kemungkinan ke sana kalau dilihat dari hakekat perjuangannya. Begini kalau angakatan '66 itu asal anti Soekarno, asal bukan Soekarno semuanya *yess*! Datang militer sebagai kekuatan dominan *yes*! Datang pembangunan dengan cepat, stabilitas politik ditahan *yes* juga! Jadi semuanya *yess*, itu kenapa? Karena tahun '66 tidak mempunyai tuntutan nyata kecuali anti Soekarno, anti Orde Lama. Tidak punya tuntutan yang jelas. Mau diapakan negara ini, tidak punya. Ya hanya Tritura, tetapi lebih banyak soal perut. Ya demokrasi, tapi demokrasinya dia tidak menuntut yang lebih jelas. Dan tuntutan itu terlambat diajukan baru tahun '74, tahun 70-an, sementara rezim, format politik sudah disusun, strategi sudah dilaksanakan dan memperlihatkan hasil pembangunan pada lima tahun pertama, baru mahasiswa didetailkan maunya. Yaa, sudah ketinggalan jaman.
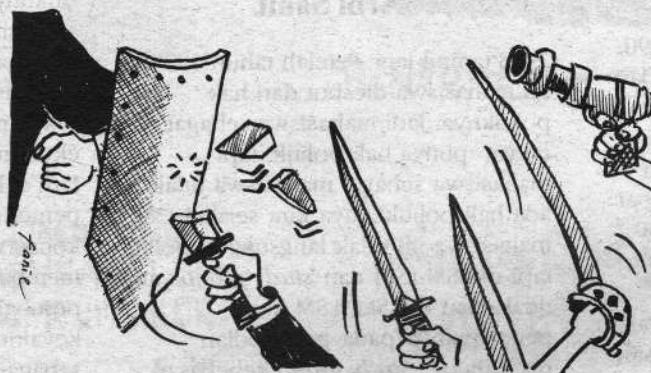
SECARA STRUKTURAL MASYARAKAT, PETANI, BURUH, PENGANGGURAN DAN MAHASISWA SENDIRI MERASA BERADA PADA KONDISI STRUKTURAL YANG TERPOJOK

Jadi walaupun angkatan '66 mau demokratis juga, cuma tidak detail juga demokrasinya, tuntutannya, disadari belakangan. Karena itu misalnya Rahman Toleng, dia menyesal kan, lalu keluar. Di DPR dikirimi bedak, celana dalam wanita, lalu dia sadar lalu keluar. Sampai sekarang dia menyesal habis-habisan. Kalau saya melihatnya kenapa? Karena angkatan '66 itu tidak melakukan *bargaining* kekuasaan yang nyata dengan potensi kekuatan-kekuatan yang riil pada waktu itu. Angkatan 66 sebenarnya bisa mem- *press* partai politik, jangan terima ABRI dalam parlemen. Bisa sebenarnya, tapi tidak melakukannya. Malah memberikannya.

Biarkan saja angkatan '66 bisa mengatakan pada ABRI, "Eh.... Kamu jangan begitu, dikurangi." Bisa sebetulnya, tapi tidak dilakukan, kenapa? Karena memang tidak punya strategi untuk itu. Angkatan ini didorong lahir sebenarnya untuk dihadapkan pada Soekarno bukan dihadapkan pada gagasan baru. Nah itu bedanya dengan yang sekarang. Sekarang lihat saja caranya Budiman berpikir, pikirannya detail. Ideologi seperti apa yang dia inginkan, demokrasi seperti apa yang dia inginkan, kekuasaan seperti apa yang diinginkan. Semuanya jelas.

Kelompok-kelompok di luar Budiman saya kira juga punya konsep tentang negara ini apa, elite nanti apa, ekonomi seperti apa, bagaimana partai, mereka punya konsep yang detail. Jadi pikirannya lebih praksis. Yang dulu ideologis. Nah yang dibutuhkan negosiasi dengan penguasa adalah pikiran praksis, agar tahu detail apa yang harus mereka lakukan.

Belajar dari sejarah, apakah kalau kita mau berhasil haruskah beraliansi dengan kelompok luar, dan kelompok mana saja yang bisa diajak beraliansi?

Dalam sejarah dunia malah nggak ada mahasiswa sendiri. Mahasiswa dengan militer, mahasiswa dengan intelektual, mahasiswa dengan kaum buruh, mahasiswa dengan kaum bisnis. Di Filiphina, mahasiswa dengan

kaum bisnis, tetapi pertama-tama dengan LSM-LSM. Lalu di Muangthai itu dengan LSM-LSM juga lalu bisnis masuk. Di Korea juga begitu. Jadi jangan harap mahasiswa bergerak sendiri lalu beres semuanya, nggak. Jadi *Strategic partnership* mesti dikembangkan.

Nah golongan mana? Di sini kembali saya pikir, kita harus membangun golongan intelektual kemudian untuk pilihan-pilihan membangun kembali elite baru. Pilihan-pilihan itu adalah kaum intelektual, profesional, saya kira itu yang paling strategis. Karena birokrat dan militer itu pasti jadi lawan mahasiswa. Karena itu yang bertahan pada posisi yang menjadi sumber kecenderungan tidak demokrasinya sistem yang ada, kecuali beberapa dari mereka mungkin tapi blok tidak mungkin. Jadi bagian dari dua golongan itu mungkin partner yang strategik buat mahasiswa.

Tapi di *level* massa, karena itu gerakan itu nggak mungkin gerakan elite, kekuatan *bargaining* mahasiswa nggak ada, kekuatan dobrak yang harus dibangun. Nah kekuatan dobrak itu tentu dukungan massa. Jadi, saya kira pemerintah untuk segera menyadari perubahan yang diperlukan itu dan segera tidak pasang strategi yang jelas, mungkin dia akan berhadapan gerakan massa. Sekalipun mungkin tidak digerakkan tapi massa terpancing pada kritik-kritik lalu terjadi juga aliran gerakan massa.

Massa golongan mana?

Ya, kaum pekerja, saya kira yang paling bisa diharapkan. Kalau petani, saya kira terkooptasi secara detail di pedesaan sana. Kemudian adalah golongan agama. Itu bisa semua golongan agama. Karena sekarang sikap kritis golongan agama kepada agama sudah mulai tumbuh. Bello misalnya. Bello tidak dimarahi atau dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Dalam rapat-rapat gereja Indonesia itu, itu dia tidak ditegur keras, toh hanya dianjurkan, diberi kesempatan. Jadi itu berarti di dalam hati ada beberapa kesempatan terhadap pikiran Bello secara tidak langsung. Golongan Kristen juga tidak menyalahkan, diam saja. Tapi dengan gejala Bello, saya lihat adanya kecenderungan adanya kesadaran politis golongan agama terhadap demokrasi.

Anda melihat gerakan mahasiswa era '90-an memberi imbas terhadap kebijakan-kebijakan politik penguasa selama ini?

Kalau terhadap kebijakan politik, beberapa ada pengaruhnya, cuma tidak begitu luas. Tapi pengaruh adalah pada isu yang mendapat dukungan masyarakat luas, misalnya SDSB. Dalam kasus itu mahasiswa terlibat, karena memang dirasakan oleh masarakat luas, karena dia dapat dukungan. Jadi kalau strategi isu menurut saya, mahasiswa perlu memilih isu nasional yang juga dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau dengan itu saya rasa berpengaruh. Tetapi sejauh masyarakat luas nggak terlibat, hanya mahasiswa jalan sendiri, kayaknya nggak itu.

Misalnya isu HAM. Tapi masyarakat luas kan masih bingung apa itu hak asasi, pemahaman mereka masih dangkal. Nah karena itu nggak dapat dukungan dari masyarakat luas. Apalagi isu nuklir, lingkungan hidup. Ini kan masih terbatas pada intelektual, awam belum kena.

> JANGAN HARAP MAHASISWA BERGERAK SENDIRI LALU BERES SEMUANYA

Sebenarnya apa masalah yang dihadapi gerakan mahasiswa era '90-an ini?

Pertama, adanya kecenderungan umum dari perhatian, motif mahasiswa sekarang ini adalah dunia bisnis. Ya, dunia kerja. Jadi itu sebagian besar. Karena itu aktivis sedikit. Ini menjadi halangan struktural, tapi fungsional tidak karena yang kecil itu kalau teriak sama-sama kan menjadi kuat juga. Apalagi sekarang *loudspeker* banyak di mana-mana, koran, TV jadi bisa di-*blow-up* menjadi besar walaupun orangnya sedikit.

Handicap yang lain sesungguhnya kebebasan bergerak, kebebasan beraktivitas dalam politik. Karena memang negara membuat kebijakan dan sistem di mana kontrol gerakan masyarakat termasuk mahasiswa itu berlangsung secara detail & intensif. Juga sistem pendidikan yang dilakukan kepada mahasiswa semuanya aduk mengaduk sehingga membatasi ruang gerak, waktu dan minat mahasiswa, oleh karena didorong pada kegiatan-kegiatan untuk nantinya memasuki lapangan kerja.

Saya kira yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu. Sejak akhir tahun 70-an mahasiswa sulit mempertahankan eksistensi politiknya di arena masyarakat. Jadi masyarakat sekarang walaupun menyadari bahwa mahasiswa itu sebagai potensi untuk membantu mereka. Tapi justru mereka kehilangan perkenalannya dengan mahasiswa. Karena sejak tahun 78 di kampus dilarang adanya aktivitas ekstra mahasiswa organisasi non kampus seperti HMI dsb. Di kampus hanya ada senat dan senat hanya bergerak di dalam, tidak ada kontak langsung dengan masyarakat. Lalu yang bergerak dengan LSM, tinggal itu saja kontaknya. Sedangkan yang grup studi juga asyik sendiri dengan mahasiswa, tidak kontak dengan masyarakat Lalu organisasi ekstra non kampus seperti HMI dsb itu asyik dengan sendirinya, protek eksistensinya lalu kerjanya adalah LDK-LDK saja. Jadi nggak kontak dengan masyarakat, to?

Menurut Anda apakah peristiwa 27 Juli merupakan muara akhir dari gerakan mahasiswa era 90 an?

Oh belum. Itu sih hanya kejutan-kejutan saja. Sekarang kan sudah mulai lagi. Saya, indikatornya begini; sebelum tanggal 27 Juli, sebelumnya saya bisa 3-4 kali ke Yogya, ada seminar ini, diskusi ini dan semacamnya, semuanya mahasiswa yang mengundang. Tapi setelah 27 Juli, sepi. Sekarang, mulai lagi, bukan ke Yogya tapi ke Bandung, seminggu bisa 2-3 kali. Pertanyaan saya apakah ada pergeseran dari Yogya ke Bandung. Dulu kan Jakarta tahun 66, lalu Bandung tahun 70an, lalu Yogya tahun 80/90an. Apakah sekarang mau mutar lagi ke sana?

Ini sepertinya saya punya '*feeling*' tentang itu. Tapi saya kira tidak merupakan akhir. Jadi tertekan, lalu balik lagi, masalah-masalah problema belum habis sih.

Perkiraan Anda, kira-kira kapan muncul kembalinya itu?

Ya... paling cepat 97/98. Sebab dalam pemilu dan sidang Umum MPR itu ada suatu 'undangan' untuk aspirasi masyarakat. Tentu mahasiswa menyadari itu, kesempatan dipakai, lalu melebar ke mana-mana. Saya kira secepatnya 97/98.

Dalam masalah strategi, tanggal 27 Juli terutama. Apakah gerakan mahasiswa itu lebih baik bermain di dalam tataran yang kecil, dalam arti, setiap ada kasus dipecahkan bersama. Atau juga bermain dalam tataran struktural?

Saya kira itu jangan dibatasi. Politik lebih baik berdasarkan keperluan dan peluang yang ada. Jadi kita perlu apa? Idealisme dulu dipajang. Pada tingkat idealisme ini ada ini, ini, ini, mana yang terbaik dari ini, itu yang diambil. Jadi saya kira, menggabungkan idealisme dengan pragmatik. Jangan sepenuhnya pragmatisme, tapi jangan sepenuhnya idealisme saja. Jadi idealisme harus ada langkah-langkah yang lebih jelas. Kombinasi itu yang kita perlukan.

Apakah Anda punya konsep gerakan mahasiswa masa depan?

Gerakan mahasiswa masa depan, gagasannya menurut saya, jelas perjuangannya menuju demokrasi. Saya katakan demokrasi menjadi tujuan, karena mahasiswa sebagai pulau intelektual dalam masyarakat harus mempelopori pengembangan daya bersaing. Dalam globalisasi kan, mekanisme pokoknya daya saing. Barang, jasa, orang pindah antar bangsa, antarnegara tidak ada hambatan. Jadi barang, jasa, orang kita harus dipersaingkan dengan barang, jasa, orang Amerika, dst. Jadi semestinya gerakan mahasiswa harus mengarah pada demokrasi, karena demokrasi yang memungkinkan persaingan itu. Daya saing tumbuh, meningkat hanya dengan demokrasi. Buktinya negara-negara komunis rontok karena tidak mampu daya saingnya ditingkatkan. Nah untuk demokrasi tentu tidak dapat diharapkan dari sumbangan atau kerelaan penguasa. Di manapun di dunia, demokrasi bukan merupakan hadiah. Itu hasil perjuangan. Oleh karena itu gerakan mahasiswa mesti punya strategi perjuangan yang jelas. Mestinya gerakan mahasiswa menjadi inti kekuatan potensial dalam masyarakat, sebab tentu menjadi bagian dari kaum intelektual yang punya rancangan yang *leadership* dalam perjuangan perubahan tapi juga mampu membangun dukungan dari akarnya, dari masyarakatnya. Juga termasuk pendidikan massa supaya berpartisipasi aktif dalam gerakan perubahan itu. Semuanya itu mengarah pada demokrasi sehingga kita dapat, di dalam bangsa kita terdapat pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia, sedangkan di antar bangsa, kita dapat berjuang secara normal untuk mempertahankan hak-hak bangsa kita dan hak-hak masyarakat

Kalau menyoal radikalisme gerakan mahasiswa, menurut Anda apa pemicunya?

Akar radikalisme tentu adanya *gap*, jarak dari apa yang diharapkan dengan realita yang disediakan masyarakat dengan negara. Lalu perjuangan-perjuangan mahasiswa untuk mendekatkan keinginan itu dengan kenyataan dihambat terus dari periode ke periode dengan berbagai cara. Mula-mula, mahasiswa tahun 70an kan, hanya ingin memperbaiki pendidikan supaya masyarakat meningkat. Bersama LSM kan begitu. Jadi gerakanya lebih kultural. Nah usaha-usaha sudah dilakukan nggak cukup juga. Nah, sekarang nggak cukup kultural, perlu struktural juga. Nah, ini mahasiswa tahun 80an, tahun 90an, strukturalnya nggak bisa diangsur-angsur, kita harus merombak secara total, nah ujungnya PRD itu.

Jadi sebenarnya, progresivitas mahasiswa itu dihambat oleh semakin konservatifnya kekuasaan dan struktur negara. Itu saya kira, yang paling basis dalam memicu tumbuhnya radikalisme.

Nah, adanya KNPI, AMPI dsb itu, bagian dari sistem konservatif yang dibangun oleh negara. Semuanya ini menjadi *barier* sehingga ini perlu dihadapi dengan usaha keras, semakin kuat niatnya, semakin keras usahanya, menjadi galaklah.

Solusi politis untuk radikalisme berarti demokrasi itu sendiri?

Ya saya kira itu. Jika tidak dipenuhi harapan-harapan dan kemajuan itu yang dicapai oleh mahasiswa itu sendiri, radikalisme itu tentunya meningkat terus.

Dalam radikalisme, tentunya ada kebaikan dan keburukan. Anda melihat di mana kebaikan dan keburukan radikalisme mahasiswa sekarang?

Keburukanya, dia bersifat konfrontatif terhadap penguasa yang konservatif. Lawan semakin keras jadinya, nggak bisa dilakukan dalam suatu perubahan atau gerak damai. Jadi kemungkinan mengadapi lawan yang semakin bersatu, semakin keras, semakin fisik pola aksinya itu, juga merupakan kelemahan saya kira.

Keuntungannya, perubahan radikal itu lebih dekat dengan idealisme. Jadi cita-cita lebih dapat direalisasikan dengan perubahan radikal. Hanya saja, perubahan radikal, meskipun tidak selalu bersifat revolusioner, bisa juga bertahap, itu banyak menyinggung, menyakiti orang karena mereka sudah merasa berjasa, dengan satu pikiran radikal dianggap pengkhianat. Misalnya sekarang dengan pikiran radikal kita bisa mengatakan DPR tidak ada gunanya padahal mereka sudah mati-matian juga. Ada yang sakit jantung juga *ngurusin* DPR itu, nah barangkali dengan gerakan radikal idealisme lebih tegas, lebih jelas, tidak kabur.❑

Khoirul Rosyadi
Mashudi, Nur Hidayati

TRI WASONO SUNU

■ Andi Arief: "Kami siap dipimpin Budiman dari dalam penjara..."

Bagaimana kondisi Anda sekarang ini, apa sudah sehat?

Secara fisik memang saya sering terganggu, tetapi tidak jadi masalah. Yang penting saya selalu sehat secara mental dan politik. Kesehatan mental dan politik di saat rezim sangat represif, adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai.

Apa kegiatan anda sehari-hari selama di 'persembunyian'?

Para pemimpin PRD saat ini mendekam dalam penjara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa agenda perjuangan menegakan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia telah mati. Pemenjaraan, penahanan dan pemberangusan dan fitnah politik terhadap PRD bukanlah jalan keluar untuk mengatasi problem rakyat Indonesia yang demikian parah di bawah Rezim Orde Baru ini. Di tengah represi dan teror putih Rezim Orde Baru yang ganas, kami akan terus bergerak walaupun harus merayap di bawah tanah. PRD akan terus berjuang bersama rakyat untuk sebuah Indonesia yang demokratik multipartai kerakyatan. Karena itu, selama bersembunyi kami tetap mengorganisir diri untuk terus melawan seperti biasanya. Perbedaannya dengan sebelum 27 Juli adalah kini kami harus lebih disiplin di saat berada dalam syarat-syarat penindasan Orde Baru seperti sekarang ini.

Bicara tentang politik, apa refleksi anda tentang peristiwa 27 Juli, PRD maupun SMID sendiri?

Sesungguhnya ketika meletus 27 Juli, kami pernah mengeluarkan *assesment* politik. Bagi kami, Peristiwa 27 Juli adalah hasil dari akumulasi dan kulminasi pertentangan yang kian menajam antara rakyat *versus* rezim Orde Baru. Kontradiksi tersebut menemukan titik ledaknya manakala tuntutan demokratisasi dan pergantian kekuasaan semakin meluas diperjuangkan oleh rakyat Indonesia pada saat-saat menjelang Pemilu 1997. Spektrum tuntutan rakyat untuk perubahan politik semakin menggelembung, meninggi dan menajam untuk membongkar dua pilar kediktatoran rezim Orde Baru; Dwifungsi ABRI dan belenggu paket 5 UU Politik. Seperti yang tersaksikan, saat-saat pra 27 Juli, perjuangan politik rakyat Indonesia mulai menemukan bentuk dan momennya, di mana tuntutan perubahan demikian meluas sehingga menyeret seluruh elemen dan sektor dalam masyarakat. Protes rakyat dalam bentuk aksi buruh, mahasiswa dan petani diimbangi juga oleh perlawanan politik yang manifes dan berwadah, seperti yang ditunjukkan lewat pendirian Partai-partai baru, KIPP, Petisi 1 Juli dan koalisi besar kelompok prodemokrasi di bawah MARI. Perkembangan perlawanan tersebut semakin lama semakin memuncak, mengimbangi penindasan rezim Orde Baru. Munculnya wadah-wadah tersebut adalah upaya rakyat untuk hari demi hari meruncingkan tombak perlawanannya ke jantung kekuasaan Orde Baru.

Dalam tegangan kontradiksi antara rakyat melawan rejim Orde Baru yang meninggi, konflik internal PDI tersebut kemudian mengundang simpati yang besar dari rakyat Indonesia yang menginginkan demokratisasi dan perubahan. Persoalan PDI bukan lagi persoalan konflik internal semata, tapi ia telah meluas dan menjadi sebuah panggung pertarungan antara kekuatan konservatif pro-rezim Orde Baru dan kekuatan massa rakyat demokratik. Sesuai dengan kerangka strategi politiknya, PRD kemudian memberikan dukungannya terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai

pemimpin PDI yang sah. PRD adalah kekuatan politik pertama non-parlementer yang memberikan dukungan tersebut. Dukungan itu diwujudkan pula secara kongkrit, melalui aksi-aksi massa aliansi PDI bersama PRD di daerah-daerah. PRD juga melakukan mobilisasi kekuatan buruh, mahasiswa dan kaum miskin kota untuk mendukung kepemimpinan Megawati serta mencabut paket 5 UU Politik. Tindakan politik ini kemudian membentang spektrum perlawanan yang meluas, dan bahkan melahirkan koalisi yang besar antar kekuatan prodemokrasi di bawah MARI.

Penajaman kontradiksi kemudian terjadi dengan sangat intens, bergelombang dan menyeret dukungan rakyat yang meluas. Pertemuan kekuatan politik parlementer dan non-parlementer ini adalah kecenderungan baru dalam masa rezim Orde Baru dan secara cepat menjadi kepalan tinju yang mengancam kekuasaan rezim Orde Baru. Sementara, secara obyektif, kondisi kemarahan massa rakyat semakin mendidih menyaksikan tingkah-polah kekuasaan yang hari demi hari semakin menjelma menjadi tirani yang memuakkan, merampas dan menindas hak-hak dasar rakyat selama lebih dari tigapuluh tahun.

Dengan latar belakang seperti itulah peristiwa 27 Juli meletus. Rezim Orde Baru berupaya mengakhirinya dengan menyerbu dan merebut markas PDI dari tangan Megawati. Dengan brutal Rezim menyerang para simpatisan Megawati yang berjaga di kantor tersebut yang menyebabkan sejumlah pembela demokrasi itu gugur. Secara politik, tindakan tersebut berupaya membuyarkan sebuah titik temu antara kekuatan parlementer dan nonparlementer yang diwadahi oleh PDI Megawati. Namun tindakan penyerbuan tersebut ternyata menjadi bumerang bagi rezim Orde Baru. Rakyat massa perkotaan kemudian mengamuk, dan mengaduk-aduk Jakarta. Puluhan gedung pemerintah dan para kapitalis besar dibakar. Puluhan orang tewas dan ratusan hilang akibat pertarungan antara aparat kekuasaan dengan Rakyat yang menentang tindakan brutal perebutan kantor tersebut.

Perlawanan 27 Juli, menjadi saksi — bahwa ternyata rakyat mampu bergerak. Perlawanan rakyat ini adalah perlawanan spontan, tanpa kendali

Apakah aktivis PRD/SMID bisa dikatakan takut dan mundur?

Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa kami yang kini di luar, di penjara besar Orde Baru meskipun sulit awalnya, tetapi kini sudah mulai terkonsolidasikan. Sikap rejim Orde Baru dalam merespon peristiwa 27 Juli yang akhirnya melakukan intimidasi dan penangkapan terhadap puluhan aktifis PRD termasuk ketua kami Budiman Sudjatmiko, merupakan tindakan reaksioner. Tindakan reaksioner dari Rezim Orde Baru tidak lagi memandang hukum sebagai piranti utama dalam menegakkan fakta dan kebenaran. Intimidasi, penyiksaan dan penangkapan terhadap aktifis PRD dan aktifis pro demokrasi lainnya merupakan pola penanggulangan ala negara yang fasistik. Pilihan dari sebagian besar aktifis PRD untuk sementara bersembunyi, hanya merupakan kerangka taktis melawan cara-cara fasis, bukan berarti takut dan kemudian mundur tidak melawan . Bagi kami semakin reaksioner rezim menangkapi dan mengintimidasi kami, maka semakin meneguhkan bahwa rezim ini harus dilawan. Ini artinya, perjuangan organisasi kami yang berazas sosial demokrasi kerakyatan yang menuju Indonesia yang demokratik dan multipartai harus tetap jalan, meski teror putih dan represi siap menghadang kami. Aktifis PRD yang di luar yang telah terkonsolidasikan berdasarkan mandat dari ketua PRD Budiman Sudjatmiko dan disetujui oleh ratusan aktifis lainnya, berhasil membentuk KPP-PRD. KPP PRD inilah yang kemudian pemegang mandat untuk melanjutkan perjuangan. Secara prinsip, kami masih tetap mengakui kepemimpinan Budiman Sudjatmiko. Kami siap dipimpin oleh Budiman dari dalam penjara. Hanya saja, aktifitas politik sehari-hari dijalankan oleh kami (KPP) yang telah mendapat mandat dari dalam. Mandat yang kami terima adalah yang menyangkut tugas, aktifitas dan keputusan baik secara politik, organisasi dan ideologi. Keputusan secara organisasi, politik dan ideologi ini mengacu pada hasil kongres PRD yang sudah kami publikasikan secara luas lewat deklarasi 22 Juli, termasuk manifesto politiknya.

INTIMIDASI DAN PENANGKAPAN TERHADAP PULUHAN AKTIFIS PRD TERMASUK KETUA KAMI BUDIMAN SUDJATMIKO, MERUPAKAN TINDAKAN REAKSIONER

Ngomong-ngomong tentang PRD/ SMID, apa sebenarnya landasan ideologi dan cita-cita politiknya?

Di dalam manifesto yang kami sebarluaskan waktu deklarasi 22 Juli saya kira cukup jelas. Cita-cita politiknya adalah terbentuknya sistem DEMOKRASI MULTI-PARTAI KERAKYATAN DI BAWAH PIMPINAN KOALISI DEMOKRATIK KERAKYATAN di bawah AZAS SOSIALISME DEMOKRASI KERAKYATAN. Untuk mencapai ini tentu saja harus dibimbing oleh landasan ideologi yang terwujud dalam program ideologi, organisasi, dan politik. Tanpa dibimbing ini, cita-cita hanya tinggal cerita, bahkan perjuangan gampang tergelincir dalam oportunisme dan avonturisme. Perjuangan harus berideologi. Ideologi sebagai pembimbing gerakan, lahir dan tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan dalam merespon perkembangan masyarakat di tingkat objektif.

Program ideologi, program politik dan program organisasi, karenanya, merupakan penjabaran/ akomodasi/ pengelompokan titik-titik kontradiksi perjuangan rakyat dalam program perjuangan demokrasi sejati, mewujudkan pemerintahan demokrasi di bawah kedaulatan rakyat. Dengan demikian basis programnya adalah karena sejarah memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa diparalelkan dengan masyarakat Rusia, Cina, Amerika Latin, Filipina dan Eropa pada

masa-masa revolusinya, karena, dilihat dari cara produksi masyarakatnya, masyarakat Indonesia sekarang tidak memberikan relevansi lagi terhadap problem kontradiksi antara kaum tani dan kaum feodal ---sebab besar kaum tani telah menjadi pemilik-pemilik petak-petak tanah kecil — walaupun, memang, dilihat dari problem politiknya, di dalam masyarakat Indonesia masih terdapat sisa-sisa feodal, yang belum dituntaskan hingga ke tahap masyarakat-sipil.

Potensi bahaya ideologis yang paling dekat adalah kesadaran palsu rakyat untuk secara sukarela menerima kekuasaan kaum penghisap/penindas. Dengan demikian, ideologi penting bagi rakyat agar rakyat bisa membebaskan diri dari kesadaran palsu mereka, untuk kemudian meraih kesadaran kerakyatannya sebagai pemandu bagi aksi-aksinya yang bertentangan kepentingan dengan kaum penghisap/penindas beserta alat-alat politiknya. Dengan kesadaran kerakyatannya maka rakyat akan melihat posisi obyektifnya sebagai unsur yang mengemban misi sejarah yang harus merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan. Dalam masyarakat Indonesia, senyatanya, telah terbukti, rakyat lah yang telah secara obyektif memiliki kemampuan (baca: potensi) berkesadaran sejati untuk memimpin perubahan demokratik. Program politik merupakan penetapan sasaran tindakan beserta strategi/taktiknya yang harus dicapai dan dikerjakan rakyat, sehingga gerbang bagi arah kemilau —*high road*— perjuangan menuju masyarakat yang demokratik secara ekonomi, politik dan budaya bisa dijadikan kenyataan. Perjuangan politik massa rakyat diupayakan dan tidak bisa ditawar lagi harus dapat mendirikan negara koalisi demokratik kerakyatan, menggantikan negara penghisap/penindasan, dengan segala aparat kekerasannya (tentara, pengadilan dan penjara). Pun demikian dengan program politik ini, rakyat dapat mengenali kelompok-kelompok mana dalam masyarakat kapitalis yang mengalami penghisapan dan penindasan. Dari situlah, rakyat dapat mengenali kelompok-kelompok mana —yang secara ekonomi-politik— nyata memiliki kepentingan akan perubahan demokratik, sehingga bisa menjadi sekutu-sekutu yang harus dirangkul dalam setiap tahapan perjuangan rakyat yang dilaluinya. Program organisasi merupakan program mendesak untuk segera dilaksanakan. Dalam sejarah partisan oposisi terhadap rezim Orde Baru, kelemahannya adalah ketidaksanggupan mempersiapkan organisasi partai radikal-militan; yang sanggup terus menerus menohok kekuasaan dalam kesatuan pemahaman, kesatuan aksi, dan kesatuan komando. Kesanggupan inilah yang akan menyebabkan organisasi partisan dapat menjadi oposisi masa depan. Satu-satunya alat perjuangan rakyat dalam perjuangan demokratik adalah partai rakyat demokratik.

M. NURDIANTO

Demostrasi mahasiswa
Berjuang untuk rakyat?

Menurut anda, apa untung ruginya radikalisme gerakan politik?

Sulit untuk mengkalkulasinya, karena ia berjalan secara dialektis. Karena itu, radikalisme diuji lewat hasil politiknya. Sejarah sudah memberi referensi bahwa gerakan politik radikal cukup signifikan membuka ruang demokrasi yang ditutup rapat-rapat oleh rezim otoriter. Nah, Kalau kita bicara radikalisme rakyat yang dipelopori kaum terpelajar, mahasiswa progresif maka fakta-fakta menunjukkan bahwa beberapa hasil politik telah dihasilkannya: *Pertama*, sentimen kerakyatan kini telah lebih populer, atau bermakna kembali di tengah-tengah massa. Kini telah lebih banyak orang dengan lebih mudah dan mencoba lebih mendalam berbicara soal rakyat bahkan rezim Orde Baru pun kini lebih giat berdemagogi kerakyatan. Kata rakyat dan atmosfir kerakyatan mulai beraroma. *Kedua*, baik langsung maupun tidak langsung, tingkat agitasi dan propaganda mulai melebar ke segala sektor masyarakat. Yang terpenting, rakyat kini mulai lebih sadar akan bobroknya rezim orde baru dan mendambakan alternatif yang lain — inilah yang disebut kekosongan, kevakuman, ideologi yang harus diisi dengan segera oleh pergerakan. *Ketiga*, tingkat mobilisasi, pengerahan massa dalam tingkat tertentu sudah tidak bisa dikendalikan oleh rezim orde baru. Aksi massa, baik yang diorganisir maupun tidak mulai banyak dilancarkan oleh berbagai sektor masyarakat. *Ke-empat*, tingkat militansi dan radikalisasi massa mulai meningkat. Berbagai tindakan penindasan oleh rezim Orde Baru terhadap pergerakan tidak dapat menghentikan gerak maju, peningkatan isi dan cara tuntutan massa. *Kelima*, pembentukan organisasi massa tandingan (alternatif) dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh rezim Orde Baru.

Bagaimana anda memandang gerakan politik mahasiswa kita saat kini?

Gerakan politik mahasiswa terutama di era 90-an, memberi kontribusi besar terhadap munculnya gerakan kerakyatan —yang dalam beberapa ukuran mampu mendesakkan reformasi politik, meski reformasi itu sekedar dipinjamkan oleh penguasa Orde Baru—. Tetapi yang terpenting, gerakan politik mahasiswa saat ini sudah mampu keluar dari sektornya sendiri, tidak sektarian sektor. Tidak lagi berjuang untuk otonomi kampus,

masa-masa revolusinya, karena, dilihat dari cara produksi masyarakatnya, masyarakat Indonesia sekarang tidak memberikan relevansi lagi terhadap problem kontradiksi antara kaum tani dan kaum feodal ---sebab besar kaum tani telah menjadi pemilik-pemilik petak-petak tanah kecil — walaupun, memang, dilihat dari problem politiknya, di dalam masyarakat Indonesia masih terdapat sisa-sisa feodal, yang belum dituntaskan hingga ke tahap masyarakat-sipil.

Potensi bahaya ideologis yang paling dekat adalah kesadaran palsu rakyat untuk secara sukarela menerima kekuasaan kaum penghisap/penindas. Dengan demikian, ideologi penting bagi rakyat agar rakyat bisa membebaskan diri dari kesadaran palsu mereka, untuk kemudian meraih kesadaran kerakyatannya sebagai pemandu bagi aksi-aksinya yang bertentangan kepentingan dengan kaum penghisap/penindas beserta alat-alat politiknya. Dengan kesadaran kerakyatannya maka rakyat akan melihat posisi obyektifnya sebagai unsur yang mengemban misi sejarah yang harus merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan. Dalam masyarakat Indonesia, senyatanya, telah terbukti, rakyat lah yang telah secara obyektif memiliki kemampuan (baca: potensi) berkesadaran sejati untuk memimpin perubahan demokratik. Program politik merupakan penetapan sasaran tindakan beserta strategi/taktiknya yang harus dicapai dan dikerjakan rakyat, sehingga gerbang bagi arah kemilau —*high road*— perjuangan menuju masyarakat yang demokratik secara ekonomi, politik dan budaya bisa dijadikan kenyataan. Perjuangan politik massa rakyat diupayakan dan tidak bisa ditawar lagi harus dapat mendirikan negara koalisi demokratik kerakyatan, menggantikan negara penghisap/penindasan, dengan segala aparat kekerasannya (tentara, pengadilan dan penjara). Pun demikian dengan program politik ini, rakyat dapat mengenali kelompok-kelompok mana dalam masyarakat kapitalis yang mengalami penghisapan dan penindasan. Dari situlah, rakyat dapat mengenali kelompok-kelompok mana —yang secara ekonomi-politik— nyata memiliki kepentingan akan perubahan demokratik, sehingga bisa menjadi sekutu-sekutu yang harus dirangkul dalam setiap tahapan perjuangan rakyat yang dilaluinya. Program organisasi merupakan program mendesak untuk segera dilaksanakan. Dalam sejarah partisan oposisi terhadap rezim Orde Baru, kelemahannya adalah ketidaksanggupan mempersiapkan organisasi partai radikal-militan; yang sanggup terus menerus menohok kekuasaan dalam kesatuan pemahaman, kesatuan aksi, dan kesatuan komando. Kesanggupan inilah yang akan menyebabkan organisasi partisan dapat menjadi oposisi masa depan. Satu-satunya alat perjuangan rakyat dalam perjuangan demokratik adalah partai rakyat demokratik.

M. NURDIANTO

Demostrasi mahasiswa
Berjuang untuk rakyat?

Menurut anda, apa untung ruginya radikalisme gerakan politik?

Sulit untuk mengkalkulasinya, karena ia berjalan secara dialektis. Karena itu, radikalisme diuji lewat hasil politiknya. Sejarah sudah memberi referensi bahwa gerakan politik radikal cukup signifikan membuka ruang demokrasi yang ditutup rapat-rapat oleh rezim otoriter. Nah, Kalau kita bicara radikalisme rakyat yang dipelopori kaum terpelajar, mahasiswa progresif maka fakta-fakta menunjukkan bahwa beberapa hasil politik telah dihasilkannya: *Pertama*, sentimen kerakyatan kini telah lebih populer, atau bermakna kembali di tengah-tengah massa. Kini telah lebih banyak orang dengan lebih mudah dan mencoba lebih mendalam berbicara soal rakyat bahkan rezim Orde Baru pun kini lebih giat berdemagogi kerakyatan. Kata rakyat dan atmosfir kerakyatan mulai beraroma. *Kedua*, baik langsung maupun tidak langsung, tingkat agitasi dan propaganda mulai melebar ke segala sektor masyarakat. Yang terpenting, rakyat kini mulai lebih sadar akan bobroknya rezim orde baru dan mendambakan alternatif yang lain — inilah yang disebut kekosongan, kevakuman, ideologi yang harus diisi dengan segera oleh pergerakan. *Ketiga*, tingkat mobilisasi, pengerahan massa dalam tingkat tertentu sudah tidak bisa dikendalikan oleh rezim orde baru. Aksi massa, baik yang diorganisir maupun tidak mulai banyak dilancarkan oleh berbagai sektor masyarakat. *Ke-empat*, tingkat militansi dan radikalisasi massa mulai meningkat. Berbagai tindakan penindasan oleh rezim Orde Baru terhadap pergerakan tidak dapat menghentikan gerak maju, peningkatan isi dan cara tuntutan massa. *Kelima*, pembentukan organisasi massa tandingan (alternatif) dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh rezim Orde Baru.

Bagaimana anda memandang gerakan politik mahasiswa kita saat kini?

Gerakan politik mahasiswa terutama di era 90-an, memberi kontribusi besar terhadap munculnya gerakan kerakyatan —yang dalam beberapa ukuran mampu mendesakkan reformasi politik, meski reformasi itu sekedar dipinjamkan oleh penguasa Orde Baru—. Tetapi yang terpenting, gerakan politik mahasiswa saat ini sudah mampu keluar dari sektornya sendiri, tidak sektarian sektor. Tidak lagi berjuang untuk otonomi kampus,

organisasi mahasiswa independen (*student right*) atau kesejahteraan mahasiswa (*student welfare*) saja. Perspektif munculnya gerakan mahasiswa kerakyatan berawal di sini. Di tingkat kampanye, persoalan ekonomi politik yang melilit rakyat mampu direkam dengan baik oleh kaum terpelajar. Kemampuan mahasiswa memperkenalkan alat-alat politik modern —seperti organisasi, aksi massa, selebaran dll— kepada rakyat seperti buruh, petani dll, menjadi cukup signifikan bagi terbentuknya gerakan rakyat. Kemampuan, ketepatan gerakan mahasiswa memilih sekutu demokrasinya kepada rakyat dan bukan mencantol ke elite seperti pendahulu-pendahulunya, baik ditingkat kampanye maupun aksi-aksi kongkret, adalah nilai lebih gerakan mahasiswa.

Apakah anda percaya gerakan mahasiswa Indonesia mampu mengadakan perubahan politik?

Kenyataan historis menunjukkan bahwa perubahan sejati atau demokrasi sejati tidak pernah dilakukan oleh mahasiswa. Perubahan sejati hanya dapat diraih dengan kekuatan rakyat. Namun bukan berarti gerakan mahasiswa tidak menjadi penting. Di berbagai negara, secara historis justru terbentuknya kekuatan rakyat dipelopori oleh kaum terpelajar, intelektual atau mahasiswa. Terbukti, semenjak akhir 80-an dan awal 90-an, mahasiswa telah menjadi pelopor dalam perlawanan politik menentang kekuasan rezim Orde Baru. Kemampuan mereka dalam ideologi, organisasi dan politik merupakan sumbangan yang penting bagi gerakan demokrasi. Penumpulan dan petualangan gerakan mahasiswa, hanya bisa dikurangi bila terintegrasi dalam gerakan rakyat atau demokrasi secara keseluruhan.

Dalam manifesto partai, mahasiswa merupakan prioritas kedua untuk terciptanya gerakan rakyat. Prioritas pertama adalah buruh. perlawanan kaum buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Jumlahnya yang semakin besar, kesetiaan perlawanannya, dan makna strategisnya bagi perekonomian kapitalisme Orde Baru akan membuat buruh dapat menjadi benteng demokrasi di masa kini dan masa depan. Kekuatan ketiga yang terbukti yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota. Jumlah mereka yang besar dan tersingkir akibat daya tarik kota dan pembangunan yang pincang antara kota-daerah menjadikan sektor ini menjadi penyangga basis masa di kota. Dalam aksi-aksi mendukung Megawati, terlihat bagaimana sektor ini secara militan dan fanatik membela hak-hak mereka; Dan sektor terakhir yang juga penting adalah sumbangan perlawanan kaum tani. Kapitalisme brutal yang terjadi telah memiskinkan dan membuat petani kehilangan tanah sebagai alat produksinya. Tidak mengherankan bila sektor ini, yang jumlahnya tersebar dipelosok Indonesia akan menjadi kekuatan pendukung yang penting dalam gerakan demokrasi.

Apa otokritik anda terhadap gerakan politik mahasiswa era 90-an ini?

Otokritik saya terhadap gerakan mahasiswa era 90-an ini adalah adanya kecenderungan — idealis-romantis-penyedih — dalam memandang polarisasi, seolah-olah polarisasi dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, harus diakui bahwa polarisasi merupakan konsekwensi ideologi, garis politik dan reorganisasian pergerakan. Polarisasi jelas menghasilkan unsur positif (unsur maju) dan unsur negatif (unsur konservatif dan reaksioner), itu pasti. Jadi, menangisi polarisasi, menangisi perpisahan, sama halnya dengan menangisi perginya unsur konservatif dan reaksioner. Atau mungkin takut, rendah diri, akan reaksi unsur konservatif dan reaksioner. Aktivis boleh datang, boleh pergi akan tetapi perjuangan harus terus maju secara kualitatif.❑

Prabowo

KETEPATAN GERAKAN MAHASISWA MEMILIH SEKUTU DEMOKRASINYA KEPADA RAKYAT DAN BUKAN MENCANTOL KE ELITE SEPERTI PENDAHULU-PENDAHULUNYA, BAIK DITINGKAT KAMPANYE MAUPUN AKSI-AKSI KONGKRET, ADALAH NILAI LEBIH GERAKAN MAHASISWA.

Sartono Kartodirdjo:

"Manifesto Politik Pemuda Banyak Dilupakan"

Anda bisa cerita tentang Manifesto Politik Pemuda, sebagai dokumen penting pergerakan mahasiswa pra-kemerdekaan?

Manifesto politik ini terjadi pada tahun 1925, dimuat dalam majalah *Perhimpoenan Indonesia* yang diselenggarakan di Nederland, tepatnya di Universitas Leiden. Tempat para pemimpin nasional kita belajar.

Dalam Manifesto Politik ini dirumuskan dasar-dasar nasionalisme Indonesia. Mereka membuat analisa politik kolonial secara mendalam. Isinya, butir pertama, sewajarnya Indonesia diperintah oleh orang-orang yang dipilih dari rakyat sendiri, dan dari kalangan sendiri. Ini implisit sekali sebagai penegakan kedaulatan rakyat. Ya, tentu saja ini menuju kemerdekaan dan demokrasi. Butir kedua, dalam memperjuangkan itu, Bangsa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari pihak manapun. Ini masalah otonomi. Swadaya suatu bangsa. Jadi tidak menggantungkan pihak manapun. Butir ketiga, dalam perjuangan itu sebagai unsur-unsur perlu bersatu untuk mencapai cita-cita bersama. Persatuan dan kesatuan, itu *conditio sie quanon*, persyaratan mutlak menuju kemerdekaan dan nasionalisme.

Saya kira Manifestasi Politik ini sangat penting bagi pergerakan nasional sampai tahun 1945. Yang lebih mendasar dari Sumpah Pemuda 1928 itu sendiri.

Arti penting lain manifestasi politik dalam perspektif sejarah?

Oh, ya, ini sebelum lupa. Dengan konsep manifestasi politik itu dimulai modernisasi kebudayaan politik kita. Sebelumnya kita tidak mengenal, yang ada hanya feodalisme kerajaan. Maka ini menjadi awal modernisasi kebudayaan politik Indonesia. Memberi pola hidup politik yang berbeda dari sebelumnya.

Para Tokoh di balik manifestasi politik itu sendiri siapa saja?

Antara lain M. Hatta, Ali Sastroamijoyo, Budiman, Sunaryo, kemudian Widagdo. Tapi ada contoh yang lebih penting bagi generasi mahasiswa sekarang. Ketika mereka pulang dari Universitas Leiden, para tokoh mahasiswa di balik manifestasi politik itu tidak tinggal diam. Inspirasi mereka direalisasikan. Caranya, ya menjadi pemimpin pergerakan nasional dengan hidup penuh kesulitan, dari penjara ke penjara. Mereka tidak melakukan terobosan untuk hidup enak dengan membantu kolonial.

TRI WASONO SUNU

Ideologi gerakan politik kaum nasionalis itu sendiri pada waktu itu apa?

Bicara masalah ideologi, saya kembalikan ke butir ketiga, yaitu tentang persatuan menuju nasionalisme. Suatu kondisi yang menjamin kesejahteraan *nation-state*. Ya, persatuanlah prasyaratnya. Sebab apa, karena dengan persatuan kita dihadapkan pada politik kolonialisme yang juga memakai konsep yang ingin memecah belah dengan negara federal, mengungkit-ungkit lagi kesultanan. Ya, dalam hal ini persatuan menjadi senjata ampuh untuk melawan politik kolonial tersebut.

Sebagai ideologi ini kita sebut ideologi utilitarianisme, untuk menghadapi feodalisme, separatisme, kolonialisme.

Menurut Anda apa nasionalisme saat ini masih relevan?

Saya menentang pada generasi muda yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak relevan lagi. Nasionalisme itu belum sempurna. Perlu dikonsolidasikan lagi ...Untuk menghadapi globalisasi yang dahsyat ini nasionalisme perlu kita pulihkan. *Masak* kita terus menyerah saja.

Terakhir, apa pandangan Anda terhadap gerakan mahasiswa sekarang?

Kalau *policy* pemerintah saya tidak tahu. Tapi gejala-gejala ini saya lihat penyaluran idealisme itu tidak bisa di hambat. Saya sebagai pengamat, dengan kemajuan pembangunan ini, mau tidak mau di kota atau di desa, pengetahuan dan informasi semakin lengkap. Orang mulai berpikir secara kritis. Jadi ini konsekwensi yang harus kita pikirkan. Bagaimana membuat penyaluran yang baik dan tidak merusak-rusak saja.

Saya sering juga mendengar kalau mahasiswa sekarang apatis, tidak punya wajah. Itu tidak. Buktinya mahasiswa mulai hidup idealisme dan pemikirannya. ❑

Prabowo
B. Nursanti RR

CIKAPUNDUNG, EUY!

Kota Bandung dan sungai Cikapundung adalah dua sejoli yang tidak terpisahkan. Bahwa dalam sejarah, setiap pertumbuhan kota selalu di sebelah sungai ... sungai dianggap sebagai titik awal pertumbuhan kota.

Begitu juga dengan Bandung. Dulu Bandung tumbuh dari sebuah mata air yang dikenal orang sebagai "Pangguyangan Badak Putih" alias tempat berkubangnya Badak Putih. Tempat dari mana sungai Cikapundung itu mengalir, pada masanya pernah terpilih sebagai lokasi didirikannya tempat tinggal sekaligus pusat pemerintahan Bupati Bandung kala itu. Mula-mulanya Pusat Pemerintahan itu bergerak dari Kampung Cikalintu (Cipaganti), ke Babakan Bogor (Kebon Kawung), sampai ke sisi sungai Cikapundung, atau tepatnya di Alun-alun Bandung.

Alun-alun Bandung yang letaknya tepat di sebelah barat Sungai Cikapundung ini dekat sekali dengan sebuah sumber mata air. Namanya "Sumur Bandung", lokasinya sekarang adalah di bawah gedung PLN, sedangkan yang dimaksud dengan Sumur Bandung itu sendiri adalah sumur Babandungan alias sumur sepasang. Konon di mata air berair bening ini bersemayam seorang puteri cantik penguasa alam halus Bandung.

Warna air Cikapundung yang sekarang coklat, keruh dan penuh limbah kotor, dulunya adalah pemenuh hajat kebutuhan air bersih warga Bandung. Sebelum pemasangan instalasi air minum di Bandung tahun 1916, sebagian penduduk kota Bandung mandi dan mencuci pakaian di Cikapundung ... kalau sekarang sih siapa yang berani.

BANDUNG, EUY!

Begitulah, RASEFM adalah radionya Bandung yang peduli sama Bandungnya. Peduli sama kelestarian bangunan peninggalan Bandung *Parijs Van Java*-nya, peduli pada keindahan lingkungannya, dan peduli pada aktivitas kreatif orang-orangnya ...

KEEP BANDUNG BEAUTIFUL, EUY! 102,3 RASEFM BANDUNG, EUY!

BDG EUY!

102,3
RASEFM
BANDUNG

102,3 RASEFM, EUY!

Membongkar Platform Gerakan Mahasiswa

Antara Struktural dan Kultural

Quo Vadis gerakan mahasiswa? Demikian kiranya pertanyaan yang menggelisahkan kaum aktivis saat ini. Di forum-forum diskusi mahasiswa, gerakan mahasiswa kembali diperbincangkan, ketika di luar forum demonstrasi menjadi aktifitas yang "agak menakutkan".
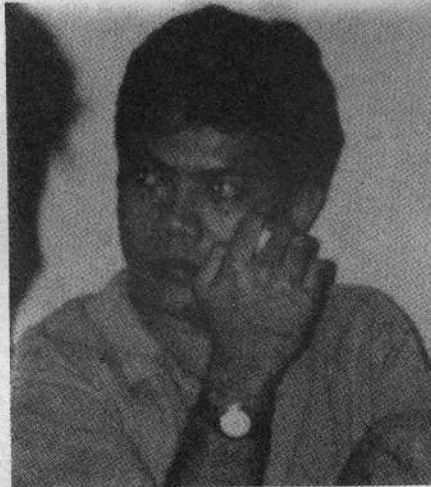
Di tengah-tengah reses kekuasaan yang semakin buruk dan akut, di belahan negara mana pun, baik dunia kelas tiga atau kelas satu, tak pelak akan dikibarkan bendera-bendera perlawanan. Dan siapa berani bilang gerakan politik mahasiswa di Indonesia telah tiarap dan mati? Justru pada saat rezim republik ini kian hari semakin turun drastis derajat kesehatannya? De-regimentasi terjadi di mana-mana; kerusuhan rakyat pecah di berbagai wilayah dan kekerasan politik; menjadi lambang ketimpangan sosial dan demokrasi "seolah-olah".

Semenjak peristiwa kekerasan politik yang menimpa PDI dan kekuatan pro-demokrasi Indonesia Sabtu pagi 27 Juli 1996 tempo lalu, ada spekulasi pendapat yang menyatakan bahwa gerakan politik mahasiswa mengalami *knock out*. Di berbagai kota memang banyak aktivis gerakan mahasiswa yang ditangkap.

AGUNG ARIF BUDIMAN

Drs. Aris Arif Mundayat

Seiring dengan pembersihan kampus di sana-sini, yang ternyata tidak cuma isapan jempol, karena kekuatan mahasiswa dijadikan tumbal kekerasan politik negara.

Sangat disayangkan memang peristiwa "*accident of democracy*" tersebut. Meskipun banyak hikmah bisa dipetik. Setidaknya menjadi pembelajaran berharga bagi pendidikan politik rakyat juga untuk kekuatan gerakan mahasiswa (baca: pedagogi politik gerakan). Padahal di sekitar era 90-an inilah gerakan politik mahasiswa marak dan baru menemukan keintimannya dalam mengadvokasi rakyat bawah sebagai upaya penegakan hak kedaulatan rakyat. Suatu penegasan barangkali harus dilakukan, bahwa politik mahasiswa adalah bermakna *student movement*, gerakan perubah politik secara riil, ketimbang *student protest*, sebagai sekumpulan massa yang berteriak di jalan-jalan menuntut perubahan.

Akan tetapi mengevaluasi gerakan mahasiswa, tradisi yang mencoba mendiskursuskan rancang-bangun strategis gerakan, tetaplah selalu dibutuhkan. Pertanyaan besar: Quo Vadis Gerakan Mahasiswa Indonesia? Agaknya menuntut penjabaran yang lebih menukik untuk dipasok di lajur-lajur, baik dalam konteks ide maupun praksis gerakan mahasiswa. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam kesempatan temu wicara BALAIRUNG edisi 25 hal ini coba diperbincangkan. Hadir dalam kesempatan ini **Drs. Aris Arif Mundayat** (dosen Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Sastra UGM), **Zul Amrozi** (Ketua SMID Yogyakarta), **M. Lutfhi** (aktifis Kelompok Mahasiswa Pecinta Demokrasi) KMPD Yogyakarta dan **Wisnu Agung** (aktivis gerakan mahasiswa Universitas Atmajaya). Temu wicara ini dipandu oleh **Hary Prabowo**.

Merancang Agenda Perlawanan: kultural atau Struktural?

Agenda perjuangan demokratisasi memang harus dihidupkan. Namun bagaimana melakukan perlawanan terhadap rezim yang represif? Ini bukan masalah gampang. Sebagai evaluasi, agaknya SMID-PRD menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Zul Amrozi, ketua SMID Yogyakarta, mempunyai catatan terhadap induk organisasinya tersebut. Bahwa mengupayakan seluruh kekuatan dan mengatasnamakan sebuah kekuatan yang dilabeli partai adalah pilihan tergesa-gesa. Memang keinginan yang mengebu-gebu yang mencoba menggunakan partai sebagai sandaran politik, sebagai kritik, boleh dikatakan sangat coba-coba (*gambling*).

Untuk itu, lanjut mahasiswa Jurusan Sastra Asia Barat Fakultas Sastra UGM ini, "Perlu sebuah kondisi di mana kita bisa menghitung kesiapan kita untuk

muncul secara terbuka dalam bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang represif. Perhitungan taktis memang menuntut analisa matang. Namun yang lebih penting lagi adalah persatuan semua unsur perlawanan demi satu agenda perubahan."

Menurut Ojik, panggilan akrab Zul Amrozi, aliansi ini tak bisa dihindari dan akan ada. Hanya sekarang persoalannya ketika belum banyak kekuatan yang muncul adalah persoalan menyusun kembali langkah yang ada, juga menyangkut metodologi gerakan politik.

Menindaklanjuti sodoran pemikiran ini, transformasi penyadaran politik secara nasional agaknya menjadi relevan. Sebagai paradigma pengguliran ide demokratisasi secara merata. Paling tidak ini diyakini oleh M. Lutfi. Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga ini berpendapat, gerakan mahasiswa tidak perlu *set-back* tahun 80-an dengan kelompok-kelompok diskusinya. Sebab terlalu menghabiskan energi. Apa yang perlu disepakati adalah gerakan mahasiswa itu gerakan perubahan. Gerakan bersama rakyat. Dan yang dibutuhkan adalah paradigma transformasi yang akan mensosialisasikan kesadaran politik mahasiswa ke dalam segmen masyarakat secara luas. Dalam paradigma baru, lanjutnya, buruh dan tani bukan lagi kekuatan tunggal perubahan sistem. Namun juga nelayan, pedagang kaki lima, dan semua lapisan masyarakat. Semua harus diorganisir sebagai kekuatan perubah.

Tetapi dalam pengorganisasian perubahan, apakah gerakan mahasiswa harus selalu beraliansi dengan rakyat? Wisnu Agung menjawabnya tidak. Kegelisahan gerakan mahasiswa pasca 27 Juli, menurut mahasiswa Komunikasi Atmajaya ini, memang memunculkan kebutuhan-kebutuhan riil yang salah satunya adalah aliansi dengan kekuatan rakyat. Tapi untuk saat ini kebutuhan itu sudah hilang. Meredefinisikan gerakan massa, aliansi dengan rakyat bukanlah gerakan yang kuat untuk perubahan struktur di Indonesia. Pengalaman politik selama Orde Baru ini bisa menjadi bukti. "Artinya, kalau mau aliansi tidak sama dengan rakyat, *dong*. Melainkan elite politik. Militer, misalnya." Ia memberikan penjelasan, "Apalagi kalau kekuatan mahasiswa hanya memiliki ideologi secukupnya, ya kita mencukupkan demokrasi sampai di sini saja," tandasnya.

Menilik bangunan politik Orde Baru, secara struktural maupun kultural, memang suatu kasus berbeda dari negara semi demokrasi lainnya. Berbagai cangkokan teori perubahan, meminjam negara mana pun seringkali macet bila diterapkan di sini. Kekuatan pro demokrasi seolah berhadapan dengan kekuasaan yang kelewat alot.

Yul Amrozi

Mencoba melakukan pendekatan perubahan secara lain, Aris Arif Mundayat, tokoh senior gerakan politik yang pemikirannya cukup konseptual ini, lebih suka menawarkan gerakan kultural ketimbang struktural sebagai pilihan gerakan mahasiswa. "Yaitu gerakan yang coba mempersiapkan infrastruktur budaya yang lebih demokratis, itu jalur yang akan lebih taktis ketimbang hanya masuk pada struktur yang nanti justru akan berbenturan secara keras," ujarnya memberi argumentasi.

Bila kita belajar pada kasus 27 Juli, berkaitan dengan SMID-PRD, dengan membuat organisasi payung dari dulu Aris juga tidak sepakat. Kehancuran total adalah konsekwensi logis bila suatu organisasi payung ini dihantam. Padalah untuk membangunnya lagi memakan waktu yang tak singkat. Pilihan-pilihan gerakan strategis-taktis, memang membutuhkan persiapan yang sangat matang. Tidak bisa dilakukan secara gegabah.

Melihat ketimpangan gerakan demokrasi di Indonesia, menurutnya, ketika gerakan mahasiswa bungkam dan sangat ketakutan, gerakan pengacara justru menguat secara hebat. Ini fenomena riil. Kita bisa melihat tim pembelanya PDI atau PRD. Mereka sangat *concern* pada gerakan mereka di sektor hukum. "Nah, dulu pernah saya tekankan kenapa kawan-kawan tidak mencoba mengusik isu hukum secara terus-menerus, kemudian beraliansi dengan massa rakyat yang secara langsung lebih banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan hukum ini. Baik tukang becak, petani, buruh, kaki lima, mereka selalu pada posisi terkalahkan secara hukum."

Dalam kata lain, Aris mencoba menawarkan bagian infrastruktur budaya di tingkat hukum harus digarap. Proses penyadaran hukum agar rakyat tidak bisa dimainkan secara hukum dengan terus-menerus. Ini titik intensif yang harus dimasuki. Dalam hal ini gerakan mahasiswa bisa beraliansi dengan LBH sebagai lembaga yang juga independen. Papar Aris Mundayat.

... GERAKAN MAHASISWA TIDAK PERLU *SET-BACK* TAHUN 80-AN DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK DISKUSINYA. SEBAB TERLALU MENGHABISKAN ENERGI.

"Saya mempunyai asumsi seperti ini, bahwa negara kita hegemonik. Dan melalui basis kultural mampu masuk. Oleh karena itu harus kita hadapi dengan *counter-hegemonik* pada tingkat kultural pula, dan itu mesti secara berlahan. Karena negara kita juga telah membangun secara berlahan, kemudian masuk dan sudah terlanjur menjadi kuat. Untuk itu kita mesti mencopoti satu persatu, mendemistifikasi dengan memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif terhadap *counter* tersebut. Oleh karena itu basis kultural penting, tanpa harus menjadikan gerakan mahasiswa menghegemoni formasi baru itu di kemudian hari.

Pilihan kerja-kerja kultural sebagai

framework gerakan mahasiswa, boleh jadi menjadi tawaran menarik. Minimal untuk mengeliminir gerakan radikal-progresif yang oleh Aris dikatakan hanya menyemai kekerasan di mana-mana. Kasus Tiananmen bisa mewakili sejarah radikalisasi ini. Moderat-progresif, adakah ini memang watak dari gerakan kultural yang efektif?

Format gerakan kultural agaknya tak segampang yang dibayangkan Aris. Dalam realisasinya ternyata mengandung kompleksitas tersendiri. Ini diakui oleh Wisnu Agung. "Teman-teman di Atmajaya juga melakukan kerja kultural, misalnya mengajar bimbingan di SMA. Tapi tidak sesederhana itu. Ketika harus berangkat mengajar di SMA, siapa yang mengajar, kriteria dan seleksinya juga ada, itu kadangkala mengikat secara hukum. Artinya, ruang-ruang yang coba kita bangun ini sebenarnya sudah terisi penuh oleh negara," keluhnya mengungkap keberatan.

Juga Agus Subhan, seorang partisipan diskusi memberi tanggapan murung. Bahwa gerakan kultural tak menjamin rampungnya hegemoni di Indonesia. "Pada UU Militer, misalnya, militer bisa saja menyediakan juga untuk menghadapi strategi kultural yang coba kita gunakan. Mereka akan membuat strategi yang kemungkinannya lebih solid, karena militer itu sendiri jelas lebih solid dari kita. Nah, kalau mereka juga melakukan seperti ini, sampai kapan keberhasilan kita?" Gugat Agus pesimistik.

Melawan Militerisme

Di negara kelas tiga, militerisme memang satu gejala buruk yang mewabah. Alat kekuasaan ini beserta senjata beratnya bisa dengan mudah mengatakan "siap tembak!" pada kekuatan pro-demokrasi. Semua dilakoni demi tugasnya; penjaga status quo yang baik.

Memperbincangkan militerisme riil di Indonesia, tak lain dari persoalan pencengkeraman doktrin Dwi Fungsi ABRI. Dan satu topik penting dalam gerakan mahasiswa era 90-an juga menuntut penghapusan doktrin tersebut. Dari kasus Marsinah, kerusuhan Ujung Pandang, 27 Juli sampai kasus Udin; militer agaknya selalu terkait di dalamnya, menjadi ganjalan tersendiri bagi proses akselerasi transformasi di Indonesia dari otoriter ke demokratik.

Namun menyoal masalah pengangkatan tema-tema strategis, Aris Mundayat banyak mengkritik cara-cara SMID yang terlalu frontal terhadap Dwifungsi ABRI. "Dia nampaknya secara bertubi-tubi menyerang Dwifungsi terus-menerus. Akibatnya, mereka gampang dihabisi. Kalau mau melakukan langkah yang strategis, ketika berhadapan dengan ABRI, memang perlu mengusik Dwifungsi. Tetapi tidak dilobi secara langsung. Melainkan cukup diperbincangkan secara terus menerus. Sehingga orang sadar bahwa pada titik tertentu Dwifungsi menjadi riskan secara politis."

> ... BAHWA NEGARA KITA HEGEMONIK. DAN MELALUI BASIS KULTURAL MAMPU MASUK. OLEH KARENA ITU HARUS KITA HADAPI DENGAN *COUNTER* HEGEMONIK PADA TINGKAT KULTURAL PULA ...

AGUNG ARIF BUDIMAN

M. Lutfhi

Lebih analitis Aris Mundayat mengungkapkan. Pada kasus 27 Juli merupakan refleksi dari konflik internal militer yang tajam. Namun juga bisa diantisipasi dengan isu Dwifungsinya, ABRI bisa kembali solid. Dan ini tidak terjadi di negara-negara seperti Filipina atau Amerika Latin. Kalau di Amerika Latin terjadi konflik di internal militer, ada yang bisa berkoalisi dengan kekuatan politik luar, secara langsung militer bisa pecah. Juga di Filipina. Ketika terjadi konflik, ada yang berkoalisi dengan gereja. Sedang di Indonesia tidak. Ada satu bangunan yang berbeda dan bangunan itu bernama Dwifungsi. Artinya dia tidak bisa dilawan secara frontal. Tapi lebih bisa dikalahkan secara strategis. Demistifikasi nilai-niai otoritarian itu perlu digodok di tingkat umum. Apalagi sekarang mau ada UU wajib militer. Itu artinya sebuah arena untuk masuknya militer ke tempat-tempat kultural. Jadi yang kita demistifikasi bukan dalam konteks pertahanan negara. Tapi yang terpenting, jangan sampai itu menjadi tempat berkembangbiaknya ide militerisme. Karena kalau militerisme berkembang, basis otoritarianisme juga berkembang. Nah, itu yang kita *counter* terus-menerus.

Membaca Peta kemungkinan Kekuatan Aliansi

Kanal perintang penyemaian kekuatan demokrasi di Indonesia selain militerisme adalah demografi. Ini bukannya mengada-ada. Tapi ruang Indonesia memang lumayan besar dibanding Filipina atau Korea Selatan sekalipun. Indonesia pulaunya ribuan, bertapal-tapal dan dipisahkan laut dan samudra. Sungguh sebuah sirkuit yang tak ramping, sehingga cukup repot dan penuh tanjakan untuk membangun kekuatan aliansi secara holistik.

Karena 'gemuknya' Indonesia ini pula, kemudian menguncupkan bunga-bunga pergerakan di mana-mana. Sebuah diaspora kekuatan yang menjamur di setiap pulau, setiap kota, setiap kampus. Taruhlah di Yogyakarta sendiri. Di kota ini hampir semua kelompok dan ideologi ada. Tapi tak pernah bisa bersatu-padu dalam satu barisan, meskipun bila disensus cukup banyak kubu-kubu yang lebih suka eksis dengan benderanya masing-masing. Juga gerakan mahasiswa di Bandung yang

kondang mempertahankan basis kotanya. Cukup sulit anasir kekuatan luar yang mencoba "*break*" Bandung, untuk membuka cabang atau afiliasi. Pendeknya, semua ingin eksis dan otonom.

M. Lutfhi menganalisa fenomena ini sebagai suatu formasi gerakan yang masih diatur berdasar potensi kekuatan feodal. "Dulu ada KSKPO yang menangani masalah Kedung Ombo, kemudian ada Marsinah. Tapi justru di sana kebutuhan aliansi dapat dipenuhi. Misalnya di Yogya ada FKMY, di Semarang FKMM, di Surabaya FKMS. Semua bermunculan dengan garis politik yang senada."

Lebih lanjut Lutfhi menuturkan bahwa memang sangat susah melakukan sentralisme aliansi demokrasi. Sesuatu yang belum kita pikirkan adalah kebutuhan aliansi taktis macam apa? Perebutan diskursus antarkelompok agaknya masih terjadi seiring dengan pluralisasi permasalahan di berbagai wilayah. Sehingga masih menyulitkan terjadinya aliansi taktis. Padahal gerakan mahasiswa sekarang bermunculan di mana-mana, di Kediri, Madura, Tulung Agung dan sebagainya.

Domestifikasi permasalahan dan garis kepentingan politik antarkelompok, meskipun ada kesan senada namun tetap ada titik-koma pemaknaan yang berbeda. Ini pula yang membedakan gerakan politik mahasiswa di Indonesia dengan di Korea Selatan. "Kalau SMID sama-sama meneriakkan hidup buruh, tapi ada penafsiran buruh yang berbeda di antara kita. Sentimen kerakyatan itu ada di mana-mana, tapi tidak pada wacana," kata Wisnu Agung yang juga aktif di KMPD ini.

Masalah ego kelompok gerakan di Indonesia memang tergolong cukup tinggi. Sehingga sulit untuk melahirkan satu pemimpin tunggal yang menjadi komando perlawanan dari semua lini. Di sini memang satu masalah besar. Kendala dari kebhinekaan kelompok gerakan. Sementara dalam spektrum besar, momen-momen perlawanan selalu gagal menyatukan gerakan mahasiswa. Tak adanya mekanisme penggembosan ego, jelas telah meletakkan gerakan mahasiswa dalam konflik-konflik tanpa akhir. Perang klaim akan selalu terjadi, seiring dengan menguatnya sentimen antarkelompok. Berkaca pada realitas ini patutlah kita berefleksi, adakah ini suatu dinamika yang khas gerakan mahasiswa ataukah melambangkan ketidakdewasaan yang terlalu ingin mengedepankan ego kelompok? Bila

Temu wicara di kantor redaksi

jawaban terakhir dari pertanyaan di atas benar, sebagai konsekuensinya adalah: kemustahilan akan adanya aliansi gerakan mahasiswa dalam skala besar. Dus, dinamika-sporadis tetap akan menjadi warna utama gerakan mahasiswa Indonesia.

Sedangkan kemungkinan menjalin aliansi dengan kelompok LSM sendiri, Aris Mundayat berpendapat, problemnya di Indonesia adalah persoalan institusi. Institusionalisasi LSM itu sendiri saya kira sering menjebak mereka terspesialisasi. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak melakukan perubahan yang riil betul. Sedangkan mahasiswa yang tidak dibebani keinstitusionalan, saya kira sebenarnya lebih enak bekerja sama dengan LSM. Cuma sekarang ada keengganan karena LSM seolah-olah cuma cari *duit* saja. Ini tidak bisa dipungkiri. Suara mahasiswa mengatakan seperti itu. Itu coba kita hilangkan dan mulai bekerja bareng. Sebab toh mereka juga mempunyai pemikiran sama. Hanya persoalannya kemudian terbentur pada masalah institusi.

Mendiskusikan kemungkinan aliansi gerakan mahasiswa di Indonesia sungguh tidak gampang. Sesulit mengadakan perubuhan terhadap wacana kekuasaan yang mengungkunginya. Faktor politis-ideologis, setidaknya menjadi determinan-determinan yang menyulitkan persatuan. Perbedaan visi pandang terhadap isu-isu perubahan, jelas juga akan membedakan pemaknaan terhadap anasir perubahan itu sendiri. Dalam kata simpul; bolehlah kita punya tujuan sama, namun ada banyak trotoar menuju Roma.

Menjawab satu pertanyaan utama; quo vadis gerakan mahasiswa Indonesia? Pada akhirnya memang harus kembali pada masing-masing mahasiswa, ideologi grakan mahasiswa, dan cita-cita mahasiswa. Ada banyak pelajaran dari pertautan-pertautan dengan pergulatan politiknya secara kongkrit. Ada

KALAU SMID SAMA-SAMA MENERIAKKAN HIDUP BURUH, TAPI ADA PENAFSIRAN BURUH YANG BERBEDA DI ANTARA KITA

kesalahan-kelasahan di masa lalu. Juga monumen-monumen kecil lambang kemenangan perjuangan mahasiswa. Atau *headline-headline* surat kabar yang luput terbaca. Namun setidaknya, menakar kekuatan gerakan mahasiswa dari wilayah pergumulannya sendiri, menjadi penilaian yang relatif obyektif. Sebagai pusat landas menuju perubahan yang diidealkan bersama. Sebuah idealisme itu sendiri bukankah nyala api yang tak boleh padam? Selama keadilan dan kedaulatan rakyat masih 'indekos' di atas langit. ***

Prabowo

transkip oleh *M.A. Fitrianto*

Perlawanan Tak Pernah Mati
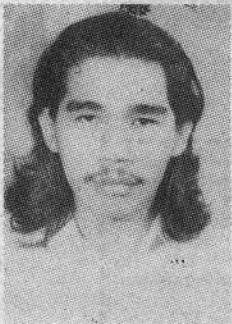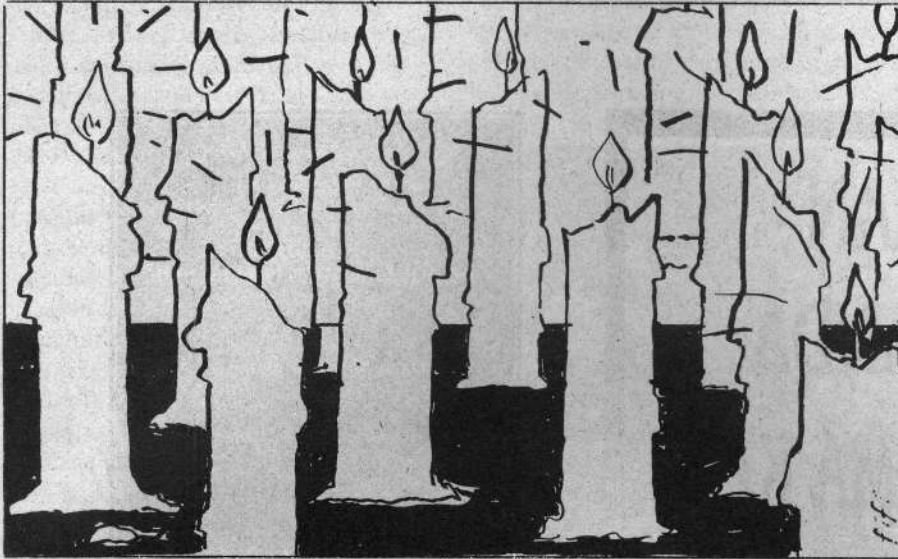
Edy Haryadi

Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM angkatan 1990

Pergerakan akan maju jika tidak ditindas,
Pergerakan juga akan maju jika ditindas, di sinilah tragisnya nasib para penindas.
(Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi I)

Banyak orang bingung di dalam situasi sekarang. Mau bergerak, atmosfer untuk itu, dirasa semakin sempit menghimpit. Situasi sekarang, memang dirasa tak sama seperti sebelum tanggal 27 Juli (1996-red).

Lalu ungkapan frustasi, pesimisme, begitu kerap muncul dalam diskusi-diskusi informal maupun formal. Yang kemudian merembet menjadi saling tuding-menuding kesalahan. Salah satu tudingan yang serius ialah, bahwa penyebab mandegnya gerakan, lebih dikarenakan oleh ulah Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan *underbow*nya, seperti Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID), Jaringan Kesenian Rakyat (JAKER), Serikat Tani Nasional (STN), dan Pusat Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI). Mereka tak cukup divonis oleh penguasa, tetapi, yang menyedihkan lagi, mereka juga dihukum oleh rekan-rekan sesama para aktivis pro-demokrasi.

PRD dituding terlalu cepat mengambil konfrontasi dengan rezim, dan tidak taktis. Sehingga kemudian pada akhirnya, 'terpaksa' memukul seluruh gerakan yang ada di Indonesia. Baik itu yang dilakukan oleh PRD, maupun oleh kelompok pro-demokrasi lainnya. Mereka lupa, bahwa ada atau tidaknya PRD, mereka memang akan dibabat habis. Itu sesuai dengan skenario untuk mempermulus Pemilu 1997, demi *status quo* rezim yang sekarang sedang berkuasa.

Itu adalah metode *shock therapy* jitu dari rezim penguasa, untuk membungkam gerakan demokratisasi. Dan berhasil membuat para aktivis terkaget-kaget, setengah tidak percaya.

Para aktivis, sesungguhnya tidak perlu kaget, dan bisa belajar dari sejarah pergerakan pada tahun 1920-an. Ketika itu, pergerakan amat maju berkembang.

Namun, ketika gerakan semakin massif dan radikal, pemerintah Belanda mulai kelabakan. Radikalisasi massa aksi, terasa semakin mengancam *status quo* kekuasaan. Maka, seperti halnya hukum Newtonian: ada aksi, pasti ada reaksi.

Pemerintah Belanda kemudian bergerak cepat, organisasi dan partai-partai politik radikal kemudian dibubarkan. Pemimpinnnya ditangkapi, dan dibuang ke Tanah Merah, Banda, dan daerah-daerah terpencil lainnya. Pengucilan ini dimaksudkan agar gerakan dapat terhenti; seperti yang dituturkan oleh Takeshi Shirashi, dalam disertasi doktoralnya di Ithaca University, dengan judul *an Age of Motion*.

Lalu, apakah gerakan menjadi mandeg ketika para pemimpin dan organisasi seperti *Insulinde, Indische Partij*, dilarang? Tidak sama sekali. Pengorbanan para martir tersebut, sesungguhnya memberi pelajaran secara kualitatif kepada massa rakyat, dan menyadarkan massa rakyat tentang pentingnya arti aksi dan organisasi. Mereka faham, bahwa penguasa tidak pernah takut pada pribadi, seperti Suwardi Suryaningrat, atau Dr. Soetomo, maupun Semaoen. Yang mereka takutkan adalah organisasi.

Penjajah sadar, bahwa mereka akan bisa bertahan lama untuk menindas jika mereka terorganisir. Mereka juga maklum penindasan yang terorganisir, akan melemah

ketika dihadapi lewat pergerakan yang terorganisir dalam sebuah organisasi.

Terbukti kemudian, pergerakan tetap maju, meski dalam situasi yang mengekang. Hingga kemudian Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya.

Kalau kita mau secara jernih melihat peristiwa 27 Juli, terlihat ada dua aspek yang melekat, aspek positif dan negatif. Benar bahwa ada aspek negatif yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Aksi-aksi massa, untuk sementara, selalu diberantas habis. Bahkan sebuah aksi yang terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah, seperti aksi di Gelanggang Mahasiswa UGM beberapa waktu lalu, juga turut di*gebug*.

Namun, yang harus dipahami, pada sisi positif, telah terjadi peningkatan kesadaran secara kualitatif. Antara lain semakin tumbuh berkembangnya tentang kesadaran melakukan aksi. Aksi bukan lagi sesuatu yang "wah", dan menjadi sesuatu yang hanya dikenal oleh mahasiswa. Ibu-ibu rumah tangga, sampai anak SMA, juga sudah dapat melakukan aksi.

Dan amat menyesatkan, ketika setelah peristiwa "Sabtu kelabu", tidak ada lagi aksi-aksi yang muncul. Massa PDI Megawati, tetap melakukan aksi di merata tempat. Baik di Jawa Tengah, maupun di Jakarta. Begitu juga pemogokan buruh tetap berlangsung. Baik yang dilakukan oleh buruh manufaktur maupun buruh transportasi. Dengan kata lain, ada atau tidaknya peristiwa 27 Juli, perlawanan tetap muncul.

Hanya masalahnya sekarang adalah persoalan organisasi. Ini bisa dilihat, bahwa seseorang seperti Sri Bintang Pamungkas, yang jauh lebih radikal dalam tindakannya, dan terkadang menyerang secara langsung pribadi pemimpin Rezim ini, tetap dibiarkan menghirup udara segar. PRD telah mengajarkan betapa sebuah organisasi, ternyata jauh lebih ditakuti oleh penguasa, ketimbang seorang Bintang.

Lewat *onderbouw*-nya seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), telah muncul sebuah gejala baru. Di mana organisasi pergerakan, tidak sebatas ada di Jawa. Tetapi menyebar di luar Jawa. Dengan model seperti ini, aksi-aksi kemudian dapat dikoordinasi secara baik.

Aksi dengan satu isu, tidak lagi muncul hanya di Yogya, tapi bisa serentak di Bandung, Jakarta, Ujung Pandang, Palu, maupun Manado sekaligus, dalam jam dan hari yang sama. Kesatuan tindakan menjadi mungkin, ketika koordinasi berjalan dengan baik. Seperti slogan mereka: *"Satu komando, satu Tindakan: Satu Komando untuk Satu Tindakan. Satu Tindakan, Satu Perubahan : Satu Tindakan untuk Satu Perubahan".*

Satu-satunya kesalahan yang terjadi pada PRD sekarang hanyalah PRD terlalu cepat dipukul. Kurang dari dua tahun, PRD lewat *onderbouw*-nya seperti SMID, mengembang dengan cepat. Sehingga SMID telah masuk daftar no. 1 dari Bakorstanas untuk *digebug*, jauh sebelum peristiwa 27 Juli meletus.

Artinya, metode PRD, sudah tepat. Ketepatan strategi PRD sendiri, diam-diam diakui oleh Rezim penguasa, dengan memukul dan memfitnahnya sebagai dalang kerusuhan 27 Juli. Sekalipun kemudian tudingan itu tidak terbukti serta tidak tercantum di dalam dakwaan bagi aktivis PRD.

Kalau saja PRD tidak memiliki potensi yang besar dalam melakukan perubahan, tentunya reaksi Rezim tidak akan seperti sekarang ini. Artinya, di balik sikap Rezim, kita bisa membaca, bahwa yang ditakutkan oleh Rezim adalah organisasi yang memiliki visi, dan kemampuan untuk berkembang secara cepat. Dan baru pada kasus PRD-lah, tidak hanya para aktivisnya ditangkapi, tetapi juga organisasinya dilarang. Kita lihat, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), meskipun Mochtar Pakpahan dibui, tetap saja organisasi itu bisa berjalan terus.

Maka tak perlu ada rasa pesimis. Perubahan bisa diperlambat, tetapi tidak bisa dihambat. Ditindas ataupun tidak, sebuah gerakan akan tetap maju hingga Rezim penindas tumbang. Di sinilah tragis rangkap duanya rezim penindas.❑

ISTIMEWA

Suharko

Staf pengajar Jurusan Sosiologi Fisip UGM

■ Gerakan Mahasiswa Tahun 90-an

Kasus SMID Yogyakarta

PERKEMBANGAN politik menjelang Pemilu tahun 1997 mendatang, agaknya telah menimbulkan respon tersendiri dari kalangan aktivis gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Seperti biasa, para aktivis yang tergabung dalam berbagai kelompok atau faksi baik secara spontan maupun terorganisir menunjukkkan sikap politiknya terhadap sejumlah isu-isu politik dengan menggelar berbagai aksi demonstrasi.

Dari pengamatan langsung dan pemberitaan di surat kabar, sejak bulan April menjelang akhir Juli 1996, setidaknya terdapat empat isu politik yang telah mendapat respon dari gerakan mahasiswa Yogya, juga kota lainnya, yakni kasus demonstrasi Berdarah Ujung Pandang, pendirian Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP), kaburnya Edy Tansil dan perpecahan di tubuh PDI. Pendirian KIPP mendapat respon langsung dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Yogyakarta dalam aksi demonstrasi pada tanggal 24 April 1996 (*Kedaulatan Rakyat* dan *Jawa Pos*, 25 April 1996).

Peristiwa demonstrasi berdarah yang menimbukan sejumlah korban tewas di Ujung Pandang mendapatkan respon dari sejumlah kelompok aksi, yakni SMID, Germakan (Gerakan Mahasiswa Anti Kekerasan), Tetasjuang majuyo (Komite Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Ujung Pandang di Yogyakarta), Fordema (Forum Demokrasi Mahasiswa UMY), dan lain-lain.

Aksi mahasiswa merespon perpecahan dan konflik berkepanjangan di tubuh PDI dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Front Penyelamat Demokrasi Indonesia (FRPDI) dan SMID-PRD cabang Yogyakarta. Kelompok aksi yang terakhir ini bekerja sama dengan kelompok PDI pro Megawati dan menanamakan diri gerakan Pendukung Megawati (GPM). Dari sejumlah penampakan aksi gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh berbagai kelompok aksi mahasiswa tersebut, terdapat gejala menarik, yakni berkaitan dengan aksi yang dilakukan SMID. Gejala menarik tersebut adalah:

M. NURDIANTO

SMID Yogyakarta bentrok dengan aparat militer

Berbendera merah dan radikal

Pertama, dalam setiap aksi demonstrasi, SMID lebih sering tampil sendirian, dalam arti tidak bergabung dengan kelompok-kelompok aksi dari berbagai perguruan tinggi di Yogya. SMID secara konsisten membawa "bendera"-nya sendiri. Ini yang membedakan dengan kelompok aksi lain yang selalu mengubah-ubah namanya dalam merespon suatu isu politik, seperti Fordema, GMMY, "Tetasjuangmajuyo, "FRPDI, Gemakan,"Tegak Grak", dan lain-lain. Gabungan-gabungan kelompok aksi tersebut hanya dibentuk secara momental dan terkesan reaktif untuk merespon satu isu politik tertentu saja dan setelah itu membubarkan diri.

Kedua, SMID dalam setiap aksinya tidak pernah mengatas-namakan dirinya mewakili mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu. Mereka tidak mau mengklaim diri mewakili mahasiswa perguruan tinggi tertentu, meskipun aktivitasnya tersebar di berbagai kampus di Yogyakarta.

Ketiga, meskipun SMID lebih sering tampil sendirian, setiap aksi yang mereka lakukan mampu melibatkan massa yang cukup besar. Ini menandakan bahwa anggota dan simpatisannya cukup besar pula.

Penampakan gejala-gejala tersebut memunculkan pertanyaan berikut: *Siapakah SMID sebenarnya? Bagaimanakah format, watak, dan orientasi politik apa yang mereka perjuangkan?*

SMID sebagai Organisasi Massa

Agak sulit untuk menjejaki kembali sejarah lahirnya SMID. Tapi barangkali kita bisa beranjak dari munculnya kelompok aktivis mahasiswa yang menyebut dirinya 'Tegaklima' (Komite Penegak Hak-hak Mahasiswa). Tegaklima terdiri dari aktivis Senat (SMF dan SMPT) dan pers mahasiswa. Kelompok ini memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang seringkali diabaikan universitas dan kurang mendapat perhatian dari senator (SMPT). Tegaklima lebih menfokuskan aksi-aksi pada isu sekitar kampus, seperti tuntutan otonomi kampus, penolakan intervensi militer ke kampus, kenaikan SPP, dan lain-lain. Apa yang ingin ditujukan oleh kelompok ini adalah bahwa SMPT belum mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mahasiswa.

SMID ADALAH ORGANISASI MASSA SEKTOR MAHASISWA YANG SEJAJAR DENGAN HMI,GMNI, DAN LAIN-LAIN

Para aktivis Tegaklima selanjutnya mempelopori pendirian Dema (Dewan Mahasiswa) yang dimaksudkan sebagai organisasi "tandingan" SMPT. Tegaklima kemudian di "likuidasi" untuk menghindari dualisme kepemimpinan antara Tegaklima dan Dema. Perjuangan Tegaklima diambil alih oleh Dema, yakni menciptakan format organisasi mahasiswa yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan mahasiswa. Hingga kini, Dema masih terus bergulat dengan tuntutan tersebut dan berdiri sebagai organisasi "tandingan" bagi SMPT.

Sejumlah aktivis Tegaklima bersama-sama dengan kelompok mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogya yang sehaluan mendirikan SMY (Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta). SMY merupakan bentuk penggalangan massa mahasiswa dalam merespon isu-isu politik pada waktu itu. Meskipun SMY mengalami perpecahan, terutama di kampus UGM dan UII, ia mampu membuat jaringan dengan kelompok mahasiswa sehaluan politik dari berbagai kota, yakni IMS (Ikatan Mahasiswa Solo), SMST (Solidaritas Mahasiswa Salatiga), SMS (Solidaritas Mahasiswa Semarang, dan SMJ (Solidaritas Mahasiswa Jakarta).

MENURUT SEORANG AKTIVIS SMID ASAS SOSIAL DEMOKRASI KERAKYATAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI *POPULAR-DEMOCRATIC SOCIALISM*, SEBUAH TERMINOLOGI IDEOLOGI YANG DIKEMBANGKAN OLEH GERAKAN-GERAKAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN

Kelima organisasi mahasiswa tersebut kemudian membentuk "Koordinasi Nasional" yang sesungguhnya merupakan embrio dari SMID. Mereka mengadakan konggres di Jakarta pada 1 Mei 1994. Kongres menyepakati untuk membentuk organisasi massa (Ormas), meskipun masih merasa gamang jika harus mencakup level nasional. Kegamangan ini agaknya tidak berlangsung lama. Setelah kelompok mahasiswa Surabaya dan Manado bergabung, maka deklarasi pendirian SMID pun terjadi melalui Kongres Luar Biasa pada tanggal 1-2 Agustus 1994 di Jakarta.Deklarasi yang dibacakan ketua SMID, Munif Loredo, secara tegas mengatakan bahwa SMID adalah organisasi massa sektor mahasiswa yang sejajar dengan HMI,GMNI, dan lain-lain.Deklarasi tersebut diumumkan di kantor YLBHI Jakarata dan dihadiri sejumlah tokoh politik seperti Adnan Buyung Nasution, H.C.J. Princen, Mulyana W. Kusuma dan tokoh-tokoh pro-demokrasi lainnya.

SMID cabang Yogyakarta, dapat dikatakan berdiri pada tanggal yang sama. Dalam hal ini, SMID Yogya boleh dikatakan merupakan salah satu perintis dari pendirian SMID pada level nasional.

Dalam perkembangan kemudian SMID bergabung dan menjadi organisasi *underbow* PRD. PRD pada awalnya, atau ketika masih merupakan kepanjangan Persatuan Rakyat Demokratik dan diketuai Sugeng Bahagijo belum mengklaim diri sebagai partai. Namun, setelah terjadi perubahan menjadi partai, yang diikuti pula oleh pergantian ketuanya, yakni Budiman Sujatmiko pada tanggal 15 April 1996, PRD secara tegas mengklaim diri sebagai partai politik. Para aktivis PRD di bawah Budiman Sujatmiko ini pada umumnya adalah aktivis SMID. Ketika PRD menyatakan diri sebagai partai politik, SMID menyatakan diri bergabung dan menjadi organisasi *underbouw* PRD.

Organisasi SMID

SMID cabang Yogyakarta memiliki lima komisariat di lima perguruan tinggi di Yogya, yakni komisariat UGM, Universitas Sanata Darma (USD), Universitas Cokroaminoto, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Masing-masing komisariat dipimpin oleh seorang ketua.

Aktivis SMID Yogya terbagi ke dalam tiga departemen. Yang pertama departemen pendidikan dan propaganda (DPP). DPP memiliki tugas melakukan pendidikan, training dan kursus (politik) bagi anggota, dan menerbitkan media informasi secara teratur sebagai sarana propaganda. Yang kedua adalah departemen pengembangan organisasi(DPO). DPO bertugas antara lain mempersiapkan proses pembentukan organisasi di tingkat cabang dan komisariat, dan bersama DPP melakukan program ekspansi. Departemen ketiga adalah departemen dana dan usaha(DDU) yang bertugas antara lain: mengkoordinasikan kerja-kerja penggalian dana, mengawasi dan mengatur alokasi dana, melakukan pencarian, pengelolaan dan pendistribusian dana, mengumpulkan iuran dari anggota, dan meyimpan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang kerja organisasi.

SMID cabang biasanya hanya memilki tiga departemen di atas. SMID pusat, di samping kelengkapan organisasi di atas, juga memiliki seorang sekjen dan Departemen Hubungan Internasional (DHI). Ini menandakan bahwa SMID berupaya membangun jaringan kerja dengan berbagai organisasi sehaluan di luar negeri. Tugas departemen ini antara lain adalah (sebagai tersebut dalam ART-nya) memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas internasional anti imperialisme.

Organ tertinggi di tingkat cabang adalah konferensi

cabang yang diadakan setahun sekali. Konferensi ini biasanya dihadiri oleh semua pengurus cabang, wakil-wakil komisariat dan utusan dari pengurus pusat SMID. Melalui forum ini hasil-hasil kongres SMID dan keputusan SMID pusat disosialisasikan. Forum ini juga meminta pertanggung jawaban pengurus cabang.

Sedangkan organ tertinggi di tingkat pusat adalah kongres yang diadakan dua tahun sekali. Kongres ini dihadiri oleh seluruh wakil cabang SMID. Kongres ini pula yang memilih ketua pusat dan sekjen SMID. Kongres ini dapat dikatakan wahana penggodokan seluruh strategi perjuangan politik SMID. Kongres bertugas menganalisis situasi nasional, membuat garis besar program politik, menetapkan strategi dan taktik (stratak), dan membuat resolusi-resolusi politik. Dalam kondisi yang mendesak, Kongres Luar Biasa (KLB) dimungkinkan dengan syarat diusulkan oleh 1/2 +1 cabang.

Organ pengambil keputusan pada level kedua disebut dengan Dewan Nasional yang dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Dewan Nasional ini memiliki tugas hampir sama dengan kongres. Dewan nasioanal biasanya sangat penting dalam situasi yang mendesak. Dalam situasi ini, Dewan Nasional berhak membuat keputusan yang belum dibuat oleh kongres.

Satu hal yang menonjol dari mekanisme pengambilan keputusan adalah adanya institusi instruksi (politik) dari SMID pusat yang harus dilakukan oleh semua cabang dan juga komisariat. Instruksi ini memang tidak dibuat begitu saja oleh para pengurus di tingkat pusat. Aspirasi dan rekomendasi dari cabang-cabang biasanya direkam dan diproses ke dalam keputusan yang berbentuk instruksi tersebut. Gaya pengambilan keputusan ini disebut dengan Sentralisme Demokratis, yakni pengambilan keputusan tertinggi di pusat setelah sebelumnya memperhatikan aspirasi dari bawah. Aspirasi dari bawah ini biasanya berwujud "laporan kota" yang berisikan perkembangan politik di daerah dan harus dikirim sebulan sekali secara teratur oleh ketua cabang ke ketua pusat Jakarta.

Orientasi politik SMID

Anggaran dasar SMID dengan tegas menyatakan bahwa organisasi berasaskan "sosial demokrasi kerakyatan" (sama halnya dengan asas organisasi PRD). Sebenarnya tidak jelas betul apa yang dimaksud dengan asas tersebut. Menurut seorang aktivis SMID asas sosial demokrasi kerakyatan merupaka terjemahan dari *popular-democratic socialism*, sebuah terminologi ideologi yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan sosial di negara-negara Amerika Latin yang berhasil memaksa turun penguasa-penguasa militer yang otoriter, seperti Brazil, Chile dan lain-lain. Negara-negara Amerika Latin kini dicirikan oleh penguasa sipil dengan sistem multi partai. Sistem politik inilah yang agaknya dicita-citakan oleh SMID.

Cita-cita tersebut dengan gamblang dapat dilihat dari tujuan SMID yang tertuang dalam anggaran dasarnya, yakni mendukung perwujudan masyarakat demokratis multi partai kerakyatan. Karena itu, strategi perjuangan SMID berkisar pada gerakan perlawanan terhadap rezim otoriter, dan memperjuangkan hak-hak sipil dan kepentingan kelompok masyarakat yang tertindas, seperti buruh dan petani, serta mengkampanyekan sistem pendidikan yang murah dan berorientasi kerakyatan.

Dalam kerangka tujuan dan stratategi tersebut, SMID bersama-sama dengan organisai *underbouw* PRD yang lain yakni, PPBI, Jaker dan STN secara intensif menggalang massa rakyat yang besar dan tertindas, yakni buruh, mahasiswa, seniman dan petani. Untuk saat ini massa buruh merupakan prioritas utama yang tengah mereka mobilisasi. Alasannya adalah karena jumlah buruh yang sangat besar, militansi mereka dan ketertindasan mereka yang amat kentara, seperti tampak dari upah buruh yang rendah. Sedangkan prioritas kedua dan ketiga adalah mahasiswa dan petani.

Pilihan ideologi ini dan strategi perjuangan tersebut, selanjutnya mendasari isu-isu politik yang mereka tuntut dan perjuangkan. Dalam bahasa khas SMID, isu-isu politik itu mereka rumuskan menjadi slogan perjuangan, yakni:

Satu perlawanan satu perubahan, upah Rp 7000, turunkan harga, partai baru, presiden baru, referendum bagi rakyat Maubere (Timor Timur-red).

Tujuh isu politik yang tertuang dalam tujuh slogan itulah yang menjadi muara dari seluruh aktivitas politik SMID. Pada bagian berikut kita akan melihat bagaimana isu-isu politik tersebut diperjuangkan oleh SMID Yogyakarta.

Aksi-aksi poltik SMID Yogya

Selama kurun waktu lima bulan terakhir, menjelang peristiwa 27 Juli, SMID Yogya melakukan serangkaian aksi poltik. Setidaknya terdapat tiga kategori isu politik yag mereka respon, yakni pendirian KIPP (berkaitan dengan partai baru dan presiden baru).

Isu politik pertama yang mereka respon adalah pendirian KIPP di Jakarta pada bulan April 1996. Menurut pernyataan para pendirinya KIPP adaah gerakan moral untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya Luber tapi juga Jurdil. Pendirian KIPP ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, SMID secara tegas mendukung ide KIPP. Bahkan ketua SMID pusat, masuk dalam pengurus teras KIPP.

Respon SMID Yogya yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi pada tanggal 24 April 1996. Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa melakukan aksi dengan mengitari kampus UGM sambil membawa poster-poster beruliskan kritik. Poster-poster itu antara lain: *Awasi Pemilu curang; Pemilu untuk rakyat, katakan tidak pada golongan yang curang; dan tiada Pemilu jurdil tanpa pengawasan.*

Mereka berkeliling dengan menyanyi dan sesekali meneriakkan yel-yel *hidup demokrasi, hidup rakyat.* Di depan fakultas yang mereka lewati iring-iringan itu berhenti sebentar dan satu atau dua orang dari mereka bicara lantang mengenai isu-isu politik yang berkaitan dengan KIPP. Mereka mengecam berbagai tindakan aparat keamanan yang menghambat gerak KIPP, seperti acara pembubaran acara diskusi KIPP di Surabaya dan di Solo, dan pembakaran gedung LBH Medan. Di depan Fakultas ISIPOL UGM, mereka berhenti cukup lama, seorang mahasiswi nampak membacakan puisi yang intinya menentang tindak sewenang-wenang dari aparat keamanan.

Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan sikap politik SMID yang menentang semua bentuk hambatan dan larangan terhadap aktivitas KIPP. Ketua SMID Yogya menyatakan bahwa: *Tidak akan pernah ada Pemilu yang*

jujur dan adil tanpa pengawasan rakyat, dan tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa perubahan sistem politik. Kita harus bahu membahu mendukung sepenuhnya kemunculan KIPP di Indonesia. Pendirian KIPP bertujuan untuk menyelamatkan Pemilu dari kecurangan-kecurangan".

Isu politik berikutnya yang dapat respon cukup radikal dan luas adalah kasus demonstrasi mahasiswa berdarah yang menimbulkan sejumlah korban tewas di Ujung Pandang. Dalam kasus politik ini SMID beberapa kali menggelar aksi demonstrasi. Aksi solidaritas Ujung Pandang ini agaknya merupakan aksi terbesar dan berantai yang dilakukan oleh SMID Yogya selama ini.

Aksi pertama terhadap kasus ini adalah mimbar bebas pada tanggal 26 April di Boulevard UGM. Mereka mengecam tindakan keras aparat keamanan yang menyebabkan sedikitnya 10 mahasiswa meninggal. Aksi mimbar bebas ini berlangsung kira-kira satu jam. Secara bergantian mereka maju ke mimbar dan meneriakkan kecaman mereka terhadap tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi di Ujung Pandang. Mereka menuntut agar bersikap lebih persuasif dan bersahabat terhadap mahasiswa.

Aksi yang kedua digelar pada 14 Mei 1996 di Bulaksumur. Mereka mengadakan mimbar bebas yang diberi nama Rapat Umum Mahasiswa Indonesia. Dalam aksi ini mereka kembali meneriakkan kecaman terhadap perlakuan keamanan terhadap demonstrasi mahasiswa di Ujung Pandang. Aksi ini juga diwarnai dengan bentrokan dengan aparat keamanan, ketika mereka berupaya berjalan menuju ke DPRD dan terhalang oleh pagar betis yang dibuat oleh petugas polisi. Karena kuat dan rapatnya pagar betis, mereka gagal menuju ke DPRD.

Sekalipun hanya dihadiri puluhan mahasiswa, aksi ini telah mengundang perhatian banyak orang yang kebetulan lewat di dekat Bunderan UGM. Terlihat puluhan pelajar SMU yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti bimbingan belajar menjelang UMPTN singgah dan menonton acara aksi unjuk rasa ini.

Dalam aksi ini slogan *Awasi Pemilu, Partai Baru dan Presiden Baru*, berulang kali diteriakkan pada massa. Slogan tersebut agaknya secara sengaja dipilih, karena momentumnya dianggap tepat. Tidak mengherankan jika reaksi dari pihak aparat keamanan cukup keras, sehingga menimbulkan bentrokan fisik. Aksi solidaritas ini ternyata mengimbas ke aksi-aksi di kota lain yang juga di warnai dengan bentrokan dengan aparat keamanan.

Yang terakhir adalah isu yang pada akhir Juli 1996 meletup menjadi aksi kekerasan di Jakarta, yakni perpecahan yang tidak kunjung mereda di tubuh PDI. Dalam kasus ini SMID cabang Yogyakarta mendukung kubu PDI pimpinan Megawati. Dukungan SMID terhadap kubu Megawati, sebenarnya menyimpang dari salah satu slogan SMID, yakni *partai baru*. Kemungkinan terjadinya perubahan politik sebagai hasil perjuangan politik kubu Mega nampaknya merupakan alasan dukungan SMID.

Dalam aksi-aksinya, SMID dengan para pendukung Megawati menamakan diri mereka dengan Gerakan Pendukung Mega (GPM). Aksi poltik mereka antara lain adalah menggelar lesehan politik di kantor DPD PDI Yogyakarta pada 17 Juli 1996. Lesehan politik ini merupakan bagian dari kegiatan pra kondisi untuk melakukan aksi demonstrasi besar yang nampaknya akan dilakukan. Aksi ini diikuti oleh para pendukung Megawati dan sejumlah aktivis SMID. Mereka mengundang pembicara dari kampus dan lembaga penelitian.

Rencana aksi tersebut direalisasi di Boulevard UGM dalam bentuk mimbar bebas pada 22 dan 28 Juli 1996, (sehari setelah tindak kerusuhan politik di Jakarta). Dalam selebaran yang mereka bagikan untuk aksi tanggal 22 juli, dinyatakan bahwa rekayasa KLB PDI medan tidak lebih dari *badut-badut politik*. Apa yang ditunjukkan oleh para pendukung Mega adalah wujud semangat perlawanan. Menurut mereka, Mega adalah kekuatan simpatik yang diakibatkan oleh tindakan sewenang-wenamg oleh para penguasa. Sementara itu, dalam kasus mimbar bebas 28 Juli, mereka juga mengecam keras intervensi militer dalam kasus ini sehingga berbuntut pada tindak kerusuhan yang menimbulkan korban manusia dan kerugian material di Jakarta.

Purnawacana: Kesimpulan dan Diskusi

Munculnya SMID di panggung pergerakan mahasiwa telah memberikan konstribusi tersendiri terhadap gerakan mahasiswa era tahun 1990-an. Pemaparan di atas setidaknya memberikan gambaran mengenai format, watak dan orientasi politik SMID yang nampak berbeda dari organisasi aksi mahasiswa yang lain.

Format aksi yang ditunjukkan SMID adalah format gerakan organisasi 'massa'. Gerakan mahasiswa seperti ini akan melibatkan golongan masyarakat yang secara ekonomi bersifat marginal, seperti buruh dan petani. Perubahan politik diandaikan merupakan produk dari kesatuan aksi antar kaum terdidik (mahasiswa) dan golongan masyarakat terbesar dan yang sekaligus marginal. Karena itu, SMID bukan organisasi aksi untuk merespon sebuah isu politik tertentu, tetapi didesain untuk merespon situasi politik Indonesia kontemporer.

WATAK GERAKAN MAHASISWA YANG DIBANGUN ADALAH BERSIFAT 'PROGRESIF RADIKAL', DALAM ARTI BAHWA JALUR DEMONSTRASI DENGAN PENGORGANISASIAN MASSA YANG LUAS LEBIH DIPILIH SEBAGAI CARA MENGARTIKULASIKAN DAN MENDESAKKAN KEPENTINGAN POLITIK.

Watak gerakan mahasiswa yang dibangun adalah bersifat 'progresif radikal', dalam arti bahwa jalur demonstrasi dengan pengorganisasian massa yang luas lebih dipilih sebagai cara mengartikulasikan dan mendesakkan kepentingan politik. Watak tersebut tampak dari yel-yel, poster-poster, selebaran, pamflet, dan sikap mereka terhadap aparat keamanan.

Orientasi politik SMID adalah perubahan politik nasional yang lebih demokratis. SMID memasuki arena pergulatan wacana politik ini melalui berbagai isu politik strategis, yang kemudian mereka tuangkan dalam "slogan politik". Isu-isu politik yang dipilih seperti isu buruh, partai politik, suksesi, pemilu, dan lain-lain, dikatakan strategis, karena mencakup dimensi kepentingan publik yang luas.

Selektivitas terhadap isu-isu politik yang direspon menunjukkan bahwa SMID memiliki garis perjuangan dan program politik yang jelas dan terumuskan secara sistematis. Seluruh aktivitas politik selalu bermuara pada tujuh isu politik yang sekaligus juga merupakan slogan perjuangan mereka. Adanya garis perjuangan dan program politik ini juga memungkinkan SMID tidak terjebak dalam sikap yang "reaktif" terhadap isu politik tertentu sebagaimana terjadi pada kelompok aksi mahasiswa yang lain.

Orientasi politik SMID juga tampak pada ideologi politik yang diperjuangankan yakni "sosial demokrasi kerakyatan". Pilihan ideologi ini, menurut mereka merujuk pada ideologi gerakan sosial di negara-negara Amerika Latin. Di negara-negara tersebut, para penguasa militer yang otoriter berjatuhan, dan digantikan oleh penguasa sipil yang demokratis. Perubahan politik tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang para aktivis gerakan sosial sejak tahun 1970-an.

Berkaitan dengan ideologi tersebut dua catatan berikut dapat saya kemukakan. Pertama, hingga kini saya masih terus tidak mengerti apa pengertian dan orientasi utama dari ideologi tersebut. Terminologi "kerakyatan", bagi saya cukup membingungkan karena dalam wacana ideologi politik, terminologi "demokrasi sosial" dan "sosialisme demokratis" lebih populer. Kedua, konsep ideologi tersebut juga jelas memiliki pertautan erat dengan sosialisme. Konsep demokrasi sosial, misalnya sangat populer di Eropa dan dijadikan rujukan ideologis oleh banyak partai politik, seperti Partai Buruh di Inggris. Partai politik ini memperjuangkan sistem ekonomi campuran, yakni pengawasan negara terhadap pasar dan regulasi atau intervensi negara terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. Sistem tersebut dianggap lebih demokratis dari masyarakat sosialis negara, karena kekuasaan tidak terpusat dan warga negara akan lebih mampu mengontrol bidang-bidang kehidupan mereka. Hal itu dapat dicapai melalui sistem pemilihan bebas dan sistem parlementer (Jary & Jary, 1992).

Kedua, kalau benar bahwa rumusan ideologi SMID merujuk ke ideologi gerakan sosial di negara-negara Amerika Latin, satu hal yang barangkali dilupakan adalah bahwa meskipun penguasa sipil sekarang memimpin negara-negara tersebut, sistem ekonominya tidak berubah, atau hanya meneruskan sistem ekonomi peninggalan penguasa militer (Schuurman, 1993). Sistem ekonomi negara-negara Amerika Latin adalah sistem ekonomi kapitalistik yang tidak memungkinkan distribusi ekonomi yang merata, sehingga cenderung untuk hanya menguntungkan golongan menengah ke atas dan merugikan mayoritas masyarakat bawah. Menurut Schuurman, perubahan politik ekonomi di negara-negara Amerika Latin adalah sekedar "transisi menuju demokrasi", dan bukan "redemokratisasi". Karena itu mengidealkan perubahan politik ekonomi yang dihasilkan oleh gerakan sosial di negara-negara tersebut dalam hemat saya adalah prematur. Negara-negara Eropa Barat yang telah mencapai tahapan *welfare state* pun kini tengah berada dalam suatu krisis, karena mereka tidak bisa sepenuhnya menjamin distribusi sumber daya ekonomi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

... KALAU BENAR BAHWA RUMUSAN IDEOLOGI SMID MERUJUK KE IDEOLOGI GERAKAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN, SATU HAL YANG BARANGKALI DILUPAKAN ADALAH BAHWA MESKIPUN PENGUASA SIPIL SEKARANG MEMIMPIN NEGARA-NEGARA TERSEBUT, SISTEM EKONOMINYA TIDAK BERUBAH, ATAU HANYA MENERUSKAN SISTEM EKONOMI PENINGGALAN PENGUASA MILITER ...

Meskipun cita-cita perubahan politik yang mereka idealkan nampak utopis, mereka berhasil dalam melakukan penggalangan massa yang luas. Dari berbagai aksi politik bersama, seperti kasus aksi dukungan terhadap KIPP, aksi solidaritas untuk mahasiswa Ujung Pandang, dan aksi dukungan terhadap PDI kubu Megawati, mereka berhasil menggalang dan memobilisasikan masyarakat yang besar, terutama mahasiswa.

Keberhasilan dalam penggalangan massa ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan jaringan kerja yang dilakukan SMID ke banyak perguruan tinggi di sejumlah kota di Jawa dan di luar Jawa. Seluruh jaringan ini nampak bekerja sistematis karena ada mekanisme pengambilan keputusan yang dikendalikan dari pusat di Jakarta. Program-program politik dan instruksi-instruksi SMID terumuskan dengan matang dan diberlakukan secara serentak di seluruh cabang-cabangnya. Aliansinya dengan PRD dan organisasi-organisasi *underbauw* PRD yang lain memungkinkan aksi penggalangan massa yang luas, tidak hanya terbatas pada massa mahasiswa saja tetapi juga kaum buruh, petani dan bahkan seniman.

Fenomena aliansi gerakan mahasiswa dengan kelompok masyarakat yang dibela, seperti buruh dan petani, sebagaimana dilakukan SMID merupakan bagian dari orientasi baru gerakan mahasiswa era '90-an. Aditjondro (*Opini*, Edisi 16/1994) menyatakan bahwa gerakan mahasiswa 1990-an tidak mudah terkooptasi, seperti angkatan-angkatan yang lalu. Banyak koalisi baru yang berbeda dengan koalisi angkatan 1966, seperti koalisi dengan buruh, petani dan bahkan dengan tokoh-tokoh Orde Lama.

Bonar Tigor (*Balairung*, No. 20/1994) menyatakan bahwa gerakan mahasiswa sekarang mengikutsertakan rakyat yang dibelanya secara langsung. Inilah yang membedakan gerakan mahasiswa sebelumnya yang cenderung elitis. Meskipun kecil, gerakan mahasiswa sekarang lebih maju karena mereka berada langsung di tengah masyarakat.

Edward Aspinall (*Balairung*, No. 20/1994) menegaskan pengamatan Aditjondro, bahwa salah satu karakteristik gerakan mahasiswa era '90-an adalah berkembangnya fenomena kasus rakyat, fenomena turun ke bawah, yakni bekerjasama dengan dan mendampingi kaum buruh dan petani. Pada intinya, proses ini merupakan awal kemunculan suatu orientasi massa. Ini merupakan fenomena yang sama sekali baru selama sepanjang sejarah Orde Baru.❑

■ **Di Fakultas Filsafat UGM:**

Ganjaran bagi PD III yang Sering Mangkir dan Birokratis

Drs. Parmono Msi, Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Filsafat terancam diturunkan dari jabatannya. Pasalnya ia dinilai terlalu birokratis dan sering memotong kreatifitas mahasiswa. Maka meletuslah serangkaian aksi mahasiswa pada tanggal 19 dan 21 Desember 1996.

Idealnya PD III adalah figur yang luwes dan dekat dengan mahasiswa, baik secara intelektual maupun psikologis. Apa jadinya jika PD III sering mangkir dari kampus, berlaku sangat birokratis, juga berlagak bak badan sensor yang bebas menggunting kreatifitas mahasiswa? Tidak ada kata lain: turunkan! Itulah yang diteriakkan sejumlah besar mahasiswa Fakultas Filsafat UGM.

Pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah mahasiswa Fakultas Filsafat berkumpul di halaman kantin. Mereka tengah menggelar mimbar bebas. Beberapa poster bernada sarkastis dan spanduk kecil warna putih bertuliskan sejumlah tuntutan ditoreh tebal-tebal. Muara persoalan internal di Fakultas Filsafat ini adalah pada pihak PD III, Drs. Parmono Msi.

Banyak hal yang melatarbelakangi meletusnya aksi tersebut.

Aksi mahasiswa Filsafat 'mendongkel' PD. III
Menentang birokratisasi

Kesemuanya berawal dari kejengkelan mahasiswa yang menilai kekakuan PD III Fakultas Filsafat tersebut. Pasalnya, birokrasi di fakultas ini --menurut versi mahasiswa Filsafat-- dinilai terlalu berbelit-belit. Kegiatan mahasiswa di antaranya sejumlah proposal kegiatan akademik, kerap ditolak tanpa alasan yang jelas.

Menurut Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat, Medhy Aginta Hidayat, alasan digelarnya mimbar bebas itu diakui sangatlah konkret. Awalnya adalah sistem birokrasi yang kelewat rumit, sehingga pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) sangat sulit untuk mengakomodir kegiatan-kegiatannya. Semua mentok gara-gara PD III satu ini.

"Seperti kasus seminar nasional yang terpotong," kata Medhy. Menurutnya, yang dikritisi bukan individunya, melainkan lembaganya. Titik permasalahannya adalah ditolaknya proposal Seminar Nasional bertajuk "Menyingkap Seksualitas Indonesia" yang dinilai terlalu vulgar dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kajian filosofis. Hal serupa juga dialami oleh BKM-BKM yang ada di lingkungan Fakultas Filsafat.

Selain itu, intervensi PD III terhadap BKM, BEM dan Senat, dinilai terlalu berlebihan. Salah satunya ruang kegiatan mahasiswa--yang biasa digunakan rapat dan diskusi--, dipegang oleh pihak PD III ini.

Saat ditemui Balairung, Parmono mengakui, ia membawa kunci ruangan kegiatan mahasiswa karena ruangan tersebut sebelumnya pernah disalahgunakan fungsinya. Jelas hal ini berbeda dengan kebijakan-kebijakan

yang berlaku di fakultas lain yang lebih memberikan kepercayaan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Namun masih menurut PD III ini, birokrasi yang dilakukannya ia rasa wajar dan tidak berlebihan. Terhadap tuntutan mahasiswa yang mengatakan debirokratisasi ia tidak sepakat jika debirokratisasi diartikan sebagai penghilangan aturan prosedur urusan melalui birokrasi. Jadi segala sesuatu itu pakai aturan, jelasnya kepada *Balairung*.

Berkaitan dengan masalah birokrasi ini, ternyata tidak hanya BKM-BKM saja yang terhambat kegiatannya. Celakanya mahasiswa yang hendak mengajukan beasiswa pun memperoleh nasib sama dalam proses pengajuannya. Selain persoalan birokrasinya yang kelewat sulit, hambatan yang paling sering adalah sulitnya menemui PD III yang satu ini di ruang kerjanya. Sebab pada kenyataannya PD III ini amat sering mangkir dari fakultas karena kesibukannya di luar fakultas yang juga amat sangat padat. Sehingga tak ayal membuat beliau jarang nongol di fakultas.

Bagaimana tidak, PD III ini dikenal sebagai orang yang "sangat gigih" dalam mengecer-ecerkan ilmunya di mana-mana. Ini dibuktikan dengan kegiatan mengajarnya di belasan universitas swasta di Yogyakarta. Selain itu beliau juga aktif di lembaga negara LEMHANAS sebagai Penatar P4.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka cukup wajar bila pihak mahasiswa kemudian menuntut empat hal. Pertama, debirokratisasi kampus, independensi dan otonomi lembaga kemahasiswaan, dan penggantian Drs. Parmono M.si dari jabatan Pembantu Dekan III selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 1996 pukul 12.00 wib. Jika ketiga tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka seluruh unsur dari Badan Kegiatan Mahasiswa yang ada di Fakultas Filsafat akan membubarkan diri. Mengenai Empat Tuntutan Mahasiswa Fakultas Filsafat tersebut, tembusannya sampai kepada Rektor UGM, Dirjen Dikti, Dekan Fakultas Filsafat, dan Pers.

Berhasilkah ketiga tuntutan mahasiswa tersebut? Tak sepenuhnya berhasil namun cukup melegakan. Sebagaimana isi tuntutan pertama, pada tanggal 21 Desember 1996 menjelang pukul 12.00 WIB, sebagaimana batas akhir tuntutan, mahasiswa berkumpul untuk mengadakan aksi kembali. Mahasiswa menuntut tindaklanjut dari persoalan tersebut kepada pihak Dekanat Fakultas Filsafat.

Mendekati pukul 12.00 siang, akhirnya terjadi dialog yang dilanjutkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di atas kertas bermaterai yang isinya cukup melegakan pihak mahasiswa. Pasalnya, pihak Dekanat Fakultas Filsafat yang dihadiri oleh Drs. Sri Soeprapto sendiri selaku Dekan Fakultas Filsafat itu menyetujui tuntutan mahasiswa tersebut. Debirokratisasi, independensi dan otonomi kelembagaan mahasiswa dan penurunan Drs. Parmono M.si dari jabatannya sebagai PD III.

Terhadap tuntutan Mahasiswa, sepenuhnya Dekan Fakultas Filsafat mendukung. Ketika diwawancarai *Balairung* beliau menandaskan, "Faktanya, tuntutan mahasiswa tersebut hampir sepenuhnya benar," tegasnya.

Oleh karena itu Dekan kemudian mengambil sikap netral terhadap masalah ini, artinya beliau tidak memihak kepada salah satu pihak pun, akan tetapi menyetujui tuntutan mahasiswa. Terbentur adanya masalah-masalah kegiatan kemahasiswaannya, maka segenap mahasiswa Fakultas Filsafat UGM sepakat untuk menuntut diturunkannya PDIII.

Namun tuntutan terhadap penggantian PDIII, - sampai saat wawancara pihak *Balairung*- belum bisa terealisasi. Sebab utamanya, sistem pengangkatan PD-PD di seluruh Indonesia, sesuai dengan aturan MenPan, harus disesuaikan dengan jenjang kepangkatannya, bukan dari kualitas. Pendapat ini dikuatkan pula oleh Pembantu Rektor III, Ir. Bambang Kartika, bahwasannya mekanisme yang benar mengenai penurunan PDIII melalui SK Mendikbud dan tidak bisa langsung melalui Rektor.

"Semua itu tergantung pada keputusan menteri, jika data-data yang diperlukan lengkap, dan mahasiswa tetap *ngotot* maka semuanya tergantung pada kebijaksanaan Menteri," seperti dituturkan pada *Balairung*.

Sementara itu Parmono sendiri tidak khawatir dirinya akan diturunkan dari jabatan PDIII. "Dekan *nggak* berhak menurunkan saya," katanya. Baginya, menjadi pengurus fakultas itu adalah suatu penghormatan dan merupakan pengabdian.

Tapi Parmono juga tidak keberatan jika harus mundur dari jabatannya. " Jika pengabdian saya dianggap menghambat kemajuan mahasiswa, tentu saya tidak keberatan untuk diundurkan," tuturnya datar.

Agaknya Dekan Fakultas Filsafat harus mengambil keputusan "sementara" dengan bijaksana, sambil menunggu diluluskannya tuntutan penggantian PDIII dari pihak Dikti. Sejak ditandatanganinya empat tuntutan mahasiswa tersebut, Dekan mengambil alih semua tugas PDIII. Walhasil sejak itu *nyaris* dalam hubungannya dengan mahasiswa, PDIII tidak mempunyai wewenang sama sekali. ❑

Irma Hidayana
Shalahuddin Ghozali, Ajianto, Irfan Muktiono

■ **Menggugat SMPT 0457:**

Memperjuangkan Independensi dan Otonomi Mahasiswa

Gugatan mahasiswa terhadap konsep SMPT tak ada hentinya. Penolakan SK bernomor 0457 ini tak hanya masalah konsep, namun sudah sampai pada taraf paling verbal dari paket politik ini. Apa yang bernama SMPT ditolak. Mereka emoh kalau cuma merenovasi bangunan yang telah rapuh. Mereka menginginkan independensi dan otonomi untuk mengatur rumahtangga sendiri.

Agenda perjuangan mahasiswa untuk merehabilisir simbol-simbol kemahasiswaannya sebagai *agent of change*, agaknya diharuskan melawan kejenuhannya dalam upaya menembus kekerasan-struktural paket politik bernama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Peraturan peninggalan Mendikbud Fuad Hasan ini tak henti dikutuk, dituding sebagai *biangkerok* depolitisasi mahasiswa, tak memanifestasikan idealisasi *student goverment*, dan tersubordinasinya kegiatan mahasiswa oleh birokrasi kampus secara berlebihan. Sebagai konsekwensi dialektisnya, pragmatisme mahasiswa dan pemandulan bagi lahirnya calon pemimpin bangsa bakal menyuramkan kebutuhan Indonesia masa depan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan mendasar SMPT tersebut, upaya gugatan sampai pencabutan SMPT juga tiada henti dilakukan mahasiswa. Akhir 1995, di UGM dideklarasikan kelahiran Dema-UGM sebagai salah satu jawaban riil bagi kelemahan konseptual SMPT.

Substansialitas apa sebenarnya yang hendak diperjuangkan Dema? Dema ingin bahwa lembaga mahasiswa itu independen dan otonom, tak terkooptasi oleh birokrasi kampus dan sebagai lembaga mendapat legitimasi dari massa mahasiswa, jelas Gusti, generasi kedua Dema-UGM.

Ribut-ribut gugatan SMPT tak hanya berhenti pada Dema-UGM. Pada tanggal 10 Oktober 1996, 36 perguruan tinggi dengan 100

dok BEM UGM

SMPT UGM
digugat dan dirombak

mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertemuan bersama yang intinya tuntutan pencabutan SK. 02457 tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan (14 Desember 1996). Upaya dialog dengan berbagai pihak terkait pun dilakukan. Namun toh, pihak Mendikbud tak memberikan 'sinyal' bakal diluluskannya gugatan penghapusan paket politik ini. Sampai batas waktu yang telah ditentukan lewat tanpa perubahan apa-apa.

Apakah forum senat-senat mahasiswa Indonesia sendiri sudah mengantongi konsep kelembagaan mahasiswa pilihan mahasiswa yang bakal menggantikan SMPT nantinya?

Purbaya, mahasiswa ITB yang ikut menandatangani pertemuan FKMSI -- dan terancam peringatan dari birokrat kampus karenanya -- ketika dikonfirmasi *Balairung* menyatakan, dari pertemuan tersebut pun sebenarnya belum bisa menawarkan konsep kelembagaan mahasiswa yang alternatif dan ideal sebagaimana diinginkan mayoritas mahasiswa. Ide tentang Dema pun juga tak disambut dengan antusias. Maka menyamakan pendapat dan menggalang opini di kalangan kampus secara nasional, inilah yang baru dituju.

Benang Kusut SMPT

Bagi beberapa perguruan tinggi di Yogya yang dihubungi *Balairung*, memiliki aplikasi konsep SMPT-nya masing-masing. Satu fakta bagaimana SMPT memang invalid, tak mampu lagi menampung kompleksitas persoalan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai 3000-an PT. Di UGM sendiri, konsep SMPT boleh dikata telah dirombak dan disiasati sedemikian rupa. Keberadaan SMPT digantikan BEM (Badan Eksekutif

Mahasiswa) dan Senat Mahasiswa (SM) yang dinamakan Keluarga Mahasiswa (KM). Demikian juga di Universitas Islam Indonesia. Senat Mahasiswa menjadi KM yang terdiri dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) dan DPM. Sedang untuk beberapa perguruan tinggi karena iklimnya tidak menguntungkan seperti UMY, ISI, USD, konsep SMPT hampir-hampir menemukan indolensinya.

Di ITB, kampus yang tak pernah henti bergulat dengan masalah internal, malah terpaksa menerima watak otoritarian birokrat kampusnya, menjadi korban SMPT. Sejumlah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) digusur dari ruang-ruang beraktivitasnya setelah terjadi unjuk rasa menolak konsep Senat Mahasiswa Perguruang Tinggi (SMPT). Mereka yang "terpaksa" tergusur antara lain, Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan (HMTM), Himpunan Mahasiswa Matematika (Himatika), Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT), Himpunan Mahasiswa Teknologi Geologi (HMTG) dan Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik (HMFT).

Akibat penggusuran tersebut sesama pengurus HMJ sepakat mendirikan sekretariat darurat bersama di areal kampus. Dari 20 HMJ yang ada di kampus ITB, pada prinsipnya sama-sama menolak konsep SMPT. Dan "kasus ITB" menjadi satu contoh kasus dari daftar panjang dosa SMPT yang digugat dan ditolak di mana-mana.

Sampai tulisan ini diturunkan, benang-kusut persoalan SMPT belum terudari. Sejumlah gugatan mahasiswa di berbagai kampus masih menggantung karena sikap keras kepala pihak Mendikbud yang tetap mempertahankan konsep SMPT. Meskipun demikian, konsep lembaga kemahasiswaan alternatif versi mahasiswa jelas menuntut segera diterbitkan. Sebab SMPT sebagai wacana milik negara membutuhkan *counter-conceptual* secepatnya, sebagai jawaban atas kecacatannya. ❑

Sutrisno dan **Prabowo**

Antariksa

Anggota Kelompok Bermain Kacamata

Virtua Cop

Jika berjalan-jalan ke Malioboro *Mall*, sekali waktu mampirlah ke sebuah ruangan di lantai dasar yang bertajuk *SS MEGA WORLD Family Techno-Game Center*. Apa yang akan kita dapatkan di sana? Dunia simulasi yang "gila-gilaan". Kita dihadapkan pada puluhan *video game* yang semuanya menawarkan kemenawanan dunia simulasi.

Cobalah misalnya *video game* bernama *Virtua Cop*, ia mengajak kita memasuki kehidupan "polisi masa depan", dengan segala persenjataan canggihnya, memburu para penjahat dengan *setting* gudang kontainer dalam suasana sebuah kota industri.

Televisi layar lebar di hadapan kita menampilkan adegan para penjahat yang menembak ke arah kita.

Anda tidak perlu gugup. Untuk membunuh mereka, lepaskan saja tembakan ke arah para penjahat di dalam layar televisi. Jangan khawatir akan segala kerepotan "polisi konvensional", sebab kita di lengkapi dengan persenjataan maha canggih. Perhatikan misalnya kecanggihan yang dijanjikannya kepada kita: *"The lock on sight automatically detects the enemy and allows you (by watching the arrow indicators) to know the moment the enemy will fire"*.

Anda tertembak, terluka, lalu mati? Tidak perlu gundah. Masukkan saja tiga buah koin (1 koin berharga lima ratus rupiah), maka Anda hidup lagi (ini semacam reinkarnasi) untuk melanjutkan perburuan atau sekedar membalaskan dendam kepada para penjahat tersebut.

* * *

Memasuki dunia simulasi seperti dunia *Virtua Cop*, sebenarnya kita memasuki sebuah dunia impian, tempat kita menemukan hasrat (*desire*) kita seolah-olah terpenuhi. Unsur paradoksal dalam dunia semacam ini adalah di satu sisi kita yakin kepada adagium "hasratku akan terpenuhi", tetapi di sisi lain, *Virtua Cop* — pada dirinya sendiri — sama sekali tidak menjanjikan terpenuhinya hasrat kita. *Virtua Cop* justru menciptakan kondisi hidup yang terus-menerus mengharuskan kita untuk membunuh (para penjahat). Apa yang diberikannya adalah kepuasan semu. *Virtua Cop* membuat kita sulit untuk sekedar membayangkan bahwa pada sebuah titik kita mesti berhenti. Hasrat kita tidak akan pernah terpuasi, sementara kita memasukinya dengan keyakinan "hasratku akan terpenuhi".

Dunia simulasi menggiring manusia kepada perangkap nafsu dan keinginan itu sendiri, yang selalu menuntut manusia untuk memenuhinya secara konkrit, sementara hasrat (*desire*) itu sendiri seperti "jalan tiada ujung". *Virtua Cop* adalah semacam apa yang disebut Gilles Deleuze dan Felix Guattari sebagai *"desiring machine"* (mesin hasrat).

Dalam bukunya yang terkenal, *Simulations*, Jean Baudrillard melihat adanya kesejajaran antara dunia riil dengan dunia simulasi. Menurutnya dunia sedang memasuki era simulasi; dikontrol oleh kode-kode dan didominasi oleh reproduksi dari realitas buatan.

Era simulasi ditandai dengan berkembangnya demokratisasi yang ekstrim dalam "dunia penampakan", tempat manusia tidak saja diberikan kebebasan dalam memilih gaya dan gaya hidup, akan tetapi justru diberi peluang besar untuk menciptakan "penampakan" berbagai simulasi dari "penampakan" dirinya sendiri atau penampakan kebudayaan materi di sekelilingnya.

Citra cermin (*mirror-image*) sekarang ini dipenuhi oleh silih bergantinya berbagai citra dan obyek yang telah dikomodifikasi sedemikian rupa di dalam sistem yang disebut oleh Umberto Eco sebagai "perubahan abadi" *fashion* dan mode — sebagai aktualisasi dan pemenuhan *desiring machine*. Kehidupan bagaikan daur ulang *fashion*. Wacana *fashion* ini bukanlah satu kemajuan, sebab *fashion* selalu berubah, berganti-ganti, berputar dan tidak menambah apa-apa pada nilai dalam diri individu.

Wajah dunia kita, setara dengan dunia simulasi *Virtua Cop*, dipenuhi dengan berbagai bentuk imitasi. Operasi plastik, cat rambut, wig, alis palsu, *body building*, yang merupakan manifestasi ketidakpercayaan pada bentuk-bentuk hukum, adat, dan tabu, serta manifestasi dari dominasi model komoditi dan tontonan dalam mekanisme citra cermin, yang berlandaskan hukum ekonomi kapitalisme, yang menjadikan "keinginan untuk selalu berbeda" (*difference* [Ferdinand de Saussure], *distinction* [Pierre Bourdieu], *jouissance* [Roland Barthes]) sebagai titik tolak dan ideologi dalam sistem reproduksi kapitalisme.

Celakanya, oleh tuntutan tiada henti itu, kita merasa "was-was tapi nikmat" berada di dalamnya.

"Harap tenang. Lagi tegang Nih!" (tulisan pada papan pengumuman *SS MEGA WORLD Family Techno-Game Center*).❑
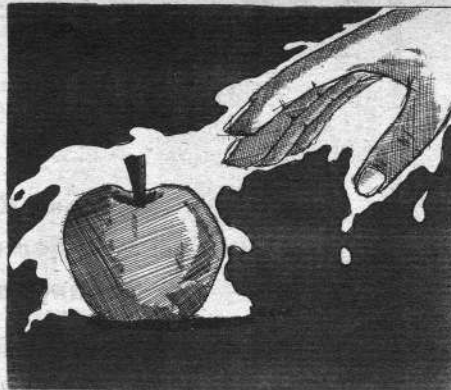
Purwadi, S.S.

Alumni Sastra Jawa UGM dan sedang menempuh program Pascasarjana Ilmu Humaniora bidang Filsafat Timur, UGM

Candra Jiwa, Wanita Jawa

Prolog. Dunia kewanitaan mendapat perhatian istimewa dari para pujangga dan kebudayaan Jawa, terutama pada masa kejayaan keraton dahulu. Nilai etika dan estetika yang menghendaki agar kaum wanita selalu tampil *bekti, gemati, alus* dan *luwes*.

Banyak karya satra Jawa ciptaan pujangga istana yang menyoal idealnya perilaku para putri dalam masyarakat. Dalam seni sastra itu dilukiskan norma kesusilaan, kedarma-baktian, *keluwesan* dan kehalusan yang harus dijalankan para putri, sehingga kehadirannya menambah suasana *ayu-bayu* dan *rahayu*.

Serat-serat kuno yang berisi kewanitaan di antaranya: *Piwulang Putri* karya Sri Paku Buwono IV, *Candrarini* karya Sri Mangkunegara IV, *Piwulang Estri* karya Ki Hadajar Dewantara. Beliau-beliau itu latar belakang kehidupannya adalah lingkungan kraton, suatu kawasan yang menjunjung nilai estetika. Oleh karena itu cipta sastra yang mereka produksi pun pada umumnya mendukung sifat tersebut.

Keputren dalam Pewayangan.

Adegan kedhatonan yang menampilkan permasuri raja selalu menghiasi jagat pakeliran. Di situ sang prameswari dilukiskan jiwa, raga, gerak badan serta tutur bahasanya yang pantas ditiru.

Kelelahan fisik dan mental sang raja akibat pekerjaan, urusan politik dan masalah kenegaraan lainnya seketika musnah setelah sang *prameswari* menghiburnya. Adegan *kedhaton* ini mengajarkan pada para ibu rumah tangga agar bisa berbuat sedemikian rupa: *miraga, micara, mirasa* dan *mirama*, sehingga suaminya tenteram dan betah di rumah.

Tipologi wanita utama yang sabar, halus, berprasangka baik terhadap suami kerap dipersonifikasikan *Dewi Wara sembadra*. Ke mana saja dan kapan saja Arjuna berkelana, Sembadra tidak pernah curiga, apalagi protes. Kepergian Arjuna tetap diasumsikan dalam rangka menjalankan tugas luhur kemasyarakatan. Bahkan ada kisah menarik menggambarkan kecintaan dan keikhlasan Sembadra. Sewaktu Arjuna sakit keras, Sembadra membuat janji. Kalau Arjuna sembuh dari sakitnya, Sembadra sanggup mencarikan istri baru lagi yang lebih muda dan cantik.

Peranan *Kanca Wingking*.

Istilah *kanca wingking* (teman belakang) sering diberi interpretasi yang salah. Wanita digambarkan seolah-olah makhluk yang selalu berdiri di belakang, tanpa wewenang dan takluk total atas komando laki-laki.

Kanca wingking secara denotatif bermakna mitra kerja yang mendapat distribusi kerja di wilayah belakang. Wilayah belakang di sini dalam arti positif yakni bagian kerja yang hanya pantas dipegang wanita. Pelanggaran oleh laki-laki terhadap wilayah belakang ini akan mendatangkan kecaman yang pedas.

Contoh *gampang*, seorang suami yang membuka *kekeb kuwali, bathok beras*, atau *uleg-uleg* akan dipandang sebagai tindakan yang sangat memalukan. Istri akan merasa dilangkahi wewenangnya, tidak dipercaya lagi. Sebaliknya bila para suami sedang *jagongan* dan *riungan* dengan koleganya, biasanya para istri akan sibuk di belakang dan enggan ikut campur. Begitulah harmonitas pembagian kerja.

Konsep *Suwarga Nunut Neraka Katut*.

Sama dengan istilah *kanca wingking*, konsep *suwarga nunut neraka katut* juga kerap ditafsirkan sinis dan kejam. Kedudukan wanita di hadapan laki-laki seolah-olah cuma sekedar numpang.

Sesungguhnya idiom suwarga nunut neraka katut itu maknanya sangat indah, mulia dan luhur. Semua wanita akan berbahagia sekali bila semuanya mendapat kekayaan, kekuasaan dan kehormatan dalam masyarakat. Tanpa berbelit-belit seorang istri akan menggunakan secara sah dan terhormat segala fasilitas yang didapat suaminya. Itulah maknanya *suwarga nunut*.

Sebaliknya, kalau sang suami tiba-tiba jatuh bisnis dan kariernya, secara langsung istrinya akan ikut menanggung dan merasakan dampaknya. Kesengsaraan, kesedihan dan kehinaan suami secara otomatis penderitaan istrinya juga. Begitulah makna *neraka katut*.

Hal ini tentunya berbeda sekali dengan kejatuhan istri, suami akan cepat membangkitkan kembali. Istri turun jabatan akan cepat terobati *post power sindrom*nya setelah ikut suaminya lagi tanpa merasa merosot martabatnya.

Epilog. Al Qur'an menyebutkan bahwa para lelaki adalah pemimpin atas diri kaum wanita. Pemimpin di sini tidak berarti menguasai apalagi menindas.

Demikian pula konsep-konsep kejiwaan yang mengatur tata laku pria-wanita, hendaknya tidak dipahami secara dikotomi antagonis, tetapi harus dikerangkakan dalam *job description* harmonis.❑

Era Baru Pers Mahasiswa

Kedekatan pers mahasiswa dengan masyarakat luas telah memiliki akar historis sejak masa pra kemerdekaan. Waktu itu pers mahasiswa -- biarpun masih dalam bentuk yang sederhana -- tidak bisa dipisahkan dengan gerakan kepemudaan dan pelajar. Secara ideologis ia selalu bergayut dengan gerakan kepemudaan pada jamannya.

Pada masa awal kemerdekaan pers mahasiswa adalah lembaga yang disegani tidak hanya oleh komunitas kampus tetapi juga masyarakat luas. Pada tahun '50-an hingga awal '60-70-an eksistensi pers mahasiswa benar-benar menempati posisi yang terhormat. Kejayaan pers mahasiswa berlanjut lagi pada era bulan madu Orde Baru. Mingguan *Mahasiswa Indonesia*, harian *Kami*, adalah sebagian contoh prasasti-prasasti sejarah kejayaan tersebut.

Semangat juang dan kebanggaan akan kejayaan pers mahasiswa ini ternyata terjaga di kalangan pegiat pers mahasiswa generasi '80-an hingga 2000-an ini. Kredo "pers perjuangan" ternyata merupakan semangat dari 'ilham sejarah' juga. Tentunya tanpa menghilangkan faktor lain yang ikut melanggengkan semangat ini, misalnya, kondisi-kondisi psiko-sosial dari mahasiswa sebagai pelaku utamanya.

Faktor sejarah menjadi penting ketika belum lama ini beberapa pengamat pers dan pemerhati pers mahasiswa melontarkan kritikan yang tajam terhadap perkembangan pers mahasiswa. Sebagian besar pers mahasiswa saat ini ditengarai tengah mengembangkan apa yang disebut sebagai "jurnalisme caci-maki".

Alasannya barangkali teknis saja bahwa pers mahasiswa selalu memajang judul-judul yang yang *angker*, keras, atau bombastis. Sementara bila diukur dengan kaidah jurnalisme, isinya tidak berbobot. Tema yang diangkat seringkali aneh-aneh dan tidak mengakar. Sajian datanya lemah, peliputannya pun sering tidak berimbang *(all sides reporting)*. Atau secara teoritik, adalah karena isi pers mahasiswa lebih merupakan laporan "realitas psikologis" ketimbang "realitas sosiologis". Pers mahasiswa dianggap kurang mampu melakukan sejenis "reportase investigatif".

Nah, relevansi sejarah pers mahasiswa seperti pernah disampaikan oleh Ahmad Zaini Abar ataupun Ashadi Siregar dalam masalah ini adalah bahwa "idealisme" (perjuangan) pers mahasiswa pada masa lampau relatif masih terjaga sampai generasi sekarang. Sosialisasi nilai-nilai perjuangan dari generasi ke generasi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Namun kenyataan ini tidak diimbangi oleh kemampuan (teknis) SDM-nya di bidang jurnalisme.

Maka yang terjadi adalah semacem kesenjangan antar perangkat lunak dan perangkat keras, antara superstruktur dan infrastruktur. Perangkat lunak atau apa pun namanya yang merupakan bagian dari manifestasi sejarah inilah yang kira-kira perlu mendapat perhatian. Karena, jangan-jangan ada semacam "romantisme sejarah" di kalangan pegiat pers mahasiswa yang bersifat kontra-produktif.

* * *

Sejarah pers mahasiswa memang penuh warna-warni perjuangan. Perannya dalam pembentukan *nation building* besar sekali. hal ini antara lain karena pada masa itu pers umum belum kuat. Dari sisi SDM-nya saja pers mahasiswa lebih unggul. Pendek kata peran yang diambil pers mahasiswa pada saat itu memang telah menjadi tugas zamannya.

Diakui atau tidak, kini keadaannya telah jauh berbeda dan telah melahirkan segudang persoalan yang kompleks dan pelik bagi pers mahasiswa. Setelah negara yang dibangun oleh Orde Baru semakin menguat, mulailah perangkat negara memisahkan mahasiswa, termasuk di dalamnya pers mahasiswa, dari kebebasannya, dari hubungannya dengan masyarakat. Pada pers umum dan pers mahasiswa, dikenakan Permenpen tahun 1975 ditambah *policy* NKK/BKK yang telah memberangus hak-hak politik mahasiswa.

Di lain pihak, pers umum sekarang telah berkembang pesat. Taraf pendidikan wartawan sudah jauh lebih tinggi. Dari sisi modal, hanya pengusaha kaya atau konglomeratlah yang mampu memperoleh SIUPP. Artinya, pers kini telah berkembang menjadi sebuah industri, di mana dukungan modal menjadi dominan, lepas dari persoalan bahwa SIUPP adalah alat negara dalam mengontrol institusi ini.

Melihat kondisi objektif ini, pers mahasiswa tidak bisa lagi selalu membayangkan peran yang pernah diembannya di masa lalu. Diperlukan kearifan dalam memaknai sejarahnya, juga kebesaran jiwa, untuk menghadapi kenyataan yang telah berubah. Pers mahasiswa harus mentranformasikan "inspirasi sejarahnya" dalam mengejawantahkan jamannya sendiri.

Ide "Pers Alternatif " barangkali sebuah usaha melawan kejumudan pers mahasiswa. Ahmad Zaini Abar, adalah salah satu dari banyak pemerhati yang pesimis dengan ide ini. Menurutnya, pers mahasiswa lebih dulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan teknis seperti, menjaga rutinitas terbit, menjaga konsistensi politik redaksionalnya -- karena begitu ganti pengurus biasanya berganti pula kebijakan redaksionalnya. Pers mahasiswa juga masih bermasalah dengan *audience*-nya, dan tentu saja, kemampuan teknis pengelolanya. Pers mahasiswa tidak jeli dalam mencari dan menggali ceruk (*niche*) yang masih tersisa, tetapi malah mencoba bersaing dengan pers umum.

Di tengah kondisi semacam ini, kemunculan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang telah ikut berupaya membantu meningkatkan kemampuan teknis pengelola pers mahasiswa patut kita terima dengan tangan terbuka. Sepanjang tidak mengikat secara institusional, tentu saja. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebagai wadah komunikasi antarpers mahasiswa di Indonesia, juga semakin dibutuhkan kehadirannya secara nyata. Bagaimanapun, PPMI memiliki peran yang strategis dalam menciptakan "iklim" yang kondusif untuk kemajuan pers mahasiswa Indonesia.

Di balik kejumudan ini, saat pers mahasiswa ditinggalkan pembacanya atau kehilangan pembaca, disaat kehilangan orientasi, siapa tahu hal ini bisa menjadi bahan bakar bagi "era baru" pers mahasiswa Indonesia di penghujung rejim Orde Baru yang semakin uzur ini.

Asip Agus Hasani
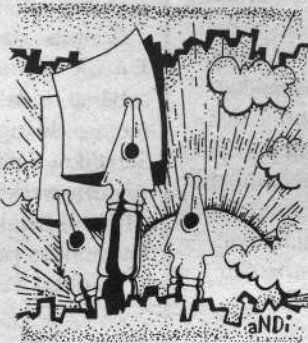
BIS KOTA

Bersamaan dengan merangkaknya pagi, roda-roda bis kota itu mulai berputar seiring waktu berjalan... Bertemankan seragam oranye "Kopata", kacamata hitam dan sebuah topi, Pak Anjar dengan bis kotanya mulai menyusuri jalan-jalan di kota Yogyakarta. Memotong sawah, perempatan, pasar dan ruas jalan Yogya lalu begitu seterusnya.

Satu demi satu para penumpang memasuki perut bis. Dan itu berarti keping demi keping, lembar demi lembar uang akan terkumpul dan memutar roda kehidupan Pak Anjar.

Tak terasa, enam belas tahun sudah, Pak Anjar dengan bis kotanya setiap hari menyusuri ruas jalan kota Yogya. Saat ongkos bis kota masih Rp. 25 dan merangkak sampai Rp. 350. Kala itu "Kopata" menjadi primadona. sampai akhir 80-an karena tak banyak angkutan kota lain seperti sekarang ini.
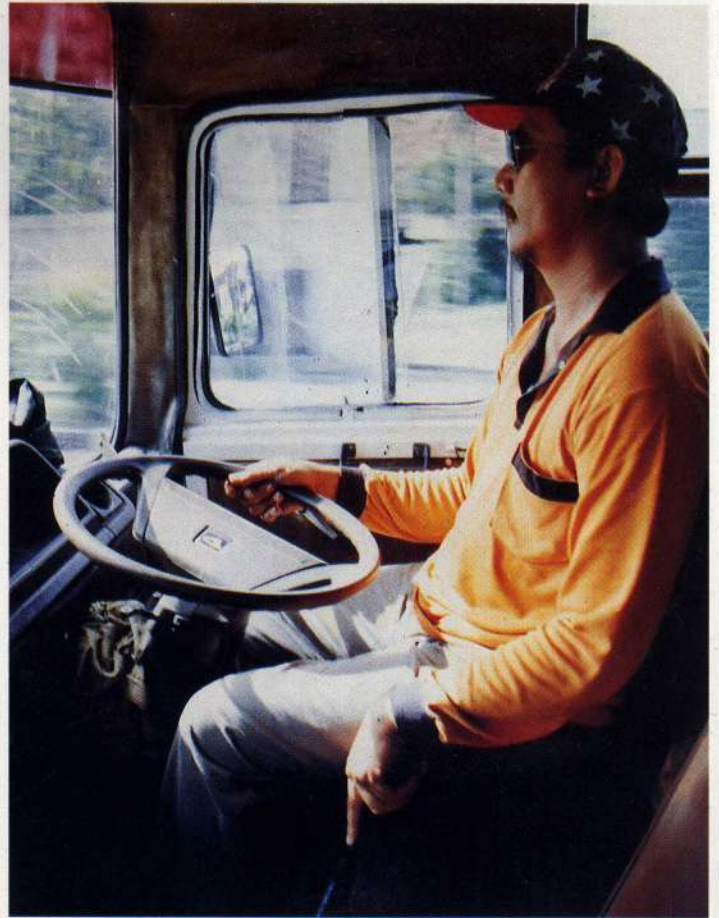
Foto : Tri Wasono Sunu, Fernando Bestral
Narasi : Tri Wasono Sunu

SUNU

Pak Anjar adalah salah satu saksi betapa semakin sesaknya kota Yogya. Dulu kota Yogya tidak seramai kini. Terminal Umbulharjo masih kelihatan bersih, tidak sesemrawut sekarang. Dulu toko yang terkenal adalah "Samijaya". Matahari ataupun Mall terbayang pun belum, dan masih ada 'air mancur' di perempatan Kantor Pos Besar. Bioskop "Rahayu" masih ramai. Tapi semua itu kini tinggal kenangan.

SUNU

Meski tidak mengecap sekolah tinggi, Pak Anjar tahu betul, kesemerawutan Yogya karena kenaikan jumlah kendaraan dengan pertambahan panjang maupun lebar jalan tidak sebanding. Pak Anjar coba melukiskan, "Kalau Kopata saja punya 194-an armada, Puskopar 100-an, Damri 40-an, Aspada 125-an, dan Kobutri 100-an. Belum dipikir-pikir nanti malah nglokro, tidak berani nyetir melihat saingan sebanyak itu."

Sampai sekarang Pak Anjar masih setia dengan bis kotanya. Rasa bosan dihilangkannya, kala ingat anak-istrinya di rumah. Keyakinan yang selalu dipegangnya hanyalah selalu *"ayem". "Mosok Gusti mboten ajeng maringi."* Dengan bekal keyakinan itu Pak Anjar kembali mengarungi jalan-jalan di Yogya. Dari jam enam pagi sampai jam enam sore, Pak Anjar terus melayani pengguna angkutan kota. Waktu istirahat datang saat makan di warung sudut terminal atau pinggir jalan.

Silih berganti penumpang naik turun, begitu pula keyakinannya; roda terus berputar.

FERNANDL

Teknik Sabo:

Melindungi Yogya dari Amuk Merapi

Malam hari yang cerah bila kita menghadap utara di atas jembatan Gondolayu, Jalan Jendral Sudirman, Yogya, maka sekali waktu dapat terlihat pemandangan alam yang sangat indah dan sekaligus menakutkan. Lelehan merah bara dari puncak Merapi. Peristiwa itu dapat terlihat saat Merapi batuk. Dapat dibayangkan berapa banyak material yang tersimpan di perut gunung itu. Bila kena hujan dan hanyut ke bawah, bisa jadi kota Yogya akan lumpuh dan berantakan.

Di daerah Kalasan, Yogya berdiri sebuah candi, namanya Candi Sari. Candi ini baru dikenal sekitar tahun 80-an, sesudah diadakan penggalian. Sebelumnya candi ini tertimbun batuan sedimen muntahan gunung berapi. Ini menunjukkan bahwa bahaya letusan gunung api mampu menimbun sebuah kota.

Bukti kekuatan dahsyat alam ini dapat pula dilihat di daerah Bantul. Di sini terdapat pipa-pipa irigasi yang semuanya kini tak berfungsi lagi. Karena sumber air untuk irigasi lenyap akibat sedimentasi. Hal ini jelas menunjukkan beberapa waktu silam sering terjadi pengendapan sedimen.

Wilayah Indonesia merupakan daratan yang bergunung-gunung, baik yang masih aktif maupun yang sedang beristirahat. Tercatat sebanyak 129 buah gunung api berdiri di Indonesia. Sebagian besar dipengaruhi oleh daerah seismik sirkum Pasifik sekitar 85%, sedang sisanya di daerah seismik Mediterania.

Gempa yang terjadi sangat berpotensi sebagai sumber bencana alam. Karena gempa yang terjadi adalah gempa tektonik berskala di atas 4 Richter. Dengan frekuensi gempa di Indonesia rata-rata 300-400 kali setiap tahun.

Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia berada di atas jalur lempeng (*fractured zone*). Struktur geologi kawasan yang dilalui jalur patahan ini pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim.

Beginilah teknologi sabo menahan sedimen

Sehingga pada musim penghujan kerap terjadi tanah longsor yang diikuti oleh sedimen luruh.

Curah hujan yang tinggi (1000-4000 mm setahun) juga merupakan faktor pendukung penyebab kerawanan bencana tanah longsor dan lahar dingin. Artinya curah hujan membuat gerakan sedimen lebih terpacu.

Dengan memperhatikan kerentanan bencana inilah akhirnya dicari suatu teknik untuk mengatasi bencana, khususnya bahaya sedimen dan erosi. Itulah yang dikenal sebagai Teknik Sabo.

Sabo berasal dari 2 kata Jepang (sa=pasir, bo=pengendalian) yang secara harfiah berarti pengendalian pasir. Tapi dalam kenyataannya Sabo merupakan suatu sistem penanggulangan bencana alam akibat erosi dan sedimentasi. Termasuk di dalamnya erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh adanya lahar hujan, sedimen luruh, tanah longsor dan lain-lain.

Dengan demikian penerapan teknik Sabo tidak terbatas hanya di daerah vulkanik saja, melainkan dapat pula diterapkan di daerah non-vulkanik yang banyak mempunyai permasalahan erosi sedimentasi.

Parahnya lagi, ternyata sabuk gunung api (*vulkanic gate*) tersebut memanjang dari Sumatera, Jawa dan Bali yang merupakan daerah berpenduduk paling padat.

Ir. Candra Hassan, Dip. H.E.,

seorang staf di *Sabo Technical Centre (STC)* Yogyakarta kepada *Balairung* mengatakan,"Bencana ada kalau menimbulkan korban manusia, atau setidaknya mempengaruhi tata kehidupan manusia." Jadi kejadian di suatu tempat yang tidak memakan korban dan tidak berpengaruh terhadap tata kehidupan manusia bukanlah bencana yang sebenarnya.

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pegunungan telah lama mengenal upaya penganggulangan masalah erosi dan sedimentasi sebagai bagian dari konservasi lahan. Sebenarnya mereka telah melakukan suatu pekerjaan Sabo meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, dan mungkin ini tanpa disadari. Upaya penanggulangan yang dilaksanakan lebih dititikberatkan pada pekerjaan pemantapan lereng bukit. Yaitu mencegah erosi pada daerah sumber sedimen dengan menerapkan teknologi warisan nenek moyang seperti pembuatan *sengkedan*, bendung pengendali sedimen sederhana yang dikenal dengan istrilah *lundak* atau *anggel*, serta penghutanan. Kembali dikatakan oleh Candra Hassan,"Jepang mungkin bukan yang lebih dulu menerapkan teknik Sabo. Mungkin nenek moyang kita juga sudah lebih dulu, tapi belum ada penamaan khusus dan kalah populer dibanding di Jepang".

Penanggulangan masalah erosi dan sedimentasi mulai dikembangkan di Indonesia ketika seorang ahli Sabo berkebangsaan Jepang tahun 1970, Mr. Tomoaki Yokota, datang dan mengenalkan teknologi Sabo yang sudah diterapkan di Jepang. Teknik ini berguna untuk menanggulangi bencana alam akibat letusan gunung api, yakni bahaya sekunder berupa lahar hujan. Di Indonesia teknik Sabo dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia."Teknik ini kita kembangkan, dan tidak diambil secara mentah-mentah dengan melihat faktor-faktor seperti biaya dan lingkungan," ungkap Kepala Seksi Penerangan STC ini.

Dan ternyata penerapan teknologi Sabo tersebut memberikan hasil yang positif. Lahar hujan mulai dapat dikendalikan. Dari hasil pengkajian selama ini menunjukkan bahwa teknologi Sabo dapat diterapkan tidak hanya pada kawasan gunung api melainkan juga daerah non-gunung api yang rentan terhadap bencana tanah longsor serta aliran sedimen maupun sedimen luruh. Penerapan teknik Sabo di kawasan non-gunung api memang terbukti diperlukan untuk menanggulangi sedimen luruh, tanah longsor serta pengendalian jumlah angkutan sedimen yang masuk ke dalam suatu waduk.

DOC. STC
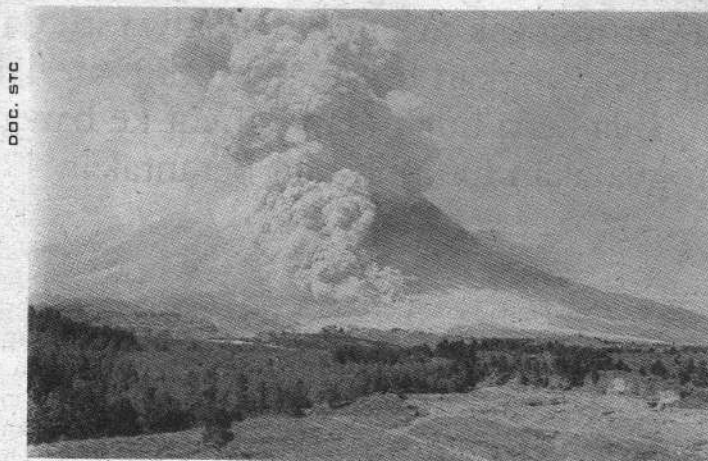
Awan panas Merapi tahun 1984

Material padatnya bisa memusnahkan peradaban Yogya

Penerapan teknik Sabo di Indonesia dimaksudkan agar sungai tetap dalam keadaan seimbang-dinamis, aman terhadap kejadian baik yang tidak maupun yang mengangkut sedimen. Dengan demikian, sungai perlu dikendalikan dan bilamana perlu juga diatur dengan cara membuat bangunan Sabo di tempat-tempat tertentu sehingga mampu berfungsi sebagai penahan, penampung dan pengendali aliran sedimen.

Sedang tujuan diterapkannya teknologi Sabo adalah, 1) Melindungi masyarakat beserta segala harta miliknya terhadap bencana erosi dan sedimentasi, 2) Menciptakan rasa aman terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana erosi dan sedimentasi, 3) Melindungi dan mengamankan daerah produksi pangan, 4) Melindungi dan mengamankan bangunan sarana dan prasarana umum, 5) Memelihara kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kondisi lingkungan alam sekitarnya menjadi lebih baik.

Secara fisik jenis pekerjaan Sabo meliputi pekerjaan langsung dan tidak langsung. Pekerjaan langsung misalnya berupa sengkedan (*terrace*) dan penghutanan (*reforestation*). Pekerjaan ini diutamakan sebagai cara untuk memantapkan lereng bukit sebagai upaya pencegahan terjadinya erosi. Sedang pekerjaan tidak langsung untuk pengendalian aliran sedimen dan sedimen luruh. Pekerjaan ini meliputi bendung penahan sedimen, kantong sedimen, normalisasi/kanalisasi alir, tanggul dan lain-lain.

Tapi pekerjaan Sabo tidak cuma secara fisik saja. Tapi juga non-fisik yang berupa pemberitaan dini. Yakni penjelasan-penjelasan tentang teknik Sabo dan kegunaannya.

Dalam pengembangan dan pelaksanaannya *Sabo Technical Centre* bekrjasama dengan *Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)*. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam penelitian dan pengembangan. "Kita bekerjasama dengan Jepang dalam rangka mengembangkan teknik Sabo yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Karena sudah disepakati bahwa Sabo berasal dari Jepang, mengapa kita belajar dan bekerjasama dengan orang lain?" lanjut Ir. Candra Hasan.

Teknik Sabo merupakan perisai terdepan dalam pengendalian bencana, khususnya emisi sedimen. Karena itu bangunan Sabo sangat dibutuhkan pada daerah-daerah rawan. Namun jika orientasi yang dijalankan hanya profit, maka tampaknya teknik sabo tidak menghasilkan produk langsung yang bermanfaat, seperti irigasi yang mengatur pengairan . Sehingga sering kali orang (yang berpikiran sempit) berpikir, buat apa membangun Sabo, Dam misalnya, yang banyak makan biaya dan tidak bermanfaat. Jika terjadi bencana, bukannya cukup dengan

kentongan atau sirine. Dengan itu saja masyarakat di daerah rawan bisa langsung menyelamatkan diri.

Menanggapi hal ini Ir. Candra Hassan menimpali, "Memang mereka bisa menyelamatkan diri, tapi bagaimana dengan rumahnya, sawah ladang, jalan-jalan dan irigasi? Apa mereka juga bisa lari?" tanyanya berkelakar.

Karena teknik Sabo tidak cuma penyelamat bencana bagi manusia, tapi juga seluruh aspek kehidupannya, seperti bangunan-bangunan vital, jalan, jembatan, dam dan lain-lain. Bahkan sebenarnya, bangunan Sabo yang baik itu harus dibangun dengan prinsip: mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena bangunan itu harus menampung sedimen hasil longsoran maupun lahar pada saat terjadi bencana.

Meski bersifat preventif, namun Sabo sangat berperan dalam masalah penanggulangan bencana semacam ini. Kita memiliki bangunan-bangunan dam yang besar seperti Karang Kates, Jatiluhur dan Asahan. Kesemuanya terletak di daerah jalur gunung api. Tanpa ada pengamanan dari bangunan Sabo, dapat dibayangkan jika irigai tersebut dipenuhi oleh sedimen, maka kerugian yang diderita sangat besar. Bukan cuma persoalan keperluan air yang tidak dapat diatur, tapi juga kemampuan irigasi untuk membangkitkan listrik(PLTA) juga akan berkurang, bahkan terhenti.

Mengenai tanggapan masyarakat sekitar, dijelaskan Candra Hassan bahwa penduduk sekitar daerah yang dibangun bangunan Sabo, khususnya di Jawa, sudah cukup sadar. "Bahkan sampai sekarang belum pernah didengar adanya *complain* dari masyarakat," ungkapnya kepada Hermawan dari *Balairung* di kantornya, Sopalan Maguwoharjo, Yogya. Karena mereka telah sadar bahwa bangunan Sabo itu didirikan justru untuk kebutuhan mereka, melindungi mereka. Sabo dibangun di daerah yang memang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, masyarakat sudah bisa diajak kerjasama dalam penanggulangan bencana sedimentasi ini.

Lalu siapa yang menangani proyek Sabo di Indonesia? *Sabo Technical Centre* itulah setidaknya yang selama ini mengoordinasinya. Secara struktural STC berada di bawah Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. STC banyak melakukan pekerjaan yang bersifat umum seperti pekerjaan yang berhubungan dengan jalan, sungai atau waduk. Tugas-tugas Sabo lain seperti perhutanan, terasa sering tidak langsung ditangani. Hal-hal seperti ini sudah menjadi tugas departemen lain yakni Departermen Kehutanan."Jadi meskipun kehutanan juga termasuk Sabo, tapi itu bukan wewenang STC," jelas Candra Hassan lagi. Adanya pemisahan atau pembagian wewenang seperti ini mau tidak mau akan membuat pekerjaan tersebut menjadi kurang terkoordinasi. Untuk itu harus sering dilakukan hubungan timbal-balik agar ada koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.

Karena tanah di daerah gunung sangat labil, maka bangunan Sabo dibuat dengan pondasi mengambang, yakni pondasi yang tidak dalam sampai ke dasar. Sebab dasarnya bergerak seperti pasir. Dibuat mengambang, memang dianggap paling sesuai untuk daerah tersebut, meskipun bisa dengan pondasi yang dalam dan kokoh, tapi itu agak menyimpang dari prinsip bangunan Sabo, yakni murah dan ramah lingkungan.

Dam penahan sedimen
demi nasib beribu manusia

Bangunan Sabo merupakan bangunan yang terpadu. Jika biasanya bangunan seperti dam dibuat satu dan besar, maka bangunan Sabo dibuat secara terpadu dan berantai.

Bangunan di atas mempengaruhi bangunan bawahnya. Demikian pula sebaliknya. "Bangunan Sabo tidak bisa dipandang secara individu, tapi secara keseluruhan," papar Ir. Candra Hassan, Dip.HE.

Prinsipnya untuk membangun bangunan Sabo, harus diperhitungkan besaran arus sedimen secara maksimum, besar batu yang mungkin akan membentur bangunan, kekuatan gempa baik akibat letusan ataupun bukan, serta beberapa banyak perkiraan sedimen yang akan dilewatkan.

Bangunan di bawahnya pun akan diperhitungkan secara sama pula dengan melihat sedimen yang dilewatkan pada bangunan Sabo di atasnya. Begitu seterusnya.

Untuk itu perlu pemikiran dan perhitungan yang matang sebelum dibuat bangunan Sabo. "Jadi perencanaannya harus betul-betul ekstra", tegas Candra Hassan.

Artinya harus ada pola khusus penanganan sedimen dan pendirian bangunan yakni pola umum pengendalian sedimen.

Dengan demikian, bangunan Sabo sangat berperan dalam menanggulangi bahaya bencana sedimen, baik yang berasal dari gunung api berupa lahar (panas dan dingin), maupun dari non-gunung api seperti erosi dan lainnya. "Andai saja Tuhan itu murka kepada kita karena kita banyak dosa lalu meletuskan beberapa gunung saja, tanpa antisipasi teknis Sabo entah sudah jadi apa kota kita (termasuk Yogyakarta-red)." kata pak Hassan berfilsafat. Ya, Teknik Sabo memang perisai Yogya dari amuk Merapi! ❑

Hermawan

Hak-Hak bagi yang cacat:

Penyelamatan dari Kubangan Alienasi

Perwujudan hak-hak hidup bagi orang-orang yang 'invalid' di Indonesia masih runyam. Ketakpekaan pemerintah, kelambatan realisasi undang-undang penyandang cacat, sikap apriori dan skeptis masyarakat, mempurukkan nasib mereka. Sekarang mereka menuntut hak-haknya.

"Aku bisa sendiri, jangan kasihani aku," ujar Kevin pada seorang kawan yang ingin menolongnya menyeberang jalan.

Perkataan ini muncul dari seorang tunanetra ketika pada suatu siang yang terik, mahasiswa tunanetra ini berjalan menuju kampusnya. Ia tinggal tidak jauh dari kampusnya, hanya berjarak beberapa blok saja. Mahasiswa asal Amerika ini belum genap setengah tahun tinggal di Indonesia. Dengan tongkat penuntun, setiap hari ia menyusuri jalan menuju kampusnya.

Ia berhenti sejenak di ujung pertigaan jalan. Sambil menunggu lalu lintas sepi, ia ketukkan tongkatnya mencoba menguasai keadaan. Belum sempat ia melangkahkan kaki hendak menyeberang, seorang pemuda bergegas datang menghampirinya. Pemuda itu kemudian menggandeng tangan kirinya untuk dituntun menyebarang jalan. Ia diam sejenak, diurungkan niatnya untuk melangkah. Perlahan ditepiskannya tangan yang telah menggandengnya. Suasana sejenak menjadi kaku ketika si pemuda menyadari maksud baiknya ditolak. Akhirnya si pemuda mendampinginya menyeberang jalan sambil bercakap-cakap entah tentang apa.

Pemuda itu kembali menekuri semangkuk mie ayam yang tadi ditinggalnya dikantin, "Saya hanya ingin menolong," begitu sempat terdengar ucapannya. Pemuda ini hanyalah salah satu dari anggota masyarakat yang terkadang tidak tahu harus berbuat bagaimana terhadap penyandang cacat. Perasaan iba yang muncul pada setiap orang ketika melihat orang cacat, itu wajar saja dan manusiawi. Namun perbuatan seperti itu apakah bisa diterima oleh mereka (penyandang cacat) atau tidak, tergantung dari bagaimana masing-masing pihak memahami perbuatannya.

Sebagai kaum yang memiliki ketidaksempurnaan fisik, orang cacat cenderung mempunyai perasaan yang sensitif, cepat tersinggung dan perasa, namun mereka juga ingin dihargai, dihormati, diakui eksistensinya sebagaimana manusia normal lainnya.

Diakui atau tidak kadang-kadang yang merasa diri normal, memandang penyandang cacat adalah sebagai mahluk yang patut dikasihani dan tidak memiliki kemampuan apa-apa selain merepotkan.

Mungkin anggapan tersebut akan pudar bila melihat keberhasilan dan prestasi yang diraih oleh panyandang cacat. Lihat saja Marlee Martin, artis bisu tuli yang dengan mengagumkan berhasil memperoleh penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik. Juga Stevie Wonder, penyanyi solo atau Stephen Hawking, ilmuan fisika terbesar abad ini..

Di negeri kita sendiri prestasi semacam juga tidak kurang. Seperti Ramona Purba, tunanetra yang dengan suara emasnya memanja telinga pendengarnya, Ully Sigar Rusady dengan cacat tangannya tidak mengurangi kepiwaian dia bermain gitar akustik, dan masih banyak contoh lain yang bisa memupus

anggapan bahwa penyandang cacat tidak dapat berbuat apa-apa.

Rasanya menjadi tidak tepatlah jika kemudian ada anggapan bahwa penyandang cacat sebagai makhluk yang lemah. Karena pada hakekatnya di bumi ini tidak ada manusia yang tanpa kekurangan. Artinya semua orang mempunyai kecacatan, entah yang menyangkut fisik, mental dan sosialnya.

Selama ini proses integrasi penyandang cacat dengan masyarakat luas belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan proses penerimaan masyarakat terhadap penyandang cacat sendiri belum optimal. Aksesibilitas baik lingkungan fisik dan non fisik belun tercipta. Aksesibilitas di sini di antaranya berupa norma masyarakat dan juga kebijakan pemerintah.

Diskriminasi masyarakat terhadap mereka menjadikan penyandang cacat seperti bukan bagian dari masyarakat. Bahkan penghargaan terhadap mereka seolah tidak ada. Tidak jarang masyarakat sengaja tidak mau berepot-repot dengan menolong mereka.

Wibiwo Raharjo seorang penderita tunanetra bawaan mengisahkan ia paling kesal dengan sikap kondektur bis yang tidak mau menaikkan tunanetra. Suatu kali ia pernah cerita, "Saya masuk ke toko hendak beli baju. Tapi tiba-tiba diberi duit, dikira mau mengemis."

Diskriminasi ini muncul karena dipengaruhi ideologi pembedaaan antara kelompok "cacat" dan kelompok "normal". Celakanya pembedaan ini tidak hanya sebatas istilah dan identitas saja. Namun tumbuh subur pada seluruh aspek kehidupan. Lebih ironis lagi diskriminasi ini terjadi pada semua lapisan masyarakat. Baik dari lingkungan terdekat yaitu keluarga maupun sampai tingkat negara.

Widiharsono mahasiswa Fisipol penyandang cacat tunanetra merasa kesulitan dengan kurangnya buku-buku yang ditulis dengan huruf *braille* di perpustakaan. Apalagi kalau kuliah dilakukan dengan OHP, terkadang ia harus meminta bantuan teman untuk membacakannya.

Pola diskriminasi yang paling dirisaukan oleh penyandang cacat saat ini adalah lapangan pekerjaan. Meskipun bidang yang lainnya misalnya pendidikan, sosial, apalagi politik. Pusat-pusat rehabilitasi tidak memberikan bekal yang cukup. Sementara untuk memasuki pendidikan umum, tidak mungkin karena mensyarakatkan tidak menderita cacat. Meskipun mereka kadang mempunyai kemampuan namun sedikit yang mau menampung untuk bekerja. Biasanya alasan yang ada sangat praktis karena mereka dianggap merepotkan selain diragukan produktifitasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa memang selama ini hal-hal teknis dan yang nampaknya kecil ini terlepas dari perhatian. Ini bukti betapa kecil penghargaan untuk mereka.

Masalah pendiskriminasian yang dihadapi penyandang cacat seakan lepas dari perhatian. Seolah masalah itu hanya milik mereka dan orang "normal" tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut memecahkannya. Apalagi kebijakan dari pemerintah sendiri tidak membuat mereka "ada". Misalnya dengan pembangunan trotoar jalan yang tidak didesain untuk mereka yang menggunakan kursi roda. Hal serupa juga terdapat pada fasilitas umum seperti telepon, perpustakaan, tempat ibadah, bahkan sampai asuransi kecelakaan pun tidak mencantumkan penyandang cacat.

Agaknya suatu langkah yang tepat bila RUU yang diajukan untuk melindungi penyandang cacat telah disahkan baru-baru ini. Artinya ada suatu awal yang bagus untuk meruntuhkan bangunan diskriminasi yang sampai pada tingkat struktural maupun kultural. Hak-hak penyandang cacat yang termaktub dalam undang -undang tersebut di antaranya;

1. Hak untuk memperoleh pendidikan;
2. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Hak memperoleh dan memanfaatkan informasi dan komunikasi;
4. Hak memperoleh perlindungan hukum;
5. Hak memperoleh lingkungan yang aksesibel;
6. Hak memperoleh jaminan sosial yang layak;
7. Hak melakukan peranan politik;
8. Hak untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
9. Hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

Paling tidak dari sini undang-undang punya kekuatan mendesak untuk meningkatkan norma masyarakat yang selama ini masih memarginalkan penyandang cacat. Dengan begitu ada upaya meningkatkan aksesibilitas

penyandang cacat.

Walaupun diakui memang pencapaian aksesibilitas ini tidak hanya dari masyarakat dengan memberi kelapangan tempat bagi penyandang cacat. Namun juga dengan meningkatkan kemampuan penyandang cacat.

Pusat-pusat rehabilitasi dan sekolah-sekolah untuk penyandang cacat telah ada sejak peninggalan zaman Belanda. Meski sampai saat ini *kembang-kempis* nasibnya. Rehabilitasi yang dilakukan hanya sebatas *skill* saja. Sehingga terkesan sebagai upaya mengisolasi mereka dengan dunia luar.

Seperti yang disampaikan Pujianto, seorang mahasiswa berkursi roda yang aktif di BEM dan juga di penerbitan fakultas Filsafat. Menurutnya, kalau berkumpul dengan klub-klub penyandang cacat akhirnya hanya akan menyesali diri. Ketika keluar mereka tidak siap berhadapan dengan orang-orang normal, jadi minder dan tidak ada kesiapan melampaui lingkungan mereka yang baru.

Pujianto juga menambahkan bahwa dalam mengikuti kuliah ia banyak dibantu teman-temannya. Bahkan menurutnya pergaulannya dengan anak-anak "normal" sedikit banyak membuatnya tidak merasa berbeda dengan yang lain.

Jika sorang Agusto Boal, anggota dewan Ceko mempelopori teater rakyat yang berhasil membuat kebijakan yang sangat menghargai penyandang cacat. Pada permainan penonton ikut serta dalam menentukan perjalan cerita bahkan *ending* -nya. Permainan ini berhasil berhasil membuat keputusan tentang penempatan telepon umum agar tidak tertabrak penyandang cacat tunanetra. Jika keputusan dan perhatian pada penyandang cacat semacam itu bisa dilahirkan oleh sebuah kelompok teater, bagaimana halnya dengan sebuah masyarakat yang lebih luas? ❑

Nining Sunartiningsih
M. Arifin, Setiati, Irfan Muktiono, Edo Rahardian.

FERNANDO BESTRAL

Yogya Makin Panas, Dikepung Polusi

Yogyakarta dikenal sebagai kota yang nyaman dan ramah. Kini... panas semakin menyengat. Kebisingan terus meningkat. Udara pun tak lagi segar. Asap knalpot ditengarai memberi andil besar yang membuat Yogya akan kehilangan keramahan dan kenyamanannya. Akankah ini kita biarkan?

Bersepeda lepas subuh di kota pelajar yang juga diyakini sebagai kota budaya ini cukup nyaman dan menyehatkan. Sepanjang jalan Malioboro yang masih sepi mengalirkan udara sejuk yang bersih di pagi hari, melambangkan pernafasan. Begitulah seharusnya Malioboro. Letaknya yang tepat di sebelah utara kraton Yogyakarta, lurus mencapai Tugu adalah bagian dari filosofi keraton sebagai pusat " poros imajiner " yang menghubungkan dua kekuatan natural. Segara Kidul di Selatan dan Gunung Merapi di Utara.

Sayangnya kenyamanan ini tidak bertahan lama. Menjelang setengah tujuh pagi jalan-jalan mulai dipenuhi kendaraan bermotor. Bis kota yang sarat penumpang, mobil-mobil pribadi dan sepeda motor memadati jalan-jalan utama kota Yogyakarta. Asap tebal yang disertai bau tak sedap menunjukkan banyaknya partikel serta gas-gas lain pencemar udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Pada tingkat tertentu pencemaran ini akan mengganggu pernafasan sehingga Malioboro bukan lagi lambang pernafasan, melainkan pasar dan pencemaran.

Pencemaran Udara

Tingginya urban dan banyaknya pendatang yang kebanyakan pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta menuntut tersedianya alat transportasi yang memadai. Bis kota yang setiap pagi dan siang selalu dijejali pelajar dan mahasiswa belum memadai jumlahnya. Hal ini berarti jumlah kendaraan bermotor akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Yogyakarta.

Lalu lintas akan semakin padat. Pada kondisi tertentu hal ini akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pencemaran udara. Menurut data *Perkiraan Prosentase Komponen Pencemar Udara Di Indonesia*, pencemaran berupa partikel kurang lebih 1,33% sedangkan pencemaran gas karbon monoksida (CO) mencapai 70,5% dari sumber pencemar transportasi. Selain itu gas karbon dioksida (CO_2) yang merupakan hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi dalam penurunan kualitas lingkungan.

Walaupun gas karbon dioksida tidak beracun, keberadaannya di udara dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan efek rumah kaca. Energi inframerah yang diemisikan kembali oleh bumi terperangkap oleh lapisan karbon dioksida. Dengan demikian, panas yang seharusnya 'dibuang' ke ruang angkasa, tetap tertahan di atmosfir bumi. Suhu permukaan bumi pun senantiasa terus naik.

Berbeda dengan karbon dioksida, karbon monoksida bersifat racun. Gas ini walaupun tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi orang yang terlalu banyak menghirupnya. Karbon monoksida dapat menurunkan kemampuan berpikir seseorang, memperlambat refleks, dan menurunkan aktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena karbon monoksida lebih kuat terikat pada *haemoglobin* dibandingkan dengan oksigen (O_2). Otomatis volume oksigen dalam darah berkurang sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh juga berkurang. Berkurangnya suplai oksigen ini akan mengganggu "kerja" organ-organ tubuh, termasuk otak yang merupakan pusat pengintegrasian berbagai rangsangan yang diterimanya.

Pencemaran gas karbon monoksida sebagian besar merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil (bensin, solar) dengan udara yang berasal dari kendaraan bermotor. Konsentrasi karbon monoksida yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi mesin dan perbandingan bahan bakar dengan udara yang digunakan. Mesin yang tidak terawat dengan sistem pengapian yang buruk akan mempertinggi kadar karbon monoksida dalam emisi gas buangnya.

Selain gas-gas tersebut di atas, pencemaran udara juga banyak dipengaruhi oleh nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan hidro karbon (HC). Keberadaan zat-zat tersebut dalam jumlah yang cukup tinggi dapat mempengaruhi kesehatan karena zat-zat tersebut mampu mengiritasi organ-organ tertentu seperti mata.

Yogyakarta Belum Tercemar

Menyadari arti penting kualitas udara, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal ini P3LH Biro Bina Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan melakukan pemantauan kualitas udara di wilayah Kotamadya Yogyakarta, pada bulan September dan Nopember 1996. Hasilnya, atmosfer Yogyakarta belum tercemar. Tetapi tingkat kebisingannya sudah melebihi yang batas diperbolehkan menurut Surat Keputusan Gubernur DIY No. 214/KPTS/1991.

Pengotoran udara oleh partikel debu dan karbon monoksida sudah menunjukkan angka yang serius. Bahkan di beberapa tempat kandungan partikel debu sudah di atas batas yang ditetapkan. Seperti di depan kecamatan Jetis di jalan Diponegoro kandungan partikel debunya sudah mencapai 0,305 mg/m3 sementara di depan Kantor Bank Niaga jalan Jenderal Sudirman kandungan partikel debu mencapai 0,255 mg/m3. Padahal batas yang diperbolehkan hanya sampai 0,23 mg/m3. Kondisi terburuk akibat pencemaran partikel debu adalah di depan Hotel Internasional jalan Laksda Adisucipto yang telah jauh melampaui ambang yaitu 0,354 mg/m3. Kandungan karbon monoksida tertinggi di depan Kantor Bank Niaga Jalan Jenderal Sudirman sebesar 20,0 ppm. Sementara di depan Bank BCA Jalan Urip Sumoharjo mencapai 17,0 ppm. Keduanya masih di bawah batas yang diperbolehkan yaitu 26,0 ppm.

Angka-angka tersebut di atas adalah hasil pemantauan bulan September 1996. Data hasil pemantauan pada bulan Nopember tahun yang sama menunjukkan adanya peningkatan kualitas udara. Kandungan partikel debu yang semula tinggi sudah mengalami penurunan

Tabel 1
Perkiraan prosentase komponen pencemar udara dari sumber pencemar transportasi di Indonesia

Komponen Pencemar	Prosentase %
CO	70,50
NOx	8,89
SOx	0,88
HC	18,34
Partikel	1,33
Total	**100,00**

Sumber: Dampak Pencemaran Lingkungan

TIMBUL

Pencemaran gas kendaraan bermotor, problem serius udara kota

Tabel 2
Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAKU MUTU UDARA AMBIEN

No	Parameter	Waktu (Jam)	Baku Mutu
1.	Sulfur Dioksida	1	0,3 ppm
		24	0,1 "
2.	Karbon Monoksida	1	26 "
		8	9 "
3.	Nitrogen Dioksida	1	0,2 "
		24	0,05 "
4.	Oksidan Photokimia	1	0,08 "
		24	0,03 "
5.	Partikel Tersuspensi	24	230 ug/m³
6.	Timah Hitam	24	60 "
7.	Hidrogen Sulfida	30 (menit)	42 "
8.	Amoniak	24	1360 "
9.	Hidrokarbon	3	160 "

Sumber: SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 214/ KPTS/ 1991

yang berarti.

Berhati Nyaman

Untuk mereduksi dampak negatif pencemaran udara yang mulai terasa di Yogyakarta ini, Biro Bina Lingkungan Hidup dan Bappeda Kotamadya Yogyakarta berusaha untuk mewujudkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau tidak sama dengan penghijauan lahan-lahan terbuka. Pengertian ruang terbuka hijau ini adalah lahan terbuka pada satu kota dalam bentuk ruang terbuka kelas kota, kelas lingkungan dan kelas bangunan. Pada kelas bangunan ditentukan perbandingan antara luas daerah yang terbangun dengan luas tanah yang tersedia. Salah satu bentuknya adalah pembuatan taman-taman kota.

"Taman perlu disediakan karena mampu memberikan banyak hal, antara lain sebagai tempat untuk berinteraksi, rekreasi keluarga, dan tempat bermain anak," ungkap Dr. Sugiyanto, konsultan Psikologi Teknologi dan Ergonomi yang juga staf pengajar Fakultas Psikologi UGM. Terbatasnya lahan menyebabkan pemukiman tumbuh meninggi vertikal dan berkembang meluas secara massal, berhimpitan. "Kondisi tersebut mengakibatkan orang merasa kegelapan karena semakin sulit melihat langsung sinar matahari dan menderita disorientasi arah, ketinggian dan letak lokasi," lanjut Dr Sugiyanto. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman-taman kota, *boulevard*

FERNANDO B.

Memandang Yogya dari sudut hijau
"Tunggu aku di pojok taman situ"

dan lapangan olah raga sebagai tempat untuk menghirup udara segar, rekreasi dan bersosialisasi penduduknya. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka hijau ini mutlak perlu karena selain berfungsi sebagai pembentuk iklim mikro, pengendali tata air, penyerap karbon dioksida, pembentuk ruang luar dan pengendali tata ruang, juga berfungsi untuk mencegah perilaku negatif penduduk sekitarnya.

Pembuatan jalur-jalur hijau di sepanjang jalan juga dipandang perlu oleh Hadi Sabari Yunus, pakar Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi UGM. Adanya pohon di sepanjang jalan akan menghadirkan suasana alami yang menyejukkan. Hal ini perlu untuk mempertahankan ikatan kehidupan kota dengan alam.

Lebih jauh Hadi Sabari Yunus menyoroti buruknya koordinasi antar instansi pelaksana. Untuk menginstal jaringan listrik, instansi terkait sering mengorbankan pohon yang sudah cukup rindang. "Hal ini sangat menyedihkan, karena untuk memperoleh pohon itu memerlukan waktu yang lama, sementara listrik dapat diperoleh dalam waktu singkat," tutur Hadi Sabari Yunus menunjukkan keprihatinannya. Lebih lanjut beliau menyarankan, "Sebaiknya mulai dipikirkan instalasi jaringan listrik bawah tanah yang sejalan dengan sistem *caving.*"

Sistem *caving* dimaksudkan untuk mengendalikan peresapan air supaya tidak terjadi banjir. Keuntungannya sistem ini dapat dibongkar pasang dalam waktu yang relatif singkat tanpa banyak mengeluarkan tenaga dan biaya. Perencanaan yang baik belum tentu berhasil baik tanpa didukung

koordinasi dalam pelaksanaannya.

Upaya di atas belum cukup untuk mengendalikan pencemaran udara yang cenderung meningkat. Pemasangan *catalytic converter* dan penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor adalah cara yang cukup efektif untuk mengendalikan emisi gas buangnya. Tetapi hal ini menjadi tidak berarti tanpa dibarengi pengendalian jumlah kendaraan bermotor yang juga cenderung meningkat.

TIMBUL. S

Sepeda

Transportasi publik yang tersisihkan oleh kendaraan pribadi

Transportasi Berwawasan Lingkungan

Pengendalian jumlah kendaraan bermotor dapat diawali dengan peningkatan kualitas angkutan umum. Dengan meningkatnya kenyamanan para pengguna jasa angkutan umum ini diharapkan akan mengubah perilaku pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Hal ini memang berarti meningkatkan jumlah armada angkutan umum, tetapi juga berarti menurunkan jumlah kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas, khususnya Pulau Jawa yang diperkirakan mencapai 41 mobil per kilometer jalan raya pada tahun 2005.

Selain itu, penggunaan alat transportasi tanpa emisi gas buang seperti sepeda harus terus menerus didorong dan diupayakan. "Peralihan model transportasi sangat memegang peranan dalam hal ini," ungkap Dr. Laksono, Antropolog yang juga staf pengajar Fakultas Sastra UGM. "Awal tahun 70 mahasiswa ke kampus masih naik sepeda, tetapi pada pertengahan tahun terjadi peralihan model transportasi," lanjut Dr. Laksono. Pada saat itu mulai muncul Colt Kampus yang merupakan upaya Dewan Mahasiswa UGM dalam membantu transportasi mahasiswa. Dengan Colt Kampus waktu tempuh menjadi semakin singkat, tetapi jalan bertambah padat karenanya. Sehingga sangat wajar bila akhirnya orang enggan naik sepeda. "Ini adalah kesalahan yang

Tabel 3.

Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wil Propinsi DIY

SUMBER BERGERAK

No.	Katagori kedaraan	Bahan bakar	Tahap uji operasi	CO gr/km max	CO gr/km rata2	HC gr/km max	HC gr/km rata2	NO gr/km max	NO gr/km rata2
1.	mobil penumpang maks 5 orang tmsk sopir	bensin	10	28,2	24,6	4,2	3,6	3,7	3,1
2.	mobil barang GVW lebih kecil dari 5 ton	bensin	10	31,4	26,8	4,8	4,3	3,7	3,3
3.	kendaraan diesel								
	- direct injection	solar	6	1050	920			1010	920
	- indirect injection	solar	6	1050	920	680	590	1010	920
4.	kendaraan roda 2*)								
	- 4 tak	bensin	idling	4,5 %		3300			
	- 2 tak	bensin	idling						
	*) dalam ppm								

sumber: SK Gubernur Kepala Daerah DIY no. 214/ KPTS/ 1991

fatal!" lanjut Dr. Laksono.

Yogyakarta tidak terlalu besar untuk dikitari dengan sepeda. Alat transportasi ini bukan hanya akrab lingkungan tetapi juga murah dan menyehatkan. "Di Belanda, profesor ke kampus naik sepeda. Jarak yang ditempuh bukan hanya 5 km, tetapi bisa mencapai 16 km. Mereka bangga dengan hal itu," Dr. Laksono memberikan gambaran.

Di negara Kincir Angin ini pengendara sepeda sangat dilindungi. Jalur sepeda dibuat khusus lengkap dengan *traffic light* dan tempat penyeberangan. Menabrak pengendara sepeda dikenai denda yang sangat tinggi. Belanda sungguh-sungguh menghargai orang yang menggunakan alat transportasi bebas emisi.

Menengok keberhasilan Belanda dalam hal transportasi ini sudah sepantasnya kita tidak malu untuk mengikutinya. Jalur lambat untuk kendaraan tak bermotor harus disediakan. Khususnya pada ruas-ruas jalan dalam kota, kawasan inti, dan kawasan penyangga yang meliputi kawasan bernilai budaya, sejarah, serta jalur-jalur potensial untuk sirkulasi wisata dalam kota.

Perlindungan dan penyediaan fasilitas untuk alat transportasi bebas emisi seperti sepeda, becak, dan andong harus diwujudkan sebagai bagian dari sistem transportasi berwawasan lingkungan. Sebagai contoh adalah *Taman Boulevard* UGM yang menyediakan jalur lambat, pohon-pohon rindang, dan ruang terbuka hijau yang cukup. Pengguna jalan di sepanjang boulevard akan merasa nyaman. Bahkan pejalan kaki pun tidak risih menyusuri tepi jalan yang rindang oleh pohon-pohon cemara. Hal ini sejalan dengan aspek kehidupan sosial Yogyakarta yang penuh tenggang rasa dan kebersamaan sebagai ciri masyarakatnya.

Mengembalikan Yogyakarta pada tahun 70-an secara fisik memang tidak mungkin. Tetapi mengembalikan suasananya yang nyaman dan tak terbeli, masih memungkinkan. Yogyakarta harus segera berbenah. ❑

Pedy Artsanti
Hendrik, Mustajab, April, dan Kusen A. Hadi.

Psikosomatik: Bila Tubuh dan Jiwa Berkolusi

Psikosomatik--begitu sebutan untuk fenomena gangguan fisik yang diakibatkan oleh gangguan jiwa atau psikologis-- kini banyak diderita oleh banyak orang. Disinyalir bahwa ternyata banyak ragam penyebabnya. penyembuhannya bisa dengan meditasi, relaksasi dan sharing pengalaman dengan teman.

Rasanya nggak enak banget lho, masak setiap ujian matematika saya mesti bolak-balik ke kamar kecil, saya nggak ngerti kenapa bisa begini," keluh Deni. Lain yang dialami Deni lain pula yang dialami Endang, katanya, "Setiap melihat wajah dia (orang yang menyukainya) rasanya mau muntah dan perut saya mulas sekali,". Inilah pengakuan dua orang penderita psikosomatik.

Bila anda pernah atau sedang mengalami hal serupa, ketika stress, bisa disebabkan oleh faktor apa saja, tubuh secara otomatis memberikan teaksi, berati anda termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang pernah atau tengah mengalami gangguan kejiwaan yang dikenal dengan psikosomatik.

Pada hari Kesehatan jiwa sedunia tahun 1995, Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa kurang lebih 30% penduduk Indonesia mengalami gangguan kejiwaan. Kita sempat kaget mendengar uraian kepala negara tersebut, bagaimanapun juga jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan 3 dari 10 orang yang datang ke Puskesmas terganggu jiwanya dan salah satu prosentase terbanyak dari gangguan jiwa yang dimaksud adalah gangguan psikosomatik. Seberapa bahayakah psikosomatik dan apakah psikosomatik ini sama dengan gangguan jiwa yang lain seperti hilang ingatan? Apakah psikosomatik bisa disembuhkan?

dr. Inu Wicaksono

Apakah psikosomatik itu?

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGI-II, 1983), psikosomatik merupakan istilah klasik untuk kasus-kasus yang menunjukkan gejala-gejala ataupun keluhan-keluhan pada fisik, yang ditimbulkan oleh faktor-faktor psikologis. Faktor psikologis itu bisa bermacam-macam, seperti : ketidakberesan dalam perkawinan, tekanan dalam pekerjaan, rapuhnya ekonomi keluarga, memikirkan anak yang nakal, memikirkan suami yang mempunyai WIL atau sebaliknya, di-PHK, pensiun, diancam DO, dikucilkan dari kampus, kegagalan dalam studi, atau putus cinta.

Menurut Dra. Ira Paramastri, psikolog dari Fakultas Psikologi UGM, psikosomatik merupakan suatu gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan psikis. Penyebab utamanya adalah stress. Hal senada diungkapkan oleh Dr. Inu Wicaksono, seorang psikiater dari RSU Dr. Sardjito yang juga menjabat sebagai staf RSJ Magelang, bahwa psikosomatik menunjukkan adanya hubungan yang erat antara psikis (jiwa) dengan somatik (fisik, badan).

Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu *nerosa organ.* Karena biasanya hanya fungsi faal/fisik yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan *psikofisiologik.* Umumnya psikosomatik dibagi

menjadi dua golongan. Pertama, malfungsi fisiologik, yaitu pelbagai gejala fisik atau gangguan fungsi fisik yang berkaitan dengan faktor mental, tapi tidak ada kerusakan organ (jaringan tubuh) yang dapat dideteksi secara medis.

Terdapat rangsangan psikologik (*stressor* psikologik) yang berkaitan dengan munculnya gejala-gejala atau keluhan fisik. Misalnya: nyeri kepala kumat-kumatan, sesak napas, detak jantung tak teratur, nyeri dada (ulu hati), gatal-gatal (pruritus) di anus, genital wanita, hiperhidrosis (keringat banyak di tubuh dan tangan), diare terus-terusan, atau nyeri haid (*dismenore*).

Menurut Dr. Inu Wicaksana, banyak pasien yang datang padanya mengeluh menderita suatu penyakit, padahal setelah diperiksa secara medis tidak ditemukan satu jenis penyakitpun. Keluhannya sangat beragam. Kadang-kadang rasa sakit tidak hanya di satu tempat tapi bisa berpindah-pindah tempat atau bahkan di banyak tempat.

Bila ditemui penderita seperti itu, papar Dr Inu Wicaksono, maka yang harus dilakukan adalah mencari faktor penyebabnya. Mungkin dia mempunyai masa lalu yang tidak menyenangkan seperti: didikan orang tua yang otoriter sehingga dia berubah menjadi dingin dan selalu *negative thinking* terhadap orang lain, lingkungan sekitar yang tidak bersahabat (minimal menurut dia).

Kedua, faktor psikologik yang mempengaruhi kondisi (penyakit) fisik. Pelbagai faktor psikologik yang memegang peranan penting dalam etismologi semua kondisi fisik (kerusakan organ atau jaringan). Biasanya orang tersebut sudah mempunyai kelainan pada fungsi fisiknya dan dapat dibuktikan secara medis di laboratorium. Dengan kelainan fisik atau somatik yang dideritanya, maka penyakitnya akan kambuh bila dia *stress*. Jadi, munculnya kelainan fisik dipengaruhi atau diperberat oleh faktor-faktor (*stressor*) psikologik. Misalnya, seseorang sudah mempunyai penyakit *maag*, dalam keadaan biasa penyakitnya tidak kambuh tapi saat dia *stress*, asam lambung meningkat sehingga akan melukai dinding lambung, dan akhirnya si penderita akan mengeluh nyeri lambung, perut mual dan sebagainya. Hal yang sama dialami oleh penderita yang mempunyai gejala penyakit nyeri sendi, asma, atau payah jantung.

Dalam ilmu psikologi, terdapat suatu teori *Somatik Weaknes*; yang menyebutkan bahwa gangguan psikosomatik biasanya menyerang bagian tubuh yang rentan. Misalnya,

bila kita mempunyai kelemahan pada bagian kepala maka saat kita *stress* yang akan terserang adalah pada bagian kepala. Atau bila kita rentan pada bagian perut (*gastro*), maka yang akan sangat terasa adalah bagian perut.

Konflik dan gangguan jiwa dapat menimbulkan gangguan badaniah yang terus menerus, biasanya hanya pada satu organ tubuh saja, tetapi kadang-kadang juga berturut-turut atau serentak beberapa organ yang lain. Untuk klasifikasinya, maka jenis gangguan dibagi menurut organ yang paling sering terkena, yaitu kulit, otot dan tulang, saluran pernapasan, sistem kardivaskuler, saluran pencernaan, *urogenital* dan sistem *endokrin*.

Teori lain dikenal dengan teori *Specific Reaction*, yang menyatakan gangguan psikosomatik untuk setiap orang tidak sama atau khas untuk setiap orang saja. Misalnya ada *stressor*, sebagian orang akan memberikan reaksi dengan adanya *stressor* itu dan mengalami gangguan psikosomatik, tapi orang lain meski diberi *stressor* yang sama tidak akan memberikan reaksi apa-apa.

Psikosomatik biasanya diderita oleh orang-orang yang mempunyai kepribadian labil yaitu mereka yang dikategorikan dalam tipe orang-orang yang mudah terkena *stress*, seperti tipe orang yang tidak percaya diri, pencemas (*neurotik*), banyak memakai pola pikir negatif, mudah takut dan merasa tidak berguna, tipe seperti ini digolongkan pada tipe A. Untuk tipe B yang merupakan kebalikan dari tipe A yang mempunyai sifat sangat ambisius, tidak ingin disalahkan, ingin selalu berhasil, tidak pernah ingin gagal.

"Setiap orang pasti mengalami *stress*," tutur Dra. Ira Paramastri. Hanya saja tergantung bagaimana dia mengolah dan mensikapi *stress* yang dialami hingga tidak sampai menimbulkan gangguan kejiwaan yang fatal. Untuk orang yang mempunyai kepribadian normal, cenderung mampu menghadapi *stress*.

Apakah psikosomatik berbahaya?

Sebenarnya psikosomatik tidak berbahaya tapi akan sangat mengganggu. Sebab bila seseorang mengalami psikosomatik, maka dia tidak dapat memfungsikan dirinya secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi peran menurun, konsentrasi berpikir terganggu, tidak produktif, bahkan dapat mengganggu lingkungannya. Bila sudah bersifat patologis, jelas selain mengganggu bagi dirinya bisa juga bagi orang lain.

Psikosomatik ini akan sangat berbahaya bila diderita oleh orang yang sebelumnya telah mempunyai penyakit klinis, misalnya mempunyai gejala penyakit jantung. Dalam kondisi ini bisa jadi dia akan mengalami kematian akibat *stress* yang dialaminya.

Karena psikosomatik ini bisa dialami oleh semua orang maka hal tersebut tidak harus menjadikan kita malu ataupun minder. Sebaiknya

cepat mencari sumber penyebabnya, sambil berupaya menghilangkan stress tersebut. Kita akan terus menerus tersiksa bila kita tidak dapat menerima keadaan ataupun mengatasi *stress* yang diderita. Bila dijumpai hal yang bersifat klinis maka pengobatan mutlak segera dilakukan.

Pengobatan psikosomatik

Psikosomatik bukan penyakit yang berbahaya dan bukan pula penyakit menular. Pengobatannya dapat dilakukan dengan latihan dan terapi. Kalaupun ada yang bersifat klinis dapat dicegah dengan obat sesuai tingkat penyakit yang diderita. Psikosomatik dapat diobati dengan bermacam-macam cara. Bila psikosomatik dapat dilihat secara fisik dan psikis maka pengobatannya dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara psikis pengobatannya dengan terapi, misalnya latihan relaksasi.

Relaksasi adalah mengendorkan urat syaraf yang tegang. Karena penderita *stress*, aktivitas sistem syaraf simpatitiknya cenderung lebih tinggi. Maka pengendoran urat syaraf sangat membantu mengurangi penderitaan. Relaksasi merupakan proses pembelajaran yaitu kita dituntun untuk menegangkan (merasakan ketegangan yang dialami), lalu mengendorkan, kemudian menegangkan, mengendorkan, secara terus-menerus sampai kita merasa nyaman. Relaksasi ada dua yaitu: relaksasi otot dan relaksasi kesadaran indera.

Pengobatan lain dapat dilakukan dengan yoga, meditasi, hidroterapi, *sharing* dengan teman, mendengarkan musik, atau olah raga ringan dan bersifat rileks. Pengobatan dapat juga dilakukan dengan obat-obatan. Susunan syaraf *vegetatif* yang sangat kacau dapat diatur dan ditenangkan dengan obat-obatan, sehingga dengan demikian penderita menjadi lebih tenang dan dapat menerima psikoterapi dengan baik. Obat-obatan yang dapat dipergunakan untuk ini antara lain, obat yang dapat menstabilkan fungsi susunan syaraf vegetatif secara umum ataupun organ tertentu, seperti anti depresi atau anti cemas, *neroleptika* ataupun *tranquilaizer*.

Kadang-kadang ada penderita psikosomatik yang sikapnya tradisional. Terhadap dokter yang merawatnya sering mengharapkan suatu obat atau suntikan untuk menghilangkan gejala-gejalanya.

Tergantung pada kepribadian dan inteligensi penderita, maka dia harus diyakinkan bahwa kesembuhannya tidak tergantung pada obat-obatan saja. Pada mulanya obat memang dapat menolong, tetapi penderita untuk selanjutnya sebisa mungkin tidak boleh tergantung terus menerus pada obat tersebut.

Tujuan pengobatan adalah untuk menghilangkan gejala-gejala. Supaya gejala-gejala lenyap, maka tujuan yang lebih utama tentu adalah mengembalikan kestabilan emosi menuju kematangan kepribadian.

Strees bisa dialami oleh semua orang, maka sebaiknya kita membiasakan diri hidup sehat baik sehat berpikir, maupun sehat badan sehingga prosentase penduduk Indonesia yang menderita gangguan jiwa dapat dikurangi.

Kita bisa memulai secara sederhana, menjalani hidup apa adanya tanpa menghilangkan hasrat dan makna hidup itu sendiri. ❑

Wuwun Widiawati
Mora Claramita

TEATER

AKU MASIH HIDUP/CALIGULA
KARYA: ALBERT CAMUS
DIBAWAKAN OLEH TEATER PAYUNG HITAM BANDUNG
SUTRADARA: RACHMAN SABUR
TEMPAT: ARENA TAMAN BUDAYA SURAKARTA

Ia berjalan begitu tergesa-gesa, memasuki pintu-pintu tak berdaun sambil sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan. Sementara suasana begitu mencekam, dengan cahaya biru yang temaram. Sesosok mayat tergeletak di atas meja dibungkus kain putih.

Ia tertegun sejenak menatap mayat itu, yang tak lain adalah orang yang dicintainya. Lalu dibukanya kain itu, serempak dentuman musik yang keras dan disusul kemudian suara-suara kereta api yang menderu-deru.

Begitulah awalnya. Kematian orang yang dicintainya telah menyadarkannya tentang kehidupan yang serba absurd. Kematian menjadi keharusan yang membuat manusia menjadi tidak bahagia. *"Kebenaran adalah kematian,"* katanya.

Untuk mengatasi kehidupan yang absurd itu, maka, Ia harus berontak mengatasi keabsurdan itu. Kesia-siaan hanya dapat dilawan dengan "kegilaan" (menurut pandangan umum). *"Aku mau mencari bulan, sekalipun itu mustahil"*

Karya asli dari naskah *Aku Masih Hidup* ini tadinya berjudul *Caligula.* Dalam setiap karya-karyanya, Albert Camus, seorang eksistensialis, selalu memandang hidup sebagai suatu kesia-siaan. Kematian manusia adalah contoh besar dalam keabsurdan hidup. *"Manusia mati karena itu tidak bahagia."*

Untuk mengatasi kesia-siaan atau absurditas dalam kehidupan ini, Camus mengajak semua orang untuk berontak. Berontak terhadap semua nilai-nilai yang telah mapan. Keadilan, kedamaian, kasih sayang tidak akan ada gunanya. Toh, akhirnya kematian akan merenggutnya.

Namun pemberontakan yang ditawarkan tak lebih adalah suatu bunuh diri. Kematian, dengan cara apapun dan kapanpun hakekatnya adalah kematian juga. Manusia tidak perlu *cengeng* hanya untuk memperpanjang hidupnya. Yang itu justru malah memperpanjang penderitaannya. Misalnya karya-karya Camus yang lain seperti *Les Justes* (1949), *la Chute* (1959), lakon ini diakhiri dengan suatu tindakan bunuh diri.

***

Di Indonesia lakon Caligula sudah begitu dikenal, tak heran jika sering dimainkan. Lakon ini pertama kali dipentaskan di Paris tahun 1950. Kelemahan dari pementasan naskah-naskah terkenal seperti ini adalah tidak adanya unsur kebaruan bagi penontonnya.

Namun, kelemahan ini dapat diatasi oleh Rachman Sabur dengan cermat. menjadi kebiasaan terbaru bagi Rachman Sabur untuk mengganti judul naskah yang disutradarainya.

Pementasan *Aku Masih Hidup* di Arena Taman Budaya Surakarta ini merupakan pementasan yang kedua kalinya. Sebelumnya lakon ini pernah dimainkan oleh kelompok teater yang sama di Festival Teater Indonesia Oktober 1996 di Bandung.

Kekompakan pemain patut diacungi jembol. Meski *setting* ceritanya terpotong-potong namun dapat disiasati secara apik dengan penataan pintu-pintu tak berdaun yang diberi roda, yang menyerupai formasi tarian. Didukung dengan penataan musik yang cermat membuat panggung

"Manusia Mati, Karena Itu Tidak Bahagia"
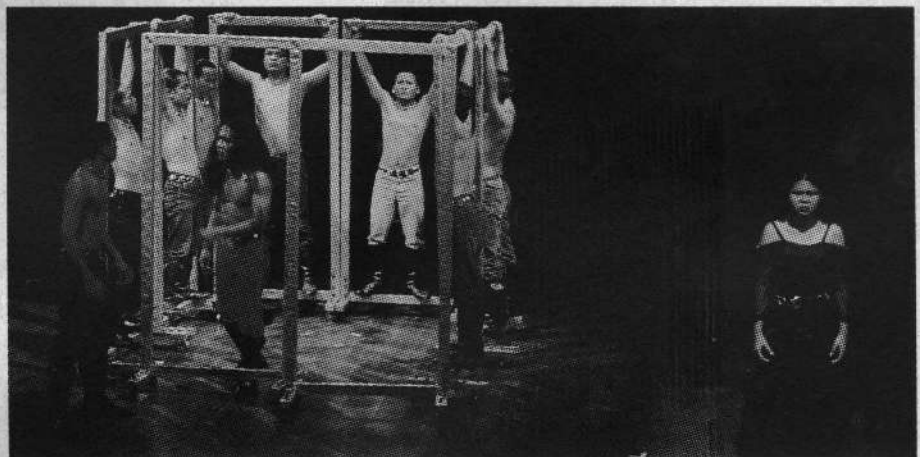
Setting cerita dibuat agak lebih modern. Semua pemain, kecuali seorang wanita, bertelanjang dada, bercelana jins dan sepatu bot tinggi dan berkalung rantai. Ini yang membedakan dengan yang pernah dimainkan oleh Teater Garasi (Fisipol UGM) beberapa waktu lalu, dengan setting cerita yang mengambil nuansa Yunani.

Keberanian Rachman Sabur dalam menampilkan cerita yang tidak ada dalam naskah asli Caligula ini membuat pementasan tersebut terasa lain. Tak satu pun dalam pementasan tersebut menyebut nama seseorang. Yang ada hanyalah Aku, Engkau dan Dia. Bahkan judulnya pun dirubah. Semula berjudul "Caligula" menjadi "Aku Masih Hidup". Dan ini sudah

terasa lebih bersinambungan.

Namun sayangnya, kehadiran pemain figuran tidak membuat pementasan menjadi hidup, bahkan seolah-olah menjadi patung di atas pentas. Ini beda sekali dengan permainan bagus Rusli Kelleng yang tidak diimbangi oleh pemain-pemain lain. Kesan pementasan tersebut seolah milik Rusli Kelleng sendiri.

Secara keseluruhan pementasan kali ini terbilang cukup berhasil. Stamina para aktornya patut diberi aplus. Terutama Rusli Kelleng, yang hampir diseluruh adegan dia hadir. Dia mampu melontarkan dialog selalu dalam tensi yang tinggi dan bisa menampilkan karakter seorang yang betul-betul "gila". ❑

Mashudi

KONSER MUSIK

HOME CONCERT 1996
PADUAN SUARA MAHASISWA (PSM) UGM
14 DESEMBER 1996
UNIVERSITY CENTRE BULAKSUMUR

Ketika *Bohemian Rhapsody*-nya Queen Mengalun dalam Koor...

Ketika kata paduan suara (orang menyebutnya koor) terlontar, terbayang suasana gereja dengan piano dan organ atau alunan musik klasik berbahasa latin. Sungguhlah wajar bayangan itu, karena paduan suara berakar dari gereja untuk kepentingan liturgi peribadatan. Kemudian seni ini berkembang terutama di daratan Eropa, khususnya Jerman dan Austria. Dari masa inilah dikenal musisi-musisi klasik macam Hayden, Handell, Bach atau Mozart.

Kesan konvensional memang begitu melekat jika kita melihat gaya klasik pada paduan suara. Terpaku oleh ketukan, berbahasa latin; tidak banyak improvisasi. Tapi sebenarnya anggapan ini tidaklah tepat. Pada saat ini jenis musik yang lain seperti pop, jazz dan etnik mulai banyak dicoba sebagai inovasi baru dalam seni. Paduan suara sekarang ini mulai menyajikan berbagai ragam lagu. Dari Ave Verum yang sangat klasik sampai Bohemian Rhapsody milik kelompok Queen.

Home Concert 1996 yang digelarkan oleh Paduan Suara UGM pada tanggal 14 Desember 1996 lalu, bertempat di University Centre Bulaksumur, merupakan salah satu momen pengenalan dan apresiasi seni paduan suara bagi masyarakat luas. Dalam konser ini disajikan berbagai ragam lagu, dari klasik karya Mozart, lagu pop, nasional sampai lagu daerah disuguhkan cukup lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan bagi mereka, karena selera penikmat musik umumnya kurang menyukai musik klasik (sebagai jenis musik akar paduan suara). Paling tidak lewat momen ini masyarakat dikenalkan dengan paduan suara sebagai sebuah seni. Pepatah "tak kenal maka tak sayang", mungkin berlaku untuk kondisi ini. Maka lewat konser inilah dicoba untuk mengenalkan kepada masyarakat; sebagai sebuah misi yang tak muluk-muluk.

DOC. PSM UGM

Lagu-lagu yang dibawakan dalam *home concert* ini adalah karya si Ajaib Mozart, yang sudah mampu membuat komposisi pada usia 7 tahun. Masyarakat yang banyak mengenal Mozart lewat komposisi orkestra dikenalkan dengan karya-karya opera. Ada beberapa cuplikan opera yang dinyanyikan. *Opera Titus, Opera Idemeneo* yang diciptakan pada umur yang masih sangat muda. *Opera Marriage of Figaro* yang meriah; *opera Don Giovanni* yang romantis. Selain itu juga disajikan lagu *Ave Verum*, sebuah *motet* (komposisi untuk paduan suara diiringi kuartet gesek dan organ) yang terkenal.

Selain musik klasik ditampilkan pula lagu-lagu daerah macam *Gambang Suling* yang *kemayu*, *Kicir-Kicir* yang bernuansa dinamis dan lagu do'a, sebuah musikalisasi puisi dari sajak berjudul *Do'a* karya Amir Hamzah.

Unsur inovasi dicoba untuk dimunculkan lewat hadirnya Yogyakarta Guitar Orchestra Institut Seni Indonesia (ISI Yogyakarta). Orkes gitar satu-satunya di Indonesia ini mengiringi sekitar enam lagu dan membawakan satu reporteir bebas yaitu *Cuban Lanscape with Rain*. Kehadiran orchestra yang disingkat YGO ini merupakan hal yang tak lazim sebab orkes yang biasa mengiringi paduan suara adalah orkes gesek. Sebuah inovasi baru yang pantas diacungi jempol.

Memang ini sebuah dilema. Pada satu sisi terlihat adanya keinginan untuk memasyarakatkan paduan suara sebagai sebuah seni. Di sisi lain biaya produksi sebuah konser tidaklah sedikit dan sponsor yang dijaring tidaklah seramai sebuah pementasan Kla Project atau Gigi Band. Ketika tiket konser ini ditawarkan, muncul komentar; "wah mahal.... *mendingan* untuk nonton film di Empire (salah satu gedung film kelas atas di Yogyakarta).... lebih murah."

Belum adanya penghargaan untuk jenis musik seni ini semoga tidak menjadi kondisi yang abadi. Semoga suatu saat nanti, sedikit demi sedikit masyarakat mulai mengenal dan mengapresiasi paduan suara sebagai sebuah seni. ❑

** tulisan ini atas kebaikan dan laporan:
Yovita Ari N. Probandari -
Paduan Suara Mahasiswa UGM

dokumentasi Unit Foto UGM

Mas Karebet dari Bulaksumur

KETOPRAK

GEGER DEMAK
DIBAWAKAN OLEH: KETOPRAK GABUNGAN UKM UGM
SUTRADARA: BONDAN NUSANTARA & GATI HANDOKO
TEMPAT: GEDUNG PURNABUDAYA YOGYAKARTA

Pementaan ketoprak mahasiswa agaknya memang beda dengan ketoprak-ketoprak selazimnya (ketoprak tobong). Kostum dan pemanggungan boleh sama. Namun kemampuan sutradara menggarap aktor, komposisi musik (gending), tata panggung, muatan dialog, plot atau lebih lagi interpretasi teks sejarah, ini yang membedakannya.

Inilah ketoprak nahasiswa yang penggarapannya melibatkan empat UKM UGM; Sekber Kesenian, Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM), Menwa dan Sekber olahraga, kumpul bareng dan main ketoprak "dalam rangka" *mangayubagya* Dies Natalis UGM ke-47 (19 Desember 1996). Ketoprak yang bertajuk *Geger Demak Bintoro* ini dipentaskan cuma semalam.

Adalah kerajaan Demak Bintoro di bawah kekuasaan Raden Trenggono, waktu itu konon lagi limbung. Pasalnya pamor dan perpecahan di kalangan wali ditambah kebobrokan moral aparatur negara sudah mengkhawatirkan. Ide cerita ini sebenarnya cukup sederhana. Sewaktu Baginda Raja Raden Trenggono hendak shalat Jum'at, ada anak muda melompat di depannya seolah pamer kedigdayaan. Persoalan sepele inilah yang diangkat dalam dialog *pasowanan* Sultan, yang menampilkan tokoh antagonis bernama Semi (Anggit Budinugroho), pamongpraja yang tak cakap tapi banyak *contong*.

Lantas muncullah si protagonis, pemuda desa yang dipermasalahkan yang tiada lain adalah Mas Karebet, perjaka dari dusun Tingkir (yang diperankan dengan cacat oleh Ratun Untoro). Mas Karebet atawa Joko Tingkir ini, adalah pemuda desa yang coba dimasukkan ke dalam lingkar sistem kekuasaan Raden Trenggono oleh Kebo Kanigoro, seorang tokoh di belakang layar yang lebih suka hidup menepi di desa. Kemudian masuklah Karena kamampuan ilmu silatnya Mas Karebet atau Joko Tingkir ini akhirnya diangkat sebagai Lurah Wiratamtama. Setingkat dengan panglima prajurit karajaan.

Kisah pun bergulir. Dasar anak dusun yang kagetan, Mas Karebet silau oleh kecantikan putri kerajaan, Ratu Kambang (Rini Widyastuti). Roman asmara pun terjalin. Saat keduanya tengah di mabuk asmara di sanggar keputrian, Sultan Trenggono memergokinya. Perang mulut dan diakhiri perang tanding tak bisa dielakkan. Sebagai hukuman karena bertindak indisipliner, Joko Tingkir diusir dari wilayah Demak. Pada akhirnya ia kembali ke desa dan menemui Kebo Kanigoro.

Dikemas dengan *setting* panggung sederhana, kemampuan vokal yang rata-rata, *blocking* aktor masih terasa kaku di sana-sini. Permainan warna dan gending karawitan yang tak lazim dalam ketoprak, meski cukup mengatrol permainan aktor yang nampak kedodoran, tetap menimbulkan tanda tanya. Ketoprak dengan iringan karawitan apakah pilihan estetika panggung, inovasi baru atau hanya karena untuk menfasilitasi Unit Kegiatan Karawitan gaya Surakarta?

Pementasan berdurasi hampir dua jam ini, dengan fokus permasalahan sebagai titik poin malah kabur. Dikalahkan oleh figuran yang terlalu banyak tampil memakan waktu. Adegan *guyonan* para prajurit, cengkerama di keputrian antara Senik, Dhenok dan Jodhang, membantu mencairkan kekakuan dengan joke-joke *saru* nan politis. Adegan-adegan dalam naskah cerita yang mestinya melengkapi naskah teks, kadang berjumpalitan. Semisal tidak tampilnya Buyut Banyu Biru, bisa jadi terkena pemangkasan karena alasan waktu yang tak memadai.

Pementasan ini diakhiri dengan *happy ending*--kembalinya Mas Karebet ke Demak-- membereskan huru-hara karena amukan seekor kerbau. Sepenuhnya memang bisa ditebak. Anak dusun ini diangkat lagi menjadi Lurah Wiratamtama, tentunya juga mengawini Ratu Kambang seterusnya menggantikan Sultan Trenggana dengan gelar Sultan Hadiwijaya. ❑

Prabowo

Partisipasi dalam Persimpangan
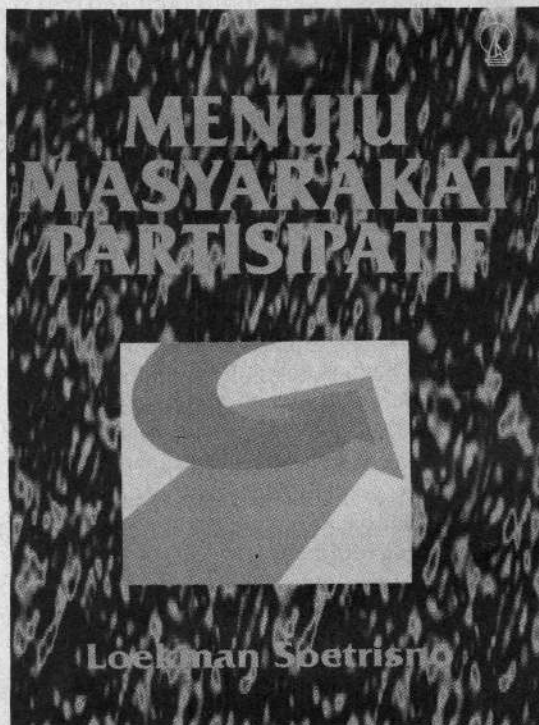
Istilah partisipasi dalam masyarakat kita telah menjadi sebuah slogan. Sebagai slogan tidak aneh kalau istilah ini begitu populer di lapisan manapun. Setidaknya semua orang mengenal istilah ini. Terlepas dari paham tidaknya mereka atas definisi kata ini.

Celakanya, kata ini terlanjur salah kaprah dimengerti. Definisi partisipasi selama ini dipahami secara pasif dari defensif. Dimaknai sebagai sesuatu yang mengandung penafsiran tunggal dan tertutup kemungkinan untuk mendefinisikannya secara alternatif.

Buku Loekman Soetrisno ini antara lain mencoba membongkar pemahaman sloganis yang sudah terlanjur mendarah itu Tidak sekedar memaparkan persepsi sempit yang telah menjarah kepala setiap orang. Akan tetapi ia juga mengemukakan konsep epistemologis tentang definisi partisipasi yang bertalian dengan proses pembangunan di Indonesia.

Subjek dan Aktif

Menurut Loekman Soetrisno, banyak program pengembangan dan pembangunan masyarakat mengalami kegagalan. Setidaknya dalam dataran memaknai arti partisipasi pembangunan.

Di kalangan aparat, partisipasi dipahami sebagai keharusan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah, tulis Loekman (hal. 207). Pemahaman semacam ini yang secara hierarkis tertanam sampai tingkatan aparat terbawah membawa implikasi terciptanya subordinasi subsistem dalam suprasistem yang timpang. Maka yang berlaku akhirnya pola pemerintah aktif sedangkan rakyat pasif. Aparat membuat program dan rakyat diharuskan mendukung. Akibatnya bisa ditebak, di dalam masyarakat muncul pola *top-down* yang bersifat holistik komunal. Padahal, kata Loekman definisi universal partisipasi itu bukanlah demikian. Partispasi seyogyanya dipahami sebagai proses kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan melaksanakan melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Artinya, keduanya menjalankan konsep pembangunan secara kesadaran penuh dan bijak.

Kerjasama di sini tidak diasumsikan ada yang dominasi dan subordinat. Dengan demikian semua komponen diposisikan sebagai subjek yang sama-sama harus aktif dalam proses yang sudah disepakati bersama.

Hambatan Ideologi

Alasan lain mengapa banyak program pemerintah gagal di lapangan adalah karena oleh aparat pembangunan telah dipersepsikan sebagai sebuah ideologi. Karena pembangunan adalah ideologi, maka persepsi yang muncul adalah sikap ingin menjaga dan mengamankannya. Dengan begitu yang boleh aktif adalah aparat.

Adanya persepsi demikian selain memunculkan sikap pasif masyarakat, juga memunculkan budaya baru yang disebut budaya bisu. Suatu sikap acuh dengan apa yang terjadi dan buntutnya memunculkan sikap apriori dan tertutup terhadap kondisi yang ada. Mereka menganggap aspirasi telah dipasung. Sikap apolitis pada mulanya juga berawal dari sini. Fenomena demikian dalam jangka panjang sangat membahayakan kehidupan bangsa. Untuk itu kata Loekman paling tidak ada tiga hal yang harus dibenahi. *Pertama,* mengubah persepsi yang muncul tentang partisipasi. Partisipasi harus dipahami bukan sebagai upaya mobilisasi rakyat, tetapi lebih pada proses kerjasama antara rakyat dan pemerintah. *Kedua,* pembangunan dilaksanakan bukan sebagai sebuah ideologi yang melibatkan pengamanan ketat, tetapi dilakukan sebagai sebuah kewajiban moral bersama semua anak bangsa. *Ketiga,* diciptakan sikap toleransi yang tinggi terhadap kritik atau evaluasi dari masyarakat. Sebab partisipasi yang sesungguhnya akan muncul jika rakyat diberi kebebasan untuk membuka pemikiran alternatif dan selanjutnya diberi keluasaan untuk melaksanakannya sendiri berdasarkan kebutuhannya. ❑

BUKU

MENUJU MASYARAKAT PARTISIPASIF
PENULIS: PROF. DR. LOEKMAN SOETRISNO
PENERBIT: KANISIUS, YOGYAKARTA, 1996
TEBAL: 260 HALAMAN

Istiqomatul Hayati
Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada)

ISTIMEWA
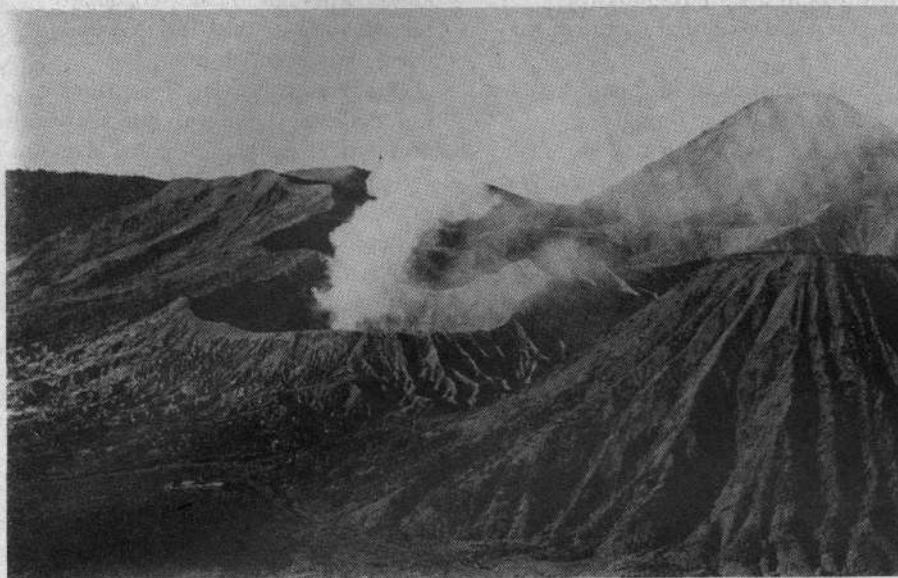
Gunung Bromo dengan kawahnya yang selalu mengepulkan asap

Tempat Dewa Api bekerja

Suku Tengger di Dataran Tinggi Bromo

Tengger, Lima Ratus Tahun Sisa-Sisa Majapahit

Suku Tengger di tengah perkembangan teknologi dan pengembangan pariwisata Taman Nasional Bromo, ternyata mampu mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Meski bukan lagi termasuk suku pedalaman, Tengger masih berproses dalam menampilkan jati dirinya.

Membentang di empat kabupaten --Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Malang -- daerah Tengger telah menjalani sejarah berabad-abad melewati berbagai perubahan arus jaman. Dan di dalamnya, masyarakat Tengger meniti liku-liku itu sambil menyaksikan dunia sekelilingnya berubah, sementara identitas yang melekat dalam dirinya pun mau tak mau harus turut pula bergeser mengikutinya.

Melacak asal muasal masyarakat Tengger adalah perjalanan *flashback* sepuluh abad ke belakang. Ketika masyarakat di pusat-pusat kekuasaan yang telah menghasilkan Borobudur dan Prambanan, mulai bergerak ke Timur, ke suatu tempat yang sekarang disebut Kediri. Awal abad ketigabelas, pergeseran itu terus berlanjut ke Singosari, persis di ujung barat dataran tinggi Tengger. Berbagai macam spekulasi menyatakan bahwa perpindahan itu bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, orang menghindari pengerahan tenaga kerja massal saat diadakan pembangunan candi-candi besar di Jawa Tengah pada saat itu. Dan kedua, eksodus itu berkaitan dengan perdagangan rempah-rempah, di mana penguasa yang berdiam di bagian timur Jawa berperan sebagai perantara.
Ketika akhirnya sebuah pusat kerajaan yang kini diyakini sebagai kerajaan Majapahit didirikan, itu mengakhiri perseteruan berkepanjangan dengan kemenangan silih berganti antara Kediri dan Singosari. Majapahit adalah Singosari yang berkembang pesat setelah memantapkan keberadaannya dengan lebih dulu membungkam saingan terdekatnya yaitu Kediri.

Pada perkembangannya, Singosari Majapahit menempatkan wilayah Tengger sebagai wilayah penting berkenaan dengan pelaksanaan ritual keagamaan yang berpusat di sana. Sebuah sumber penting yang berasal dari masa akhir Majapahit, Tantu Panggelaran, menyebutkan bahwa Gunung Bromo merupakan tempat di mana Brahma, dewa api melakukan pekerjaannya. Sumber lain, Negarakertagama, menyebutkan bahwa di abad ke-14, Hayam Wuruk pernah menyusuri wilayah ini untuk memeriksa perkembangan di daerah

pedalaman.

Gelombang dari Barat

Berbicara soal Tengger memang tidak bisa dilepaskan dari pasang surut kerajaan Majapahit yang benar-benar lenyap pada abad lima belas. Tenggelamnya kerajaan ini sebagian disebabkan karena kebangkitan kerajaan-kerajaan merkantilis di bagian barat dan timur kepulauan Melayu. Para pedagang dari barat itu masuk lewat mulut Sungai Brantas, dan mendesak kekuasaan kerajaan hingga makin jauh ke pedalaman.

Pada tahun 1520, Majapahit jatuh ke tangan penguasa Islam dari pantai utara Jawa, yaitu Demak. Maka, proses Islamisasi yang telah merambah jalur perdagangan melewati Sumatera Utara, Malaya, Filipina bagian selatan dan Selat Malaka seolah mendapatkan "buruan" kakapnya: kerajaan Hindu-Budha terbesar saat itu, yaitu Majapahit.

REPRO DOC. PUSLIT UNEJ

Pura Agung di kaki Gunung Bromo
Tempat upacara adat

Potret paling nyata dari jejak masa lalu itu adalah Pasuruan hari ini. Daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu berada di dataran rendah yang terletak persis di "bawah" dataran tinggi Tengger.

Sejak awal abad kesembilan belas, guru-guru agama yang terbawa lewat merunyaknya perdagangan Islam ke wilayah bekas Majapahit, telah pula membentuk kaum elite baru di Pasuruan. Demikian juga pesantren turut berkembang pesat di daerah itu. Maka, dari dataran rendah di Pasuruan hingga ke dataran tinggi yang ditinggali orang-orang Tengger tercipta semacam gradien kultural yang menyolok. Dan itu adalah hasil dari proses perubahan jaman yang telah berlangsung berabad-abad.

Apa yang disebut sebagai masyarakat Tengger sekarang adalah masyarakat keturunan orang-orang Hindu yang menyelamatkan diri dari gelombang Islamisasi di abad ke-16. Gelombang itu pulalah yang merupakan awal terbentuknya karakter sosio-kultural Pasuruan saat ini.

Yang menjadikan ini penting adalah karena masyarakat Tengger melakukan pembedaan tajam antara apa yang mereka sebut sebagai *wong ngare* (orang-orang dari dataran rendah) dan *wong nggunung*, sebuah terminologi yang digunakan untuk menyebut diri mereka sendiri.

Walaupun dari hari ke hari pembedaan itu makin kabur dengan mobilitas manusia yang makin tinggi keluar masuk wilayah Tengger, tapi "identitas" itu pula yang telah menyusun kedirian masyarakat Tengger selama berabad-abad.

Tak heran bila kita mendengar kata "Tengger" maka apa yang ada di kepala kita adalah sebuah ekslusivitas etnis di tengah- tengah pulau Jawa yang makin gemuk problematikanya karena modernisasi.

Bagaimanapun, pembedaan itu menunjukkan pada kita bahwa perasaan *in-group* dalam diri masyarakat Tengger tampak begitu kuat. Sesuatu yang amat menolong mereka untuk *survive* terhadap gerusan dari luar yang terus menghantam masyarakat tersebut.

Wong Ngare-Wong Gunung

Soliditas kuat masyarakat Tengger tidak semata-mata karena mereka merasa *sak-turunan* dari nenek moyang yang tersingkir oleh sesuatu yang kita pahami secara historis sebagai proses Islamisasi yang dibawa oleh arus perdagangan Islam di abad ke-16, tapi juga akibat perjalanan sejarah yang mereka lewati pada masa-masa sesudah itu.

Di antaranya adalah kolonialisme. Kolonialisme di wilayah timur Jawa ini pun berkait dengan ekspansi Mataram yang banyak terhambat oleh pemberontakan-pemberontakan sengit. Salah satunya adalah pemberontakan Untung Surapati. Untung Surapati membangun basis perlawanannya di kaki utara pegunungan Tengger dan membentuk aliansi anti-Mataram dengan kekuatan dari Bali, Pasuruan, Blambangan dan Tengger itu sendiri.

Pada tahun 1764, Untung Surapati tertangkap. Maka mata rantai aliansi anti- Mataram itupun terputus, memungkinkan Mataram memantapkan kekuasaannya di wilayah timur pulau Jawa. Dan tentu saja, maka Islam pun turut disebarkan di sana. Islamisasi itu mengakibatkan sisa-sisa penganut Hindu menyingkir dan membentuk populasi kecil di dataran tinggi Tengger.

Akan halnya Belanda, Ricklefs (1981) mencatat bahwa pada akhirnya Belanda mendapatkan konsesi berupa kedaulatan penuh di pantai utara dan seluruh ujung timur Pulau Jawa. Pada tahun 1743, Belanda membuka kebun sayur di Tosari --sebuah desa yang merupakan salah satu desa terpenting masyarakat Tengger-- untuk menyuplai kebutuhan garnizun mereka. Dalam masa itulah masyarakat Tengger dikenal dengan pertanian modern. Bibit dan penyuluh pertanian didatangkan dari Jerman. Pada masa-masa itu pula di seluruh Jawa sedang diberlakukan Sistem Tanam Paksa yang menyulap sebagian besar dataran tinggi di pulau Jawa menjadi perkebunan kopi. Maka daerah-daerah dataran tinggi yang semula merupakan wilayah periferal yang tidak diperhitungkan secara ekonomi menjadi terkait dngan kepentingan kolonial.

Dan perubahan seperti itu selalu

bukan hanya semata-mata perubahan perekonomian belaka. Ketika pada akhirnya perkebunan kopi dibuka pula di Tengger pada tahun 1830, maka pertanian yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri berupa jagung atau ketela pohon berubah menjadi perkebunan komersial. Dan kopi adalah komoditi internasional. Hal itu menyebabkan Tengger menjadi wilayah yang tiba-tiba punya sangkut paut dengan perdagangan internasional.

Tidak hanya berhenti di situ, sebab persoalan kekurangan tenaga kerja yang dihadapi pemerintah kolonial memaksanya untuk mengambil kebijakan lebih jauh untuk mengatasinya. Satu-satunya cara adalah mendorong perpindahan penduduk dari wilayah yang memiliki surplus tenaga kerja, yaitu daerah Jawa Tengah. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemotongan pajak bagi para migran yang bersedia pindah ke daerah Tengger untuk membuka perkebunan kopi di sana. Maka kaum pendatangpun segera berhamburan memenuhi wilayah Tengger. Perkebunan kopi itu dibuka di daerah dengan ketinggian antara 600-1200 meter di atas permukaan laut. Di daerah itulah kaum pendatang membuka pemukiman mereka. Dan sekali lagi, orang Tengger makin menyingkir ke ketinggian di atasnya. Pola kependudukan di wilayah Tengger dan sekitarnya yang terlihat saat ini merupakan implikasi dari perpindahan penduduk di masa itu. Dan pola itu sekaligus menciptakan dinamika kultural yang bervariasi dengan masyarakat Tengger yang menganut agama Hindu di daerah tertinggi dari pegunungan Tengger, kaum pendatang dengan kepercayaan Kejawen di bawahnya serta daerah di dataran rendah Pasuruan didiami oleh penganut agama Islam.

Perbedaan kultural yang menyolok di ketiga daerah ketinggian itu tampaknya turut pula memberikan kontribusi terhadap soliditas masyarakat Tengger yang membuat pembedaan yang tegas antara diri mereka sendiri dan orang-orang yang tinggal di wilayah yang berada di bawahnya. Selama berabad-abad orang-orang Tengger menggunakan pembedaan regional yang tajam itu untuk berbicara tentang diri mereka sendiri *(wong gunung)* yang amat berbeda dengan orang-orang di luar lingkaran masyarakat mereka (yang kemudian digeneralisasikan dengan sebutan *wong ngare*). Di mata mereka, *wong ngare* ditandai dengan perbedaan hirarki di antara anggota masyarakat yang tampak menyolok, juga ketiadaan tanah garapan serta rendahnya toleransi antarumat beragama. Sementara mereka memandang masyarakatnya sendiri sebagai lugas, terbuka, dan tak membedakan pangkat satu sama lain.

REPRO DOC. PUSLIT UNEJ

Masyarakat Tengger tak lepas dari proses sinkretisme Hindu-Islam

Upacara Entas-Entas di pura

Superioritas Kultural

Pada masa setelah Orde Baru melakukan modernisasi wilayah ini, polarisasi semacam itu makin lama makin menjadi kabur, terutama karena pembangunan ekonomi yang gencar telah membawa arus perubahan melalui mobilitas yang makin tinggi ke daerah dataran tinggi tersebut. Contoh paling mudah adalah membentangnya jalan raya yang mencapai Desa Ngadisari, desa tertinggi di dataran Tengger, telah mencairkan klasifikasi masyarakat yang semula merupakan sebuah komunitas yang ekslusif menjadi terintegrasi dengan daerah-daerah di bawahnya yang telah jauh lebih modern. Patut dicatat pula bahwa Ngadisari merupakan desa yang kemudian dijadikan resort pariwisata bagi para turis yang hendak menikmati Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru.

Bahkan bisa dibilang bahwa sepanjang gigir pegunungan yang mengeliling Segara Wedi yang membentang di kaki Gunung Bromo merupakan wilayah yang tak pernah sepi dari pengunjung dari "bawah". Jalur ini merupakan rute bagi para penjelajah yang tak habis-habisnya menyusuri sepanjang pegunungan Tengger, termasuk juga Semeru, gunung tertinggi di Jawa, yang sepanjang tahun menarik minat para pegiat olahraga alam bebas.

Gunung Bromo sendiri telah menarik minat ribuan wisatawan setiap bulannya. Dan sebagaimana layaknya wisatawan, maka para wisatawan ini tak lain adalah pengunjung yang berada di wilayah tersebut untuk kesenangan. Maka tak pelak lagi, sebagaimana daerah wisata di manapun, adalah terciptanya komersialisasi besar-besaran di sana. Tentu saja ini juga berarti pergeseran yang nyata dari cara hidup penduduk setempat.

Walaupun demikian, bisa dibilang bahwa masyarakat Tengger merupakan masyarakat yang cukup akomodatif terhadap berbagai bentuk-bentuk asing yang datang dari luar, yang notabene sebagian besar dibawa oleh imbas kegiatan pariwisata. Toh, ada pertanyaan besar yang cukup mengganjal. Sejauh manakah masyarakat Tengger dapat terus mengakomodasi pergeseran yang terjadi sambil sementara itu tetap mempertahankan jati dirinya yang

telah dibelanya selama berabad-abad.

Bisa jadi ini pertanyaan klise yang bisa diajukan terhadap daerah mana pun yang menjadi sasaran kegiatan pariwisata. Dan dengan pluralitas yang dimilikinya, Indonesia mempunyai keunikan-keunikan lokal yang siap dipariwisatakan. Ini menjadi unik ketika kita menyadari potensi pariwisata yang terdapat di daerah Tengger, mengingat ia juga begitu dekat dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk membangun sebuah daerah pariwisata yang menjanjikan secara komersial, sebab praktis Tengger berada di tengah-tengah pulau Jawa, pusat modernisasi. Juga ini menjadi pertanyaan yang pantas untuk diagendakan mengingat bahwa keindahan Bromo, Tengger, Semeru yang siap dikomoditikan itu bisa jadi merupakan wilayah yang amat terkait dengan kedirian salah satu etnis paling unik yang masih ada di pulau Jawa. Pemahaman masyarakat Tengger yang menganggap bahwa wilayah Bromo dan sekitarnya merupakan semacam tanah suci bagi mereka cukup menjelaskan bahwa superioritas kultural mereka tampaknya memang amat bergantung pada cara bagaimana kemudian pemahaman itu dapat terus dipertahankan. Atau dengan kata lain, "kesucian" Bromo-lah yang akan menjaga masyarakat Tengger tetap aktual untuk berdiam dalam wilayahnya yang sekarang. Mempertaruhkan Bromo sebagai aset pariwisata punya kemungkinan untuk menggoyang akar identitas yang melekat dalam diri masyarakat Tengger. Mengingat imbas negatif yang bisa dihasilkan oleh sebuah kegiatan pariwisata.

Sebagaimana dengan banyak masyarakat lain yang memiliki keunikan kultural, ancaman terbesar yang dihadapi masyarakat Tengger adalah arus perubahan yang tak cukup terakomodasi dalam proses yang menyisakan kesempatan untuk beradaptasi. Satu hal karena perubahan terjadi demikian cepat dengan berbagai macam perkembangan teknologi, juga keterdesakan kultural diakibatkan oleh kekuatan birokrasi yang memperlakukannya tak lebih sebagai bagian yang mesti diaturnya dalam sebuah keseragaman. Padahal masyarakat ini jelas plural.

Masyarakat Tengger adalah masyarakat yang membuktikan dirinya mampu bertahan dalam berbagai macam arus perubahan. Kemampuan ini bisa dilacak sejak lima ratus tahun silam. Sampai hari ini kita dapat menemukan dengan jelas keberadaannya yang khas dengan segala paduan kultural. Dan yang menjadikannya unik adalah bahwa kebudayaan Tengger, konfigurasi praktek-praktek sosial dan simbol-simbol kulturalnya tergambar dalam ritual-ritual yang hingga saat ini masih terus dipraktekkan. Bila hal itu kita kaitkan dengan semacam identitas yang melekat untuk mengenali dirinya sendiri, sejauh manakah itu dapat bertahan terhadap perubahan yang makin tak mengenal batas geografis?

Maka Tengger adalah lima ratus tahun sisa peninggalan Majapahit di era global. Yang kian riuh dengan pengaruh asing dan terus mendesak untuk diidentifikasikan agar tak sampai mencabut akar identitas aslinya. ❑

Dirmawan Hatta
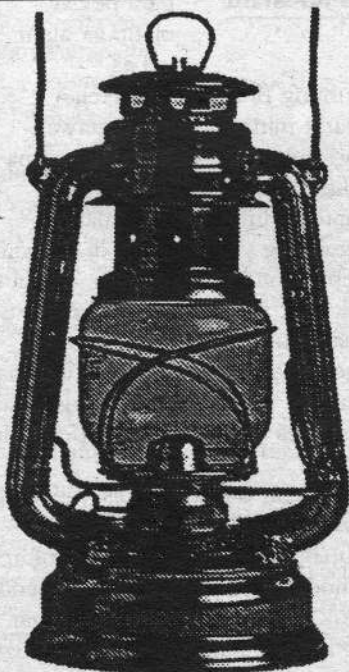
PEMENANG ANGKET BALAIRUNG

Berikut adalah pemenang angket pembaca Majalah Mahasiswa *Balairung* UGM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca yang telah sudi mengirimkan kembali angket tersebut. Kenang-kenangan sebagai wujud ucapan terima kasih itu, akan kami kirimkan ke alamat pemenang.

1. **Widya Prasetyarini**
Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29
Yogyakarta 55002

2. **Praminto Moehayat**
Jl. Bangka III 22
Jember
Jawa Timur 68121

3. **Rochmiani**
BTN Asal-Mula D6/4
Ujung Pandang 90245

4. **Zulli Saprilla**
Jl. Kologad Bawah No. 46
Rt/Rw : 05/09 Pondok Gede
Bekasi Jawa Barat

5. **Safrin Mahmud**
Jl. W.R. Mongisidi 128 A
Bau-Bau (Buton) SULTRA 93714

6. **Siti Maryamah**
FISIPOL /KOM 94
Jl. sosio Justisia No 1
Bulaksumur Yogyakarta 55281

7. **Ny. Hj. Sri Utami**
Jl. Karya Bhakti II Komp. PGSD
UPPI Pontianak KALBAR

8. **Sidik Setiyadi**
Jl. Siliwangi Dalam I/155 B
Bandung 40131

9. **Teguh Sri W**
Karikpa Mataram
Jl. Arif Rahman Hakim 49
Mataram
Nusa Tenggara Barat 83126

10. **dr. H. Syamsa Latief, M.Kes**
Jl. A. Makkasau No. 1
Pangkajene Sulawesi
91611

Citra Emas (CES)

Sekolah Manajemen dan Public Relations

Pada dasarnya setiap individu selalu berupaya agar dirinya senantiasa dapat memancarkan sosok pribadinya secara positif agar di dalam meniti kehidupannya, ia dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Upaya membangun citra diri (*personal image*) yang baik sudah menjadi prasyarat utama agar dirinya bisa survive dan berhasil di dalam menembus peradaban masyarakat yang modern. Realitas sosial tersebut secara makro juga terjadi pada setiap organisasi perusahaan, apapun jenisnya. Sehingga keberhasilan manajemen di dalam membangun sebuah citra (*institusional building*) dan upaya pembinaan moral kerja yang kondusif akan menentukan kelangsungan usahanya.

Maraknya kegiatan ekonomi yang makin kompetitif dewasa ini tentu saja mempercepat laju permintaan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara teknis maupun dalam aspek kepribadiannya. Kesiapan diri pada masing-masing individu tersebut semestinya direncana sejak dini agar ia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tuntutan kerja. Perwujudan citra diri dan institusi yang positif akan lebih memungkinkan perusahaan tersebut dapat merebut ruang kehidupan (*niche*), yang makin hari persaingan makin sengit.

dok CES

Staf pengajar, **komitmen dengan kualitas**

Melihat problema tersebut, C-E-S hadir dengan memberikan berbagai alternatif pendidikan pelatihan, konsultasi maupun riset yang arahnya untuk mengisi kecakapan *Public Relations* baik dalam perspektif mikro sebagai pengembangan kepribadian (bisnis) maupun pengelolaan *Public Relations* secara kelembagaan, sebagai salah satu fungsi manajemen yang makin strategis. **Rhenald Kasali** (pakar manajemen dan Public Relations dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) mengatakan bahwa C-E-S telah melakukan terobosan maju dan merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali di Indonesia yang memadukan kajian *Public Relations* dalam terminologi manajemen modern, yang prospektif.

Kelahiran yang bertepatan dengan Tahun Indonesia Emas (1995) memberikan inspirasi untuk memberi nama CITRA EMAS (CES - dibaca Ce-E-Es). Dengan semangat memberikan yang terbaik pada siswa didik dan *clien* serta ditopang dengan fasilitas pendidikan yang eksklusif di pusat kota Malioboro Yogyakarta.

DIPLOMA MANAJEMEN DAN *PUBLIC RELATIONS*

Program ini dirancang bagi anda yang lulus SMA atau mahasiswa/wi yang punya minat di dalam *Public Relations* secara mendalam, yang ditempuh selama 1 tahun. Adapun materi dasar meliputi Teori Komunikasi, Dasar-dasar *Public Relations*, *Marketing*, Komunikasi Organisasi dan Teknik Presentasi. Materi lanjutan meliputi Manajemen PR, Perencanaan Media, Pengelolaan Media Internal, Komunikasi Lisan dan Periklanan. Sedangkan materi penunjang adalah Komputer (*under Windows*) dan *English For Bussiness I & II* serta diakhiri dengan proses magang.

Para lulusan diharapkan siap memasuki dunia ke-PR-an di berbagai perusahaan. Hingga saat ini kami sudah menerima pesanan dari beberapa perusahaan bagi para lulusan program ini. Program berikutnya direncanakan dimulai 7 April 1997.

PUBLIC RELATIONS FOR EXECUTIVE

Para eksekutif dan manajer perusahaan perlu menambah wawasan berkenaan dengan peranan dan arti penting PR bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Program ini disajikan secara intensif dengan mengutamakan pada analisis kasus, agar para peserta dapat memahami secata teoritis maupun praktis serta kritis di dalam mensikapi persoalan organisasi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Materi yang disajikan meliputi Budaya Perusahaan, Manajemen PR, Kepribadian Plus, Loby dan Negoisasi, Table Manner, dan lain-lain. Masa pelatihan selama 6 minggu (seminggu 3X).

PROGRAM REGULER LAINNYA

Meliputi: Pelatihan Komunikasi Bisnis (selama 3 minggu); Komunikasi Pemasaran (selama 3 minggu); Mensiasati Interview (selama 2 minggu); Kepribadian Plus (selama 2 minggu) dan segera dibuka Diploma *Marketing* (selama 1 tahun).

LAYANAN *IN HOUSE TRAINING*

Kinerja sebuah perusahaan biasanya mengalami pasang surut, yang terkadang bisa memunculkan kondisi krisis yang sulit dideteksi dan diramalkan. CES siap mendampingi dalam pelatihan spesifik diperusahaan ataupun di CES. Serta dimungkinkan konsultasi dan riset yang relevan dengan kasus tersebut. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan keinginan perusahaan.

Waktu Pendaftaran
setiap hari kerja
Jam 08.00 s/d 17.00
di Kantor CES
Jl Malioboro 183 Lantai II
(Depan Hotel Garuda)
Yogyakarta.
Telp. (0274) 581706.
Area parkir di Taman Parkir
Abu Bakar Ali

STAF AHLI DAN PENGAJAR

CES didukung oleh Prof. DR. Harsono Suwardi (Ketua Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana UI); DR. Sasa Djuarsa Sendjaja (Direktur LPPKM Jakarta); Dra. Miranty Abidin (praktisi PR); DR. Suyanto, MA (Konsultan Bank Dunia). Staf Pengajar: Drs. Widodo Muktiyo, SE, M.Com.; Drs. Jefta Leibo, MS; Drs. A. Eko Setyanto, M.Si.; Drs. Ahmad Zaini Abar; Drs. IG. Ngurah Putra, MA; Okina Fitriyani, S. Psi.; Ir. Herawati , MM; Dra. Mirra Noor Milla; Ahmad Syauqi Soeratno dan Drs. M Alexander.***

Kisah Perjalanan Dua Mahasiswa Joao Mota dan Octavio Soares

Memburu Horta Sampai ke Oslo

Oktavio Soares dan **Joao Mato**

Tanggal 15 Oktober 1996: Komite Nasional mengumumkan pemenang Nobel untuk perdamaian tahun 1996 adalah Uskup Filipe Ximenes Belo yang disandingkan dengan "pelarian Timor-Timur" Jose Ramos Horta.

Tanggal 26 oktober 1996: Saya di Yogya langsung terlibat perbincangan dengan topik yang sama dengan dua orang teman saya yakni Jose Remigio Pinto Soares dan Ketut Suratama. Kebetulan mereka berdua adalah mahasiswa Fisipol UGM jurusan HI dan selama ini kost kami sama. Kami mulai berpikir mengenai tindakan yang akan kami ambil untuk menunjukkan tentangan kami atas keputusan dunia memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Jose Ramos Horta. Kami pun mulai memikirkan untuk membentuk kelompok yang akan berjuang secara informasi dalam meng-*counter* aksi-aksi Horta selama ini di dalam maupun di luar begeri Indonesia. Hubungan kami dengan Joao, mahasiswa fakultas Hukum Unas Jakarta, menjadi sering meskipun hanya melalui telepon.

Tanggal 6 Desember 1996: Saya dan Joao mengajukan permohonan visa turis kepada kedubes Norwegia di Jakarta. Ketika ditanya maksud kunjungan kami ke Oslo, kami jawab bahwa itu perjalanan biasa (turis) sekalian menyaksikan penganuhgerahan hadiah Nobel, sebab kami adalah mahasiswa Timor Timur.

Tanggal 10 Desember: Jam 05.30 subuh tiba di Bandara Schippol-Amsterdam, Belanda. Saya sempat menelepon orang tua di New York, kebetulan orang tua saya bertugas pada KJRI New York, untuk memberitahukan tentang keberangkatan kami ke Oslo dan sekaligus minta suntikan dana, sebab saya dan teman saya hanya bermodal 1000 dollar per orang. Saya mengaku kepada orang tua bahwa kami sudah tiba di Oslo, sebab kami khawatir jika keberangkatan kami sampai bocor kepada pihak KBRI Oslo, mungkin kami akan ditahan untuk tidak beraksi di Oslo. Orang tuaku sebenarnya sangat mengkhawatirkan keselamatan kami berdua dan meminta kami untuk mengurungkan niat kami. Tetapi setelah saya jelaskan, mama saya bisa memahami, sebab beliau yakin tak akan dapat mengubahnya lagi dan beliau hanya berpesan agar kami berdua bisa membawa diri agar tidak sampai celaka, beliau berjanji akan mendoakan kami agar selamat dalam aksi kami di Oslo, Norwegia.

Jam 07. 45 pagi pesawat KLM Nomor 0157 meninggalkan Bandara Schippol, Amsterdam dengan tujuan Bandara Fornebu-Oslo, Norwegia.

Jam 9.15 pagi, pesawat yang kami tumpangi mendarat di Bandara Fornebu-Oslo, Norwegia. Saya dan teman saya berdoa, mengucapkan syukur bahwa kami telah selamat tiba di tujuan perjalanan kami dan sekaligus untuk memohon pertolongan dalam memulai kegiatan kami.

Jam 9.20 pagi, kami berdua menghadap petugas Imigrasi Norwegia pada Bandara Fornebu, tetapi berkas kami dipindahkan kepada petugas Kepolisian Norwegia di Bandara Fornebu dan kami di bawa masuk ke sebuah ruangan, semacam Pos Polisi di bandara. Kami kemudian ditanyai mengenai pekerjaan kami, umur kami, dan maksud kedatangan kami di Oslo. Kami mengatakan bahwa maksud kami datang ke Oslo adalah untuk berkunjung sebagai turis, dan karena kebetulan ada penganugerahan hadiah nobel kepada dua orang wakil Timor Timur maka kami juga menyempatkan diri hadir pada acara di City Hall tersebut pada pagi itu. Setelah paspor KTM dan KTP kami diperiksa (serta difoto copy), lalu dicap dan kami pun dibiarkan keluar dari pos tersebut.

Jam 9.40 pagi setelah mengambil barang-barang kami pada bagian klaim bagasi kami berdua ke luar gerbang bandara. Namun sial, sebab baru melangkah sekitar empat langkah kami ditahan oleh petugas berpakaian preman Bandara Fornebu, yang mengaku dari bagian *Internal Affair* Kepolisian Norwegia. Mereka bermaksud menggeledah barang

bawaan kami dengan alasan keamanan berkenaan dengan acara Nobel Perdamaian. Pada penggeledahan tersebut semua pakaian kami dikeluarkan, dan satu persatu barang-barang milik kami ditanyai, kemudian kami berdua digeledah secara terpisah di dalam sel yang berbeda, dan pada saat itulah saya mendapatkan perlakuan tidak manusiawi pada Hari HAM dunia tersebut, saya ditelanjangi oleh petugas polisi yang juga adalah seorang laki-laki, dengan alasan untuk meyakinkan bahwa saya tidak menyembunyikan apapun. Setelah itu kami dibawa lagi ke Pos Polisi yang telah kami "kunjungi" tadi, karena katanya kedatangan kami menyimpang dari visa yang diminta sebab mereka menemukan *leaflet, statement*, dan *pamflet* yang kami bawa serta yang katanya melanggar undang-undang Norwegia, khususnya pihak Kepolisian Norwegia, telah bersekongkol dengan orang-orang yang anti Indonesia, yakni pihak Fretelin yang dalam hal ini diwakili oleh LSM-LSM seperti *Free East Timor Action, SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelppefond* atau Lembaga Bantuan Mahasiswa dan akademikus Internasional), dan *Amnesti Internasional*. Mereka mendengar isu bahwa akan datang delapan agen rahasia dari Indonesia untuk membunuh Jose Ramos Horta pada saat pemberian hadiah nobel. Maka ketika kami berdua datang, pihak pemerintah Norwegia melalui kepolisian Norwegia langsung menuduh kami sebagai agen Indonesia, sehingga perlu "diamankan" meskipun kami dapat menunjukkan bukti otentik yang menunjukkan bahwa kami berdua benar-benar mahasiswa dan bukan agen rahasia seperti tuduhan mereka.

Sejak dibawa kembali ke pos polisi bandara Fornebu tersebut dimulailah rangkaian pelanggaran atas HAM kami, saya dan teman saya Joao Mota. Pertama-tama kami berdua dimasukkan ke dalam sel terpisah, tetapi kami masih bisa saling melihat melalui terali. Selama dalam sel tersebut kami lebih banyak tertawa dari pada termenung sebab bagi kami sangat lucu, begitu tiba di sebuah negara yang katanya sangat menjunjung tinggi HAM di mana *freedom of speech* sangat dihargai malah kami berdua ditangkap dengan alasan bahwa unjuk rasa di Norwegia dilarang. Sebaliknya di Indonesia, yang kata mereka (bangsa-bangsa Barat) HAM banyak dilanggar, sehingga mereka mesti memberikan hadiah nobel kepada para penentang bangsa Indonesia untuk menekan pemerintah Indonesia agar memperbaiki kondisi HAMnya, kami berdua justru belum pernah dimasukkan ke sel karena ingin menyatakan pendapat secara terbuka dan sopan.

Setelah sekitar satu setengah jam di dalam sel, saya kemudian dibawa keluar untuk menghadap seorang *officer* polisi di rungan lain. Setelah memperkenalkan diri dengan sopan, saya kemudian ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkesan *interogasi*, seperti dengan pertanyaan : *Apakah engkau pernah bergabung dengan suatu kelompok politik di negaramu? Mengapa engkau ingin memperotes pemberian Nobel Perdamaian kepada Horta!* Dan yang paling terkesan menyudutkan adalah: *Apakah engkau punya latar belakang pendidikan militer?* Semuanya saya jawab dengan singkat, namun ketika sampai pada pertanyaan mangapa saya ingin memprotes pemberian Nobel kepada Horta, saya menjelaskan dengan panjang lebar. Horta adalah Menteri Luar Negeri Partai Fretelin yang Komunis yang memproklamirkan kemerdekaan Timor-Timur pada tanggal 28 November 1975, dan kemudian mereka menangkap semua politikus yang tidak sepaham dengan Fretilin yang komunis, termasuk ayah saya, Jose Fernando Osorio Soares. Kemudian Fretelin mengekskusi semua tahanan mereka yang tidak bersenjata, termasuk ayah saya pada tanggal 27 Januari 1976 di Same, padahal ayah saya tidak pernah menyakiti atau sampai membunuh seorang Fretelin pun. Tidak hanya itu Fretelin juga bertanggung jawab atas kematian lebih dari 200.000 jiwa orang Timor Timur yang mati antara tahun 1974-1976 akibat perang atau kelaparan karena dipaksa mengungsi ke hutan untuk menjadi "tameng hidup" bagi kekuatan militer Fretelin menghadapi tentara RI. Lantas kenapa seorang pembunuh, yang tidak pernah cinta dan tidak pernah menginginkan perdamaian di Timor Timur justru diberi hadiah Nobel untuk Perdamaian? Saya datang ke Oslo bukan atas dasar dendam pribadi, tetapi untuk menjelaskan kepada orang-orang Oslo bahwa pilihan mereka salah. Dan saya katakan jika mereka ingin memberikan hadiah Nobel Perdamaian, yang berhak adalah rakyat Timor Timur yang berjuang setiap hari untuk perdamaian Timor Timur.

Setelah diinterogasi selama lebih dari tiga jam, tanpa ditemani oleh seorang pengacara dan tanpa diberi makan, lantas saya dimasukan ke dalam ruangan isolasi agar tidak bisa bertemu dengan teman saya Joao. Selama saya dimasukkan ke dalam ruang isolasi, teman saya Joao ternyata dibawa ke ruang interogasi untuk ditanyai selama sekitar dua jam lebih, dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip. Setelah teman saya ditanyai, ia dimasukan ke dalam ruang isolasi lain. Lantas saya di bawa kembali ke ruang interogasi untuk di-*cross-check*. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi kali ini saya diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang kesannya menyuruh saya untuk mengarang cerita bahwa saya disuruh oleh seseorang, kalau bukan oleh pemerintah RI ke Oslo untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada saat itu saya juga sempat ditest apakah benar-benar adalah mahasiswa kedokteran sebagaimana pengakuan saya yang tertulis pada KTM saya. Saya ditanyai beberapa istilah medis bahasa Latin. Selama diinterogasi yang kedua kali tersebut terkesan mereka ingin mengintimidasi saya secara fisik, hal itu terasa dari hawa ruangan interogasi yang sengaja diturunkan dengan tidak menyalakan penghangat ruangan. Lantas mereka mengenakan baju hangat sedangkan saya dilarang mengenakan jaket saya dengan alasan hal itu melanggar aturan interogasi. Padahal waktu itu cuaca kota Oslo berkisar antara 9 sampai 15 derajat Celcius di bawah nol.

Setelah sekitar satu setengah jam meng-*cross-check*, saya kembali ke ruang isolasi, kemudian mereka mengeluarkan teman saya Joao untuk di-*cross-check* juga selama dua jam.

Setelah waktu-waktu tersebut berlalu, mereka (polisi Norwegia) tampak mulai gelisah karena tidak bisa membuktikan tuduhan mereka kepada kami, apalagi ditambah dengan jawaban kami berdua sama. Akhirnya mereka memutuskan mendeportasi kami kembali ke Indonesia dengan alasan saya kelebihan membawa pasport, sebab pada waktu itu ada bersama saya pasport adik saya dan keponakan saya, yang rencananya akan saya uruskan visa mereka ke Kedubes AS di Jakarta, karena mereka berdua rencananya akan mengunjungi orang tua kami di AS. Sedangkan teman saya Joao Mota dengan alasan nama yang tertera pada tiket dan pasport tidak sama, yaitu nama tengahnya, di mana pada pasport tertulis *de Sausa* sadangkan pada tiket tertulis *de Sousa*. Padahal Joao sudah punya pengalaman mengunjungi beberapa negara Eropa dan Australia dengan nama tersebut tapi tidak pernah menimbulkan masalah. Karena diancam akan dideportasi, maka teman saya meminta waktu bertemu dengan saya untuk berdiskusi. Sejak berangkat dari Jakarta, kami berdua sudah bersepakat untuk tidak melibatkan siapa pun dalam perjalanan kami, termasuk orang tua kami masing-masing. Maka sewaktu diancam untuk dideportasi teman saya berkeputusan untuk memberitahukan kepada KBRI di Oslo tentang kedatangan kami, sebab bagaimanapun kami berdua adalah warga negara Indonesia dan datang ke Norwegia dengan pasport dan visa yang masih berlaku. Lantas setelah sekitar hampir sepuluh jam kami tidak saling bertemu muka, kami pun lantas dipertemukan di sebuah ruang tamu. Setelah berdiskusi, akhirnya saya menyetujui usul teman saya itu, walaupun hal itu melanggar komitmen yang telah kami buat di Jakarta. Lalu saya memberikan kesempatan kepada dia untuk menghubungi pihak KBRI. Setelah pihak KBRI Oslo dihubungi tampaklah perbedaan sikap para petugas polisi Norwegia yang tadinya tampak bermusuhan, berubah menjadi ramah. Ditandai dengan kunjungan seorang petugas yang mengaku sebagai petugas piket kepada kami untuk menyampaikan permintaan maaf atas penahanan mereka sekian jam terhadap kami serta mengucapkan selamat datang di Oslo, Norwegia. Belakangan kami ketahui bahwa perubahan sikap tersebut adalah karena teguran dari pihak KBRI atas perlakuan tidak bersahabat dari polisi Norwegia kepada dua orang warga negara Indonesia tanpa alasan.

Jam 9.30 malam kami keluar dari pos Polisi Norwegia Bandara Fornebu. Sebenarnya pihak KBRI meminta kepada para petugas Polisi tersebut agar mengatakan kepada kami untuk menunggu, karena kami akan dijemput oleh pihak KBRI sekitar jam 10 malam, atau setengah jam kemudian. Tetapi ternyata mereka tidak mengatakan apa-apa dan menyuruh kami pergi. Lantas berbekal informasi dari Guide Book untuk turis, kami pun mencari taksi dan menyuruh mengantarkan kami ke *Haralds-heim Youth Hostel*, sebuah penginapan anak muda sekitar 4 kilo dari pusat kota Oslo.

Tanggal 11 Desember pagi, setelah membersihkan diri dan sarapan pagi, kami memutuskan untuk berkunjung ke KBRI Oslo untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan KBRI pada malam sebelumnya. Kami tiba di KBRI Oslo yang beralamat di Inkognitogaten 8 Oslo, sekitar pukul 10 pagi. Kami disambut dengan keramahan Indonesia yang sangat menyejukkan, setelah bercerita ngalor-ngidul dan mengucapkan terima kasih maka kami kemudian bermaksud untuk pulang. Tetapi oleh staf KBRI kami disuruh menunggu sebentar sebab katanya ada beberapa hal yang akan dibicarakan dengan kami. Ternyata pihak KBRI ingin mencegah niat kami untuk berdemonstrasi pada acara resepsi bagi para tamu dan pemenang hadiah Nobel di National Theater malam itu pukul 20.00. Alasannya bahwa kebijaksanaan dari pusat, maksudnya pihak Deplu, melarang setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk memprotes Nobel Prize Tahun 1996. Walaupun telah diberi penjelasan panjang lebar tentang politik luar negeri RI dan dipertemukan langsung dengan Dubes RI untuk Norwegia, Bapak Amiruddin Noor, kami berdua tetap berkeras untuk tidak mundur. Akhirnya kami dibiarkan untuk berdemonstrasi dengan catatan resiko ditanggung sendiri dan supaya menjaga diri. Keluar dari KBRI Kami menuju kantor polisi terdekat untuk mengajukan ijin unjuk rasa sesuai saran Bapak da Lopez, seorang warga negara RI di Oslo. Dalam perjalanan ke kantor polisi kami sempat berpapasan dengan Liem Soei Liong, seorang anggota partai terlarang PKI yang sempat lolos dari Indonesia tahun 1967dan saat ini berdomisili di negeri Belanda. Dia rupanya selama acara penganugerahan Nobel di tugaskan oleh pihak-pihak yang anti Indonesia untuk memata-matai KBRI Oslo. Sebenarnya pertemuan itu tidak disengaja, tetapi berhubung teman saya Joao sudah mengenal dia, sebab mereka pernah bertemu muka di Sidney sewaktu ada acara seminar yang diadakan orang-orang Fretelin di Australia dan teman saya Joao juga hadir, maka Liem Soei Liong sangat ketakutan ketika bertemu muka dengan kami. Dia berusaha bersikap ramah kepada kami tetapi tidak kami tanggapi.

Jam 12.05 tiba di kantor polisi U.D. Oslo. Setelah ditemui petugas dan kami menjelaskan maksud kedatangan kami, maka kami disuruh menunggu sekitar satu jam, kemudian kami pun diberi ijin untuk melakukan unjuk rasa dengan catatan di tempat-tempat di mana akan dikunjungi Horta, sebab maksud unjuk rasa kami adalah untuk menentang Horta.

Jam 2. 45 siang tiba di lokasi unjuk rasa, melihat-lihat lokasi dan pasang strategi. Setelah itu keliling Universitas Oslo sambil foto-foto.

Jam 5.30 petang kembali ke sasaran, lalu menemui petugas polisi yang bertugas mengawasi acara, kami menyerahkan ijin unjuk rasa kepada mereka dan kemudian mereka menunjukkan posisi yang mesti kami tempati selama aksi (berjarak sekitar 15 meter dari Gedung National Theater) agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas depan gedung. Lalu kami mencari kopi hangat untuk menemani kami selama aksi unjuk rasa, dan saya sempat menghubungi Pak da Lopez untuk memberitahukan posisi kami, sebab beliau sangat memperhatikan kami berdua dan berpesan agar kami selalu menghubungi beliau agar setiap saat beliau bisa membantu jika dibutuhkan. Maklum Pak da Lopez adalah salah

seorang mantan aktivis mahasiswa di Jakarta pada masa pembubaran DEMA.

Jam 6. 10 malam kami sudah berada kembali di lokasi, lalu mulai memasang semua atribut dan siap beraksi. Kami mulai dengan membagi-bagikan leaflet-leaflet yang menunjukkan kejahatan Fretelin di Timor Timur antara tahun 1974-1976, serta tulisan-tulisan anti Horta yang kami bawa dari Jakarta. Pada mulanya semua lancar, tetapi setelah sekitar satu jam kami mulai diganggu oleh kelompok-kelompok pendukung Horta/Fretelin di Oslo, yakni *Free East Timor Action, SAIH dan Amnesti International.* Tidak hanya itu, para wartawan pun kebanyakan sudah dibeli oleh kelompok Horta. Yang paling menonjol adalah wartawan TV Swasta Oslo, NRK TV. Mereka menyerang kami dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Timor Timur, berdasarkan informasi yang mereka dapat dari sumber-sumber, yang katanya, dapat dipercaya. Namun umumnya pertanyaan - pertanyaan tersebut mendeskreditkan pemerintah RI dengan tidak berdasar, justru sebaliknya berkesan direkayasa (oleh kelompok Fretelin). Tetapi karena kebanyakan cerita tersebut adalah isapan jempol belaka, maka mereka berhasil kami bantai. Saya sendiri sempat menyuruh seorang wartawan NRK TV untuk masuk ke dalam ruangan National Theater dan memanggil Horta untuk berdebat dengan saya di depan TV jika Horta berani. Tapi karena Horta memang penakut sejak dari awal mula permasalahan Timor Timur terjadi, maka walaupun Horta kelihatan di situ tapi dia tidak berani keluar. Setelah mencoba dengan argumentasi mulut mereka tidak berhasil, maka mereka mencoba dengan cara fisik untuk memaksa kami masuk ke dalam perangkap mereka, tetapi tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya ketika jam menunjukkan pukul 8.30 malam, saya dan Joao memutuskan untuk pulang, sebab aksi kami secara keseluruhan sudah berhasil dan pesan kami sudah sampai kepada masyarakat kota Oslo. Tetapi gangguan dari pihak Amnesti Internatinal (AI) yang selama ini disebut-sebut sebagai sebuah badan terhormat, malahan semakin menjadi-jadi dan membuktikan bahwa mereka tidak lebih dari organisasi para Penjahat Bule berkedok membela HAM. Sewaktu saya dan Joao sedang berkemas-kemas kami diteror dengan kata-kata kotor bahkan kepala kami sempat didorong-dorong. Tetapi untuk tetap menunjukkan harga diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudi dan beradab maka kami tidak melayani tantangan itu. Sewaktu kami memasuki sebuah taksi untuk mengantar kami ke penginanapn salah seorang anggota AI membuka pintu depan taksi yang kami tumpangi dengan maksud untuk mencegahnya membawa kami. Anggota AI itu berteriak-teriak kepada sopir taksi tersebut, *"Don't take them, they are Indonesian agent, don't take them!"* Tetapi sopir taksi itu dengan santai menjawab, *"I guess, it fine becauase I am Indonesian too!"* sang anggota AI tambah marah, dia tetap membuka pintu depan taksi selama sekitar 15 menit, sebelum akhirnya menutupnya dan membiarkan kami berangkat. Sewaktu ada serangan dari orang-orang AI tersebut tampak lagi bagaimana pemerintah Norwegia bersekongkol dengan pihak-pihak yang anti Indonesia. Sekitar 20 polisi yang sejak sore menjaga gedung National Theater dan walaupun mobil mereka masih diparkir di depan gedung tersebut, pada waktu kami diserang oleh orang AI itu mereka menghilang semuanya. Untunglah kami ditolong oleh sopir taksi yang ternyata adalah orang Kurdi, Iran.

Tanggal 12 Desember 1996 pagi. Kami bermaksud untuk mengadakan aksi unjuk rasa lagi di depan sebuah SMU, Hogskoleni Oslo, tempat diadakannya seminar tentang Timor-Timur yang juga menghadirkan Horta sebagai pembicara, disamping Dr. George Aditjondro dan Liem Soei Liong. Tetapi rencana tersebut kami batalkan, mengingat perlakuan para pendukung Fretelin (Amnesti International) yang brutal terhadap kami pada malam sebelumnya di depan National Theater. Bukannya kami takut, tetapi sebagai bangsa yang lebih beradap dan berbudi, kami merasa bahwa lebih baik mencegah sebelum terjadi bentrokan fisik yang mereka paksakan kepada kami secara sepihak. Ternyata mereka pun mengira kami akan unjuk rasa di depan tempat seminar, sehingga acara seminar yang mestinya selesai pukul 5 petang sesuai rencana, ternyata dibubarkan sekitar pukul 3 siang atau dua jam lebih awal.

Hari itu praktis kami hanya berkunjung ke KBRI untuk mengumpulkan informasi tentang aksi kami semalam. Ternyata aksi kami cukup mendapat perhatian luas dari masyarakat kota Oslo yang selama ini pada kenyataannya belum tahu kenyataan Timor Timur yang sebenarnya. Horta sendiri pagi itu sempat didesak pertanyaan oleh wartawan tentang eksistensi kami, dia tidak dapat memberikan jawaban sebagaimana mestinya. Karena jika dia benar-benar membuka mulut tentang kami, maka dia kalah sebab kami adalah orang asli Timor Timur dan semalam kami sudah membuka segala kejahatannya. Sewaktu dia ditanya bagaimana komentarnya tentang kami, di mana selama ini dia mengaku didukung sepenuhnya oleh rakyat Timor Timur, namun malam itu ada dua mahasiswa Timor Timur yang menentang dia serta aksinya selama ini, Horta menjawab dengan diplomatis, "Di dalam setiap perjuangan selalu ada pihak yang pro maupun kontra. Nah, mereka berdua adalah pihak yang kontra pada saya!"

Siang itu kami juga menyempatkan diri mengunjungi Bapak Uskup Mgr. Felipe Ximenes Belo dan rombongan di Grand Hotel Oslo. Kami sempat bertemu dengan Uskup, Romo Dominggus Sequiera, Suster Luisa dan keponakan Uskup. Sekali lagi tampak bahwa Pemerintah Norwegia berpihak pada kelompok Fretelin, hal itu tampak dari komposisi orang-orang yang menghadiri acara penganugerahan Hadiah Nobel. Di mana-mana yang terlihat adalah adalah orang-orang Fretelin dengan *co-card Free East Timor Action* di dada. Hanya Uskup Belo, Romo Sequiera, Suster Luisa, dan keponakan Uskup yang benar-benar mewakili Indonesia. Kami sempat mengucapkan selamat jalan pada Uskup Belo sebab hari itu beliau bersama rombongan akan meninggalkan kota Oslo.

Sore harinya, sekali lagi kami mengunjungi Grand Hotel Oslo untuk menyerahkan statement kami secara langsung kepada Horta, dan sekali lagi menantang Horta unutk berdebat

secara terbuka di depan TV. Tetapi Horta menolak usulan kami tersebut, dia tampak selalu didampingi oleh puluhan polisi Norwegia yang berpakaian preman.

Malamnya kami sempat diajak keliling kota Oslo oleh seorang staf KBRI Oslo, Pak Herry Kostofani, dan makan malam di sebuah restoran Pakistan. Setelah itu kami diantar oleh Mbak Lela Madjid, seorang wartawan senior harian The Jakarta Post, di Hotel Ambassadar sebab mbak Lela bermaksud mewawancarai kami berdua.

Tanggal 13 Desember 1996 pagi setelah sarapan dan saya sempat menulis beberapa kartu pos untuk teman-teman dan adik-adik saya serta mengeposkannya, lantas kami check-out. Sejak unjuk rasa kami tanggal 11 Desember 1996 malam di depan National Theater, tampak mulai bermunculan banyak reaksi bermusuhan dari beberapa warga kota Oslo sebab mereka menganggap bahwa kami telah mengusik kredibilitas Komite Nobel. Para pegawai penginapan mulai menunjukkan sikap tidak senang, dan para tamu yang juga menginap di penginapan tersebut mulai memandang kami dengan pandangan tidak bersahabat. Hal itu mungkin disebabkan karena tampang kami berdua setiap saat muncul di layar kaca seantero Oslo sebagai 'pengganggu' keagungan Nobel.

Jam 09.00 pagi kami meninggalkan penginapan menuju KBRI untuk pamit dan berterima kasih.

Jam 10.00 pagi kami tiba di KBRI disambut dengan ucapan selamat dan rasa senang oleh seluruh staf KBRI karena tampang kami hampir menghias setiap pemberitaan di Oslo, sehingga dapat sedikit mengangkat nama bangsa pada saat sedang dinjak-injak oleh bangsa Barat. Kami sempat menyiapkan beberapa surat yang kami maksudkan dikirimkan ke beberapa media di Oslo.

Jam 15.00 sore meninggalkan KBRI Oslo menuju bandara Fornebu untuk kembali ke Indonesia dengan penerba ngan KLM.

Jam 17.45 petang meninggalkan kota Oslo bersama wartawan Kompas, Mas Jimmy Luhulima dan Mbak Lela Madjid dari Jakarta Post dengan diiringi ucapan selamat jalan dari Pak da Lopes, menuju Jakarta, dengan perasaan yang lain dengan sewaktu tiba pertama kali di Oslo. Kami berdua merasa bagaikan baru saja menyelesaikan ujian yang sangat berat dan sangat menentukan dengan hasil yang sangat meyakinkan. Yang pasti adalah bahwa kami berdua berjanji bahwa perjuangan kami melawan Horta di Oslo bukanlah yang terakhir tetapi justru yang pertama dan akan kami teruskan sampai Horta dapat kami 'tumbangkan'. Itulah tekad kami! ❑

(Dituliskan oleh **Octavio A. de Jesus O. Soares**, ***Mahasiswa FK UGM Yogyakarta)***

REPRO KOMPAS

Clifford Geertz
Princeton University, USA

Cultural Diplomacy

As I am, myself, one of Indonesia's most persistent and enduring Western tourism, returning again and again to pursue some elusive truth or remembered experience, I am exstraordinarily pleased to be back here in Jogja where, forty-four years ago almost to the day, it all began. My then wife, Hildred Geertz and I, together with six of four colleagues on what was later to be called "The Modjokuto Project," arrived here by train from Jakarta (it was Darul Islam time, and the train was full of armed soldiers who leaped out and surrounded it at each stop) on November 1, 1952.

Jogja was then mainly jalan Malioboro, the station *kareta api*, the crumbling, as yet unrestored Hotel Garuda (a paradise for *cicaks*, where, *alas*, we stayed), a string of *wandes* and *tokos*, the *kepatihan* and the *pasar*, the *alun-alun*, ringed with various goverment offices, the Chung Hwa Tsung Hwi Chinese "chamber of commerce", the *kraton*, the *mesjid* with the *Kauman* behind it, and around all of this an accumulation of *kampongs*, swamped in mud when they weren't covered with dust. Everything was, as they say, *pelan-pelan*. There were only a handful of carefully chauffeured automobiles, mostly belonging to *pegawais* and foreigners, a few busses bound for Solo or Semarang, some bicycles but nothing like the locust swarm they later became, lots of *becaks*, lots of *andongs*, lots of people walking, carrying, often as not, large loads on their back or head, and, slowest of all, barely moving it sometimes seemed, a number of brightly colored, *sapi* - drawn *garabegs* lumbering with their immense cargoes down the street, bound for God-knows-where to arrive Godknows-when.

Bulaksumur, the present campus of Gadjah Mada was, as the name indicates, then a deserted area outside of town. The university, which was only a few years old and still a skeletal business, casual and unsystematic, was housed in the forecourt of the *kraton*, where I squatted in a *pendopo* among hundreds of student, many of them just emerged from the army of the Revolution, and listened to lectures on *adat* law, Indonesian literature, and the history of the nationalist movement. Hilly studied dance at Pangeran Tedjokosumo's school in his *pendopo* every Sunday morning. (I watched.) The old prince, then in his eighties, presided over the still quite informal classes of high school and college students with great verve and humor, spouting a wild mixture of Javanese, Indonesian, and Dutch I think nobody there antirely understood, and hardly understood at all. I saw my first *wayang orang* in the *kraton* in the presence of the Sultan; there were *wayang kulits* and *slametans* in one or another *kampong* it seemed every other night. We studied Javanese every morning with a relay of students from the university, went to Prambanan and Borobudur (though we couldn't see the later by moonlight, as recommended, because there were still *gerombolan* about); we

TIMBUL SUNOTO

* This writing has presentated in International Cenference on Tourism and Heritage Management, Yogyakarta October 28-30, 1996

learned about *sate, kretek,* and *kopi tubruk,* sat *sela,* but not very long, ate with our hands, though not very elegantly. All in all, it was a great beginning for a happenstance tourist at a time when commercial tourism, planned, promoted, sytematized, sanitized, and administered, was hardly more than a spectral notion.

I remember, actually, when the first intimation of such a tourism came into my awareness, only to be immediately put aside as a tropical mirage. Hilly and I rode out on our bikes one *soreh,* either sometime during the first eight month stay here or later on during some period of return from our studies in east Java -- I no longer remember which -- to a rural *kabupaten* on the Solo road. It was a very quiet, soft and beutiful place, *tentrem -- a pendopo, a pekarangan, a waringen,* the Bupati's wooden office and home, and across the road, on which there was virtually no traffic at that time of day, a *desa* shrouded in trees. We talked to the Bupati, a young man, and a couple members of his staff even younger, all of them also veterans of the battles around Jogja a couple years earlier, trying to find out about the area. But all we could get them to talk about were the plans they had, or the goverment had, or someone had, to built an enormous hotel with the swimming pool, several restaurants, tennis couts, a shopping arcade, to attract the rich and spenthrift Americans tourists who would be arriving as soon as the nearby airport the expanded to international size. We thought it all a pipe dream, another example of the grandiose imaginings that were current in the early, heady days of the Republic, when, for awhile, everything seemed possible and very near at hand, and we went away a bit suddened by such, as we thought, naive hopes soon to be dissappointed. When I came back here in the seventies en route to yet another field trip, I went out there again, and there it was, on the very spot we had sat by the *waringen,* just as they had said it would be- -that Borobudur of grand luxe tourism, its first and in some ways still most impressive monument, The Ambarrukmo Palace, later Sheraton. Well no one ever said anthropology was a predictive science.

This initiatory periode in Jogja was, in any case, not the only time I felt as much a tourist as I did an anthropologist, insofar as a clear distinction can be drawn between them. To be in Bali in 1957 during the Irian crisis when there were essentialy no other Westerners at all on the island gave me a glimpse anyway of what all tourists, like all anthropologists, dream of but never realy get: pure Otherness, unspoiled by the presence of other tourists- -or other anthropologists. Something similiar happened when I was marooned in Padang and Bukittinggi during the Permesta rebellion, cut off from all communications with the outside world. But the closest I probably ever got to the tourist state of mind, or at least to the Americans tourist state of mind, and the most I have ever had to do with real tourists of any sort (like most anthropologists, I tend to regard them as messing up the neighborhood, and in the normal course of thing stay as far away from them as I can), was in 1982 when I lectured on a cruise ship sailing frantically about the archipelago- -Singapore, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Baubau, Larantuka, Komodo, Ampenan, and Padangbai, with side trips to Jogja and Rantepao, all in the space of a month.

Despite this haste, the cruise is not exactly your ordinary love boat off sailing to tropical beaches and sunsets in the passengers were not exactly your ordinary tourists in search of safe adventure and a fabricated sense of genuineness; it was more like a floating seminar. The enterprise had been organized by The American Museum of Natural History in New York, perhaps the premier ethnological and natural history museum in the country, and one of the leading ones in the world, as a special privilege and further encouragement for its wealthy, a number of the *very* wealthy, trustees and sponsors. A half dozen specialists, all except myself members of the Museum's staff, were brought on to give four or five lecture each. There was a geologist on volcanoes and eartquakes, an ornithologist on birds, a herpetologist on snakes and of course the ineffable komodo dragons (this was a very Darwinist group: they had gone to the Galapagos the year before to see where those finches had been), a pre-historian on paleolithic and bronze age skulls and artifacts, a nautical expert- -the Director of the museum, as a matter of fact- -on sailing and navigation in the region, and myself, who was supposed to take care of culture, history, art, society, economy, politics and whatever else was left over.

After a couple of, I am afraid wildly overcrowded, introductory lecturers on the Hindu-Buddhist period and on the coming of Islam, I gave talks, the day before each of our main stops describing to the two hundreds or so passengers the cultural context of what they were abuot to see. I spoke, and held discussions afterward, about Jogja and Solo court culture and the various candis around, about Torajan cattle sacrifices and burial customs, about heirlooms, ritual exchange, and linguistic groupings on Flores, about dance, drama, and village organization on Bali; anything I could think of that might interest them and I knew anything about. The point is that this was a serious business. Given the income of the passengers, the accomodations were first class and there was the usual excess of eating and drinking; but at least the great majority, travelled, informed, and well-educated, were interest in *knowing,* not just in seeing, buying, or even --in that blank cliche of travel agency brochures-- just "experiencing".

Coming closer to the tourist world, or at least to one rather special aspect of it, did not sharpen the distinction between that world and the one I inhabited, and still inhabit, as a field anthropologist; it scrambled and confused, and in some ways, disturbed it, undercut some cherished simplicities. The explosion of international tourism in Indonesia occured around me, overtook me so to speak, as I worked on through the fifties and sixties more or less innocence, willed innocence, of it. (It began in force, only after the consolidation of the New Order in the seventies--there were about 50,000 foreign visitors in 1968, two and half million in 1991.)/ When finally, as was I suppose inevitable, I encountered it directly as a quasi-participant rather than just something off there in the phantasmal

distance, like the Ambarukmo Palace, the simple contrast between the study of culture and the merchandizing of it, by means of which anthropologist distiguish themselves from those who pass through their field sites snapping pictures and buying *oleh-oleh*, no longer seemed remotely adequate. It is not that the two modes of dealing with unfamiliar peoples in distant places do not differ. It is that they meet, cross, and separate at all sorts of unexpected angles, such that just what is one and what the other, and what their relationship is, is often not easy to define.[2]

The last stage, or anyway the last stage so far, in my deepening sense that ethnographic ways of intruding upon other peoples lives and touristic ways of doing so were so tangled up with one another as to resist any very clear way of sorting them out came when I was asked by an influential American maga zine to write a piece on the extraordinarily various enterprises (two-hundred and fifty events over eighteen months in fifty cities--though I hardly got them all) connected with the so-called "Festival of Indonesia".[3] Held in the United States in 1990-91, the festival was both an enormous, and enormously expensive, effort to stimulate tourism to Indonesia and to present to the outside world an authentic, official even, made-in-Indonesia conception of Indonesian cultural -- at once an effort in "cultural diplomacy" as its general director, ex-foreign minister Mochtar Kusumaatmadja called it, and, as he also called it, "Indonesia's coming-out party". Financed, in good part, by American corporation, conceived and managed by the Indonesian goverment, and mounted in some of leading cultural institutions in the U.S., from the Kennedy Center to the Cincinnati Zoo, it disarranged a good many familiar categories. Or at least it disarranged a good many familiar categories.

To me, the most novel thing about it was the objects of tourist's interest were being brougt to them, rather than the other way around. During the colonial period, the colonial regimes sometimes brought representative, in shudder quotes, "natives" and live performances to Western "World Fair" -- the *gamelan* Debussy heard, the *rangda* Artaud saw. But in the festival (and others like it, from India, Mexico, etc) the objects and the performances--and, again in quotes, the "natives" as well--were not being brought they were being sent. The situation was no longer one of active tourist searching out the passive "other" to look at; the "other" was the active party, deciding what the tourist was to witness.

This immediately raised two issues. First, were the messages being sent those being received? What would American make of a four-armed Bhairava astride a jackal above a pedestal of skulls or an Alorese dragon effigy designed to rid the world of mice? Second, and even more important, what was the message that should be sent? How should the culture of a nation as diverse as this one is be summed up for a random collection of foreigners? The worry, on the one hand, that the inner significance of Indonesian cultural forms, the depth, as it was put, beneath the surface exoticism, would be lost in translation, that their meaning would be distorted, their force diluted, and, on the other, the worry that a clear, unified, balanced and occurate image of the extraordinary complexity and variety of those forms--ethnic, religious, and geographical, elite and popular, contemporary and traditional--could not be constructed ran through every aspect of the festival. The problems involved in staging performances or displaying artifact for audiences ill-prepared to understand them are indeed great. Even greater are those involved in creating a national persona aut of clashing attitudes, cultural summary out of cultural swirl.

What have, then, these so glancing and breathlessly described encounters with tourists and tourism left me with? What can one say as an anthropologist, jolted out of his academic aloofness and self-satisfaction but still more than a little wary of the whole enterprise, say to other anthropologists and to the various sorts of professionals engaged in the planning and management of tourism? If one of the leading methodological principles of ethnographic research is to attempt to understand matter from the point of view of those whose world you are inquiring into, it would seem that there is more than an advice-giving, policy-forming, project-planning task facing us in a conference such as this. There is, in addition, a research task--one that, despite the fine pioneering studies of Michel Picard, Edward Bruner, Phillip McKean, and Toby Volkman, to cite only those I know of who have worked on the subject here, to cite only those I know of who have worked on the subject here, is only just beginning.

***

The first, and perhaps in the end most importand, conclusion that can be drawn from the little stories I have been relating is that the cultural "heritage", of a people, of a place, of a nation, is not some solid, unmoving block of objects, practices, beliefs, and understandings, a settled, crystalline structure of traditions and customs that time and tourism, development and modernity, can only erode, disrupt, pollute, or destroy. It is something that is constantly changing, constantly being reconstructed and recreated, in response to new circumstances and emerging needs. The so-called "museum" or "cultural park" view of heritage as something that has only to be preserved and tended, only to be kept pristine, isolated from the alterations going on all around it, is not only utopian, it is mischievous. In trying to freeze a living tradition in teh name of authenticity you preduce the worst sort of inauthenticity--decadence, not purity. The *pelan-pelan* Jogja is not coming back, however keenly its disappearance may be felt by those of us who knew it. The answer to that famous of tourist quention, "Is Bali still Bali?" is: "Of course it is! What else could it be?" Trying to keep the Minangkebau shut up in their cleans and longhouses is like trying to keep a river backed up to ist source.

This, as it has come to be called, "anti-essentialist" view of "heritage", "cultural" or "*kebudayaan*," the realization that such heritage does not stand still, that it is always a complex integration of the old and the new, the domestic and the foreign, has a number of implications for the study tourism. One is that tourism is not merely an instrusion into a settled society which is either more or less

resistant or more or less accomodating to it. Both sides, the touristing and the touristed, are active forces. The understanding and evaluation of their engagement, its outcomes and its prospects, must be cast in terms of mutual influence and resiprocal impact. But, aside from a few isolated insights, such as Michel Picard's intriguing account of the construction by Balinese of a European accented "sacred" vs. "profane," "religious" vs. "secular," "rite' vs. "entertainment" distinction that they did not have until they found themselves obliged to decide which parts of their life they were willing to expose to the tourist gaze and pocketbook and which parts they were not, very little is known about these matters.[4] Nor, despite the appearance of such promising notion as contact zones," "borderlives," "hibridity," "bricolage," and "travelling cultural" in anthropology and cultural studies, do we have as yet the conceptual resources with which to attack them.[5]

Aside from an abandonment of the "unchanging tradition," "eternal Java," or "Irian of a thousand years" image, the reciprocal impact view necessitates a whole range of new conceptions of what tourism is--new conceptions of where is takes place, of what the interest of the parties, far more various than just the visiting and the visited , involved in it are, and of what the exchange process consists in (beyond, that is, the received, "commodification" view, not so much wrong as superficial, that it involves an exchange of money for packaged "otherness"). The study of tourism, and the management of it, demand that it be seen as an extended field of relationship not readily disentangled from one another, not easily sorted, as I did just a moment ago, into clear-cut and exclusive, opposing categories: host and visitor, inside and outside, local and global, we and they, here and there.

DOK. HUMAS UGM

Another lesson I draw from my glancing experiencies with this whole nest of ambiguities and complexities, ironies piled upon ironies, is that tourism and the organization of tourism is an effort, to create an image of the mind of one people in the mind of another. It is a means, hardly the only one but hardly, also, the least important, by which the public identity of a country, the face it presents to the world, is constructed. Tourism is not innocent, a mere flourishing and marvelling, displaying and photographing. Out of its workings emerges what, in the case at hand, Indonesians- -or various sorts of Indonesians- -desire others to thing animates and defines them, how they want themselves to be seen and imagined. and for that to happen, some deep going, troublesome, divisive, on occasion even can induce others to view you as you wish to be viewed, you have to decide how, in fact, you wish to be viewed; indeed, how you view yourself. And that may not even usually be, a simple and uncontested matter.

Again the festival was a particularly clear example of this, though the Indonesian-organized guided trips that swept up the museum ship passengers at each stop, in what EdwardBruner has aptly called "touristic surrender," to march them off to see whatever it was they were scheduled to see(and I had preinstructured them about how to see it) demonstrates it as well.[6] In such productions, stagings, organizings, whether the stupa or the minaret, the kris or the prau, the staircase topography of upcountry rice terraces or the high rise architecture of downtown Jakarta is to be taken, in this instance or that, as the percetible token of "Indonesia" is a consequential business. There are real investements, personal, moral, political, and material, on both sides of transaction, in (with the quotes their eluseveness demands) "Indic Indonesia" or "Islamic Indonesia," "civilized Indonesia" or "folk Indonesia," "modern Indonesia," "traditional Indonesia." These categories are both porous and ill-defined, as well as more than a little arbitrary. But, for all that, they clash, diverge, interact, align, or even fuse, in complicated and fateful ways, in the inner life of the nation, in its outward expressions, and in how others come to conceive and understand it.

So far as the Festival was concerned, this problem was reasonably well dealt with by staging parallel events in different venues--on Hindu-Buddhist sculpture, on court heirlooms, on crafts and artifact "from beyond the Java sea" and on contemporary Indonesian painting, with a number of more specialized performances and exhibitions--Dyak

dancers, Achenese Quran chanters-- sandwiched in between. Rather like the country whose story it was seeking to tell, it was archipelagic. Even my boat trip was cerefully diversified in this way, sailing merrily from *mesdjid* to *tautaus*, *pasars* to *puras*, in the space of few hours. But the issues raised--how do we want ourselves to be seen? How do we see ourselves?-- Are of the sort that cannot, in the nature of the case, be completely and finally resolved. Lika any diplomacy, "cultural diplomacy" wherever it takes place, in Egypt or Malaysia, in Indonesia or The United States (or, in the other case I know directly, Morocco, where the competing tokens are Berber horsemen and Fezrug merchants, veiled women and sidewalk cafes), has, inevitably, its designs and its dilemmas.

And, of course, it diplomats. In a confrence such as this, focused on ways and means to make of tourism not just an economically productive force (which, of course, it is, and a powerful one), but a culturally productive one as well, a view of "heritage" as active and ever-changing, as emerging from the efforts of peoples to define themselves in relation to other peoples, gives a particular twist to the question of the role of the expert in the matter. Anthropologists, archaeologists, site managers, tour planners, and the like need to see their role as more than one of providing specialized information to be integrated into some sort of overall policy, as technicians assisting decision makers in allocating resources and effecting aims. They need to see themselves as engaged in a project of rethinking the whole idea of what tourism is what it consists in, how it works, what its effects are, what its goals should be.

To do this, the practitioners of these various professions -- and others, such as economics and ecology, psycology, an history -- will have to put deeply ingrained notions of disciplinary self-sufficiency aside and form themselves into a new research community. In one sense, it is fortunate that there is no well-defined, autonomous subject, called perhaps (perish the thought!) "touristology," for that means that the study of tourism can hardly be other than multisciplinary -- the bringing together of different perspectives, skills, and intellectual traditions to bear on a common subject. As I have noted, and as this conference in itself demonstrates, the formation of such a community and the construction of such a subject has already begun. But very much more will have to be done before we will able adequately to understand just what this phenomenon, at once very old (Ibn Batutta was, I suppose, a tourist, and so was Columbus) and very new (since its explosion in the 1960's international tourism alone -- never mind domestic tourism, which is, of course, much larger -- has increased six or seven percent a year worldwide) amounts to as a transformative force in the life of societies, cultures, nations, and peoples at the close of the twentieth century.

Whatever it amounts to, it is clearly massive. It is a central dynamic in change, both for the better and for the worse. It contructs new ways of being in the wolrd, some promising, others dismaying. It undermines established ones, some cruel and obsolete, others splendid and irreplaceable. The last, and the most deeply felt, lesson I have learned from being an anthropologist in this country at a time when tourism went from being a relatively peripheral element in the life of the nation, at most a dream of future hotels and enlarged airports, to a time when it has become a greatly consequential one, marked by tourist ministries, international conferences, and aging keynote speakers sorrowfully reminiscing, is that the Irish poet W.B. Yeats was when he wrote:

Man is in love,
And loves what vanished.
What more is there to say?

***

Nostalgia must be resisted in tourism studies, as in anthropological ones. It forecloses the future and mythologizes the past. It leaves one complaining and forlorn, an enemy of promise. But memory, and regret for what was valuable and ingenious and beautiful and grand but which has been overtaken by event-- "all the golden grasshoppers and bees/That used to keep a drowsy emperor awake," to quote another keening line from Yeats, who knew what a heritage was and what is wasn't--is not nostalgia. It is part of the emotional baggage those who traffic in either of these subjects, much less in both of them at once, carry with them, so long as they are more than mere technicians or removed observers. Navigating between a lifting sense of hope and a nagging one of loss is the condition of things in the sorts of research the multidisclipinary community of tourism scholars, whose formation this conference so powerfully calls for, will be carrying out in the years ahead. I Can only wish for you the fortune I have had; and the rememberings.❑

The Last Notes

1. M. Picard, Bali. Tourisme et cultural ouristique, Paris, L'Harmattan, 1992, p.54

2. For discussions of the similarity of the tourist and anthropological enterprises on the one band and the differences between them on the other, see M. Crick, The Anthropologist as Tourist: an Identity in Question," in M. Lefant, J. B. Allcock, and E. M. Bruner (eds.),International Tourism. Identity and Change, London, sage, 1995, pp.205-223 and E.M. Bruner, "The Ethnographer/Tourist in Indonesia," ibid. pp. 224-241.

3. C. Geertz, "The Year of Living Culturally," The New Republic, October 21, 1991, pp. 30-36

4. Picard, op.cit., pp. 152-178

5. For "contact zones," see M.L. Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, New York, Routledge, 1992; "bordirlives," O. Lofgren, "Taking the back door, on the historical anthropology of identities,"Focaal, 26/27, 1996, pp. 51-58; "hybridity," H.Bhabha, The Location of Culture, London, Routledge 1994; "bricolage," Cl. Levi-Strauss, The Savage Mind, London, Weidenfeld and Nicholsen, 1996; "travelling cultures," J. Clifford, "Travelling Cultures," in L. Grossberg et. al. (eds.), Cultural Studies, New York, Routledge, 1992; pp. 96-112.

6. Bruner, "The Ethnographer/Tourist," op. cit., pp. 236ff.

7. For the figures, see M.L. Lanfant, "Tourism, internalization and Identity," in Lanmfent et. al., op. cit., p.27

■ Dr. Arief Budiman:

FAUZAN HARYOSOEDIGDO

"Masalahnya Kembali pada Keluarga Nomor Satu Itu"

Tokoh '66, tokoh golput, dan oposan yang tak berhenti bersuara lantang ini lahir dengan nama Soe Hok Djin. Mungkin tak semua orang tahu bahwa ia keturunan Cina. Lahir di Jakarta, 3 Januari 1941, yang kemudian mengubah nama menjadi Arief Budiman ini, adalah kakak kandung tokoh demonstran '66, almarhum Soe Hok Gie. Menamatkan gelar kesarjanaannya di Fakultas Psikologi UI, lalu menyelesaikan doktor sosiologi pembangunan di Universitas Harvard, USA. Dalam panggung politik Orde Baru, dialah salah satu dari sekian tokoh yang masih konsisten berjuang di luar sistem. Dalam konstelasi keilmuan, ia juga banyak dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan pemikiran tentang sosialisme di Indonesia. "Saya masih konsisten sebagai seorang sosialis," tuturnya pada *Balairung*. Di rumahnya yang asri hasil rancangan Romo Mangun di kaki Gunung Merbabu, sore itu di antara lenguh suara angsa-angsa, Arief Budiman menerima Hary Prabowo dan Mashudi. Berikut ini petikan wawancaranya.

Ngomong-omong, sampai saat ini apakah Anda masih konsisten sebagai seorang sosialis?

Ya, saya masih sosialis. Karena buat saya jadi sosialis tidak tergantung suasana politik, tetapi secara teoritis kelihatannya kapitalisme dan demokrasi saja tidak cukup. Kalau kapitalisme jelas sistem ini kan berdasarkan kompetisi di pasar. Memang dia punya keuntungan-keuntungan untuk bikin orang makin kompetitif, makin berusaha, berprestasi. Tapi prestasinya selalu ke arah pasar, jadi artinya produk-produknya selalu untuk melayani

tidak bisa diingkari lagi. Demokrasi tidak menolong karena pada dasarnya kan melakukan kebebasan dari individu, itu penting, tapi tidak cukup itu. Harus ada suatu program apakah dasarnya negara atau masyarakat yang bisa memecahkan masalahnya sendiri dan saya kira jaman sosialisme yang mendasarkan supaya tidak hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi. Apakah melalui campur tangan negara atau apa, itu resepnya yang belum jelas.

Kalau orientasi sosialisme masalah tiadanya kesenjangan sosial, tidak ada yang kuat dan yang lemah sudah tercapai, lantas apakah Anda sepakat untuk menuju kapitalisme?

Kalau masyarakatnya memilih kapitalisme, boleh aja. Tapi harusnya ada juga kesempatan untuk mempropagandakan sosialisme. Sebab, sebenarnya sosialisme akan lebih menarik buat kalangan masyarakat besar seperti Indonesia, karena akan memperhatikan mereka.

Kalau dalam konteks Indonesia yang tengah membangun dan cenderung menuju kapitalisme, nilai-nilai sosialisme apa dan bagaimana yang bersemayam?

Sebenarnya nilai-nilai sosialisme sudah kuat sekali di Indonesia. Sosialisme tidak populer di Indonesia karena dihubungkan dengan komunisme, kemudian dihubungkan dengan represi. Karena yang ngomong sosialisme kan dilarang, gerakan-gerakan politik dilarang semuanya. Jadi paham sosialisme sebenarnya gampang sekali tumbuh kalau dikasih kesempatan. Tapi sayangnya kesempatan itu tidak ada. jadi masalah sosialisme bukan mempermasalahkan nilai, tapi mengangkat represi. Pelarangan terhadap pemberitaan apa itu sosialisme.

Tapi bagaimana Anda memandang rejim-rejim sosialis di Eropa Timur dan Amerika Latin yang sekarang bangkrut?

Itu sebenarnya yang menarik, karena banyak sekali hal-hal apakah itu sebetulnya spesies dari sosialisme. Sosialisme bisa diterapkan dari atas melalui negara. Sosialisme negara, dalam kosa kata Marxist-nya itu Stalinism. Stalinism kan Leninism dalam alternatif lain. Mungkin *state* yang kuat kemudian itu dipaksakan kepada rakyat. Akibatnya terjadi *state* yang kuat dan akibatnya rakyatnya sendiri tertekan. Bahkan *state* yang kuat itu melakukan akumulasi modal sendiri. Sehingga orang mengatakan itu adalah *state sosialism*. Ini satu spesies. Dan satu spesies ini mati, tapi sosialisme itu besar. Bila satu spesies mati bukan berarti yang lainnya gagal. Sosialisme yang diterapkan di Chili yang juga hancur karena dihabiskan Amerika Serikat, itu sebenarnya menarik karena ada kemungkinan-kemungkinan dia akan kuat. Tapi itu dihancurkan. Jadi sosialisme yang demokratis, menurut saya, ya harus dilakukan. Ada demokrasi, kebebasan yang muncul dari bawah; juga harus memperlemah lembaga-lembaga *state*.

Apakah menurut Anda antara sosialisme dan komunisme itu sendiri berbeda, kok kalau kita bicara di Indonesia kedua hal ini sering dikaitkan?

Mungkin yang bisa dikatakan adalah Marxisme. Kalau kita bilang komunisme itu sebagai gerakan, partai-partai. Tapi kalau Marxisme itu sebagai filsafat, sebagai ilmu. Jadi sumber komunisme dan sosialisme itu sendiri Marxisme. Komunisme sendiri mau gaya mana. Macam-macam. Sayangnya di Indonesia tidak diajarkan jadi kita sama sekali buta. Ngomong sosialisme, komunisme, kapitalisme, jadi satu semua. Definisinya pun nggak pernah baku sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang Marxisme adalah semua tulisan-tulisan Marx, filsafat Marxisme. Tapi ada definisi yang lain dari apa yang diberikan Stalin. Jadi dia mengatakan kalau negara komunis itu sebagai negara akhir tujuan di mana semua menjadi komunal. Negara tidak ada. Tapi sementara peralihan dari kapitalisme ke komunisme itu kan banyak musuh-musuh. Nah dalam peralihan ini dibutuhkan satu kekuatan untuk mengalihkan. Jadi negara masih dibutuhkan, yang disebut diktator proletariat untuk menyelamatkan peralihan ke komunisme. Nah, peran itu namanya sosialisme. Tapi ada negara, masyarakat negara dan dalam komunisme itu sendiri tidak ada negara. Pemerintahnya adalah rakyat. Ini menurut konsepnya, ya. Karena misalnya begini, kenapa negara didukung kapitalisme, karena ada perbedaan kelas. Yang minoritas harus mempertahankan kekuasaannya dari yang mayoritas. Karena itu dibutuhkan aparat keamanan, sebab akan banyak pencuri kalau tidak. Pencuri yang kaya. Kalau semua orang sama rata sama rasa, apa yang dicuri? Kan tidak mungkin mencuri barangnya sendiri. Itu teorinya ya. Jadi hal-hal seperti ini masih sangat teoritis sekali, sehingga perdebatan ini di Indonesia hanya sampai konsep-konsep, belum sampai problematik dari sosialisme itu sendiri.

Lantas bagaimana pandangan Anda dengan sosialisme demokratik yang dipakai Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam manifestonya itu?

Kalau yang sempat saya baca dari

Sejak usia muda ia sudah terlibat aktif dalam gerakan antikemapanan. Sewaktu terjadi *ontran-ontran* kebudayaan di tahun 60-an, ia menjadi salah satu penandatangan Manifes Kebudayaan. Ketika melihat ketidakberesan penyelenggaraan Pemilu di awal Orde Baru, ia juga memilih jalur oposan dengan menjadi golput.

Pada tahun 1971 ia sempat masuk tahanan karena protes masalah pembangunan Taman Mini. Tahun 1981, Arief Budiman menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Namun dengan menjadi dosen ternyata tak membuatnya mapan. Ia tetap manusia penuh konflik. Maka tak heran, terhitung mulai 31 Oktober 1994 ia dipecat secara tidak hormat dari semua jabatannya di UKSW sebagai buntut gelombang protes pemilihan rektor yang dinilai tidak demokratis.

manifestonya dan sepanjang saya ngomong-omong dengan temen-temen, seperti Budiman Sujatmiko, misalnya, itu kelihatannya kurang tahu mendalam tentang sosialisme. Yang dituju PRD itu sebenarnya cuma pluralisme dan demokratisasi. Jadi tidak ada misalnya konsep kelas. Artinya konsep kelasnya tidak jelas. Masyarakat sosialisme yang mau dibentuk dia tidak mengatakan dihapusnya milik pribadi. Dari apa yang diinginkan dari manifesto itu hanyalah suatu pluralisme demokrasi. Namun dalam statemen itu yang keras menyerang dwi fungsi ABRI. Itu yang menyebabkan militer marah dan dituduh komunis. Kalau dikaji dari seorang ahli Marxis begitu, melihat stetemen itu, stetemen borjuasi yang memperjuangkan demokrasi. Tapi untuk Indonesia itu relevan sekali. Karena problem negara kita yang mendesak itu demokrasi. Jadi apa yang disasarkan oleh PRD, secara ideologis-teoritis tidak bisa disebut Marxis atau komunis. Sama sekali tidak bisa.

Kalau kita bicara tentang gerakan politik mahasiswa dalam babak tahun 90-an, bagaimana penilaian Anda?

Sampai sekarang saya tidak merasa pesimis dengan gerakan mahasiswa. Dan ada yang menarik dari gerakan mahasiswa yang dipelopori sejak tahun 88 dalam kasus Kedungombo. Kalau kita melihat di gerakan mahasiswa ada perbedaan antara tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Tahun 70-an gerakan mahasiswa eksklusif. Jadi mahasiswa di Universitas Indonesia(UI), Institut Teknologi Bandung(ITB), tuntutannya politik nasional seperti kasus Malari. ITB tahun 78 minta supaya Pak Harto tidak mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Tapi pada akhir 80-an, mahasiswa turun ke bawah, bersatu dengan rakyat. Dan sekarang, untuk era 90-an, ada kecenderungan gerakan mahasiswa beralih dari Jakarta ke daerah. Yogya, Jawa Tengah, Surabaya, mulai muncul. Semarang sifatnya lebih kayak Jakarta isunya, golput, tidak bergerak kecuali komponen Kedungombonya. Jadi rakyat diikutsertakan. Sekarang gerakan mahasiswa itu, dengan PRD, SMID, PPBI, sudah mulai menyatu dengan rakyat. Tapi sekarang, seiring dengan maraknya isu PDI, gerakan rakyat lebih kuat dari gerakan mahasiswanya. Ya, pemerintah sendiri sih yang salah. Dia pukul PDI, akhirnya PDI-nya bergerak dan ini tanpa ada pertolongannya mahasiswa. Mahasiswa sekarang malah hanya pararel saja. Tidak menggerakkan lagi. Dan juga gerakan-gerakan yang terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, itu konfrontasi antara rakyat dengan negara. Sampai polisi pada takut berkeliaran di jalanan. Jadi ini artinya apa yang dilakukan mahasiswa tahun 90-an itu sudah berbuat dan rakyat sudah terpolitisir dan tidak mau menerima kesewenang-wenangan yang dilakukan pada mereka begitu saja. Saya kira gerakan mahasiswa tetap kuat. SMID dipukul memang agak ada *setback* barangkali. Artinya gerakan-gerakan pada ketakutan untuk dituduh sosialisme. Jadi banyak para aktivis yang bermasalah. Tapi saya kira akan kembali lagi. Gerakan mahasiswa akan selalu kritis dalam keadaan kayak gini.

Arief Budiman di depan kampus UKSW
Di sini pula ia 'ditendang'

Anda melihat nggak, kalau fenomena sejak 27 Juli, Situbondo, Tasikmalaya, akan menjadi people power *yang akan menuntut perubahan politik secara mendasar?*

Saya kira itu sudah bangkit. Dan sekarang Sudah dalam proses kebangkitan. Sejak PDI, bagaimana pemerintah tidak menyangka mendapat perlawanan begitu kuat di daerah-daerah, sampai Suryadi masih takut. Ini kan situasi yang tak diperkirakan. Biasanya intervensi sering dipakai, ribut-ribut kemudian selesai dalam tiga atau empat bulan. Tapi sekarang sudah berapa bulan sejak kongres Medan. Sehingga pemerintah membatalkan rencana semula terhadap Gus Dur. Tapi bisa dibayangkan kalau Gus Dus dimegawatikan. Pasti lebih gila lagi. Ya, reaksi PDI ini saya kira membuat pemerintah berpikir ulang, bahwa kalau Gus Dur ini disamakan lagi dengan Megawati maka akan terjadi aliansi antara Islam dan nasionalis. Itu bisa membikin parah pemerintah. Maka *boro-boro* pak Harto menyalami Gus Dur, karena dia tahu ada *people power* yang sangat kuat yang suatu saat bisa muncul.

Tapi Bagaimana Anda menganalisa fenomena kerusuhan rakyat seperti 27 Juli, Situbondo, Tasikmalaya. Apakah semua ini dipicu dari politik?

Nggak, ini adalah suatu keberanian baru dari rakyat untuk mengatakan "tidak!" kepada pemerintah. Bahwa alatnya adalah agama, itu logis. Kenapa, karena sekarang, taruhlah rakyat kecil, kalau punya masalah kemudian dibawa ke pengadilan, rasanya sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Yang paling gampang ya bayar tukang pukul, gitu saja. Jadi pakai kekerasan. Nah kalau saya sebagai kelas menengah yang punya uang bisa bayar. Tapi kalau rakyat kecil, mau bayar pakai apa? Kekuatan satu-satunya adalah mengorganisir diri dalam kelompok. Protes secara kelompok. Tidak memprotes secara individu, karena jelas kalah. Meskipun benar tapi kalau individu akan tetap kalah. Karena di

pengadilan itu siapa yang kuat yang akan menang.

Berkaitan dengan kasus Tasikmalaya, tidak ada hubungannya dengan Kristen, tidak ada hubungannya dengan Cina. Kalau toko-toko Cina dibakar itu karena mereka itu mewakili orang-orang kaya. Jadi ada semacam frustasi ekonomi sebenarnya. Jadi saya dengar ada pasar tradisional yang dibongkar dua tahun lalu, dibakar itu sama Pemda. Habis, kemudian mereka dipindah ke pinggir. Sedangkan pasar yang baru dibangun, nggak dapat mereka tempati karena tidak bisa bayar, kemudian diberikan kepada orang-orang Pemda.

Jadi dalam analisa saya, kasus seperti Situbondo dan Tasikmalaya ini, adanya frustasi di kalangan masyarakat, yang menurut saya itu konfliknya konflik kelas. Orang miskin yang dihancurkan begitu saja oleh kekuatan modal, masuknya modal besar ke Tasikmalaya. Laporan *Kompas* bagus juga yang menyoal masalah hancurnya peternakan ayam rakyat karena masuknya modal besar. Hancurnya anyaman-anyaman, tragis sekali. Cuma mereka tidak bisa mengartikulasikan kalau itu konflik kelas. Kemudian diartikulasikan menjadi konflik agama atau konflik rasial. Selain itu memang tidak ada organisator yang berani mengorganisir atas dasar itu. Karena yang berani cuma PRD kan.

Lebih jelasnya lagi bagaimana sih, kalau tadi Anda mengatakan sebagai kekerasan budaya politik, tapi di lain sisi juga konflik kelas?

Kekerasan itu terjadi kalau cara damai tidak bisa dijalankan. Masalah kultur kekerasan itu karena lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan secara damai tidak berfungsi.

Ngomongin tentang Indonesia sepertinya ada lingkaran setan yang tak terurai ya, yang menjangkit di semua lini kehidupan, ya hukum, ekonomi, sosial, apalagi politik. Sebenarnya apa sih kunci permasalahannya?

Kunci pertama adalah demokratisasi. Pemerintah kita itu terlalu kuat dan menyepelekan orang-orang. Kan, di Indonesia segala macam persoalan, ekonomi, kebudayaan, hukum, itu muaranya selalu politik. Jadi ada satu kekuasaan yang dipegang satu orang. Keputusannya tak bisa ditentang. Tapi kalau ada demokrasi, meskipun masalah belum selesai, tapi menjadi mungkin selesai. Karena ada lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Indonesia itu negara paling buruk di Asia Tenggara dalam tingkat perkembangan ekonominya, juga lembaganya.

REPRO TIARA

Bersama keluarganya
Andrian, Leila dan Santi

Kemarin saya baru omong-omong dengan orang-orang ahli pertanian, untuk mengembangkan buah saja susah, karena bibit saja rakyat harus beli pada lembaga tertentu yang itu juga impor. Jadi artinya, dia tidak berdaya menyetop impor yang bibitnya bagus-bagus. Apa masalahnya? Masalahnya kembali pada keluarga nomor satu itu! Selalu ke sana. Nah, kalau itu belum bisa didemokratisasi, artinya keputusan-keputusan harus dibuat bersama secara rasional, kita punya banyak ahli yang bagus. Cuma semuanya mandek di politik. Semua pembicaraan *mandek* di politik, yaitu adanya *one man* itu. Kayak Mobil Nasional itu, berapa banyak ongkos yang harus kita bayar, di WTO, di mana-mana dimusuhi banyak negara. Jadi saya pikir, lingkaran setan ini bisa dipecahkan dulu melalui, ada satu negara yang mendengarkan pendapat orang lain dan rakyat bisa ngomong.

Kembali ke persoalan gerakan mahasiswa, apakah Anda melihat sesuatu yang harus diperbaharui dalam gerakan mahasiswa pasca 27 Juli?

Saya kira tak ada yang perlu diperbaharui. Lakukan saja yang lama-lama. Itu bagus. Melihat kecurangan-kecurangan, menjadi nurani, dan aliansi kepada masyarakat. Mahasiswa harus menjadi ujung tombak untuk melakukan pembelaan rakyat kecil, memperkuat lembaga demokrasi, mengontrol aparat-aparat keamanan. Itu penting untuk keluarnya sebagai gerakan sosial. Untuk ke dalamnya saya kira perlu seperti tradisi kelompok diskusi untuk memperdalam ilmu supaya kita tidak kehilangan kecirikhasan sebagai mahasiswa, bahwa mahasiswa tidak hanya bisa demonstrasi tapi juga mempunyai sikap-sikap yang lebih canggih daripada kelompok lain.

Tapi mahasiswa tetap menarik buat saya. Kalau saya lihat dari fenomena ide-ide mahasiswa kelihatan tidak *melempem*, itu pada pers mahasiswa, seperti *Balairung* sendiri dan semuanya. Semuanya pada kritis sekali. Jarang ada pers mahasiswa yang tidak kritis. Itu menunjukkan selalu ada api dalam kehidupan mahasiswa.

Tentang modus gerakan mahasiswa, baiknya sebagai kekuatan cair dan spontan atau terorganisasi?

Keduanya bagi saya tidak ada masalah. Gerakan mahasiswa bisa spontan. Kekuatan dalam spontan adalah dia tidak punya struktur sehingga akibatnya oleh aparat keamanan tidak bisa dilarang begitu saja karena memang kekuatan informal. Tapi kelemahannya ya memang hubungannya sangat luwes. Wadahnya saya kira tidak penting, tapi gerakannya yang terpenting. Seperti PRD juga bagus. Hebatnya dia lebih rasional karena sifatnya ada koordinasi. Tapi itu memang mudah dihantam. Bila yang dihantam Jakarta

bisa merembet ke mana-mana. Kalau sifatnya informal kan hubungan bisa dilakukan secara informal, jadi kalau dipukul di Jakarta, di Semarang belum tentu teman-temannya yang di Malang kena. Tapi sebagai gerakan saya kira semua cara bisa dilakukan sambil melihat situasinya.

Kalau coba kita komparasikan dengan gerakan mahasiswa di luar negeri, seperti Korea Selatan, Cina, Filipina, apa yang perlu kita ambil pelajaran dari mereka?

Di Korea karena ada partai yang terorganisir yang juga sangat menolong gerakan mahasiswa, seperti partai oposisi. Di Indonesia yang sulit adalah mahasiswanya sangat terisolir. Di Cina juga lain tapi saya tidak tahu. Di Indonesia agak terisolir, karena kelompok massanya sendiri organisasi mahasiswa sementara partai sendiri lumpuh. Partai sekarang kan sangat birokratis sekali. Jadi mahasiswa harus melakukan semuanya sendirian, tidak ada pendamping. Kalau ada pendamping paling cuma LSM atau kelompok intelektual lepas saja. Tapi tidak ada organisasi yang mendukung gerakan mahasiswa. Sehingga gerakan mahasiswa di Indonesia memang sporadis dan kecil-kecil.

Agak berbeda pengalamannya dengan Korea. Kalau di Korea gerakannya cepat sekali. PRD barangkali salah satu usaha untuk melakukan itu. Tapi PRD juga tidak didukung sama organisasi lain. Jadi gerakan yang muncul dari bawah. Sampai di situ saja. Ke atas sana tidak dapat dukungan finansial atau apa. Sendirian betul. Jadi ibarat pertandingan bola ini kan permainannya dilakukan oleh sebelas orang. Kalau di luar negeri atau Korea sana, sebelas orang ini relatif lengkap. Kalau di kita semuanya hanya mahasiswa saja. Tidak punya temen. Tidak punya siapa-siapa. Bagaimana bisa mengegolkan bolanya?

Juga demokrasi politik di sini. Kaum intelektual dianggap tidak efektif, ya memang intelektual paling bisa merumuskan masalah dan mengartikulasikan masalah untuk menunjukkan menurut dia mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah ditunjukkan itu mestinya bola itu digelindingkan kepada partai-kah, DPR-kah. Lalu bola itu dimainkan, DPR mulai menggaung dong. Intelektual tidak bisa membawa gol. Mestinya ya DPR atau partai. Tapi bila DPR lumpuh dan partainya juga lumpuh, ya bola itu tidak ada yang memainkan.

Jadi kalau mahasiswa di Indonesia itu tidak berdaya, itu bukan berarti kualitas mahasiswanya lebih rendah dari Korea, tapi aktor-aktor lain tidak diperbolehkan bermain. Kayak kemarin tentang isu korupsi menteri pertambangan, kalau dulu menteri perhubungan, itu kan pers sudah memberikan begitu banyak data, banyak fakta. Tapi oleh Presiden, Presiden bilang itu dikembalikan saja, selesai. Selesai. Wah itu gila. Mana lembaga-lembaga lain. Mahkamah Agung tidak bisa main, Kejaksanaan Agung tidak bisa main. Jadi kelemahan lembaga negara kita lumpuh. Aktor akhirnya tidak bisa main terlalu jauh.

Lantas mahasiswa harus berfungsi sebagai parlemen jalanan, beraliansi dengan rakyat?

Ya, cukup. Tapi artinya mahasiswa sekarang berperan sebagai partai politik. Bagus itu. Ya karena kita butuh partai politik. Ya, karena itu PRD menjadi partai. Jadi itu memang tindakan yang benar. Tapi dia tidak didukung oleh dana, oleh macam-macam sehingga cuma jadi partai embrional saja. Mustinya memang harus beraliansi dengan rakyat. Karena itu politik dimainkan oleh partai. Partai yang terorganisir dengan baik. Jadi kalau gerakan mahasiswa cuma gerakan *pure* saja, itu jadi bagian dari gerakan intelektual. Kalau gerakan mahasiswa itu menyatukan dengan massa, itu menjadi gerakan kepartaian.

Sebenarnya kalau partai itu hidup, mahasiswa sebenarnya nggak usah menggabung pada kekuatan, cuma sebagai ujung tombak saja terus dilemparkan bolanya ke gerakan massa. Nah ini mahasiswa menjadi ketiban beban seperti LSM. Mahasiswa ya harus menjadi intelektual juga harus menjadi partai. Semuanya dikerjain, didanai dengan kantong sendiri.

Tapi bisa nggak dalam kondisi Indonesia itu bermain secara individu?

Kalau individu perannya selalu hanya *public opinion. Opinion maker. Opinion* itu harus disertai dengan kekuatan. Kekuatan politik ini, seperti tadi saya katakan, ya rakyat, partai, atau militer. Kalau individu itu dalam fungsinya sebagai pimpinan militer, barangkali jadi penting. Tapi kalau cuma individunya, tidak banyak berperan. Jadi perubahan politik itu hanya dilakukan oleh aktor politik yang harusnya menjadi satu kekuatan masyarakat.

Kalau feedback ke era 66-an, apa benar mahasiswa waktu itu juga cuma menjadi alat saja dari kekuatan besar yang memang menginginkan perubahan?

Memang peran mahasiswa sangat sedikit pada waktu itu.Yang berperan ABRI. Mahasiswa hanya artikulasi dan ujung tombak. Jadi

❖

Ketika masih kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ia terpikat dengan seorang gadis, teman kuliahnya. Seorang perawan sederhana, Siti Leila Chairani atau lebih dikenal Leila Ch. Budiman. Gadis Padang dan pemeluk agama Islam inilah yang kemudian dinikahinya tahun 1976. Tak ada halangan bagi cintanya meskipun Arief Budiman seorang Cina. Mereka dititipi Tuhan, dua anak. Andrian Mitra Budiman (28) dan Susanti Kusumasari (26). Keduanya sudah menuntaskan kuliahnya di UGM. Andrian, lulusan Fakultas Ekonomi, sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sedangkan Susanti, lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol.

❖

ABRI, Pak Harto tidak berani menghantam langsung istana. Maka mahasiswa yang disuruh meledek-ledek, memprovokasi Cakrabirawa. Ditembak mati, dilaporkan ke pak Harto, kemudian Pak Harto datang untuk menjaga keamanan Pangkopkamtib.

Kalau mahasiswa saja tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jadi peran mahasiswa tidak terlalu besar. Lalu yang berperan besar adalah ABRI.

Tapi untuk saat ini kayaknya mungkin nggak gerakan mahasiswa juga beraliansi dengan kelompok atas, jadi tidak melulu bermain di bawah?

Itu saya kira memang harus dimainkan. Ini terjadi dalam kasus PDI. Jadi, mahasiswa, ormas-ormas, LBH, kaum intelektual, bergabung dengan PDI. Cuma tampaknya Megawati yang kurang begitu terampil sebagai pimpinan. Ya, mungkin pengalamannya, jam terbangnya masih singkat. Menghadapi massa begitu ia tidak bisa mengambil alih. Kita kan minta Megawati jangan hanya menjadi ketua PDI saja. Tapi juga kekuatan pro-demokrasi. Tapi dia masih malu-malu, meskipun sekarang lebih berani. Tapi kemarin itu dia masih sangat malu-malu. Sehingga kita ngomong sama mereka, Megawati selalu mengatakan ya saya cuma ketua PDI, tidak mau main yurisdiksi di luar itu. Tapi nggak bisa dong, mbak Mega ini sudah *defacto* ketua dari gerakan demokrasi Indonesia. PUDI saja menyatu, PRD, LBH, MARI, tapi Megawati nggak berani ngomong. Wah ya susah. Jadi saya kira sebenarnya harus ada pimpinan yang pinter merumuskan masalah, yang bisa memimpin aliansi itu.

Ngomon-omong dalam Pemilu mendatang Anda tetap golput?

Nggak ada pilihan lain dong. Mau milih apa?...He..he...he....

Tapi bicara tentang golput, apakah isu ini nggak kontra-produktif dalam membangun politik, atau memang mau membusukkan keadaan yang sudah akut ini?

Sangat produktif, karena begitu kita memilih itu berarti kita memperkuat legitimasi pemilihan umum itu sendiri. Kalau golput kan mengatakan pemilu tidak sah. Jadi itu saya artikan sebagai pemberontakan orang yang lemah. Kita tidak punya kekuatan yang bisa membatalkan pemilu. Maka satu-satunya jalan adalah untuk tidak mengabsahkan pemilu itu dengan cara tidak memilih.

REPRO FORUM

Arief bersama Gus Dur di suatu forum
Tetap berdiri di luar sistem

Sebab bila Anda ikut pemilu, siapa pun yang Anda pilih, boleh pilih PPP, Golkar, PDI, itu sama saja. Orang-orang itu tidak ada gunanya. Jadi orang kan bilang, kalau tidak ikut pemilu kan artinya yang menang kan Golkar. Ya tak apa-apa kok. Seratus persen pun diambil ya sama saja. Jadi justru kalau kita ikut pemilu, pemerintah bisa bilang wah, rakyat masih antusias. Jadi menurut saya, paling produktif, paling tepat dan melakukan pendidikan politik pada rakyat adalah golput, pada saat sekarang.

Untuk mensosialisasikan Golput menjelang Pemilu ini, apa yang Anda lakukan?

Setiap ceramah saya ngomong golput. Setiap kali ada kesempatan saya ngomong. Ya ini yang maksimum saya lakukan karena saya bukan organisasi atau apa. Tapi sekarang saya lihat temen-temen lebih banyak daripada dulu yang jadi golput. Megawati, Kwik Kian Gie sendiri juga sudah golput, kan. Dulu saya pernah diminta masuk PDI waktu itu. Saya masih nggak mau karena 5 paket undang-undangnya masih kayak begini. Sama saja masuk PDI, meskipun Megawati oposisi pun tak berpengaruh. Saya belum mau berhenti jadi golput sebelum undang-undang (5 paket UU politik - Red) itu belum dirubah. Nggak ada litsus, nggak ada calon penunjukkan, kalau nggak, ya nggak ada gunanya. Karena ini permainan dan kita dikalahkan terus.

Ya saya bilang, daripada saya masuk PDI, bagaimana kalau PPP, PDI itu semuanya jadi golput. Kalau mereka tidak punya interes pribadi, bisa saja. Kan mereka kalau main jelas kalah. PPP dan PDI mana bisa menang. Tapi dengan jadi golput, lalu mengatakan kepada Golkar, sudah silakan ambil semuanyalah. Silakan ambil. Kita nggak mau peduli lagi. Kan kewalahan Golkar. Habis kalau main begini, ngapain main. Tapi ini kan orang-orang pemerintah yang didudukkan di PPP, PDI, kayak Soerjadi. Supaya seolah-olah ada pesta demokrasi. Pestanya ada demokrasinya tidak ada. Jadi susah kalau begitu.

Artinya kelembagaan PPP dan PDI merupakan sesuatu yang sangat essensial bagi pemerintah untuk melegitimasi pemilu. Orang-orangnya ya yang bisa dikendalikan. Sebenarnya kalau Megawati pun jadi di PDI, akan lebih bagus kan. Nggak perlu disingkirkan. Karena sistem pemilu itu sudah tidak memungkinkan PDI menang. Dan kalau pun menang PDI tidak akan mampu merubah MPR dan lain sebagainya. Kan yang membuat Megawati didongkel ya karena Megawati berani mencalonkan diri sebagai presiden. Presiden selama ini tidak ada calon lawan, masak yang terakhir *record*-nya menjadi jelek. Itu saja. Masalah perasaan seorang sultan saja. Ya harus disingkirkan.❑

Prabowo

Renungan di Kafe Mc.Donald

Saya saksikan kerusuhan itu dari satu kursi kafe Mc.Donald, pada sebuah Mall. Satu mangkuk es krim Capucino, koran nasional berbahasa asing, *hamburger* tinggal separo. Dari toko kaset sebelah kunikmati teriakan parau Mick Jagger dalam *Paint It, Black*. Kemarahan, rasa takut, pertanyaan yang tak segera terjawab, para turis bule yang bengong, berpusar di pusat kesadaranku. Di tengah amuk aku coba untuk merenung; ...es krim yang mencair. Aha! Pinocchio...! Kawan-kawan yang didakwa subversif. Kekayaan negeri yang dirampok. Simpang siur. Harus saya mulai dari mana? Kehidupan yang tidak adil? Konflik SARA? Sistem yang represif?

Muhammad Alfaris

Mahasiswa Teknik Sipil UGM

Bukan tanpa maksud Tuhan membuat golongan-golongan pada makhluk ciptaanNya. Ulama biologi membeberkan rahasia, bahwa manusia adalah satu spesies yang hidup di antara ribuan spesies lainnya. Manusia, sebagai hewan menyusui, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama *Blacky Dog, Pussy Cat*, dan *Mickey Mouse*. Dan tiap-tiap spesies punya hubungan kekerabatan, secara vertikal maupun horizontal.

Namun, sejarah semesta adalah sejarah kekerasan. Kekerasan antar individu anggota satu spesies, kekerasan antar spesies, maupun kekerasan antara spesies dengan lingkungan hidupnya. Memang kekerasan, adalah elemen dasar pembentuk semesta. Menurut teori evolusi yang dramatis itu, kekerasan adalah cara alam untuk melahirkan generasi unggul.

Suatu ketika, lewat revolusi antropologik, manusia memproklamirkan diri sebagai makhluk termulia di kolong jagat ini, lantas membangun sebuah instrumen antropologis yang tendensius dan kejam. Kemuliaan suatu bangsa akan diukur dengan alat tersebut. Hasilnya, bangsa kulit merah Amerika (bagaimanapun) tak pernah cukup nilai bagi sebutan beradab, maka membunuhnya sama asyiknya dengan membunuh seekor Bison. Di Asia, memburu *inlander* sama ringannya dengan memburu kerbau liar. Di Afrika, baru kemarin sore anak bangsa kulit hitam Afrika Selatan terbebas dari nasib nistanya.

Kini idiologi telah memilah-milah manusia pada golongan-golongan yang saling berhadapan, kemudian juga perbedaan nasib akibat struktur yang tidak adil (atau sebut saja nasib-struktural), kemudian juga simbol-simbol yang sepele; media massa di negeri ini pernah sibuk dengan berita amuk *torsedor* PERSEBAYA. Ada darah muncrat dari kepala membasahi muka. Begitu mudahnya darah mengalir di republik ini. Darah yang terbentuk dari sesuap nasi, itu pun diperoleh dengan susah payah, pada sistem ekonomi yang payah ini.

Ketika sistem mulai diragukan, karena landasan rasional bagi tegaknya sistem tersebut sudah tak dapat lagi menjawab perkembangan-perkembangan mutakhir, maka paradigma sistem mengalami krisis. Pada masyarakat dinamis, krisis sistem adalah keniscayaan. Krisis menjadi krusial, sebab pada wilayah struktural ada hegemoni tafsir atas realitas. Tafsir tunggal Orde Baru atas pembangunan telah menghalalkan kekerasan politik. Tafsir tunggal kapitalisme akan pasar telah melahirkan kekerasan iklan dalam bentuk manipulasi kebutuhan. Tafsir tunggal sosialisme atas keadilan telah membunuh hak dasar individual. Tafsir tunggal rakyat atas kesumpekan hidup akan melahirkan revolusi. Bagi Quentin Tarantino kekerasan adalah sumber inspirasi film-filmnya. Tanpa kekerasan masyarakat menjadi *absurd*, atau sebab *absurditas* masyarakat itulah kekerasan menjadi relevan?

Di negeri ini kekerasan tidak selamanya tampil telanjang, malah lebih sering tampil dalam nuansa kehalusan sebuah metode. Orang pun lebih sering tertindas, tanpa disadari dirinya tertindas.

Es krim telah lama mencair jadi semangkuk kuah santan, Mick Jagger telah lama dibungkam, sepotong *hamburger* tak tersentuh lagi, koran berbahasa asing telah masuk tong sampah. Amuk massa mulai mendekat ke kafe ini. Dengan kepala pening, akibat renungan yang terputus mendadak, tergesa-gesa saya tinggalkan kafe Mc.Donald. Samar-samar terngiang suara bening kanak-kanak: "*Aku bangga jadi anak Indonesia.*" ❑
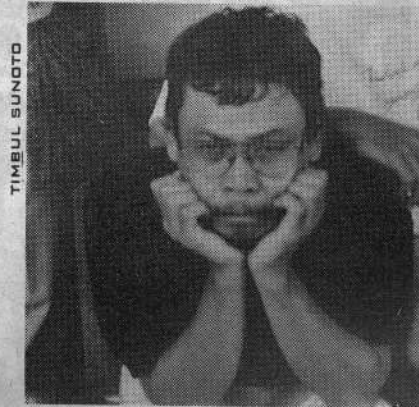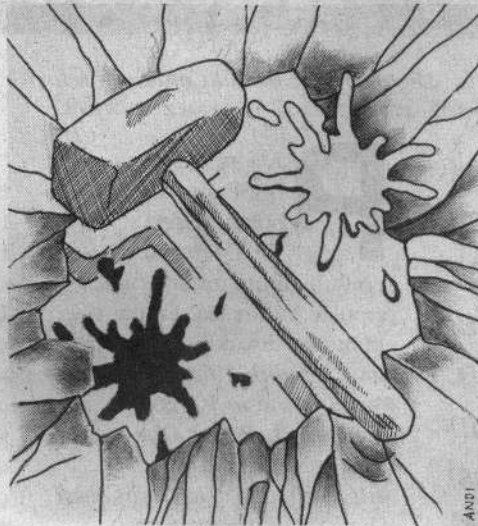
■ Musik Rock Indonesia:

Transformasi Yang Salah Cangkok?

REPRO. DRAKKAR NOIR

Musik rock. *Digandrungi kawula muda di seluruh dunia*

Tidak dipungkiri, musik rock sebagai produk Barat telah menjadi budaya massa. Hampir di seluruh dunia, musik ini digandrungi oleh kawula muda. Termasuk di Indonesia. Namun sayangnya, proses transformasi ini hanya sebatas materi (fisik) saja. Tidak ditelusuri sampai akar permasalahan, dan visi yang ingin disampaikan. Yang justru itu lebih dahsyat dari sekedar hingar-bingar musik cadas ini.

Pada pemilihan BASF Award bulan Maret 1991, tercatat sepuluh album terlaris musik populer Indonesia. Empat di antaranya diwakili musik rock, yaitu *Sepuluh Finalis Festival Rock Indonesia V* (Log Zhelebour), *Power One* (Power Metal), *Suit...Suit...He...He/Gadis Seksi* (Slank) dan *Semut Hitam* (God Bless).

Ini membuktikan bahwa musik rock telah menancapkan dirinya dalam belantara kebudayaan negeri ini. Panggung-panggung hiburan pun marak dengan musik rock. Dari Sekolah Menengah Atas sampai kampus-kampus saat menggelar hiburan, musik rock selalu tercatat rapi di mata acara.

Tidak dipungkiri bahwa rock yang lahir di Amerika itu telah menjadi budaya massa. Hampir di seluruh belahan dunia, musik ini selalu digandrungi oleh anak muda. Di Indonesia, rock yang diterima bukan sekedar musik rock itu sendiri, tetapi juga imbasnya musik ini rock pada gaya hidup anak muda. Ada sederetan polah tingkah anak muda yang lekat dengan musik cadas ini. Gaya-gaya profan seperti *hippies*, rambut gondrong, tato, pasang anting, model pakaian serabutan, sok *cuek* dan antikemapanan seolah menjadi nafas baru di sebagian anak muda. "Ini kami, barisan anak muda!" teriak mereka sambil membusungkan dada.

Rock Sebagai Pemberontakan

Menurut Joko S Gombloh (1995), bahwa musik rock dilihat dari kacamata sosial bukan hanya dipandang sebagai kelahiran genre musik baru, akan tetapi ekslusivitasnya di

bidang lirik, tema, musikalitas, serta penampilan para musisinya juga ditengarai sebagai titik awal terjadinya pemberontakan terhadap nilai-nilai sosial yang sudah mapan, di samping pemberontakan dalam bermusik.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tema lirik yang sangat agresif dan provokatif. Malahan dalam beberapa lirik lagu-lagu *The Doors* mengajak para pendengarnya supaya tidak menerima nilai-nilai kemapanan seperti institusi keluarga dan bahkan masyarakat.

Dulu ketika awal-awalnya musik rock berkembang sekitar tahun 50-an kegilaan anak muda Inggris pada gaya rambut Elvis Presley sempat menjadi mode. Padahal di Inggris saat itu, tengah gencar-gencarnya diberlakukan sistem wajib militer bagi kaum pria.

Di Amerika sendiri, kehidupan musik rock pernah diangkat dalam layar lebar, di antaranya dalam film *The Wild One*, yang dibintangi Marlon Brando dan *Rebel With out Cause* yang dibintangi oleh James Dean. Saat itu pula munculllah gaya hidup baru, yang disebut "*Teddy Bears*", dengan ciri-cirinya berpakaian sangat mencolok, jaket tergantung di bahu, celana ketat, dan sepatu runcing bertali.

Dan sejak saat itu, sejalan dengan perkembangan musik rock yang semakin keras dan progresif (untuk perkembangan musik rock: baca box) telah berpengaruh pada gaya hidup para penggemarnya di masanya. Misalnya di tahun 70-an ada gerakan *hippie* yang berpola hidup bebas ala *gypsi*, di mana dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu menghisap ganja, meninggalkan aturan-aturan sosial dan mengumandangkan hidup bebas, termasuk seks bebas.

Tak lama kemudian muncul pula kehidupan *Flower Generation*, dengan cirinya rambut yang panjang tak terurus, sepeda-sepeda motor yang kemudinya bertangkai panjang dan menyukai motif-motif bunga. Selanjutnya lagi ada gerakan *kaftan, crossboy, glamrock* dan juga *The X Generation*, yang saat ini lagi musim di Amerika.

Walaupun tak separah di Barat, para generasi muda Indonesia pun sempat ketularan. Di mana seperti Guruh Soekarno Putra yang di tahun 70-an sempat ikut-ikutan bergaya *hippies*. Juga model-model rambut gondrong, celana *jeans* ketat dan sebagainya pernah menjadi mode para pemuda di sini. Namun yang patut disyukuri, saat itu yang ditiru hanyalah sebatas model pakaian dan penampilan fisik saja, dan tidak sampai model-model gaya hidup bebas seperti di Barat. Walaupun tentu saja ada pengikutnya tetapi nggak banyak.

REPRO. FORUM

Franky Raden: *"Yang diambil masih pada taraf fisik"*

Perkembangan Rock Indonesia

Musik rock masuk ke Indonesia pertama kali melalui piringan hitam dan media film di akhir tahun 50-an. Dan berbarengan masuknya alat band di tahun 60-an para musisi muda tak ketingglan ikut memainkan lagu-lagu rock yang sedang berkembang di Barat.

Rasanya tak sahih jika tak menyebut Koes Plus sebagai pengusung awal gerakan rock 'n roll Indonesia. Di samping itu juga ada *The Rollies* (1965), *Giant Steep, God Bless, Terncem*, AKA (70-an) yang dapat dikatakan pelopor istilah rock dalam kaitannya sebagai musik cadas (keras).

Walaupun di era 70-an, aktivitas musik rock yang berkembang hanyalah gema apa yang terjadi di Barat, namun perkembangan rock Indonesia sangat menggairahkan. "Yang dimainkan sih seratus persen jiplakan atau merepro yang ada di Barat, namun anak-anak rock sangat bergairah untuk tampil menguasai panggung," komentar Franky Raden mengenang.

Kehebatan musisi kita saat itu telah membuat kagum sejumlah musisi negara tetangga. Dan diam-diam mereka menjadikan musik rock Indonesia sebagai barometer. Boleh jadi musisi kita cukup punya kualitas untuk diekor selain didukung oleh geograsfis. Kondisi ini cukup lama bertahan dan menyurut, lalu hilang sama sekali saat *booming* industri kaset meruyak begitu derasnya.

"Sejak saat (budaya kaset) itu saya melihat perkembangan rock tidak sehat. Kehidupan rock berpindah dari *live*, di mana ada komunikasi sosial dan spontanitas, menjadi *alienated* (terasing). Hanya di dalam studio, tak perlu menguasai teknik yang baik dan kenal siapa audiensnya, karena sudah dalam bentuk kaset," papar Franky.

Musik rock memang paling pas kalau dimainkan di panggung terbuka. Memungkinkan si vokalis leluasa jingkrak-jingkrak, berlompatan ataupun berjumpalitan dengan leluasa. Di sinilah musisi dan musik rock menemukan kandang-kandang bermain yang sesungguhnya. Bandingkan bila hanya di kaset. Jelas tidak akan ditemukan kepuasan seperti itu. Dalam satu kaset para musisi dipatok waktu berekspresi cuma 4-7 menit. Sehingga tak salah kalau Franky menyebutnya sebagai "masa gelap" perkembangan musik rock Indonesia.

Keadaan tersebut telah membuat *mandeg-nya* kreativitas musisi rock Indonesia di awal tahun 80-an. Di samping memang lagi sepinya perkembangan musik rock Barat. Dan seperti di Barat, perkembangan musik rock Indonesia bangkit di pertengahan-akhir tahun 80-an.

Pada era kebangkitan ke-2 ini, rock Indonesia makin berkibar dengan musik yang lebih variatif ketimbang era 70-an. Rock yang berkembang tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung, tetapi telah menjangkiti di hampir seluruh kota-kota macam Malang, Jember, Palembang, Yogayakarta dan kota-kota kecil lainnya. Muncul pula sederet bintang muda seperti *Slank, Roxx, Wizz Kid, Dewa 19, Power Metal, Gigi, Power Slave*, dan juga penganut musik-musik *Seattle* seperti PAS band, *Netral* atau *Pure Saturday* dan *Puppen*

penganut *British Sound*.

"Nah sekarang (tahun 90-an) muncul lagi impuls-impuls musik rock, walaupun tak semeriah dulu. Yang menggembirkan sekarang adalah adanya proses transformasi (dari akarnya: Barat) menjadi musik rock kita. Karya-karya yang dimainkan milik sendiri dan tema-tema yang diangkat juga permasalahan di sekitar kita. Dan itu sebagai satu gejala yang baik dan positif," kata Franky menilai.

Faktor Pendukung Bangkitnya Rock tahun 90-an

Terlepas dari tren musik rock Barat yang sedang berkibar, kebangkitan musik rock tahun 90-an ini juga di dukung oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang berhasil dipantau *Balairung* antara lain disebabkan, *pertama*, kejenuhan terhadap musik cengeng yang berjaya pada dasawarsa 80-an, telah menyebabkan konsumen untuk mencari jenis-jenis musik yang lain.

Kedua, meningkatnya kemampuan teknis para musisi. Dari generasi ke generasi ada peningkatan kemampuan teknis dalam bermusik. Terutama dalam hal penguasaan teknis alat elektronik dan teknik mengaransemen lagu.

Ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana musik, seperti semakin canggihnya peralatan elektrik dan dibangunnya gedung-gedung pertunjukkan yang representatif. Walaupun sampai saat ini Indonesia belum mempunyai gedung yang betul-betul memadai.

Dan *keempat*, bantuan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Seperti majalah HAI dan majalah-majalah asing lainnya untuk media cetak dan televisi-televisi swasta dan parabola, untuk media elektronik, yang cukup berperan dalam mengembangkan musik rock di tanah air.

Lain di Barat, Lain di Timur

Yapi Tambayong (Remy Silado) pernah menulis sebuah keprihatinan di satu jurnal kebudayaan yang isinya menyatakan bahwa banyak hal di Indonesia yang bukan milik Indonesia, terutama pikiran-pikiran yang dihafal para pandai. Pernyataan tersebut sungguh bukan sesuatu yang mengada-ada. Mengingat banyak pikiran-pikiran Barat (ilmu pengetahuan, kesenian, sampai gaya hidup) yang diterima sebagai barang jadi. Artinya tanpa diketahui bagaimana proses terjadinya.

Begitu juga dengan musik rock Indonesia. Kebanyakan para musisi rock di sini selalu mencangkok persis seperti rock yang ada di Barat, baik musikalitas ataupun tema-tema yang diangkat. Tanpa dilihat konteks sejarah yang melatarbelakanginya.

Ini bisa dilihat dari bagaimana rock Barat lahir. Ditilik dari konsep musikalisasinya, kelahiran rock Barat merupakan kombinasi antara *rhythm and blues* (R&B) dan *country and western* (C&W). Juga dilihat kondisi sosial yang melatarbelakanginya, rock Barat dapat dikatakan sebagai pemberontakan terhadap modernitas yang menjadi gaya hidup Barat saat itu. Sehingga tak heran kalau rock dimainkan oleh para pemuda

Sejarah Musik Rock

Menurut sebuah literatur, disebutkan bahwa musik rock merupakan kombinasi antara *rhythm and blues* (R&B) dan *country and western* (C&W) yang sedang berkembang di Amerika. Awal mula sebutan *rock 'n roll* sendiri berasal dari seorang DJ yang bernama Allan '*moodog*' Freed, yang terinspirasi ketika memutar lagu-lagu "musik hitam" pada tahun 1952, dalam sebuah acara siaran radionya. Saking populernya istilah tersebut hingga mampu melelehkan dinding-dinding rasial dalam bermain musik. Karena pada saat itu R&B identik dengan musik orang kulit hitam, sedangkan C&W identik dengan musik orang kulit putih.

Pada tahun 1954, sebagai cikal bakal, keluarlah sebuah album *rock 'n roll*, yang dinyanyikan oleh Elvis Presley dengan titel *That's All Right*. Sejak itulah debut musik *rock'n roll* makin populer dan memikat banyak orang. Munculah bintang-bintang baru, seperti Budy Holly, Ray Charles, Little Richard dan lain-lain yang mengusung musik ini.

Pengaruh *rock'n roll* ini mulai ramai di Inggris sekitar tahun 1957, dengan bintangnya, Cliff Richard, Tommy Steele dan lain-lainnya. Yang paling meroket adalah The Beatles dengan *Love Me Do*-nya, album ini meledak hampir di seluruh dunia dengan total penjualan 16 juta keping.

Sementara itu, Rolling Stones merupakan grup Inggris pertama yang meraih sukses di Amerika. Saat itu, ditahun 1960-an, perkembangan musik rock, hampir dikuasai oleh dua raksasa rock yaitu Beatles dan Rolling Stones.

Memasuki tahun 70-an, perkembangan rock lebih marak dengan hadirnya rock progresif. Di mana Jimmy Hendrix *Experience* (JHE), *Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Emerson Lake & Palmer* (ELP), menjadi pionernya. Musiknya juga lebih keras dan lebih progresif dibanding dengan *Beatles* atau *Rolling Stones*. Dari sini pula, musik rock mulai bercabang-cabang alirannya. Seperti, *Heavymetal, Street Metal, Thrash Metal, Grindcore, Pop Metal, Punk Rock, Speedmetal, Glamrock* dan lain-lainnya.

Memasuki awal tahun 1980-an, perkembangan musik rock agak *mandeg* karena mengalami kejenuhan. Salah satu penyebabnya adalah gempuran musik pop yang lumayan kencang. Untuk menggairahkan kembali musik rock, banyak band-band rock membalut musik rock mereka dengan sentuhan pop. Sebut saja macam Bon Jovi, *Poison, Motley Crue* dan yang paling monumental adalah *Guns N' Roses*.

Mendekati tahun 1990-an, gairah rock muncul dengan nuansa yang lebih baru lagi, tapi tetap dengan terbalut jiwa rock yang sesungguhnya: ekspresi bebas dan

golongan menengah ke bawah yang miskin konsep-konsep bermusik. Yang ingin bicara apa saja tanpa dipersulit oleh konsep-konsep musik yang rumit.

Berbeda dengan rock Indonesia yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh tren rock Barat. Juga kelahirannya yang dipelopori justru oleh golongan menengah keatas yang bisa main musik karena sekolah atau kursus. Rock Indonesia tumbuh subur di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, bukan di klab-klab seperti di Barat. Suara-suara pemberontakan yang dilontarkan pun bukan merupakan suatu perlawanan, tetapi menurut Franky, "Itu hanya alternatif lain selain membicarakan cinta."

Rock Sebagai Musik Baru Indonesia

Diakui oleh beberapa musisi Indonesia, musik rock kental dengan asumsi Barat. "Tapi biar begitu, tentu ada upaya menciptakan dengan warna khas Indonesia sendiri," kata Kaka vokalis kelompok Slank. Senada dengan itu Richard drumer kelompok PAS Band mengatakan: "Kita musti membuat musik yang baru untuk musik Indonesia."

Namun untuk membuat musik rock agar lebih membumi bukanlah sesuatu yang mudah. "Untuk memasukkan unsur etnis itu nggak gampang, sebab kalau nggak tepat bisa terjebak kepada sesuatu yang kuno." Kata Denny MR, pengamat musik dari majalah HAI mengingatkan. Untuk itu Denny mengungkapkan bahwa semua itu tergantung kepada kreativitas dan kepedulian musisinya.

Sampai saat ini baru tercatat beberapa kelompok musik rock Indonesia yang berani tampil lebih membumi. Antara lain Slank dan Gong 2000 yang mencoba memasukkan unsur-unsur etnis daerah seperti bunyi gamelan Bali atau unsur-unsur gamelan Minang, dalam musiknya.

Menyoal rock sebagai musik baru Indonesia Franky Raden dalam tulisannya di Kompas, (10 Desember 1996) mengatakan, "Kematangan pribadi para pemusiknya akan dapat membuat *genre* musik ini bisa menjadi bahasa yang efektif untuk berbicara kepada massa tentang tema-tema berbobot yang perlu untuk mendorong terjadinya formasi sosial, apalagi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia."

Untuk membuat musik rock Indonesia lebih berbobot Franky mengatakan, "Bobot itu tak bisa diukur dengan penguasaan teknik saja, tapi harus ditunjang juga dengan wawasan, kemampuan untuk memiliki visi budaya."

Dan untuk itu, Franky memberi solusi; bahwa yang bisa menjadi basis semua musik populer termasuk rock adalah musik kontemporer. "Saya berpikir dari musik kontemporerlah yang menjadi basis dari perkembangan kreativitas musik kita, setelah itu mau ke jazz, ke rock terserah." Ibarat lukisan, seorang pelukis mesti menguasai aliran realis. Setelah itu ia baru bisa meloncat ke aliran lain, seperti kubisme, naturalis ataupun ekspresionis. Tinggal pilih. ❑

Mashudi
Bowo, Eka dan Kusbi

REPRO HAI

Musik rock Indonesia. *Pernah membuat kagum musisi tetangga*

liar. Trend itu bernama *grunge*, alternatif atau yang disebut dengan *Seattle Sound*, dengan pelopornya antara lain *Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Monkeywrench, TAD, Trully* dan lain-lain. Selain itu, hadir pula *Sonic Youth* (New York) dan *Red Hot Chili Pepper* (Los Angeles) dengan warna yang hampir sama. Grup-grup tersebut menyuarakan lagunya dengan lirik lain, *nyleneh* dan sedikit vulgar. Sebagian pengamat menganggap jenis musik mereka merupakan cabang dari musik *Punk Rock* yang pernah dikibarkan oleh *Sex Pistols* di pertengahan tahun 70-an.

Belakangan, diawal tahun 1996, dominasi musik Seattle mulai digeser oleh musisi yang berkibar lewat *British Sound* . Grup-grup Inggris macam *Oasis, Blur, Radiohead, Pulp, Supergrass* mencoba menawarkan jenis musik lain, yang musiknya lebih segar, lebih *enjoy* dan melodinya ringan. Mereka enggan mengusung lagu-lagu yang bernada pesimis, absurd atau memberontak seperti lagu-lagu *Seattle*.❑

Mashudi
Bowo, Eka, Kusbiantoro

Beddu Amang dan Cabe Kering

Beddu Amang dan Cabe, memang punya hubungan yang erat. Sebagai Kabulog, Dr. Ir. Beddu Amang, MA adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas harga dan stok bahan pangan. Cabe memang gampang goyah harganya. Maka upaya penstabilan harga harus dilakukan.

Menurut alumni Fakultas Pertanian UGM tahun 1966 ini, untuk menjaga stabilitas harga, Bulog sedang mengembangkan teknologi pengawetan cabe. "Tidak cukup hanya menambah stok pada saat paceklik. Teknologi pengawetan perlu agar saat panen raya harganya tidak jatuh". Teknologi itu, masih menurut Beddu, adalah dengan mengeringkan dan menggiling cabe.

"Masyarakat kita perlu dibiasakan makan cabe kering dan cabe giling. Jangan maunya cabe segar saja. Di luar negeri orang sudah terbiasa mengkonsumsi cabe kering," tambah Beddu seraya meminta kepada para wartawan untuk ikut membantu menyebarkan informasi tersebut.

Kehadiran Dr. Ir. Beddu Amang, MA di UGM medio Desember yang lalu adalah untuk menerima penghargaan Alumni UGM. Ini merupakan penghargaan ke-5 yang diberikan oleh UGM kepada alumni terbaiknya. Penghargaan diberikan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan yang besar baik pikiran maupun materiil kepada bangsa dan almamater.

Beddu sendiri mengaku belum banyak memberi sumbangan pada UGM. "Dulu saya menyelesaikan kuliah selama sepuluh tahun. Sekarang saya sudah beberapa kali diminta untuk bisa mengajar di Fakultas Pertanian, tapi belum bisa," katanya memberi alasan. Beddu mengaku, semasa kuliah memang banyak ativitasnya. "Dulu kan sistemnya bebas, belum ada SKS. Sepuluh tahun wajar lah. Apalagi lulusannya juga tidak biasa-biasa saja," katanya menutup pembicaraan. ❑

dok: humas ugm

T. Sunoto

DAGADU : Sebuah Pesan Sosial Lewat Oblong

Siapa yang tidak kenal DAGADU (Matamu, Daya Gagas Dunia). Kaos oblong gaya Yogyakarta yang sekarang lagi *ngetrend*. Para pekerja kaos ini merupakan kumpulan anak-anak UGM yang suka bermain-main dengan imajinasi dan kreativitas. Apa motivasi pertama sehingga muncul usaha kaos oblong yang sekarang lagi *digandrungi* anak muda?

"Kehadiran kami sebenarnya adalah 'main-main'. Kami ingin menikmati hidup ini dengan santai. Karena dalam santai tersebut seseungguhnya tersimpan daya kreativitas yang dahsyat," ungkap Nowok salah satu pendiri Dagadu.

Namun demikian, lanjut Nowok, meskipun kami hanya 'main-main', bukan berarti kami tidak peduli dengan kondisi di sekitar kita. "Kami hadir selalu dengan pesan-pesan sosial. Maka jangan heran kalau banyak juga pejabat yang 'panas' kupingnya. Kami ingin

Alumni Gadjah Mada Kurang Kritis

Wong Yogya yang sudah lebih dari 20 tahun bekerja di perusahaan asing ini mempunyai kritik positif bagi warga kampus biru Bulaksumur. Sepanjang pengalamannya, ia melihat ada dua hal yang menjadi kelemahan rata-rata alumni UGM.

"Pertama, kebanyakan kemampuan Bahasa Inggrisnya masih kurang. Kedua, mereka kurang berani bicara apa adanya kepada atasan, apalagi melontarkan kritik. Tetapi, kelebihannya, hampir semua kerja ditanggungkan bisa beres di lapangan," ujar D. Priyatmono.

Selama sekitar lima tahun bekerja di Caltex dan lebih dari lima belas tahun bekerja di IBM Computer, dua hal di atas amat tampak di lapangan.

"Padahal di perusahaan asing itu yang diminta justru karyawan yang mau bicara blak-blakan kepada atasan. Apakah itu bentuknya kritik, asalkan untuk kemajuan perusahaan, mestinya disampaikan. Tapi, kebanyakan mereka takut. Apa karena mereka dibesarkan di kultur Yogya yang Jawa, ya," katanya setengah berkelakar.

Menurut Priyatmono, kritiknya ini kalau bisa dijadikan masukan positif bagi mahasiswa UGM yang sekarang. "Sebab, mereka itu SDM yang potensial. Hanya saja, banyak yang belum mengenal peta dunia kerja yang sesungguhnya," ucapnya menutup perbincangan. ❑

Ebo

" Tidak ada yang salah tentang demonstrasi mahasiswa"

Siapa mengira jika **Mayjen TNI Subagyo Hadisiswoyo**, Jenderal berbintang dua ini ramah pada siapa saja. Sosok bertubuh besar dengan kumis tebal melintang. "Saya ini menyeramkan, to?" tanyanya sembari tersenyum. Kepada *Balairung*, saat ditemui di kediamannya Puri Wedari, putra kelahiran Piyungan, Bantul 12 Juni 1946 ini berbicara cukup terbuka. Ia mengaku sejak kecil sudah bercita-cita menjadi tentara.

Jabatan Pangdam IV Diponegoro merupakan posisi yang strategis untuk bisa melesat ke pusat. Ketika diajak berbincang mengenai masalah itu, pak Bagyo hanya berujar singkat. "Yang saya lakukan hanya berusaha sebaik-baiknya, masalah nasib sudah ada yang mengatur", tutur mantan Komandan Kopasus ini.

Ketika ditanya apakah sebagian elit militer menganggap demonstrasi mahasiswa sebagai gejala yang perlu diwaspadai, dengan enteng Pak Bagyo mengatakan, "Tidak ada yang salah tentang demonstrasi mahasiswa. Itulah cerminan demokrasi," lanjutnya. Apalagi yang melakukan anak muda, bisa dipahami mereka (mahasiswa) mengkritisi ketidakberesan. Sejauh demonstrasi itu tidak bersifat anarkis dan barbar, sah-sah saja.

Di tengah kesibukannya sebagai perwira militer nomor satu di Jawa Tengah, ia masih sempat menyelesaikan kuliahnya di Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. ❑

Irfan

dok.dagadu

menyampaikan pesan-pesan moral lewat jalur santai dan alternatif," ungkapnya.

Mungkin inilah yang menjadikan DAGADU sekarang tidak hanya digandrungi anak ABG saja, tapi tak jarang orang yang sudah berumur pun *demen* memakainya. "Coba saja naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, entar Anda jumpai banyak bapak-bapak yang pakai DAGADU," kata Nowok sembari berpromosi. ❑

Katam dan Yayah

Mahasiswa UGM, Kembalilah ke Daerah.

Khrisna

Ini bukan seruan kampanye. Tetapi harapan yang sungguh-sungguh dari seorang alumnus yang telah banyak menelusuri daerah-daerah di seluruh nusantara.

"Kenapa tidak punya pikiran untuk *back to village*, kembali ke daerah? Padahal, masih banyak potensi di sana yang belum dikembangkan dan menuntut kalian yang punya kapasitas lebih ini untuk menggarapnya. Mengapa kalian harus berpikir ke Jakarta?" ujar Gideon Sulistio, alumnus Fakultas Teknik UGM salah satu Direktur PT Aqua Golden Mississipi, kepada *Balairung* beberapa waktu lalu.

Menurut Gideon, sepanjang amatannya, daerah-daerah itu, khususnya di luar Jawa, punya banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan. "Celakanya banyak putera daerah yang tidak menyadarinya. Siapa yang akan membangun daerah itu kalau bukan yang muda-muda. Kalau dulu Pak Koesnadi mencetuskan KKN dengan area di Sumatera dan Kalimantan, kenapa semangat itu tidak kalian teruskan?" tambah pria yang konon mengawali karir dari salesman ini.

Lalu, apa sarannya? "Kembalilah ke daerah. Untuk menjadi besar, tidak harus Jakarta. Kemauan dan kerja keraslah yang justru menjadi kunci utamanya. Cobalah buktikan itu," serunya untuk mahasiswa UGM yang kebanyakan masih *Jakarta oriented* dalam berkarier. ❑

Agus R dan Ebo

Efek Hand phone

Di suatu restoran internasional di Jakarta, seorang pengusaha Jepang dalam suatu jamuan makan siang berujar kepada seorang eksekutif muda Indonesia.

"Penelitian medis terbaru mengatakan bahwa pemakaian hand phone terlalu sering, medan magnet-nya bisa menyebabkan kanker otak. Saya khawatir itu!".

Sang eksekutif muda Indonesia langsung meyambung, " Ya, tapi bagi kebanyakan orang Indonesia itu bukan ancaman serius!"

"Kenapa?"

"Sebab otak orang Indonesia itu bukan di kepala,... tetapi di lutut", lanjut eksekutif muda Indonesia itu mantap.

L.A.** dari **A.K.E.

Minta petunjuk

Pada suatu hari bapak Presiden meminta kepada menteri penerangan untuk mencarikan figur penggantinya.

Pak menteri penerangan pun lantas keliling nusantara untuk mencari figur yang sesuai. Tetapi setelah sekian lama mencari Pak Menpen pun tak mendapatkan figur yang diharapkan.

Karena saking pusingnya, ia pun menyombongkan diri kepada Pak Presiden bahwa ia merupakan figur yang tepat untuk menggantikannya. Tapi presiden cepat-cepat menyegah, "Lho kalau kamu ingin jadi presiden, nanti dalam menjalankan aktivitas kamu mau minta petunjuk dari siapa?".

Risdianto

Dasar Pelit

Walter, seorang konglomerat yang terkenal sangat pelit. Ketika hendak memasuki stasiun Gambir, dalam perjalanan ke Surabaya, dia dihadang oleh seorang pengemis buta.

"Tuan, kasihanilah saya tuan, sudah dua hari saya tak makan," pinta pengemis.

"Jika tuan sudi bersedekah lima ribu rupiah saja tuan, saya akan mendoakan supaya tuan bahagia di surga selamalamanya," rayu pengemis.

Tapi apa jawab Walter, "Sayang sekali pak, aku tak begitu yakin tentang surga!"

Diran** diilhami **Kroto

Sapu

Seorang pengrajin sapu termenung-menung berpikir bagaimana supaya sapu buatannya bisa terkenal dan laku. Ia lalu mendatangi tukang sablon memesan spanduk dengan slogan yang sudah dirancangnya. Beberapa minggu kemudian saya dengar ia ditangkap dan dipenjara. Ternyata spanduk yang ia pasang dirumahnya bertuliskan : *Memasyarakatkan Sapu dan Menyapu Masyarakat.*

Kelik Supriyanto

Celana

"Aku merasa bangga sekali, ternyata semua rakyatku tidak ada yang berani sama aku, semua menghormatiku dan tidak ada yang berani menegurku, "guman seorang raja yang sudah mulai pikun sehabis jalan-jalan keliling negeri sambil tersenyum-senyum.

"Kenapa Baginda selalu tersenyum-senyum sendirian,"tanya salah seorang penasehat kerajaan ingin tahu.

Dengan agak marah campur bangga ia membentak, "Bukankah matamu sendiri melihat ketika jalan-jalan tadi aku lupa pakai celana."

Kelik Supriyanto

Perbincangan Napi

Di sebuah bui tiga orang pesakitan tanpa diklasifikasikan kesalahannya dijadikan satu sel karena kekurangan kamar tahanan.

Ketiganya terlibat dalam perbincangan seru mengapa mereka bisa ditahan.

Si Otong, berseru bangga dengan apa yang telah dilakukannya: "Saya masuk penjara karena kehebatanku, membunuh lima orang sekaligus!"

Si Iting tak mau ketinggalan, "Saya terakhir menodong di bank terbesar negeri ini, 13 trilyun langsung masuk kantung semua!", sambil menepuk dadanya.

"Lalu kehebatanmu apa Ridwan, kok sejak tadi diam saja?" tanya Otong dan Iting kepada napi temannya dengan tidak sabar.

"Aah,...aku sih cuma menghina," jawab Ridwan tenang.

"Lho, ngapain kamu ikut-ikutan merasakan nikmatnya penjara kalau cuma menghina saja?"

"Kamu tahu nggak, yang aku hina itu,...presiden!"

L.A. dari Diran

Menyesal

Seorang mahasiswa menangis tersedu-sedu ketika diberitahu bahwa sebuah kepanitiaan telah menilep dana koperasi sebesar tigapuluh empat juta.

"Kenapa kamu menangis?", temannya ingin tahu, "bukankah masalah ini sudah dibawa ke pengadilan?"

Sambil mengusap air mata iapun buka suara, "Saya menyesal kenapa dulu saya menolak untuk dipilih menjadi ketua panitianya," jawabnya sambil mengusap air matanya.

Kelik Supriyanto